

1. JUDUL  
2. INISIAL

## DISERTASI

# PEMAKNAAN PROGRAM PEMBANGUNAN OLEH WARGA DESA DALAM PROSES TRANSFORMASI SOSIAL

( Studi Tentang Pelaksanaan Bantuan  
Peningkatan Pendapatan Bagi Masyarakat Desa  
Di Kecamatan Bluluk Lamongan )



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

KK

AS 5 16/02

Roe

p.

**M.V. ROESMININGSIH**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

# **PEMAKNAAN PROGRAM PEMBANGUNAN OLEH WARGA DESA DALAM PROSES TRANSFORMASI SOSIAL**

**( Studi Tentang Pelaksanaan Bantuan  
Peningkatan Pendapatan Bagi Masyarakat Desa  
Di Kecamatan Bluluk Lamongan )**

## **DISERTASI**

**Untuk memperoleh Gelar Doktor  
dalam Ilmu - Ilmu Sosial  
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga  
di bawah pimpinan Rektor Universitas Airlangga**

**Prof. H. Soedarto, DTM & H.,dr.,Ph.D**

**telah dipertahankan di hadapan  
Rapat Terbuka Senat Universitas Airlangga  
pada hari Selasa  
tanggal 6 Juli 1999  
pukul 10.00 WIB**



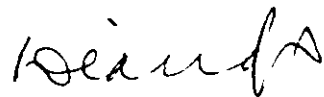
**Oleh :**

**M.V. ROESMININGSIH  
NIM. 099411668 D**

# Lembar Pengesahan

Disertasi ini telah disetujui  
Tanggal 21 Juli 1999

Oleh  
Promotor



---

Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Telah diuji pada ujian tertutup  
Tanggal 21 April 1999

---

#### PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Loekman Soetrisno  
Anggota : 1. Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA  
2. Prof. Ramlan Surbakti, Drs., MA., PhD  
3. Prof. Dr. H. Sunarto, M.Sc  
4. Dr. Dede Oetomo  
5. Widodo J.P.,dr.,MS.,MPH.,Dr.PH  
6. Dr. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc.  
7. Dr. Manfred Poppe

Ditetapkan dengan Surat Keputusan  
Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 3293/J03PP/1999  
Tanggal : 30 April 1999



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih karuniaNya telah memberikan kesehatan kepada saya, sehingga dalam keadaan yang serba terbatas ini saya masih diberi kemampuan untuk menyelesaikan disertasi ini.

Saya sadar bahwa untuk menyelesaikan disertasi ini banyak bantuan moril maupun materiil yang telah saya peroleh dari berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Oleh karenanya perkenankan saya pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada:

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Tim Manajemen Program Doktor yang telah memberikan bantuan finansial, sehingga meringankan beban penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Rektor Universitas Airlangga Prof. H. Soedarto, dr., DTM & H., Ph.D. dan mantan Rektor Universitas Airlangga Prof. Bambang Rahino Setokoesoemo, dr., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan program doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Dr. Soedijono, dr. beserta staff dan mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. Soetarjadi, Apt., yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada saya untuk mengikuti pendidikan program doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof.H. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, yang telah bertindak sebagai pendidik, pengajar dan sekaligus promotor utama, yang dengan profesionalisme yang tinggi, penuh kesabaran, ketekunan, serta secara bijak telah membimbing saya dalam proses penyelesaian disertasi dan studi di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Ramlan Surbakti. Drs. MA. Ph.D., Widodo, J.P., dr., MPH., MS.,Dr.PH., Dr. Dede Oetomo, Dr. L.Dyson, Dr. Makmur Keliat, Prof. Abdul Gani, S.H., Prof. Dr. H.J. Glinka, Dr.M. Zainuddin, Apt., dan Dr. Sarmanu, drh.,MS., sebagai staf pengajar pada program doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga khususnya pada Bidang Ilmu-ilmu Sosial.

Prof. Dr. Loekman Soetrisno MA., Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. Ramlan Surbakti, Drs., MA. Ph.D., Prof. Dr. Sunarto, M.Sc., Widodo, J.Pudjirahardjo, dr. MPH., MS., Dr.PH., Dr. Dede Oetomo, Dr. Hotman Siahaan, Dr. Saleh Soegiyanto, M.Sc., dan Dr. Manfred Poppe, sebagai penilai kualifikasi, proposal, kelayakan disertasi, serta ujian tahap I, yang telah banyak memberikan kritik dan masukan guna penyempurnaan disertasi ini.

Prof.H.Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. Hermien Hadiati Koeswadji,S.H., Prof.Dr. Loekman Soetrisno, Prof.Dr. H. Sunarto, M.Sc., Prof.Dr. Koesriningrum Rochiman,Ir.,M.S., Prof.Dr.H. Redjani, Prof.Dr. Hanafi Moeljohardjono,dr., Prof.Dr.H.R. Soedibjo H.P.,dr., Prof.Dr.Hj. Moetmainah Prajitno,drg., Prof.H.R. Prajitno,drg. sebagai penyanggah pada ujian Disertasi tahap II.

Rektor IKIP Negeri Surabaya, Prof. Toho Cholikh Muthohir, Drs., MA., Ph.D. dan mantan Rektor IKIP Negeri Surabaya Soerono Martorahardjo, Drs., yang telah memberikan kesempatan, ijin dan berbagai fasilitas bagi kelancaran pendidikan program doktor saya.

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Surabaya, Dr. Muhari, dan mantan Dekan FIP- IKIP Surabaya Sugiono, Drs., Ketua Lembaga Penelitian IKIP Surabaya Prof. Dr. H. Sunarto, M.Sc. serta Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Lilik Sri Ismilah, Dra., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan pendidikan program doktor ini.

Semua kawan sesama mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Airlangga Bidang Ilmu-ilmu Sosial, maupun kawan se kolega di IKIP Negeri Surabaya khususnya di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dorongan dalam penyelesaian disertasi ini.

Ibunda Ny. Suhartinah yang rajin menabur doa untuk keberhasilan putra-putrinya, dan tak lupa kepada suami tercinta IGL. Ngurah, serta anak-anak tersayang Putra Eka Prisma dan Ayu Dwi Astiningsih yang telah banyak memberikan semangat, dukungan serta pengertian kepada saya dalam menyelesaikan studi ini.

Atas semua bantuan tersebut, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan pahala yang berlipat ganda. Amien.

## RINGKASAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan temuan para peneliti terdahulu dapat ditengarai bahwa bantuan (khususnya untuk peningkatan pendapatan) kepada penduduk desa (miskin) belum seluruhnya mendatangkan manfaat bagi kelompok sasaran.

Beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana khalayak sasaran (anggota kelompok masyarakat desa memberikan makna terhadap bantuan yang diterima baik dari pemerintah maupun instansi lain (lembaga sosial)? (2) Faktor apa saja yang ikut membentuk makna terhadap bantuan peningkatan pendapatan yang diterima? (3) Bagaimana proses hubungan sosial di dalam sistem kelembagaan desa (organisasi pelaksana) yang berhubungan erat dengan pemberian bantuan bagi anggota kelompok masyarakat desa? (4) Bagaimana anggota kelompok penerima bantuan menggambarkan identitas dirinya sebagai penerima bantuan?.

Penelitian ini berusaha menemukan makna tindakan (menerima atau menolak) dari anggota masyarakat desa terhadap bantuan yang diberikan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial, dengan alasan bahwa studi ini berusaha memahami makna subyektif yang diberikan individu sebagai anggota suatu komunitas terhadap tindakannya dalam memperlakukan bantuan yang diterima.

Dalam menerapkan paradigma definisi sosial digunakan teori "Interaksi Simbolik" dan "Etnometodologi", serta teori pembangunan berdimensi kerakyatan (David Korten) untuk memandang pelaksanaan pembangunan umumnya dan bantuan peningkatan pendapatan khususnya.

Bantuan peningkatan pendapatan khususnya dan program pembangunan umumnya, untuk warga desa, tidak semuanya disikapi secara positif oleh si penerima. Beragamnya tindakan warga desa dalam memperlakukan bantuan peningkatan pendapatan (pembangunan) ditentukan oleh makna program bantuan tersebut. Ada dua faktor yang melatarbelakangi pemberian makna yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan karakteristik si penerima bantuan, sedangkan faktor eksternal terkait dengan strategi program dan organisasi pelaksana.

Bantuan yang diterima warga masyarakat di desa penelitian berasal dari pemerintah, tidak ada bantuan yang berasal dari swasta. Bantuan dari pemerintah ini cenderung berdampak pada proses perencanaan program lebih banyak bersifat *top down*, meskipun dalam ketentuannya diharapkan keterlibatan warga desa sebagai penerima bantuan sangat besar atau mendasarkan pada perencanaan *bottom up*.

Mencermati proses perencanaan program bantuan dapat dirumuskan proposisi sebagai berikut: Makin kuat dominasi elit penguasa menyebabkan makin banyak program yang ditentukan dari atas, dampaknya pembangunan dimaknakan negatif oleh penerima bantuan.

Tindakan dalam memperlakukan bantuan terkait erat dengan karakteristik penerima bantuan. Ada empat macam

karakteristik perilaku penerima bantuan yaitu: (1) *tiyang manutan*, (2) *tiyang ulet*, (3) *tiyang kesed (nglokro)*, dan (4) *tiyang sae*.

Perbedaan karakteristik berdampak pada perbedaan pemaknaan bantuan peningkatan pendapatan yang diterimanya atau program pembangunan yang diluncurkan ke desa. Dilihat dari karakteristik penerima bantuan ini dapat dirumuskan proposisi: " Makna terhadap bantuan peningkatan pendapatan ditentukan oleh karakteristik si penerima bantuan".

- 1) *Tiyang Manut*, memaknakan bantuan peningkatan pendapatan sebagai sesuatu yang menguntungkan Kepala Desa untuk melaksanakan kewajiban sebagai aparat.
- 2) *Tiyang Ulet*, memaknakan bantuan peningkatan pendapatan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan dan bermanfaat untuk dirinya.
- 3) *Tiyang Kesed, Nglokro*, memaknakan bantuan merupakan beban bagi yang menerima.
- 4) *Tiyang Sae*, memaknakan bantuan peningkatan pendapatan sebagai sesuatu yang hanya untuk dinikmati kerabat pamong desa. Selain itu bantuan peningkatan pendapatan dari pemerintah dimaknakan sebagai sarana untuk mengambil hati masyarakat agar masyarakat mendukung setiap kebijakan pemerintah.

#### **Implikasi Teoretik**

Secara akademik temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan analitik-informatik bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya teori sosiologi pembangunan dan lebih

khusus lagi sosiologi pedesaan. Mengingat selama ini penelitian yang dilakukan pada umumnya lebih terfokus pada perilaku yang tampak, serta keterkaitan di antara berbagai komponen dari pembangunan.

David Korten dan Syahrir (1984), dalam bukunya yang berjudul *People Centered Development: Contribution Toward Theory And Planning Framework*, menyatakan bahwa ada tiga faktor yang menentukan kelayakan program yaitu: program, penerima bantuan, dan organisasi.

Dari temuan peneliti di desa Bronjong, diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi atau menentukan keberhasilan program bantuan peningkatan pendapatan tidak hanya tiga faktor tersebut, melainkan ada faktor tambahan yang masuk dalam komponen program. Sehingga ada tiga faktor plus yang meliputi program bantuan termasuk pasar, penerima bantuan, dan organisasi pengelola.

Kesimpulan ini didasarkan bahwa program peningkatan bantuan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, ini terkait erat dengan masalah uang atau ekonomi. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mendapatkan uang adalah dengan memasarkan produksi warga desa adalah pasar. Penerima bantuan meskipun berhasil meningkatkan produktivitas kerja, namun bila barang yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan, karena tidak ada pasar yang dapat menjadi wadah pemasaran, menyebabkan bantuan tersebut kurang memberikan manfaat bagi penerimanya. Di sinilah pentingnya pasar dalam menunjang keberhasilan program bantuan peningkatan pendapatan.

Teori Korten tentang kelayakan program akan sesuai bila diterapkan pada pembangunan fisik, namun dalam

kaitannya dengan pembangunan ekonomi (peningkatan pendapatan), keberadaan pasar (baik dalam arti fisik maupun informasi) sebagai salah satu komponen kelayakan program sangat diperlukan.

Temuan lain adalah karakteristik perilaku warga masyarakat desa, ditemukan beberapa sebutan adalah kelompok *tiyang manut, tiyang ulet, tiyang nglokro, dan tiyang sae*, temuan ini ada kemiripan konsep budaya dari Thompson (1990), yang menyatakan bahwa ada lima budaya sebagai cara hidup yaitu budaya *hirarki, individualistik, egalitarian, fatalistik, dan hermit*.

Budaya sebagai cara hidup (Thompsosn) tidak begitu saja dapat digunakan untuk melihat karakteristik penerima bantuan di desa penelitian, karena ada perbedaan struktural, natural, dan kultural. Namun paling tidak temuan ini dapat digunakan untuk melihat bahwa budaya tidak berlaku secara universal di suatu wilayah (masyarakat), karena budaya sebagai cara hidup dipengaruhi oleh kuat-lemahnya ikatan kelompok, serta kuat lemahnya regulasi yang ada.

Dalam melihat pasar memang lebih ditekankan pada keberadaan pasar, baik secara fisik maupun informatik sebagai wadah menjual hasil pengelolaan bantuan. Oleh karenanya peneliti tidak membandingkannya dengan "pasarisasi" dari Penny, "kebijakan harga " dari Nasikun, atau "ekonomi pasar" menurut Rachbini. Peneliti sependapat bahwa model dari ketiga pakar tersebut dapat terjadi menyamping model tersebut tidak didukung oleh keberadaan infrastruktur baik fisik maupun kelembagaan yang memadai. Namun bila infrastruktur dipersiapkan untuk lebih banyak



memihak kepada golongan miskin, maka pasar akan bermanfaat untuk mengentas mereka dari kemiskinan.

### Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para perencana dan pelaksana pembangunan terutama dalam memilih strategi yang tepat untuk melakukan pembangunan, khususnya bantuan, terutama dengan unit analisis keluarga.

Mengacu pada temuan penelitian, ada tiga faktor plus yang berpengaruh pada kelayakan suatu program, yaitu program yang disertai pasar, penerima bantuan, dan organisasi. Atas dasar ini maka para pengambil kebijakan dalam memilih strategi pembangunan dapat memperhatikan faktor tersebut.

Meskipun secara teori program pemberian bantuan dan pembangunan diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat, namun konsep partisipasi di kalangan aparat diartikan sebagai kemauan untuk mendukung secara mutlak program yang dirancang pemerintah. Di sini ditemukan bias yang mendasar tentang konsep partisipasi itu sendiri, karena di dalamnya terkandung maksud bahwa masyarakat hanya dijadikan objek dalam pelaksanaan program. Perencana program tidak memperhatikan potensi masyarakat, termasuk potensi untuk mengembangkan diri.

Para pengambil kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (desa), hendaknya dapat menerapkan konsep partisipasi secara tepat, melalui pendekatan "Participatory Rural Appraisal" dengan keberpihakan kepada rakyat miskin.

## Abstract

Key words : Meaning  
Development Programme  
Rural Community  
Increase of Income

There have been a lot of thoughts suggested to solve the poverty problem, especially in villages. It is clearly stated that the policy to solve this problem is focused on the importance of "the increase of income " directly or indirectly, by giving an opportunity to the poor to improve themselves.

A set of problems brought up in this research is (1) how do the villagers give consideration to the aid given by the government or other institutions-social organization?, (2) what factors do build consideration to the aid of income raise accepted ?, (3) how is the process of social relationship in the village institutional (the implementer organization) which has a close relationship in the with the aid giver to concerned villagers ?, (4) how do the aid receiver groups describe their identity ?.

This research tries to find the meaning of the society member's action (accepting or declining) to the aid given. Therefore, this research uses social definition paradigm due to the fact that this study tries to comprehend the subjective meaning given by individuals in accepting the aid. The issue is the social definition process and the consequence of an action and social interaction related to the aid of income raise.

There are two approaches used to apply the social definition paradigm that are "Symbolic Interaction" and "Ethnomethodology", used the theory of People centered development by David Korten to see the application of general development and the aid of income increase in particular.

The aid which is given is not all positively accepted by villagers. The villagers' various attitudes towards the aid of income increase are determined by their judgement on the aid programme (the meaning to the programme). The aid given to the villagers of the research village is generally from the government, not from the private organizations. It is shown that the programme planning process is top down; although in the stipulation, it is hoped that involvement of the villagers as the aid receivers is great, or in other words it is based on the bottom up planning.

The meaning given by villagers to the aid of the income raise is as follows: (1) The aid is the government's programme, accepting the aid means supporting the government's programme. (2) Accepting the aid means helping the chief village to make the programme from the top

successful. If the aid or programme is successful, the chief village position will surely last long. (3) Accepting the aid is a sort of a burden for the receivers. (4) The aid gives benefits to people who have a close relationship with the chief village since the aid is not totally given to the needy. (5) The aid is essential to increase of the family's income and welfare.

The characteristics of the aid receivers are closely related to the culture as the way of life. The villagers are classified into (1) obedient people (*tiang manut*), (2) tough people (*tiyang ulet*), (3) ignorant people (*tiang nglokro*), and (4) good people (*tiang sae*). Different characteristics cause different meanings to the aid of the income raise accepted or to the development programme launched into the village.

This dissertation finds propositions as follows : (1) The stronger the dominance by the elite, the more programmes are determined by top, which leads to negative acceptance by the aid receivers towards the development. (2) The behaviours towards the aid are determined by how proper a programme is to be carried out, in the meaning that the aid can be used by the receivers to improve their lives. (3) The meaning of the aid of increasing of income are determined by the receivers' characterize of culture. Tough and obedient people give possitive meaning to the aid of income increase. Where as ignorant and bad people give negative meaning. (4) The existance of markets supported by communication and transportation is closely related to the meaning given of the programme of income increase.

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Penelitian Terdahulu .....	10
1.5.1. Kemiskinan di Pedesaan .....	10
1.5.2. Karakteristik Masyarakat Desa .....	15
1.5.3. Pembangunan Desa .....	24
1.5.4. Kajian Tentang Makna Dalam Kehidupan Manusia.	41
1.6. Paradigma Yang Digunakan .....	50
<b>BAB 2. PROSES PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
2.1. Metoda Penelitian .....	58
2.2. Penetapan Lokasi Penelitian .....	60
2.3. Fokus Penelitian .....	63
2.4. Memasuki Kancah Penelitian .....	65
2.5. Menetapkan dan Menjalin Hubungan Dengan Subjek Penelitian .....	67
2.6. Mengumpulkan Data .....	73
2.7. Menganalisis Data .....	76

BAB 3. MONOGRAFI DESA BRONJONG .....	85
3.1. Keadaan Alam .....	85
3.2. Pemerintahan Desa .....	98
3.3. Keadaan Penduduk .....	103
3.4. Keadaan Pendidikan .....	105
3.5. Keadaan Matapencaharian .....	107
3.6. Agama dan Adat Istiadat .....	110
3.7. Komunikasi dan Transportasi .....	114
3.8. Sistem Kelembagaan Sosial Desa .....	116
3.9. Lembaga Ekonomi di Desa .....	119
BAB 4. KARAKTERISTIK KELUARGA PENERIMA BANTUAN DI DAERAH PENELITIAN .....	124
4.1. Keadaan Ekonomi Keluarga .....	124
4.2. Keadaan Sosial Budaya .....	138
4.3. Aktivitas Berorganisasi .....	149
BAB 5. PELAKSANAAN BANTUAN (PEMBANGUNAN) PADA DESА PENELITIAN .....	153
5.1. Prosedur Pemberian Bantuan .....	153
5.2. Jenis Bantuan dan Asalnya .....	165
5.3. Tujuan Pemberian Bantuan .....	172
5.4. Pemanfaatan Bantuan .....	177
BAB 6. MAKNA BANTUAN PENINGKATAN PENDAPATAN (PEMBANGUNAN) BAGI ANGGOTA MASYARAKAT DESA .....	188
6.1. Temuan .....	189
6.2. Pembahasan .....	194
6.2.1. Pemaknaan Bantuan Dipengaruhi Oleh Karakteristik Program .....	198
6.2.2. Pemaknaan Bantuan Dipengaruhi Oleh Penerima Bantuan .....	222
6.2.3. Pemaknaan Bantuan Dipengaruhi Oleh Keberadaan Pasar .....	238
6.2.4. Pemaknaan Bantuan Dipengaruhi Oleh Kehidupan Organisasi Pengelola .....	246

Bab 7. Kesimpulan dan Implikasi Penelitian .....	256
7.1. Kesimpulan .....	256
7.2. Implikasi Penelitian .....	259
7.2.1. Implikasi Teoretik .....	260
7.2.2. Implikasi Praktis .....	267
Daftar Rujukan .....	269

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kedudukan Makna Bantuan dalam Kerangka Sosiologi Pembangunan Khususnya Pembangunan Desa .....	48
Tabel 1.2.	Kedudukan Peneliti Dilihat dari Teori Pembangunan dan Paradigma Ilmu Sosial .....	49
Tabel 5.1.	Ringkasan Pelaksanaan Program Bantuan Peningkatan Pendapatan Di Desa Penelitian ...	186
Tabel	Matrik Proses Pengkodean Aksial (Lampiran)	287

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Kelayakan Program Pembangunan .....	31
Gambar 2.1. Proses Pengumpulan Data .....	69
Gambar 2.2. Prosedur Penelitian .....	81
Gambar 2.3. Keterkaitan antar Dimensi .....	82
Gambar 6.1. Keterkaitan Makna Bantuan dengan Dominasi Elit Penguasa serta Keberadaan Program Bantuan.....	222
Gambar 6.2. Model Pengembangan Produktivitas Kerja ....	229
Gambar 6.3. Makna Bantuan dilihat dari Karakteristik Budaya Si Penerima Bantuan.....	238
Gambar 6.4. Keterkaitan antara Makna Bantuan dengan Keberadaan Sarana Transportasi Komunikasi dan Pasar serta Lembaga Ekonomi .....	245
Gambar 6.5. Keterkaitan Makna Bantuan dengan Dominasi elit Penguasa serta Keberadaan Organisasi Pengelola Bantuan.....	253
Gambar 6.6. Hubungan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Program Bantuan peningkatan Pendapatan ....	255



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Proses Analisis Data .....	281
Lampiran 2 Contoh Profil Empat Karakteristik Penerima Bantuan .....	292
Lampiran 3 Penerima Bantuan .....	304
Lampiran 4 Peta Kabupaten Lamongan .....	307
Lampiran 5 Peta Desa Bronjong .....	308

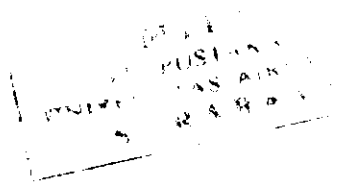
# BAB 1

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi bangsa Indonesia diperkirakan telah mencapai pendapatan rata-rata per kapita US \$ 812 pada tahun 1994 (Baswir, 1997:11). Tercapainya pendapatan perkapita tersebut melalui proses perubahan dan pembaharuan sosial yang sangat panjang. Dalam periode pembangunan (perubahan dan pembaharuan sosial) tersebut, "Indonesia mampu mengalami dua gelombang sekaligus, yaitu transisi ke arah industrialisasi, dan transisi ke arah integrasi arus globalisasi" (Poespowardojo, 1993: 82).

Transisi ke arah industrialisasi, menunjukkan bahwa pembangunan masih diorientasikan pada usaha mengejar produktivitas, baik barang maupun tenaga kerja dengan mengutamakan efisiensi kerja untuk mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa pembangunan dewasa ini cenderung berkembang menuju materialisme. Di sisi lain terintegrasi dengan arus globalisasi, berarti Indonesia telah mampu beradaptasi dengan kehidupan global, ditandai keikutsertaannya dalam pasar global.



Membaiknya berbagai unsur ekonomi merupakan indikasi kearah pembentukan struktur perekonomian baru yang lebih kuat dan moderen, namun diakui ternyata masih terdapat masalah belum terpecahkan, seperti: kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, terutama pada lapisan bawah. Apalagi keadaan setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi pada akhir tahun 1997 hingga saat ini, menyebabkan jumlah penduduk miskin kian meningkat.

Sudah banyak pemikiran diajukan untuk memecahkan masalah kemiskinan khususnya di pedesaan yang telah disampaikan dalam berbagai forum atau kesempatan, seperti seminar, ceramah, serta media massa baik cetak maupun pandang dengar. Secara pasti dinyatakan bahwa kebijakan untuk memecahkan masalah kemiskinan tersebut ditekankan pada pentingnya peningkatan pendapatan baik langsung maupun tak langsung, dengan memberikan kesempatan bagi pengembangan diri si miskin.

Berbagai program peningkatan bantuan untuk masyarakat pedesaan dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk memperbaiki tingkat hidupnya, menunjukkan bahwa bantuan kepada masyarakat seperti di desa Sukorame (bantuan ayam buras, diberikan kepada 3 orang; bibit tanaman mangga dan sayuran untuk 10 orang; bubut kayu 10 orang atau satu kelompok), ternyata setelah berjalan beberapa waktu (2 tahun), pada umumnya belum menampakkan hasil. Peternakan ayam untuk keluarga (SJ) setelah berjalan 5 bulan, dikembalikan kepada pemberi bantuan dengan alasan

repot dalam memeliharanya selain juga karena ayam tidak mau bertelur, akibat kandang berdekatan dengan jalan (lalu lintas) orang. Ayam tersebut kemudian diberikan kepada orang lain (yang menurut ukuran desa termasuk miskin dan layak menerimanya), namun baru memelihara selama 1 bulan, yang bersangkutan menyatakan tidak sanggup lagi memelihara dan berharap diberikan kepada orang lain.

Demikian juga bantuan (di desa Bronjong kecamatan Bluluk) bantuan berupa tanaman (bibit jeruk, mangga, jambu bengkak, blimbing, salam, nangka) diberikan kepada 15 orang dan setiap orang menerima 4 macam bibit tanaman masing-masing dua pohon. Pada saat mereka menerima bibit tanaman tersebut tampak senang (kelihatan dari raut muka yang berseri), mereka menyatakan sanggup untuk merawatnya. Namun kenyataannya tidak sampai satu bulan banyak diantara tanaman tersebut mati (dari 60 bibit yang diberikan, ada 15 pohon mati) dengan alasan dimakan kambing, terinjak sapi, dimakan ayam, ketiadaan air untuk menyiram, repot karena ada pekerjaan yang lain, padahal penentuan jenis tanaman sudah didasarkan pada analisis kesesuaian lahan.

Bantuan keterampilan bubut kayu di desa Kuwurejo dan Sukorame menunjukkan gejala serupa, selama diberi pelatihan warga masyarakat kelihatan sudah sangat berat untuk menerima bantuan, hal ini tampak dari frekuensi kehadiran pada waktu pelatihan tidak pernah lengkap. Setelah pelatihan selesai dan mereka dilepas untuk memproduksi sendiri, ternyata tinggal dua orang masih melanjutkan hasil pelatihan.

Kegiatan serupa di desa lain (Songowareng kecamatan Bluluk) ditengarai bahwa: dari dua kelompok binaan, masing-masing kelompok terdiri lima orang, kenyataannya hanya kelompok II (ke dua) menunjukkan antusias dalam berlatih (kelompok ini menunjukkan semangat berlatih relatif tinggi, kemauan untuk merawat alat) , sedangkan kelompok I ((ke satu) kurang bersemangat, bahkan baru satu minggu alat bubut yang diberikan sudah rusak dan tidak ada usaha untuk memperbaikinya. Meskipun bila dilihat dari usia, pekerjaan, dan kondisi ekonomi relatif sama.

Fenomena lain tampak pada bantuan pemerintah kepada masyarakat desa tertinggal (termasuk desa yang diamati). Hasil pengamatan di desa tertinggal, bantuan IDT berupa anak kambing (cempe), tiap orang menerima 3 ekor, sehingga satu kelompok ada 30 ekor kambing. Penerima bantuan (kambing) menyatakan tidak puas dengan pemberian bantuan tersebut (mereka mengatakan: *nopo namung rupi cempe, ngaten meniko tambah ngrepoti*), artinya bantuan yang diterima hanya berupa anak kambing, bantuan itu semakin merepotkan dalam memelihara. Dampak ketidakpuasan ini tampak pada perilaku dalam memelihara (menggembala), kambing dibiarkan lepas tanpa pengawasan, sehingga sering kali memakan tanaman warga desa.

Bagi orang lain (bukan penerima bantuan), mengatakan kambing IDT tersebut sering memakan (merusak) tanamannya, namun mereka tidak berani mengusik, karena kambing tersebut milik pemerintah. Gambaran ini menunjukkan bahwa masyarakat

merasa tidak memiliki keberanian untuk melindungi haknya (tanaman) dari gangguan (kambing), karena kambing tersebut milik pemerintah (penguasa). Setiap pemberian dari pemerintah dianggapnya milik pemerintah, bukan sebagai milik sendiri atau milik masyarakat. Setiap bantuan yang diberikan pemerintah kepada warga masyarakat, apapun keadaannya harus diterima, walaupun dengan terpaksa.

Fenomena ini didukung oleh penelitian Erler (1989) mengenai bantuan asing di negara Bangladesh menunjukkan bahwa bantuan pembangunan hanya mendatangkan musibah bagi kelompok sasaran, sementara kelompok lain yang mengambil keuntungan. Oleh karena itu sampai pada kesimpulan bahwa bantuan pembangunan harus dihapuskan (Erler, 1989:3).

Demikian juga dengan penelitian Prayitno (1987) tentang petani dan kemiskinan menunjukkan bahwa hasil pembangunan terutama terkait dengan pembangunan pertanian di pedesaan dalam kurun waktu 1970-1980 hanya dinikmati sekitar 3,36 persen penduduk golongan bawah serta lebih dari 9 persen penduduk golongan atas, dan sisanya dinikmati oleh orang lain di luar desa. Selain itu studi yang dilakukan di Jawa Barat menyatakan bahwa Petani kaya dengan luas pemilikan tanah lebih 0,5 ha memperoleh 60 persen dari usaha tani padi dan sisanya yaitu petani dengan pemilikan tanah kurang dari 0,5 ha hanya memperoleh 30 persen (Prayitno dan Arsyad, 1987:52).

Pendapat lain menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan menunjukkan banyak ketidakberhasilan, sebagai contoh

pembuatan jaringan irigasi untuk kepentingan rakyat kecil di pedesaan dan pertanian, namun kenyataannya yang memperoleh keuntungan mungkin bukan rakyat pedesaan melainkan para kontraktor ibu kota, termasuk di dalamnya kaum profesional yang menyusun disain proyek dan manajemen konstruksi (Chambers, 1988: xvii). Hal senada dinyatakan oleh Erler (1989:7), pada prinsipnya menggambarkan bahwa bantuan pompa air hanya dinikmati oleh petani kaya.

Penduduk desa mayoritas petani miskin karena tidak memiliki lahan pertanian sebagai sarana untuk mendatangkan penghasilan mereka akan tetap terpenjarakan oleh struktur sosial yang eksploitatif melanggengkan ketergantungan dan kelumpuhan. Sehingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kemakmuran dengan pemberian kredit murah ataupun penerapan teknologi baru hanya dapat dinikmati oleh petani kaya (Ampang, 1984: 87).

Beberapa hasil pengamatan dan temuan para peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa pada umumnya bantuan (khususnya untuk peningkatan pendapatan) kepada penduduk desa (miskin) belum seluruhnya mendatangkan manfaat bagi mereka, karena bantuan tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai.

Diduga banyak faktor yang ikut berpengaruh terhadap kegagalan bantuan tersebut, antara lain karakteristik masyarakat, peran organisasi baik organisasi ekonomi dan sosial, kepemimpinan, komunikasi, di samping faktor infrastruktur yang ada, yang kesemuanya itu akan membentuk makna terhadap bantuan yang diberikan.



Atas dasar inilah, maka penelitian ini diharapkan dapat melahirkan konsep tentang makna bantuan peningkatan pendapatan bagi warga masyarakat desa.

## 1.2. Permasalahan

Seperti telah diutarakan sebelumnya bahwa, hasil pengamatan di lapangan ditengarai tidak semua bantuan peningkatan pendapatan khususnya dan program pembangunan umumnya, dilaksanakan secara positif oleh kelompok sasaran. Secara normatif bantuan memiliki fungsi positif yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa (Alhabsyi, 1992; Yacob, 1993), namun secara empirik tidaklah demikian adanya.

Melihat fenomena seperti ini timbul pertanyaan Bagaimana khalayak sasaran (anggota kelompok masyarakat desa memberikan makna terhadap bantuan yang diterima baik dari pemerintah maupun instansi lain (lembaga sosial)?.

Pemberian makna terhadap sesuatu objek (rangsangan), berkait erat dengan faktor internal dan faktor eksternal. Atas dasar ini timbul pertanyaan bagaimana anggota kelompok penerima bantuan menjelaskan berbagai faktor yang ikut membentuk makna terhadap bantuan peningkatan pendapatan yang diterima?

Pemberian bantuan kepada warga masyarakat, juga berhubungan dengan sistem kelembagaan (organisasi pelaksana) yang ada, karena bagaimanapun juga bantuan akan digulirkan melalui kelompok yang ada.

Atas dasar ini timbul pertanyaan bagaimana proses hubungan sosial di dalam sistem kelembagaan desa (organisasi pelaksana) yang berhubungan dengan pemberian bantuan bagi anggota kelompok masyarakat desa bersangkutan?

Hal terakhir yang dipertanyakan dalam kaitanya dengan pemberian makna suatu bantuan, adalah bagaimana anggota kelompok penerima bantuan menggambarkan identitas dirinya sebagai penerima bantuan?. Gambaran tentang identitas diri ini mencakup karakteristik penerima bantuan.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan menemukan konsep tentang makna atau nilai bantuan peningkatan pendapatan (pembangunan pada umumnya), dilihat dari anggota masyarakat desa sebagai penerima bantuan (sasaran).

Tujuan ini dicapai melalui kegiatan eksplorasi, deskripsi, serta mencari keterkaitan masing-masing perilaku anggota masyarakat desa yang terekspresi di tingkat individu, dalam latar belakang situasi (sosial, ekonomi, dan politik), terutama menurut apa yang telah terkonstruksi dalam dunia makna anggota kelompok masyarakat desa sebagai penerima bantuan. Terutama dengan melihat bagaimana anggota masyarakat desa memaknakan bantuan peningkatan pendapatan yang diterima, di tengah proses transformasi sosial di masyarakatnya.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu studi dengan pendekatan kualitatif yang menerapkan paradigma definisi sosial, penelitian ini berusaha memahami makna bantuan peningkatan pendapatan oleh individu penerima bantuan, melalui perspektif sosiologi pembangunan, khususnya sosiologi pedesaan. Mengingat bantuan (peningkatan pendapatan) memiliki banyak makna.

Secara akademik temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan analitik-informatik bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya teori sosiologi pembangunan dan lebih khusus lagi sosiologi pedesaan. Mengingat selama ini penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada perilaku yang tampak (realita objektif), serta melihat keterkaitan diantara berbagai komponen pembangunan (fakta sosial) pada umumnya.

Di samping itu, temuan penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para perencana dan pelaksana pembangunan terutama dalam memilih strategi yang tepat dalam melakukan pembangunan umumnya dan memberikan bantuan peningkatan pendapatan khususnya, terutama pada unit analisis individu. Melalui pemahaman terhadap makna yang diberikan khalayak sasaran terhadap bantuan yang diberikan, para pelaksana pembangunan dapat mengidentifikasi kekurang-tepatan dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, yang pada gilirannya dapat dijadikan acuan untuk memilih strategi yang lebih tepat.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji teori, melainkan mengembangkan atau membangun teori. Ia tidak berawal dari hipotesis melainkan berakhir dengan hipotesis atau proposisi. Oleh karena itu penelitian ini lebih memfokuskan dalam mendeskripsikan proses dari pada hasil. Terutama proses dalam pemberian makna terhadap bantuan peningkatan pendapatan.

### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Telah banyak penelitian tentang pedesaan, diantaranya mengungkap tentang kemiskinan di pedesaan, karakteristik masyarakat pedesaan, pelaksanaan pembangunan khususnya dalam pemberian bantuan. Lebih lanjut dijelaskan berbagai hasil penelitian terdahulu tersebut.

#### **1.5.1. Kemiskinan di Pedesaan**

Diantara peneliti yang melihat kemiskinan di pedesaan adalah: Berger (1992) dan Jazair (1992) sebagai misal menyatakan bahwa kemiskinan di negara berkembang merupakan fenomena pedesaan. Laporan Bank Dunia tahun 1990 penduduk miskin di negara sedang berkembang berjumlah sekitar 1.116 juta jiwa atau kurang lebih sepertiga jumlah penduduk dunia (Dillon dan Hermanto, 1993). Todaro (1983) mencirikan penduduk miskin, bagi mereka yang bertempat tinggal di pedesaan dan memiliki kegiatan utama di bidang pertanian. Glewee (1989) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa

sebagian besar penduduk miskin terdapat di pedesaan dan pekerjaan utama kepala rumahtangga di sektor pertanian atau pekerja sendiri.

Demikian juga Quibria (1993), dari hasil penelitiannya di Asia Selatan dan Asia Tenggara memberikan beberapa ciri kemiskinan: (1) banyak ditemui di pedesaan daripada di perkotaan; (2) kemiskinan berkorelasi positif dengan jumlah anggota keluarga dan berkorelasi negatif dengan jumlah pekerja dalam suatu keluarga; (3) kemiskinan ditandai oleh pemilikan aset keluarga; (4) pertanian sebagai sumber penghasilan utama; dan (5) berkaitan dengan masalah sosial budaya (Laporan Bank Dunia, 1995).

Dari berbagai pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwa kemiskinan banyak terdapat di pedesaan, sehingga dapat diasumsikan bahwa berbicara tentang masyarakat desa, identik berbicara tentang kemiskinan, walaupun hal itu tidak seluruhnya benar.

Ada beberapa pandangan tentang kemiskinan diantaranya: (1) melihat kemiskinan dikaitkan dengan rendahnya etos kerja, kemiskinan dalam hal ini disebabkan karena malas dan hidup sangat konsumtif; (2) kemiskinan dilihat muncul karena ketidakadilan dalam faktor produksi masyarakat khususnya pemilikan tanah; (3) kemiskinan yang dikaitkan dengan model pembangunan (yang berorientasi pada pertumbuhan).

Bila dikaji ternyata masing-masing perspektif tersebut memiliki kelemahan yaitu melihat kemiskinan hanya dari satu

faktor saja. Padahal kenyataannya kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor (tidak hanya satu faktor). Untuk inilah maka tepatlah kiranya bila Chambers melihat kemiskinan itu sebagai kemiskinan terpadu, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang disebutnya sebagai *ketidakberuntungan* atau *disadvantages*, yang saling terkait satu sama lain (Chambers, 1983: 111).

Ketidak-beruntungan (jebakan penjarahan atau perangkap kemiskinan) tersebut melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin terutama di pedesaan. Kelima komponen *ketidak-beruntungan* tersebut adalah: (1) kemiskinan, (2) kelemahan fisik, (3) kerentanan, (4) keterisolasian, dan (5) ketidak-berdayaan (Chambers, 1983: 109). Meskipun diakui bahwa tidak selalu kelima fenomena kemiskinan itu akan selalu muncul bersamaan, namun setidaknya fenomena yang tampak lebih dari satu. Inti persoalan dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada faktor manusia, khususnya sumber daya manusia.

Kemiskinan menggambarkan suatu keadaan belum mempunya seseorang (individu) untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (*human basic needs*) bagi kelangsungan hidup secara wajar. Kebutuhan pokok manusia bermacam-macam dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain, bahkan antara satu musim dengan musim lain. Oleh karena itu pengertian kemiskinan sulit didefinisikan secara universal (Leviatan, 1980).

Konsep kemiskinan mencakup problema yang multi kompleks dan dapat dilihat dari berbagai segi, misalnya selain ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, juga ditengari oleh keterbatasan kebutuhan yang menyangkut fungsi sosial (Wriggins dan Karlson, 1978).

Friedman (1979) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi terbatasnya kesempatan kerja untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial atau modal yang produktif seperti: tanah, perumahan dan peralatan lainnya, terbatasnya jaringan sosial seperti dalam memperoleh kesempatan kerja, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, hubungan dan informasi, kesemuanya itu diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi manusia.

Semua pendapat tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan merupakan *resultante* dari banyak faktor dan dimensi. Survei Badan Litbang Deptan dan IPB (Bandiklat, 1993:5) menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan antara lain: (1) sumber daya alam, (2) teknologi, (3) prasarana dan permodalan, (4) sumber daya manusia, dan (5) kelembagaan. Menurut studi ini faktor utama yang menyebabkan kemiskinan adalah kelembagaan dan sumberdaya manusia yang mencakup dimensi struktural, kultural dan sosial.

Pendapat Mubyarto dalam Republika (Senin 29 Novemver 1993) bahwa proses ketertinggalan (kemiskinan) di desa disebabkan oleh tiga faktor yaitu: keterisolasian penduduk, sumber daya alam yang terbatas, terletak di daerah kering sulit air, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Dari berbagai pendapat yang ada, pada umumnya mereka beranggapan bahwa kemiskinan sebagai masalah yang cenderung tampak pada masyarakat desa di negara-negara berkembang.

Beberapa pakar mengetengahkan gejala kemiskinan pada masyarakat desa, secara teoretis diterangkan sebagai gejala struktural, gejala alami atau sekaligus struktural dan alami (White dan Sinaga, 1978). Kemiskinan struktural dalam hal ini dipahami sebagai akibat dari suatu struktur sosial yang dominatif dan kurang memberi peluang pada golongan bawah untuk memiliki akses terhadap sumberdaya ekonomi. Kemiskinan alami sendiri sebenarnya merupakan akibat dari kemiskinan sumberdaya alam atau kemiskinan sebagai akibat kondisi geografis yang kurang mendukung kehidupan.

Bagi masyarakat desa, fenomena dan problema kemiskinan merupakan masalah hidup sehari-hari, yang berwujud kelaparan, penyakit, meninggal dalam usia muda, kebutuhan akan pekerjaan dan perumahan dan merasakan kehilangan nilai-nilai yang biasanya memberi makna kepada kehidupan (Berger, 1976: 9). Mereka tidak hanya miskin secara ekonomi tetapi juga miskin secara sosial seperti kekurangan jaringan sosial (*social network*) dan struktur di dalam masyarakat yang dapat memberikan akses bagi *income generating* golongan miskin, sedangkan kemiskinan politik lebih merefleksikan kekurangan akses dan *line of action* pada kekuasaan (Effendi, 1993: 201-204).

Oleh karena itu untuk memahami kemiskinan secara lebih representatif harus memasukkan segala aspek pembangunan.



Dalam memahami kemiskinan seharusnya melihat interkoneksi multi-faktor seperti ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu peta analisis. Kasus yang memarginalkan kaum miskin di pedesaan termasuk juga di perkotaan tidak dapat dipisahkan dari sistem politik, ekonomi dan sosial di mana kaum miskin itu berada, karena kemiskinan tidaklah merupakan sisi yang berdiri sendiri (*single faset*). Namun demikian memahami secara sederhana masyarakat miskin dapat diketahui dari karakteristik penduduk miskin itu sendiri, yang oleh Nurdin (1993: 2) dikelompokkan ke dalam enam karakteristik yaitu: (1) sebagian besar mereka berdomisili di pedesaan, (2) jumlah anggota keluarga lebih besar dari angka rata-rata, (3) kepala keluarga biasanya wanita, (4) pemilikan asset minimal atau tidak punya sama sekali, (5) sumber pendapatan dari sektor pertanian, dan (6) sebagian besar pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok.

#### 1.5.2. Karakteristik Masyarakat Desa

Masyarakat desa (petani), sebagai masyarakat lokal (memiliki budaya tradisional) tetap mengakui adanya sistem hubungan tertutup meskipun juga menyadari mereka juga melakukan hubungan dengan masyarakat luar. Hal ini sebagai konsekuensi dari pola hubungan pada masing-masing anggota masyarakat.

Pola hubungan sosial yang tersusun secara hirarkis akan membentuk dua belahan, yaitu belahan atas (mereka yang

melakukan hubungan dengan masyarakat luar) dan belahan bawah (memelihara hubungan sosial setempat secara tertutup, terbatas). Kelompok kedua inilah pada umumnya sebagai kelompok masyarakat tak berdaya, terbelakang, kurang beruntung.

Shanin (1971:245) menemukan adanya kesulitan untuk memberi batasan yang jelas tentang lapisan sosial dalam masyarakat petani (pedesaan). Kesulitan itu timbul berkaitan dengan sifat khusus masyarakat petani dengan ciri: (1) mempunyai hubungan dengan tanah dan ciri khusus produksi pertanian yang berakar pada keadaan petani; (2) usaha tani keluarga merupakan satuan dasar pemilikan, produksi dan konsumsi serta kehidupan sosial petani; (3) kepentingan pokok pekerjaan dalam menentukan kedudukan sosial, peranan dan kepribadian petani dikenal secara baik oleh masyarakat bersangkutan; (4) struktur sosial desa merupakan keadaan khusus bagi daerah dan waktu tertentu; dan (5) masyarakat petani merupakan sebuah kesatuan sosial pra industri yang memindahkan unsur spesifik struktur sosial ekonomi dan kebudayaan lama ke dalam masyarakat kontemporer.

Geertz (1970) menunjukkan bahwa jalinan hubungan antara masyarakat petani (Jawa) dengan negara (kolonial Belanda), telah mewarnai kehidupan sosial yang khas. Hubungan sosial masyarakat desa (Jawa) semakin menyempit ke dalam, sehingga telah menyebabkan terjadinya proses *involution* dan proses *shared poverty*. Oleh karenanya Geertz melihat bahwa masyarakat desa (Jawa), tidak terbagi menjadi

dua lapisan secara mencolok yaitu kaya dan miskin, melainkan tetap menjaga homogenitas sosial sebagai struktur yang *egaliter dan simetris*.

Pandangan Geertz ini mendapat tanggapan beberapa pakar diantaranya Collier (1981). Dia menyatakan bahwa kebijaksanaan pembangunan pertanian melalui *revolusi hijau* (tahun 1970 an) menyebabkan terjadinya proses *evolution* sistem kelembagaan tradisional yang membatasi masuknya petani miskin dan buruh tani ke dalam sistem produksi pertanian. Proses tersebut menyebabkan kesenjangan semakin tajam. Petani kaya semakin terbuka untuk menerima teknologi baru sehingga menjadikan mereka sebagai kelas petani komersial, mengabaikan kewajiban dan loyalitasnya terhadap sesama (petani miskin).

Perkembangan berikutnya Hayami dan Kikuchi, mereka berdua memberikan tanggapan terhadap pendapat Collier. Mereka berpendapat bahwa Collier meletakkan sebab perubahan sosial di pedesaan hanya pada masuknya teknologi pertanian, dan mengabaikan bahwa sebenarnya teknologi pertanian jauh sebelumnya telah diperkenalkan, seperti pemakaian sabit menggantikan *ani-ani*, sistem tebasan menggantikan *bawon* (Sairin, 1976: 56-57).

Hayami dan Kikuchi menolak argumen Collier tentang persebaran teknologi menyebabkan kesenjangan sosial. Persebaran teknologi justru tidak membuat masyarakat terpolarisasi melainkan lebih terstratifikasi dalam spektrum kontinum (Hayami, 1981:68; Kikuchi, 1980:45-64).

Masyarakat petani merupakan "*part-societies with part-cultural*" (Foster, 1967: 6; Redfield, 1956:20), disatu pihak mereka tinggal di pedesaan dengan lingkungan tradisi yang telah terpelihara secara turun temurun, namun di pihak lain hidupnya dipengaruhi oleh kehidupan pasar, kekuasaan, peradaban kota. Sehingga kehidupan pertanian mereka bukanlah sebagai petani *primitif* yang ditandai dengan upaya untuk memenuhi konsumsi sendiri dan kerabatnya, tetapi juga bukan sebagai pengusaha pertanian (*farmer*) yang ditandai dengan orientasi pasar atau bisnis. Dengan kegiatan pertaniannya mereka lebih menekankan agar dapat hidup. Ekonomi uang dan pola kegiatan produksi untuk tujuan pertukaran (karena alasan pasar dan mengejar profit) sangat sedikit mewarnai pemikiran ekonomi dan aktivitas kerja mereka sehari-hari.

Foster (1967:6) menekankan bahwa setiap usaha pemberian batasan terhadap petani harus bersifat *relasional* dan *struktural*, dan bukan hanya berdasarkan mata pencaharian. Foster melihat bahwa meskipun petani merupakan masyarakat tepi (pinggiran), tetapi juga merupakan bagian dari suatu peradaban, yang berhubungan dengan kehidupan kota, kelas politik, penguasa agama, elit berpendidikan. Dengan kata lain untuk memahami petani (masyarakat desa), tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat luar (kota dan negara).

Dalam usaha memahami kehidupan masyarakat petani (desa), yang sedang bergerak ke luar dari komunitas lokal, Barnes (1954:39-58), melihat bahwa pada umumnya petani menjadi anggota dari banyak kelompok sosial, yang dibedakan

oleh masuknya petani dalam medan sosial (*social field*). Medan sosial tersebut dapat dibedakan menjadi 3 jenis, masing-masing dapat dipahami sebagai struktur sosial, sistem kegiatan, dan hubungan sosial. Ketiga medan sosial tersebut adalah medan sosial berbasiskan: *teritorial, ekonomi, dan jaringan kerja*. Ketiga medan tersebut bersama-sama memperluas hubungan dan kegiatan sosial-ekonomi komunitas lokal ke dalam masyarakat yang lebih luas.

Pandangan Barnes dan Redfield tersebut dapat digunakan untuk mempelajari masyarakat petani (desa), khususnya di Jawa, karena meluasnya hubungan sosial tidak terbatas yang dialaminya saja. Koentjaraningrat (1984:14-19), kiranya senada dengan pendapat Barnes dan Redfield, yang melihat masyarakat desa bukanlah masyarakat yang homogen, karena banyak petani terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi di luar pertanian, dan mengerjakan keduanya secara bersamaan.

Kenyataannya pendapat Barnes dan Redfield tersebut tidak didukung oleh Boeke. Boeke (1980:28-29) secara tegas menyatakan bahwa individu petani tenggelam dalam kolektivisme dan orientasi ekonomi tunduk di bawah orientasi non-ekonomi, hanya sekedar mendapatkan prestise yang tinggi di masyarakat. Mereka lebih mengutamakan memperbaiki gapura rumah daripada membeli pupuk atau bibit untuk pertaniannya. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa penduduk desa tidak memiliki kemauan untuk memanfaatkan peluang pasar dan berorientasi pada profit. Kegiatan pertanian mereka lebih menekankan agar sekedar dapat hidup. Ekonomi uang dan pola

kegiatan produksi untuk tujuan pertukaran (karena alasan pasar dan mengejar profit) sangat sedikit mewarnai pemikiran ekonomi dan aktivitas kerja mereka sehari-hari.

Demikian pula kajian Penny "Sistem pasar (pasarisasi) dan komersialisasi tidak membawa kemajuan dan keberuntungan, tapi kesengsaraan dan kelaparan", hal ini disebabkan karena sistem pasar mendorong petani miskin menjual hasil produksinya untuk membeli pangan yang lebih murah dan rendah gizinya. Sistem persaingan pasar berkaitan dengan kehidupan sosial dan politik, meningkatkan individualisme, kewajiban tradisional terabaikan (Penny, 1990: 85).

Ada tiga hal yang menjadi kajian Penny dalam menentukan apakah pasar yang ada beroperasi sesuai dengan teori ekonomi. Ketiga hal tersebut adalah: (1) intensitas penggunaan sumber daya, (2) efisiensi penggunaan sumber daya, dan (3) pengembangan keterkaitan pasar sebagai sumber pangan (Penny, 1990:58). Kajian Penny ini meskipun memfokus pada sistem pasar namun di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pasar bagi produksinya.

Schultz (1964) justru merasa yakin bahwa pada saatnya petani (masyarakat desa) dapat memetik keuntungan berkat adanya pasarisasi, karena: (1) mereka telah memiliki pasar bagi hasil produksinya, (2) terdapat pasar bagi produksi yang melebihi kebutuhan pokok, dan (3) pedagang yang datang ke desa menawarkan dagangan yang mungkin diperlukan petani (masyarakat desa) baik untuk konsumsi maupun produksinya.

Laporan Bank dunia menunjukkan pengakuan adanya kegagalan reformasi pasar dalam menyediakan pertumbuhan dan keuntungan bagi kalangan miskin (Rachbini, 1995:58). Demikian pula pernyataan Nasikun (1995), bahwa kebijaksanaan harga macam apapun, tidak dengan sendirinya menguntungkan lapisan penduduk miskin di bawah kontrol kekuatan monopoli.

Sebagai orang desa (bercocok tanam), petani bukanlah pengusaha pertanian yang mengelola usaha tani bisnis, melainkan secara ekonomi mengelola rumahtangga. Kendati demikian ia mempunyai hubungan dengan pasar di luar komunitasnya. Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun juga pasar telah mewarnai kehidupannya.

Seharusnya dengan orientasi pasar akan terjadi persaingan, yang dalam hal ini teori persaingan murni cenderung memaksimalkan kesejahteraan umum untuk menghasilkan barang terbesar bagi penduduk terbanyak, dipasarlah manusia ekonomi, manusia politik dan sebagainya mencari keuntungan masing-masing (Penny, 1990:85). Namun kompetitif yang diciptakan pasar, menguntungkan golongan kuat di setiap wilayah, yang mendasarkan diri pada keberhasilan kaum berkuasa dan menawarkan hanya sedikit bantuan dan dorongan pada kaum papa yang tak berkuasa, sehingga ekonomi pasar bukanlah sebuah model pembangunan (Rachbini, 1995:26).

Berbagai pendapat tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat desa bukanlah masyarakat yang hidup dengan pola tradisional (Schrool, 1982:55). Seperti yang terjadi di

Indonesia masyarakat pedesaan merupakan masyarakat transisi dari post-agraris menuju ke praindustri (Mar'at, 1988:17)

Masih berkaitan dengan perilaku ekonomi masyarakat pedesaan, Sobari (1995) dalam penelitiannya tentang "Kesalahan dan Perilaku Ekonomi", menyatakan bahwa masyarakat Suralaya (Betawi) gagal dalam mengembangkan kegiatan bisnis kecil menjadi besar. Hal ini disebabkan antara lain karena: (1) adanya keterbatasan pemasaran (hanya dalam desa, sedang daya dukung tidak ada), (2) beroperasi secara perorangan, tidak dapat membentuk organisasi, (3) pengaruh agama tidak langsung membentuk tingkah laku ekonomi, namun melalui budaya Betawi, (4) mereka tidak memiliki cukup modal (non struktural).

Semuanya itu menunjukkan bahwa masyarakat desa belum dapat berperilaku yang berorientasi pada ekonomi dengan memanfaatkan peluang pasar. Hal ini dapat dimaklumi karena banyaknya kendala yang dihadapi masyarakat desa dalam memanfaatkan pasar yang ada. Di samping itu juga kendala tradisi atau pandangan hidup masyarakat.

Pandangan hidup yang mewujudkan sikap atau cara hidup orang Jawa yang tertuang pada kata-kata: *"ono dino ono upo, urip iku ora ngoyo, sing penting cukup kanggo sakbendinane"*, (ada hari ada nasi; hidup itu tidak perlu ambisi; yang penting cukup untuk setiap harinya), hal ini sedikit banyak akan berpengaruh pada etos kerja mereka. Masyarakat petani khususnya di Jawa juga beranggapan bahwa hidup harus sejajar dengan lingkungannya, sehingga bila ada yang bekerja terlalu

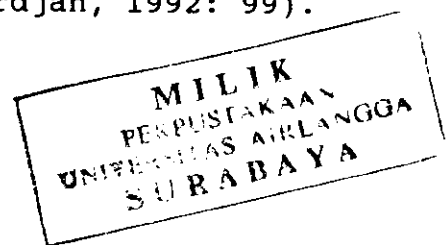


keras, mereka dianggap berambisi dan dampaknya dianggap menyimpang dari norma yang ada. Atas dasar ini "masyarakat petani berusaha hidup sejajar dengan yang lain" (Mulder, 1982).

Kenyataan ini ternyata sesuai dengan penelitian Sobari tentang orang Jawa di Tanjung Pinang menyatakan bahwa dalam menghadapi kesulitan dan tekanan hidup, terutama di luar daerah orang Jawa memang betul-betul bekerja keras, gigih, dan hemat, namun demikian mereka tidak mau dianggap *ngoyo* karena mereka merasa tidak ada persaingan, dan tidak ada ambisi untuk lebih mengungguli yang lain. Dari pada mengganggu lebih baik tidak bertindak; dari pada ambisius dan ingin serba lebih, lebih baik puas dengan yang sedikit dan hidup miskin; hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan mereka lebih banyak bersikap *nrimo* (menerima apa adanya), karena bagaimanapun, orang akan menerima sesuai dengan jatah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan (Sobari, 1986: 98-100).

Adanya sikap pasrah karena terjerat dalam berbagai macam kekurangan menyebabkan mereka tampak tidak mempunyai inisiatif, tidak mempunyai gairah, dan tidak dinamis untuk mengubah nasib mereka yang dianggap buruk (Alfian, 1980: 180-181).

Fenomena budaya kemiskinan bisa berdampak selain memberikan rasa aman juga menyebabkan warga desa menjadi apatis dan menghambat kemajuan (Tjokrowinoto, 1993). Dalam alam budaya demikian, sudah pasti ambisi untuk membangun dan mengubah tata hidup berkadar amat rendah, serta keinginan bersaing dengan masyarakat lain (Soemardjan, 1992: 99).



### 1.5.3. Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan suatu konsep yang memuat multi makna dan berdimensi kompleks, meskipun hanya sebuah kata, namun kandungan arti yang dibawanya memuat substansi yang sangat mendalam, syarat dengan interpretasi optimistik dan pesimistik. Hal ini akan semakin mudah dimengerti munculnya asumsi bahwa konsep pembangunan mudah dikatakan, namun sukar untuk membuat benang merah tentang batasan pendefinisannya. Namun pembangunan setidaknya-tidaknya memuat dimensi moral bahwa telah terjadi suatu proses transformasi nilai (materiil dan immateriil) di dalam masyarakat menuju ke bentuk yang lebih baik, yang oleh Roupp (1993: 15) dinyatakan: "*Development signifies changes from something through to be less desireable to be something through to be more desireable*".

Tuntutan akan pembangunan yang membawa ke situasi lebih baik merupakan konsekwensi logis dari dinamika kehidupan masyarakat yang selalu ditandai adanya perubahan. Terminologi perubahan sosial merefleksikan adanya proses transformasi atau perubahan struktur sosial yang meliputi institusi tertentu termasuk juga hubungan diantara institusi tersebut (Bottomore, 1972:297).

Selain itu perubahan sosial juga memuat proses pergeseran orientasi nilai yakni suatu sistem sosial dengan norma modern yang cenderung lebih mudah berubah (*change oriented*), mengembangkan teknologi, rasional dan ilmiah,

kosmopolit dan emphatik (Rogers dan Shoemaker, 1971: 32). Mengingat pembangunan juga memuat fenomena perubahan (*self-contained meaning*), maka memahami pembangunan dalam konteks proses lebih merupakan masalah tingkat perubahan ketimbang "ada atau tidak adanya" perubahan itu.

Konsep pembangunan merupakan suatu dinamika yang berproses, dan bukan merupakan suatu kondisi yang statis (Misra dan Honjo, 1981: 8), pemahaman ini menggiring kita pada pemikiran adanya gerak dinamik yang mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga nasional, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*), pemberantasan kemiskinan absolut atau *absolute poverty* (Todaro, 1983:124). Dalam konteks sosio-ekonomi, pembangunan harus berusaha meminimalkan disparitas income dan memaksimalkan distribusi pendapatan baik antar wilayah (*horizontal distribution*) maupun antar strata sosial (*vertical distribution*).

Tambahan angkatan kerja sebagai akibat peledakan penduduk belum seluruhnya dapat terserap oleh sektor non pertanian sedangkan jumlah tenaga kerja yang masuk ke sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani semakin besar meskipun secara persentase menunjukkan penurunan dari 67,5% tahun 1970 menjadi 55% tahun 1991 (BPS, 1993). Dengan keadaan tanah semakin sempit, menunjukkan bahwa beban pada sektor pertanian menjadi makin berat. Dalam kaitan inilah diperlukan kesempatan kerja di luar sektor pertanian yang mampu menampung dan menarik keluar tambahan

tenaga kerja dari sektor pertanian untuk pada akhirnya dapat memberikan tambahan pendapatan.

Meningkatkan kemampuan keluarga miskin di pedesaan agar mereka mampu mensejahterakan dirinya merupakan bagian dari pembangunan ekonomi masyarakat. Melalui program pembangunan, sasaran pembinaan seharusnya ditujukan kepada keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan. Untuk itu penyebaran bantuan kepada masyarakat setidaknya disusun dari mereka yang termiskin (*the poorest of the poor*). Salah satu strategi penanggulangan yang langsung menyentuh basis ekonomi petani (penduduk desa) miskin dipaparkan oleh Rahasan dan Kamaruddin (1993: 5-7) dengan mengajukan delapan kunci pengentasan kemiskinan yaitu:

Pertama program penanggulangan kemiskinan haruslah program yang dilandaskan pada kegiatan peningkatan kemampuan untuk menghasilkan *income* bagi sasaran (*target beneficiaries*) dan azas *income generating capacity* berasal dari kegiatan tersebut. Untuk menghasilkan *income generating capacity* paling tidak harus ada perbaikan akses pelaku terhadap empat hal yaitu: (1) akses terhadap sumber daya, (2) akses terhadap modal, (3) akses terhadap pasar, dan (4) akses terhadap teknologi. Sasaran paling utama diberikan kepada perbaikan pelakunya (*invest in people*).

Kedua diterapkannya secara utuh prinsip pembinaan dengan pendekatan kelompok, kemitraan, keluarga, serta berprinsip pada keserasian dan keswadayaan, belajar sambil bekerja dan kepemimpinan dari petani itu sendiri.

*Ketiga* dirancangkannya pola pelatihan bagi petugas pembina yang mampu meningkatkan antusiasisme, dedikasi dan kemampuan para petugas pembina dalam menggali dan mengembangkan aspirasi keluarga miskin.

*Keempat* diterapkannya pola kredit yang mendidik dan disiplin bagi petani kecil sehingga pada akhirnya mempunyai kredibilitas untuk berhubungan dengan Bank secara normal.

*Kelima* diterapkannya cara kerja yang terbuka di antara petugas pembina, sehingga memacu kreativitas dan produktivitas kerja.

*Keenam* dilaksanakannya latihan kepemimpinan perencanaan partisipatif sehingga tumbuh kesatuan kepemimpinan dan perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan.

*Ketujuh* digunakannya berbagai kredit untuk berbagai macam usaha yang memiliki peluang pasar terbesar.

*Kedelapan* digunakan prinsip pendekatan kelompok, keluarga, keserasian, kepemimpinan dari kelompok, kemitraan, swadaya, dan belajar sambil bekerja.

Banyak kesempatan yang dapat diciptakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan seperti: industri kecil, padat karya, agribisnis (Prayitno dan Arsyad, 1987). Pernyataan ini senada dengan Collier bahwa "Pengembangan agrobisnis, industri kecil di pedesaan, mengembangkan migrasi sirkuler (nglaju) dengan bekal keterampilan yang memadai bagi penglaju merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan desa" (Collier, 1996: xviii-xx ).

Dua temuan penelitian di Jatinom Klaten menjelaskan (1) hanya sedikit dari kegiatan *off-farm* yang tumbuh memperoleh dukungan langsung dari pemerintah atau lembaga modern, mereka bekerja dengan modal dalam skala kecil dan pemilikan rumah tangga, (2) meskipun *off-farm* merupakan pilihan bagi rumah tangga miskin semakin terbuka, namun pendapatan yang mereka peroleh sangat rendah (Effendi dan Manning, 1991)

Penelitian Prayitno dan Arsyad, 1987) tentang *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani Miskin* menyatakan bahwa pendapatan petani miskin masih dapat ditingkatkan lagi, antara lain dengan pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki oleh petani miskin, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Untuk itu perlu diciptakan sistem kerjasama antar instansi terkait, sehingga seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki petani miskin dapat didayagunakan secara optimal dalam upaya meningkatkan pendapatan petani miskin tersebut.

Dalam menangani kemiskinan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: (1) pasar bukanlah alat yang berhasil guna dan dapat diandalkan untuk menentukan penggunaan sumber bila pembagian pendapatan sangat pincang; (2) pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya merembes ke rakyat jelata, jika orang tidak mendapat kesempatan yang sama untuk menikmatinya; (3) perencanaan untuk mengatasi kemiskinan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia dan bukan pada pemenuhan permintaan pasar; (4) tingkat hidup golongan miskin tidak dapat dinaikkan hanya

dengan menaikkan daya belinya, melalui program kesejahteraan sosial, melainkan dengan meningkatkan produktivitasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa bantuan untuk meningkatkan penghidupan petani (masyarakat desa) agar mereka terangkat dari kemiskinannya lebih banyak diorientasikan pada pemberian pekerjaan (sebagai pekerja) agar mereka dapat memperoleh penghasilan yang layak, dan bukannya dengan menganjurkan mereka untuk mengelola suatu industri, karena dianggap belum memiliki kemampuan mengelola usaha.

Untuk itu tindakan dalam rangka mengatasi kemiskinan, tidak lain adalah perubahan lembaga kemasyarakatan, yang dapat menjangkau bagian termiskin dalam masyarakat, perlu lebih disempurnakan, karena bagaimanapun juga kelembagaan merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan khususnya di pedesaan. Bila lembaga yang ada, bersifat kaku, tenaga kerja tidak mudah melakukan mobilitas, tingkat pendidikan berbeda, kesempatan memperoleh alat produksi tidak rata, pembagian pendapatan timpang, pertumbuhan ekonomi cenderung menguntungkan golongan atas, kecuali bila lembaga yang ada diadakan perubahan (Ul Haq, 1983:72-76), maka penyebaran ekonomi dirasakan oleh kelompok bawah.

Sistem pelayanan lembaga agar mampu membagi langsung sumber kepada golongan penduduk miskin, serta meletakkan dasar untuk menaikkan produktivitas mereka, merupakan unsur terpenting. Sistem pelayanan ini mampu menyediakan sumber produksi, modal kerja, prasarana pokok, dan memberikan layanan lain, yang dibutuhkan golongan penduduk miskin agar dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi.

Bila dikaji lebih lanjut penentuan si penerima bantuan tersebut banyak ditentukan oleh kepala desa. Karena dalam penentuan kelompok sasaran sering kali pihak pemberi bantuan lebih mengandalkan informasi dari perangkat desa. Pemilik dana tidak melakukan sendiri penentuan kelompok sasaran. Atas dasar inilah diasumsikan timbulnya tindakan terhadap bantuan yang diberikan dapat dipengaruhi oleh proses penentuan kelompok sasaran.

Seperti pernyataan Bargel (1996: 55) bahwa analisis tentang situasi dan masalah yang dikumpulkan sebagai dasar perencanaan program hanya mengandalkan informasi tentang kelompok sasaran dan proyek daerah, tanpa memperhatikan aspek histori dan konteks sosial kelompok sasaran.

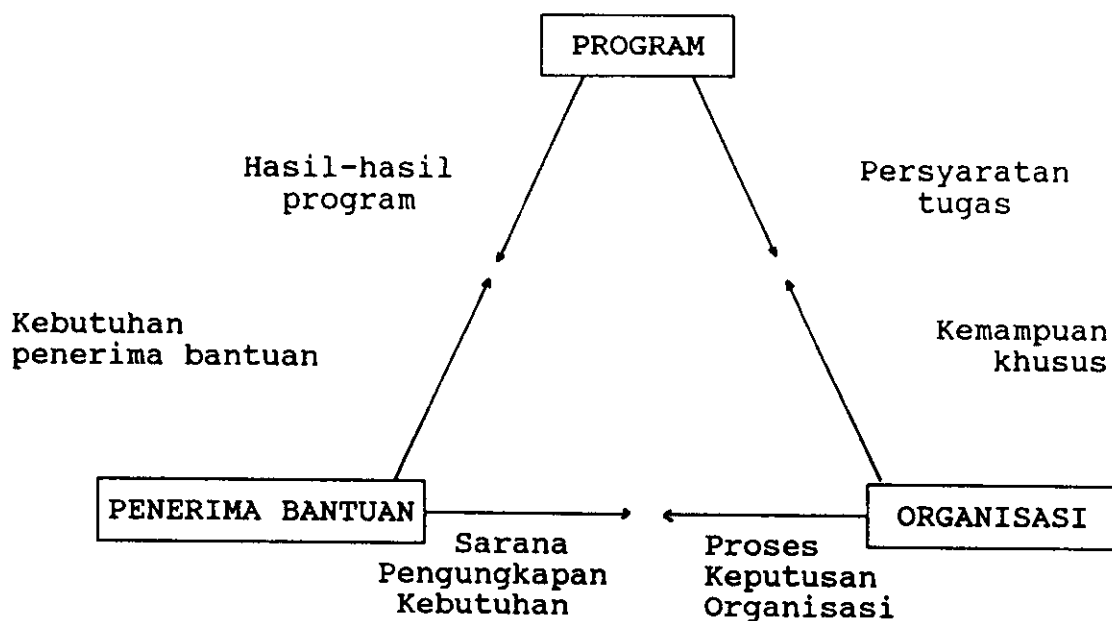
Menganalisis persoalan kemiskinan perlu dikaitkan dengan *relative position in society*, hal ini penting mengingat banyak arahan pembangunan yang mengalami bias sasaran, karena kurang memperhatikan siapa yang miskin dan siapa yang tidak, diantara yang miskin sendiri perlu dipilah siapa yang termasuk miskin absolut dan siapa miskin relatif.

Sesungguhnya secara kasat mata sangatlah mudah untuk menemukan di mana keluarga miskin itu berada. Akan tetapi seringkali mereka tidak terditeksi sehingga mereka terabaikan dalam pengalokasian berbagai program bantuan, yang secara filosofi sebenarnya program itu dirancang untuk mereka. Banyak diantara mereka menjadi objek pembicaraan dalam berbagai forum diskusi dan kemudian terlupakan ketika *action plan* mulai dilaksanakan.



Mengangkat kemiskinan ke permukaan membutuhkan suatu sikap "keberpihakan" kepada mereka. Kita perlu masuk ke dalam dunia mereka, karena fakta tidak mampu berbicara, melainkan manusialah yang menginterpretasikan.

Menyelami dunia kemiskinan, pada dasarnya ikut merasakan penderitaan mereka, akan sangat membantu dalam mengatasi kemiskinan mereka. Kiranya pemikiran ini selaras dengan Korten (1988) bahwa kelayakan program ditentukan tiga hal yaitu: program itu sendiri, kondisi penerima bantuan dan organisasi pelaksana program tersebut (Korten, 1988: 240).



Gambar 1.1  
Skema Kelayakan program Pembangunan  
(Korten, 1988)

Bila setiap program tidak memperhatikan ketiga unsur kelayakan tersebut, dimungkinkan terjadi kegagalan, seperti penelitian Erler (1989) mengenai bantuan asing di negara Bangladesh menunjukkan bahwa bantuan pembangunan hanya mendatangkan musibah bagi kelompok sasaran, sementara kelompok lain yang mengambil keuntungan. Oleh karena itu sampai pada kesimpulan bahwa bantuan pembangunan harus dihapuskan (Erler, 1989:3).

Demikian juga yang dinyatakan oleh Michael Hirsh (dalam Soetrisno, 1995:41) bahwa investasi modal asing di suatu negara belum tentu menjamin terciptanya perbaikan taraf hidup rakyat yang membutuhkan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap bantuan itu mengena pada sasaran yang seharusnya.

Daya kerja dari suatu program pembangunan adalah kesesuaian antara mereka yang dibantu, program yang diberikan, dan organisasi yang mengelola. Dengan kata lain program (pembangunan) akan gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila tidak ada keterkaitan antara kebutuhan kelompok sasaran. dengan hasil program yang akan dinikmatinya, persyaratan program dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi pelaksana, kemampuan untuk mengungkapkan kebutuhan (kelompok sasaran) dengan pengambilan keputusan organisasi pelaksana. Untuk itulah maka dalam melaksanakan program (pembangunan) ide pembangunan hendaknya di dasarkan pada perencanaan partisipatif (Bargel, 1996:55), oleh karenanya proses perencanaan harus didasarkan pada : (a) *The analyses of*

*problems and situation produce a wealth of information, but its value for the project remains doubtful "data agregard" are the result. (b) Inquiring about problems and problem priorities. (3) Inquiring into the target group's needs, preference, and hopes in relation to development.*

Dalam melakukan strategi pembangunan, orientasi kerakyatan sangat diperlukan, oleh karena itu tindakan seperti: (1) pergi kepada rakyat, (2) hidup diantara rakyat, (3) belajar dari rakyat, (4) merencanakan dengan rakyat, (5) bekerja dengan rakyat, (6) memulai dengan apa yang diketahui rakyat, (7) membangun pada apa yang dimiliki rakyat, (8) mengajar dengan menunjukkan, (9) belajar dengan bekerja, (10) tidak pamer, (11) bekerja berdasarkan sistem, (12) tidak sepotong-sepotong tetapi terpadu, (13) tidak konform tetapi untuk transformasi (Korten, dalam Guy Gran, 1983: 246)

Strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat ini, ternyata senada dengan strategi pembangunan partisipatif merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pemerataan (Soetrisno, 1995: 253). Dalam strategi ini pembangunan harus diartikan sebagai perubahan sosial yang utuh, bukan perubahan sosial parsial. Baik rakyat maupun pemerintah dituntut secara bersama-sama menciptakan sikap mental baru, dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Hal ini senada dengan pernyataan Poppe (1997:3) bahwa *Program Development as an endogeneous process, starting with a development vision for region and aim at the participation of regional actors throughout the planning process.*

Strategi Korten dan Soetrisno ini, meskipun sudah berorientasi pada manusia dengan mendasarkan kebutuhan dari bawah, namun masih melihat pada keberadaan kelompok sasaran pembangunan (kelompok miskin, rakyat desa) dilihat dari hubungannya dengan struktur yang ada. Mereka belum melihat secara khusus kedudukan dan keberadaan masing-masing individu dalam suatu kelompok, serta hal-hal apa yang mendasarinya (melatar-belakangi), sehingga menunjukkan suatu aksi tertentu. Diakui bahwa kedudukan individu ini tidak mungkin dilepaskan dengan keberadaannya dalam kelompok.

Penelitian lain tentang "strategi pembangunan desa yang berorientasi pada manusia (kerakyatan)" juga sudah banyak dilakukan. Antara lain Chambers (1983; 1996), Korten (1988), dan Collier (1996), namun pada dasarnya mereka masih menggunakan paradigma fakta sosial yang lebih cenderung mengkaji secara makro dengan melihat masyarakat desa sebagai suatu sistem sosial yang di dalamnya mencakup struktur dan pranata sosial, selain itu mereka lebih banyak menggunakan pendekatan survei. Sehingga temuannya lebih banyak bersifat makro dan membuat generalisasi. Hal ini perlu diadakan kajian yang lebih bersifat mikro, mengingat setiap masyarakat meskipun memiliki ciri-ciri umum, namun bagaimanapun juga tetap memiliki kekhususan terutama menyangkut pola perilaku masyarakat.

Ahli lain meskipun telah melakukan kajian terhadap bantuan atau program pembangunan di pedesaan, namun lebih banyak melihat dampak program atau bantuan terhadap

kehidupan masyarakat. Sebagai misal Alhabsyi (1992) melakukan kajian tentang pemanfaatan Inpres dana bantuan desa, dia menyatakan bahwa Inpres dana bantuan lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik. Ini disebabkan karena para peneliti tersebut memfokuskan pada hal-hal yang tampak.

Ali (1986) dan Atmoko (1987) menyoroti persepsi masyarakat terhadap program penghijauan dan PIR, mereka melihat bahwa program penghijauan serta perkebunan inti rakyat, tidak membuat petani dapat mandiri, sebaliknya tetap tergantung pada inti. Erler (1989) melihat bantuan untuk penduduk miskin justru akan mematikan. Lebih jauh Erler melihat bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa hanya dinikmati oleh petani atau orang kaya saja, sedangkan kelompok yang seharusnya menjadi sasaran bantuan sedikit sekali dapat menikmatinya.

Hussin (1992) melihat dampak dana bantuan desa untuk peningkatan pendapatan, dia menyatakan bahwa bantuan sangat menolong penduduk. Senada dengan Hussin, Yacob (1993) melakukan kajian tentang pemanfaatan uang batuan desa bagi peningkatan pembangunan. Nasikun (1995) melihat tentang pengembangan tenaga off-farm. Demikian juga Parikh (1996) mengkaji tentang dampak industri pada kehidupan dan ekonomi desa. Nasikun dan Parikh melihat bahwa sudah waktunya penduduk desa melakukan alih kerja di luar pertanian, mengingat lahan pertanian yang ada semakin sempit. Namun yang tampak bahwa tidak mudah melakukan hal ini.

Berbagai studi yang dilakukan tersebut sebagian besar memfokuskan pada kemiskinan dengan memperhatikan faktor penyebab serta upaya mengatasinya. Selain itu studi yang dilakukan tersebut lebih diorientasikan kepada bagaimana setiap gejala itu teramati secara empiris (tampak dalam realita). Studi yang dilakukan belum dikaitkan dengan pemaknaan terhadap bantuan atau program bantuan oleh penerima bantuan (melihat realitas simbolik).

Atas dasar inilah maka penelitian yang dilakukan melalui pendekatan mikro dengan menggunakan paradigma definisi sosial. Penelitian ini memfokuskan kajian pada tingkat kelompok dan individu, terutama dalam memaknakan bantuan (program pembangunan) yang ada, sehingga diharapkan dapat melahirkan konsep tentang makna bantuan peningkatan pendapatan bagi anggota kelompok masyarakat di desa.

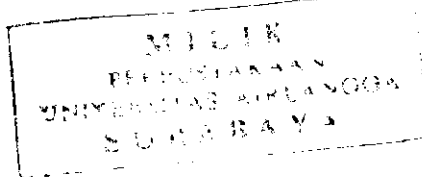
Di sinilah letak keaslian penelitian ini, karena bukan saja melihat makna terhadap bantuan peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin (desa), namun juga memfokus terhadap berbagai faktor yang melatar-belakangi pemberian makna terhadap bantuan peningkatan pendapatan khususnya dan pembangunan pada umumnya.

Bantuan peningkatan pendapatan (program pembangunan) menuntut adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi saat ini, bukan lagi masalah mau atau tidaknya mereka berpartisipasi tetapi sejauh mana mereka memperoleh manfaat bagi perbaikan kehidupan sosial ekonomi mereka (Soetrisno, 1991:12). Demikian juga penelitian Roesminingsih (1995) dan

Ariadi (1995) menyatakan bahwa banyak penerima bantuan menolak bantuan dengan alasan mereka tidak dapat secara langsung merasakan manfaat bantuan tersebut, karena pada umumnya bantuan yang diberikan masih memerlukan proses pengembangan. Penelitian tentang partisipasi maupun keswadayaan juga telah banyak dilakukan, namun penelitian ini pada umumnya baru mendeskripsikan bagaimana kondisi tersebut muncul atau tampak, belum sampai mengungkap apa yang berada dibalik perilaku yang tampak tersebut. Sebagai contoh penelitian Adjid (1985) membahas tentang pola partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan pertanian. Arfani (1987); Tony (1988) melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani dalam pertanian, baik tentang paca-usaha tani maupun konservasi tanah.

Azman (1987) juga melihat partisipasi tani khususnya dalam pengembangan KUD. Soetrisno (1988; 1991) mengupas tentang beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Tjeureng (1988) juga melihat partisipasi, namun lebih ditekankan pada upaya yang dilakukan pemerintah. Beberapa penelitian tersebut lebih banyak melihat pengaruh atau dampak dari suatu program bantuan, dengan tolok ukurnya partisipasi masyarakat.

Studi tentang partisipasi masyarakat (miskin) dalam hubungannya dengan proses pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) menunjukkan bahwa konsep yang menyertai kemiskinan yang disebut sebagai "*hakikat kemiskinan*" meliputi lemahnya nilai tukar hasil produksi, organisasi,



rendahnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas, akses hasil pembangunan, minimnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan, sederhananya teknologi yang dimiliki, adanya kesenjangan kaya-miskin, minimalnya kemampuan berpartisipasi dalam sistem pembangunan nasional serta lemahnya posisi tawar menawar (Ismawan 1992: 2).

Perubahan orientasi nilai budaya pada suatu masyarakat terjadi seiring dengan transformasi sosial budaya pada masyarakat tersebut. Transformasi sosial budaya disatu pihak dapat berarti proses perubahan atau pembaharuan struktur sosial, di pihak lain sebagai proses perubahan atau pembaharuan nilai (Alfian, 1986: vii).

Perubahan sosial sebagai tujuan pembangunan berpijak pada perubahan aspek perilaku individu, umum, tata nilai, struktur serta sistem sosial di mana individu melakukan fungsinya. Asumsi dasar gagasan ini adalah kegiatan atau program yang direncanakan dan dilaksanakan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manusia. Karenanya untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam era global apalagi beradaptasi dengan kehidupan pasca-industri diperlukan pemikiran yang kreatif dan kemampuan yang sempurna (Hage dan Powers, 1992: 18)

Modernisasi merupakan proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspeknya (Schoorl, 1988:1). Banyak terjadi pergeseran dalam kehidupan terutama mengenai peran, baik dalam kerja maupun dengan keluarga. Hal ini terjadi karena kehidupan dalam era pasca industri, semua



peralatan canggih telah dimiliki oleh setiap orang (keluarga) sehingga memungkinkan setiap orang berkomunikasi secara interpersonal.

Dalam kehidupan keluarga, semata-mata bukan kehadiran fisik orang tua, tetapi kualitas komunikasi dan pemanfaatan waktu secara tepat untuk berinteraksi dengan putra-putrinya dan anggota keluarga (Jerald dan Power, 1995: 197-205). Dinyatakan pula bahwa kontrol sosial baru, ditemukan dalam pemahaman secara interpersonal dan melalui komitmen bersama melalui pendekatan interaksi simbolik.

Meskipun diakui bahwa transformasi sosial di Indonesia (pedesaan) baru sampai tahap transisi yaitu tahapan antara tradisional dan modern. Perubahan struktur masyarakat tradisional merupakan akibat derasnya proses modernisasi dengan berbagai nilai atau teknologi yang ditawarkannya. Ciri utama yang ditampilkannya adalah semangat rasionalitas dan positivistis. Kepribadian yang *mobile*, derasnya penyebaran informasi, melalui teknologi canggih merupakan unsur penting dalam modernisasi.

Perkembangan komunikasi yang cepat, diperkirakan dapat meningkatkan proses perubahan atau pembaharuan suatu masyarakat secara bermakna. Komunikasi merupakan salah satu faktor amat penting dalam mentransformasikan masyarakat dari tradisional menuju masyarakat maju atau modern.

Diterima atau tidak salah satu efek pembangunan dengan masuknya modernisasi dan komersialisasi pertanian di pedesaan adalah adanya pergeseran nilai dalam masyarakat.

Rogers (1969) menggunakan *variable communication, literacy* dan *mass media exposure* untuk menerangkan modernisasi di kalangan petani. Sentuhan nilai baru telah memberikan efek stimulan daya intelektual masyarakat untuk bertindak lebih rasional, ekonomis, dan penuh pertimbangan dalam meminimalkan resiko.

Pergeseran nilai ini merupakan salah satu indikator terjadinya transformasi nilai dalam masyarakat, baik didorong oleh tuntutan ekonomi keluarga sehingga semakin rasional, maupun sebagai akibat masuknya nilai baru. Oleh karena itu perubahan struktural yang terjadi dalam suatu sistem sosial merupakan perubahan di dalam kultur normatif sistem sosial yang bersangkutan (Lauer, 1989: 113).

Portes (1983: 15-44) menyatakan .... *in particular made a compelling case for rationality - the dominant characteristic of modern man - as a functional adaptation to the overwhelming stimulation and complexities of metropolitan life.* Ini berarti bahwa kehidupan modern dituntut menggunakan rasio untuk melakukan adaptasi dalam kehidupan metropolitan.

Revolusi informasi atau komunikasi membawa implikasi jauh dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk sosial-budaya. Masyarakat maju saat ini sedang dilanda suasana transformasi baru atau gelombang ke tiga (Toeffler, 1990), menyebabkan elektronik atau komputer memainkan peran amat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan itu terjadi pula perubahan sistem pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, perekonomian, pertahanan keamanan. Apa yang terjadi di dunia maju ini berdampak pada seluruh negara di dunia termasuk negara yang sedang berkembang atau negara

dunia ke tiga, termasuk di desa penelitian.

Salah satu perwujudan peran elektronik antara lain listrik masuk desa sejak tahun 1994 dan diikuti dengan dimilikinya pesawat TV oleh sejumlah warga. Melalui media TV ini sedikit banyak telah berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

#### 1.5.4. Kajian Tentang Makna Dalam Kehidupan Manusia

Makna dapat diartikan sebagai pengertian yang diberikan kepada sesuatu (KBBI, 1989: 548). Makna dapat diperoleh seseorang dengan memeriksa kehidupan batiniah individu melalui pengalamannya mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana yang terjadi dalam "arus kesadaran". Oleh karenanya makna diperoleh dari hasil interaksi dengan lingkungan sosialnya. Kesadaran memiliki dua aspek yang saling melengkapi, yaitu "proses sadar" dan "objek dari kesadaran itu sendiri". Kesadaran erat hubungannya dengan *maksud (intention)* orangnya. Dengan hadirnya *maksud* dalam kesadaran mereka, maka *kesadaran* selalu memberikan *makna* terhadap objek yang dihadapi (Ahimsa, 1985: 111).

Makna terkait erat dengan persepsi, karena persepsi itu sendiri merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rachmat, 1989: 57). Persepsi merupakan pemberian makna pada stimuli inderawi. Ada dua hal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Makna tidak berakar pada proses mental tetapi dari proses interaksi (Ritzer, 1988:

182-183), sehingga makna tidak dilihat dari bagaimana mental seseorang menciptakan makna dan simbol, tetapi bagaimana seseorang belajar selama berinteraksi pada umumnya dan melakukan sosialisasi khususnya (Ritzer, 1988: 183). Seseorang belajar simbol maupun makna dalam interaksi sosial, dan menggunakannya untuk mengkomunikasikan sesuatu tentang dirinya sendiri, dengan menggunakan bahasa sebagai sistem simbol.

Di dalam penelitian ini makna tidak dilihat semata-mata dari proses mental yang terkait erat dengan kajian psikologi, namun dilihat dari proses pemberian interpretasi segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan aktor. Karena aktor berperilaku memilih, memeriksa, berfikir, mengelompokkan dan mentransformir makna dalam hubungannya dengan situasi di mana dia ditempatkan dan arah tindakannya. Interpretasi tidak hanya dianggap sebagai penerapan makna yang telah ditetapkan, tetapi sebagai suatu proses pembentukan makna baru (Blumer, 1969:5).

Dalam rangka mengindikasikan diri (*self indication*) seseorang menilai, memberi makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna yang dimiliki. Proses ini terjadi dalam konteks sosial dengan melakukan antisipasi tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana ia menafsirkan tindakan tersebut, karena tindakan itu sendiri terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut.

Tindakan tersebut dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota kelompok sebagai "tindakan bersama".

Proses kebersamaan ini dapat terjadi karena dalam memandang suatu gejala yang dialami, bisa dialami oleh orang lain sebagaimana dia mengalaminya. Dia beranggapan bahwa makna terhadap suatu gejala, sama dengan makna yang diberikan oleh lainnya. Ini yang disebut *intersubjektivitas* dunia kehidupan (Phillipson, 1972:123-126).

Tindakan (action) ditentukan oleh makna dari pengalaman yang dilembagakan (Schutz & Luckmann, 1973:229). Ini menunjukkan bahwa tindakan seseorang tergantung pada "tipifikasi" (proses abstraksi dan formalisasi untuk mengklasifikasikan suatu objek), tipifikasi diserap melalui bahasa dan pengetahuan yang terlembaga.

Pemahaman terhadap tindakan manusia dilakukan dengan pendekatan *verstehen*. Melalui pendekatan ini seseorang tidak hanya sekedar melakukan introspeksi, tetapi juga melakukan *empati*, yaitu dengan menempatkan diri dalam kerangka berfikir orang lain yang perilakunya akan dijelaskan. Untuk memahami perilaku orang lain perlu memperhitungkan elemen perilaku yang bersifat subjektif, sangat penting untuk menghindari bias dalam introspeksi tersebut. Menurut Weber (Parsons, 1964:88) Individu yang bertindak, tindakannya itu hanya dapat dimengerti menurut arti subjektifnya, sehingga tindakan selalu berada dalam kesadaran, dianalisis menurut maksud, motif, dan perasaan aktor.

Peneliti menggunakan makna tindakan dari sudut pandang Weber, karena pada dasarnya peneliti melihat bahwa tindakan seseorang (penerima bantuan) tidak lepas dari lingkungannya, sehingga tindakan seseorang tersebut dapat dimaknakan sebagai "tindakan sosial" mengingat tindakan tersebut menuntut seseorang memberi makna untuk tingkah-lakunya menurut pengalaman subjektif orang lain, yaitu berkenaan dengan maksud, motif, atau perasaan orang lain.

Makna tindakan ini berbeda dengan yang digunakan oleh Gadamer, yang lebih menekankan pada makna pada level individu yang terlepas dari lingkungannya. Pendekatan Gadamer ini lebih tepat dilakukan terhadap teks terutama dalam memahami makna dari suatu teks. Gadamer (1975:264) mempertimbangkan bahwa kesungguhan penulis dan makna tekstual tidak selalu relevan. Terutama bagi para ahli sejarah dalam melakukan penemuan baru. Makna riil dari suatu teks seperti yang dibicarakan interpreter kemungkinan tidak tergantung pada penulis dan tulisan mereka. Sebagian lagi ditentukan oleh situasi sejarah (latar belakang) interpreter dan totalitas sejarah yang diperdebatkan.

Gadamer melihat bahwa pengalaman manusia selalu merupakan sejarah, pengalaman baru merupakan hasil pengalaman masa lampau dan pengalaman baru dibutuhkan untuk membangun pengalaman yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa makna secara mutlak diambil dari sumber tradisi atau sejarah. Makna memiliki hubungan signifikan antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.

Selama ini kajian sosiologi atau dunia sosial lebih banyak melihat hubungan sebab akibat. Dunia sosial sehari-hari sebenarnya merupakan topik yang menarik dari kajian sosiologi, tetapi jarang dilakukan kajian tentang topik dunia sosial itu sendiri. Turner (1980), Slarwck dan Anderson (1986), menyatakan bahwa sosiolog biasanya melihat dunia sosial tidak sebagai topik tetapi sebagai sumber untuk mempelajari tentang realitas yang tersembunyi seperti norma, nilai, sikap, malahan sumber pembicaraan tentang cara-cara kehidupan sosial sebagai suatu topik (Ritzer, 1988: 241). Mattew Speier (1970), menyatakan bahwa ketika sosiolog melihat tentang sosialisasi anak, mereka tidak melihatnya sebagai proses, melainkan sebagai tahapan dari proses itu. Sosialisasi sebenarnya merupakan hasil interaksi dari berbagai kemampuan (Speier, 1970:189).

Pendekatan yang dilakukan Giddens dalam mendebat positivisme dengan menyajikan tiga urutan yang dilakukannya dalam memahami tentang makna yaitu: (1) *hermeneutics*, (2) *phenomenology*, dan (3) *analytic philosophy* (Preston, 1980:9). Dengan memperhatikan pemahaman, terhadap kehidupan sehari-hari secara detail akibat interaksi, serta memanfaatkan bahasa untuk menjelaskan kehidupan sosial, Giddens menekankan bahwa manusia sebenarnya membuat kehidupan dan sejarah mereka sendiri, karena manusia berinteraksi dalam dunia sosial.

Untuk dapat memberi penjelasan yang lebih luas tentang kehidupan manusia, ada empat tahap yang perlu dipahami

yaitu: (1) mengakui bahwa bahasa sama dengan realitas, (2) realitas selalu berubah, (3) proses pembuatan struktur, dan idea tentang hakikat ganda dari struktur merupakan produk dan dasar dari interaksi, (4) bahasa sebagai dasar dan sarana untuk merefleksikan tindakan yang tidak sama dengan kekuatan di dalam tindakan itu sendiri. Analogi ini rupanya digunakan Giddens untuk memperlengkapi makna dalam teori sosiologi pada umumnya mengenai konstruksi dunia sosial.

Banyak peneliti yang melihat suatu fenomena melalui pendekatan *verstehen*, untuk memahami fenomena tersebut, seperti Sobary (1995) melihat kesalehan dan tingkah laku ekonomi. Sobary bermaksud menjelaskan pola kehidupan desa setelah mundurnya perekonomian berdasarkan pertanian dan munculnya kegiatan perdagangan. Sobary menggunakan teori Weber dalam *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, untuk menguraikan perilaku agama dan ekonomi. Sobary menyatakan bahwa konsepsi Weber tampaknya tidak berlaku di Suralaya, karena perbedaan struktural. Dalam penelitian ini Sobary menggunakan penelitian terlibat (*observasi partisipasi*), dengan mengetahui pengalaman informan mengenai kehidupan saat itu.

Peneliti lain adalah Mubyarto (1993), dan kawan-kawan, melakukan penelitian tentang etos kerja dan kohesi sosial di Busa Tenggara Timur. Meskipun penelitian ini mengambil kasus pada empat etnik, dengan melakukan observasi partisipasi, namun lebih banyak mendeskripsikan fenomena yang teramati. Penelitian ini mendukung tesis Weber tentang *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*.



Ahimsa (1985) meneliti rekonstruksi dari sepotong kehidupan di bawah jembatan *Gondolayu* di Yogyakarta. Ahimsa bertujuan memerikan kehidupan gelandangan di bawah jembatan *Gondolayu*, dengan berbagai macam pekerjaan yang digeluti.

Penelitian tentang makna, pada umumnya lebih banyak dilakukan dalam bidang pendidikan (Blase, 1980; Bogdan & Biklen, 1977; Bruni, 1980); dalam bidang psikologi (Aves & Byrne, 1976; Allen & Levine, 1971; Berkovitz & Aliotto, 1973; Griffitt & Jackson, 1970);

Belum banyak diketahui peneliti lain yang melihat makna terhadap pembangunan. Karena kajian tentang pembangunan atau bantuan, lebih banyak didekati melalui penelitian kuantitatif. Husin Mohamad (1992) melihat dampak dana bantuan desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa di kabupaten Pidie. Dia melakukan penelitian di 10 desa, penentuan desa menggunakan teknik random sampling dengan 100 orang responden. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif kuantitatif. Yacob Hasbi (1993) melihat pemanfaatan uang bantuan desa bagi peningkatan pembangunan masyarakat pendekatan yang digunakan tidak jauh berbeda dengan penelitian Husin. Demikian pula penelitian Landawe Muhamad (1994) tentang evaluasi implementasi bantuan pembangunan desa. Dia menggunakan uji "Kai Kwadrat", untuk menganalisis data, dan masih banyak lagi penelitian tentang pedesaan yang menggunakan pendekatan kuantitatif seperti tersaji pada tabel 2 berikut.

Untuk lebih jelasnya penelitian yang telah ada dapat digambarkan dalam peta teoretik sebagai berikut:

Tabel 1.1.  
Kedudukan Makna Bantuan dalam Kerangka Teori Sosiologi Pembangunan khususnya Pembangunan Desa

Pakar/ peneliti	Tempat dan Tahun Penelitian	Bidang Kajian Pembangunan				
		Pemerintah/agen	Masyarakat/aktor	Organisasi	Jenis Program	Strategi/pendk
Adjid, Dudung A. Ali, Saleh Amaludin Moh. Ampang, Yakob Arfani Azman Sjamsidar Atmoko Tjipto Barudi Rudin Baswedan Rasyid Djaenuri, M. Aries Goni Jourdan Collier William dkk Tony Fredian Tjeureng Baharu din Chambers, Robert Korten dan Syah- rir Alhabsyi, Taber Yacob, Hasbi Husin, Muhamad Imron, Masyhuri Sihombing Marlon Parikh Alka dan Erik Thornbecke Mubyarto, dkk Grabowski Ri- chard Mubyarto, dkk. Ariadi, Endang, dkk Roesminingsih, dkk. Sobary Mohamad Penny Roesminingsih, MV	Jabar/1985 Uj. Pand/1985 Jateng/1987 Sulsel/1984 Lampng/1987 Jabar /1987 Kalbar/1987 Uj. Pand/1985 Yogya/1986 Jabar/1989 Maluku/1984 Jawa/1996 Jabar /1988 Jabar /1988 1983 1988 JaTim /1992 Pidie/1993 Pidie/1992 Maluku Teng 1992 Yogya /1992 Boriya, Aure palle/1992 Jateng/1994 1995 NTT /1991 Jatim/1993 Jatim/1994 Jabar/1991 Jateng dan Sumut/1990 Jawa Timur 1999		Partisipasi Masy Partisipasi Masy Kemiskinan & Polaris Pendapatan petani Partisipasi Partisipasi Persepsi Tenaga kerja Partisipasi Partisipasi Partisipasi petani Partisipasi petani	Kelompok Tani Kelompok Tani Kelompok Tani	Prg. Penghijauan KUD PIR Usaha Tani Ko- mersial Pembangunan dg Arus Balik Berorientasi Kerakyatan Inpres Bantuan Desa Uang Bantuan Desa Dampak Bantuan Desa Dampak Bantuan Industrialisa- si Komersialisasi produksi non- pertanian, Ino vasi pertanian Lingkungan Hi- dup Industri Rumah Tangga Makna Bantuan Peningkatan Pendapatan	Individual

TABEL 1.2.  
KEDUDUKAN PENELITIAN DILIHAT DARI TEORI PEMBANGUNAN DAN PARADIGMA ILMU SOSIAL

PARADIGMA ILMU SOSIAL	KAJIAN PEMBANGUNAN DESA				
	PEMERINTAH	MASYARAKAT	ORGANISASI	BENTUK PROGRAM	STRATEGI/PENDEKATAN
FAKTA SOSIAL	Djaenuri M. Aries, 1989 Goni, Jourdan, 1984 Tjeureng, Baharudin, 1988	Adjid, Dudung Abdul, 1985 Amaludin, Mohamad, 1987 Barudi Rudin, 1986 Baswedan, Rasyid, 1986 Prayitno, 1987 Mubyarto, 1994 Imron, Masyhuri, 1992	Arfani, 1987 Azman, Sjamsidar, 1987	Ali Saleh, 1986 Atmoko Tjipto, 1987 Grabowski, 1995 Alhabsji, Taher, 1992 Parikh, Alka, 1996 Hussin, Muhammad, 1992 Yacob Hasbi, 1993 Sihombing Marlon, 1992	Chambers, 1983 Collier, William, dkk, 1996 Korten dan Syahrir, 1987
DEFINISI SOSIAL		Mubyarto, 1991 Sobari, 1986 Sobari, 1991		Roesminingsih, MV, 1999	Roesminingsih, MV., 1999
PERILAKU SOSIAL			David Penny, 1990 Tony Ferdian, 1988	Ariadi, Endang, 93-95 Roesminingsih, MV., 94-96	Chambers, 1996

### 1.6. Paradigma Yang Digunakan

Penelitian ini berusaha menemukan makna dari tindakan (menerima atau menolak) anggota masyarakat desa (penerima bantuan) terhadap bantuan yang diberikan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial, dengan alasan bahwa studi ini berusaha memahami makna subjektif yang diberikan individu terhadap tindakan mereka yaitu terhadap bantuan yang diterima.

Pokok persoalan penelitian ini adalah proses pendefinisian sosial dan akibat suatu aksi dan interaksi sosial (Ritzer, 1992: 104) dalam kaitannya dengan bantuan peningkatan pendapatan.

Paradigma ini melihat masyarakat beserta strukturnya sebagai suatu konstruksi sosial yang dihasilkan oleh proses historis interaksi simbolik antar aktor sosial. Struktur sosial atau sistem sosial bukanlah realitas "objektif" dan eksternal yang "mengatasi" individu dan tindakan manusia, melainkan hasil proses interaksi. Thesis utama paradigma ini adalah "tindakan yang penuh arti" dari individu atau mempunyai makna, arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.

Weber (1961) menyatakan bahwa tindakan tidak sama dengan gerakan. Gerakan kadangkala tidak memerlukan kesadaran sehingga sering kali mirip tingkah laku (behaviour) yang hanya didasarkan pada stimulus respon,

namun tindakan selalu berada dalam kesadaran akan apa yang sedang dilakukannya yang dapat dianalisis menurut maksud, motif, maupun perasaan sebagaimana mereka alami. Tindakan sosial menuntut seseorang memberikan makna tingkah lakunya menurut pengalaman subjektif orang lain.

Pemahaman terhadap tindakan ini tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui simbol yang dipakai pelaku untuk melukiskan tingkah-lakunya sendiri. Bila dikaji lebih jauh dapat diketahui bahwa sebenarnya teori tindakan tersebut bergerak pada tingkat pemikiran dan tindakan individu.

Atas dasar ini untuk memahami suatu fenomena sosial atau tindakan orang lain harus dicari pada dunia subjektif individu atau aktor yang bertindak dan berinteraksi itu sendiri, sehingga pusat perhatiannya lebih tertuju pada analisis masalah berskala mikro (*microscopic*), serta mementingkan makna dan perspektif para aktor yang bertindak itu sendiri.

Karena lebih menekankan pada pemahaman maka penerapan *pendekatan interaksi simbolik* di dalam penelitian ini sangat diperlukan. Dalam penggunaan interaksi simbolik tindakan seseorang dapat dipelajari melalui interpretasi untuk mengetahui sesuatu yang melatarbelakangi tindakan tersebut dari sudut aktor.

Pendekatan ini merupakan sisi lain yang melihat individu sebagai produk yang ditentukan oleh masyarakat dalam pandangan "struktural fungsional" (Merton dalam Poloma, 1987:33-34). Meskipun tindakan individu ini tidak

lepas dengan keberadaannya dalam sistem sosial, namun sistem sosial (masyarakat) dilihatnya sebagai produk interaksi bersama para anggota masyarakat. Interaksi dilakukan dengan bahasa sebagai satu-satunya simbol yang terpenting dan isyarat (Poloma, 1987: 261; Ahimsa, 1985:116).

Proses interpretasi meliputi dua tahap yaitu (1) aktor menyatakan kepada dirinya sendiri tentang sesuatu, ia beraksi terhadap sesuatu tersebut mengandung suatu makna. Proses ini merupakan proses psikologis, dalam arti seseorang melakukan komunikasi dengan dirinya sendiri. (2) hasil proses komunikasi dengan dirinya sendiri, kemudian diinterpretasikan menjadi bahan yang bermakna. Aktor memilih, memeriksa, menanggapi, dan mentransformasi makna ke dalam situasi di mana ia berada dan akan mengarahkannya untuk bertindak (Ritzer, 1988: 185).

Asumsi dasar penggunaan interaksi simbolik adalah bahwa kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individual dan antar kelompok menggunakan simbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Tindakan yang terjadi pada diri seseorang bukan merupakan stimulus respon melainkan diantarai (ada variabel antara) oleh adanya interpretasi terhadap stimulus lebih dahulu. Makna atau *meaning* diturunkan melalui interpretasi sosial aktor dalam kebersamaan (Ritzer, 1990: 126). Interaksi simbolik digunakan untuk memahami makna masyarakat tentang bantuan dengan melihat ungkapan, simbol dalam berperilaku pada waktu merespon pernyataan yang terkait dengan bantuan.

Selain itu juga di dasari adanya premis yang menyatakan bahwa (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, (2) makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, (3) makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung (Blummer, 1969:2). Dengan demikian mungkin terjadi perubahan pemaknaan terhadap sesuatu bagi seseorang akibat interaksi dan komunikasi yang terjadi.

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan *Etnometodologi*. Istilah *Etnometodologi* diciptakan oleh Harold Garfinkel untuk menjelaskan sebuah komitmen studi empiris tentang penalaran praktis, tentang bagaimana orang memahami apa yang terjadi pada mereka dalam interaksi sosial, khususnya dalam percakapan satu sama lain.

Garfinkel menyatakan bahwa etnometodologi merupakan anggota metode untuk membuat pemahaman terhadap dunia sosial mereka. Sehingga pendekatan ini selalu mempersoalkan hal-hal yang biasanya tidak dianggap sebagai persoalan oleh orang-orang dalam kehidupan mereka sehari-hari, atau yang dianggap sudah terjadi sebagaimana adanya yang membuat mereka dapat memahami dunia mereka.

Etnometodologi ditujukan pada proses interaksi sosial serta bagaimana pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya bisa berinteraksi dan memahami proses itu sendiri, oleh karena itu etnometodologi memperhatikan *bahasa atau percakapan* yang ada diantara para pelaku. Bahasa merupakan alat untuk

membangun kenyataan sosial dan sarana untuk mengkomunikasikan kenyataan sosial serta makna yang dimiliki oleh para pelaku yang terlibat dalam suatu interaksi (Phillipson, 1972:146-147). Bahasa yang diperhatikan oleh peneliti dalam menggunakan etnometodologi adalah *bahasa alami* atau percakapan alami yang ada dalam *setting* tertentu. Percakapan tersebut kemudian dianalisis.

Dua prosedur yang dapat diterima para ahli etnometodologi, tetapi jarang sekali dipakai dalam sosiologi adalah (1) Observasi partisipasi dan (2) eksperimen semi lapangan.

Etnometodologi menekankan pada ekspresi atau pernyataan dari si pelaku *indeksikal* sifatnya, yaitu tergantung pada konteks, oleh karena itu penelitian atas bahasa tidak dapat dikerjakan seperti ahli bahasa (percakapan), tetapi dalam konteks alami (natural), dan si peneliti memperhatikan konteks di mana pembicaraan tersebut berlangsung.

Prinsip yang dapat digunakan untuk memahami ekspresi si pelaku antara lain *et cetera*, yaitu dengan tidak menyatakan hal-hal lain atau arti tertentu dalam percakapan, untuk ini metode interview dan partisipasi observasi sangat diperlukan. Selain itu dengan asumsi etnometodologi itu sendiri, bahwa dalam suatu percakapan terjadi interaksi sosial, si pembicara beranggapan bahwa orang yang diajak bicara mengetahui apa yang dimaksud. Hal ini selaras dengan pendapat Schutz bahwa *theoretical attitude* tidak mendukung terjadinya interaksi yang lancar.



Singkatnya yang menjadi masalah etnometodologi adalah bagaimana atau dengan metode apa orang akan menangkap dunia mereka sehari-hari. Berbagai ungkapan indeksikal merupakan rancangan mengenai ruang dan waktu kejadian yang dapat berfungsi sebagai indikan untuk menempatkan apa yang terjadi dalam dunia realitas.

Referensi waktu yang persis (sesuai dengan kenyataan), dapat dianggap sebagai ungkapan *objektif*. Ungkapan *objektif* dan *indeksikal* akan mencerminkan realitas teoritis dan praktis. Di mana ungkapan indeksikal merupakan ungkapan kegiatan praktis sehari-hari dan ungkapan objektif merupakan mode bagi dunia ilmiah. Jadi melalui bahasa khusus yang menggunakan ungkapan indeksikal manusia mampu mengungkapkan keteraturan yang mereka buat terhadap dunia sehari-hari.

Etnometodologi memiliki kemiripan dengan Interaksi Simbolis (Blumer), Dramaturgi (Goffman), Fenomenologi (Schutz). Namun etnometodologi lebih tertarik dengan masalah pemahaman yang tidak usah diucapkan. Etnometodologi juga melihat bahwa individu lebih berfungsi sebagai unit analisa dari pada organisasi atau sistem sosial. Dalam proses interaksi, individu yang memberi kesan organisasi. Dengan demikian dipertanyakan seluruh isu aturan sosial yang objektif atau struktur sosial sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh teori behaviorisme, pertukaran maupun dramaturgi, tetapi lebih banyak ditelusuri melalui interaksi-simbolik.

Hasil pendekatan ini adalah bahwa kebermaknaan interaksi sosial tak dapat dilihat hanya sebagai sesuatu yang diberikan dari luar sebuah interaksi khusus. Semua yang dapat diandaikan dalam situasi di mana orang yang bersangkutan akan berusaha memahami apa yang sedang terjadi dalam prasangka dan kepentingan mereka sendiri.

Dalam memahami bagaimanakah seseorang memberikan makna terhadap sesuatu (batuan peningkatan pendapatan), pengamat (peneliti) menetapkan atau memutuskan dalam situasi macam apakah (indeksikal) informan tersebut berada, apakah masalahnya dan bagaimana ia menyikapi bantuan yang diterimanya. Sebagai misal informan berkedudukan sebagai apa (pamong desa, warga biasa, petani pemilik tanah, petani tanpa tanah, buruh, saudara pamong), kemudian dalam situasi macam apa informan itu berada. Sebagai contoh kapan dan di mana pembicaraan itu berlangsung, apa yang dibicarakan apakah mengenai proses pemberian bantuan, penentuan kelompok sasaran atau manfaat.

Percakapan mereka tentang bantuan baik yang dinyatakan dalam forum resmi, maupun forum tidak resmi, merupakan suatu bahan kajian yang sangat penting, terutama untuk mengungkap bagaimana mereka memberikan makna terhadap bantuan tersebut, serta melihat faktor apa yang menurut mereka melatarbelakangi pembentukan makna tersebut. Apakah informan pernah gagal dalam memanfaatkan bantuan yang diterima, apakah dia selalu memperoleh keuntungan, apakah dalam menerima ada unsur paksaan.

Selain itu perilaku dalam memperlakukan bantuan yang telah diterimanya seperti cara merawat, mencarikan rumput, memandikan ternak, membersihkan kandang juga menjadi fokus penelitian, semua diperhatikan dalam menerapkan pendekatan ini, sehingga makna yang diperoleh menggambarkan nilai terhadap bantuan yang pemberian nilai tersebut baik didasarkan atas pengalaman maupun hasil interaksi dengan orang lain atau lingkungan sosial.

# BAB 2

## BAB 2

### PROSES PENELITIAN

#### 2.1. Metoda Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan dengan mendeskripsikan secara mendalam segala sesuatu yang berkenaan dengan fenomena penelitian. Alasan digunakannya pendekatan ini karena melalui penelitian juga diperoleh segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, khususnya perilaku (tindakan) individu dalam suatu masyarakat (masyarakat miskin di pedesaan) dalam hal menerima, memanfaatkan, serta memaknakan bantuan yang diterima. Selain itu juga karena sifatnya membangun konsep, kategori, hipotesis, dan teori berdasarkan data lapangan, di samping juga memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh (*whole*), dan tuntas (*exhaustive*) mengenai fenomena yang ada.

Penelitian ini difokuskan pada makna pembangunan, khususnya bantuan peningkatan pendapatan, dari anggota masyarakat desa, sebagai penerima bantuan. Pembangunan atau khususnya bantuan peningkatan pendapatan dimaknakan sesuai dengan kondisi yang terjadi yaitu dalam proses transformasi sosial. Untuk mencermati kajian ini, peneliti memilih tiga macam isu atau kasus bantuan penting di desa penelitian yaitu bantuan dari dinas peternakan, bantuan IDT, bantuan

dari Perguruan Tinggi. Dengan mengkaji ketiga kasus penting tersebut diharapkan dapat dideskripsikan pemaknaan bantuan peningkatan pendapatan (pembangunan) oleh masyarakat desa (penerima bantuan).

Mengingat penelitian lapangan tentang fenomena kemiskinan dan pemaknaan pembangunan di desa Bronjong merupakan suatu studi kasus, maka berbagai aspek yang diamati sangat terikat pada kondisi wilayah (*geographical dimension*), tipologi masyarakat dan kebudayaan (*cultural bound*), serta kelembagaan yang ada.

Rancangan penelitian bersifat luwes *Emergent Design* (Lincoln dan Guba, 1985: 41), terbuka untuk disesuaikan dengan data atau fenomena di "lapangan", sehingga rancangan penelitian dibuat tidak sekali selesai, namun selalu berkembang sesuai fenomena yang dijumpai. Ini dapat dicontohkan bahwa untuk sampai pada siap melakukan penelitian secara intensif peneliti telah merubah desain lebih dari lima kali. Perubahan tersebut di dasarkan pada informasi atau fenomena yang diperoleh selama tahap penjajagan, dan memang untuk membuat usulan penelitian yang siap dilaksanakan melalui berbagai penyempurnaan terutama berkaitan dengan fokus penelitian itu sendiri.

Unit analisis penelitian ini adalah makna bantuan peningkatan pendapatan yang dikaitkan dengan keberadaan penerima bantuan (individu) dalam suatu kelompok atau organisasi, sehingga unit analisis penelitian ini dilakukan pada tingkat individu (*level of individual*).

Untuk dapat mengungkap proses penelitian yang telah dilakukan, pada bagian ini (bab 2) diuraikan secara runtut tahapan penelitian antara lain: penetapan lokasi penelitian, fokus penelitian, memasuki kancah penelitian, menjalin hubungan dengan subjek, mengumpulkan data dan menganalisis data, yang kesemuanya mengarah pada proses penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

## 2.2. Penetapan Lokasi Penelitian

Kecamatan Bluluk sebelum tahun 1994 merupakan kecamatan paling ujung Barat Daya dari Kabupaten Lamongan, namun sejak tahun 1994 kecamatan Bluluk yang semula terdiri atas 18 desa dipecah menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bluluk (9 desa) dan Kecamatan Sukorame (9 desa). Dari 9 desa di kecamatan Bluluk 3 desa diantaranya tergolong desa miskin, sehingga ketiga desa tersebut sering menjadi objek pemberian bantuan. Ketiga desa tersebut adalah Desa Bronjong, Primpén, dan Kuwurejo.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan desa Bronjong (salah satu desa miskin), sebagai lokasi penelitian. Alasan menentukan desa Bronjong sebagai desa penelitian karena memiliki beberapa keunikan antara lain: (1) desa ini meskipun terletak tidak jauh (1,5 km) dari kota kecamatan atau 54,5 km dari kota kabupaten, namun dalam penilaian termasuk desa miskin; (2) berada di wilayah hutan (212 Ha); (3) dari 4,5 km panjang jalan desa, hanya 1 km yang dapat

dilalui roda empat, sehingga sulit untuk mengadakan komunikasi antar dusun; (4) dari 206 Ha luas sawah yang terdapat di desa, 196 Ha merupakan sawah tadah hujan, dan 10 Ha sawah dengan irigasi sederhana, sehingga padi hanya dapat ditanam satu kali setiap tahunnya, selebihnya tanah (sawah) ditanam palawija, jagung, kedelai dan tembakau, bahkan banyak lahan yang dibiarkan *bero* (kosong); (5) Listrik masuk desa sejak tahun 1995, namun jumlah pemilik televisi pada awal tahun 1997 hanya 23 orang.

Kondisi ini berbeda dengan dua desa miskin lainnya, karena relatif masih mudah dijangkau oleh kendaraan roda empat, selain itu juga tidak berada dalam wilayah hutan, serta potensi pertanian lebih baik. Oleh karena itu desa lain relatif komunikasi dengan dunia luar lebih mudah.

Selain ciri tersebut, penetapan lokasi penelitian ini sebenarnya juga dilandasi oleh hasil penelitian yang telah diadakan yaitu *The Development of the Educational Treatment for Minimizing Drop Out Rate and Repeaters and Maximizing the Transition Rate from Primary School to Junior Secondary School*, oleh IKIP Surabaya yang bekerjasama dengan KNIU dan Balitbang Dikbud. Di samping penelitian lain tentang "Pengembangan Paket Pendidikan Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan Peran Wanita Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Program PKK di Pedesaan", oleh Ariadi dan kawan-kawan, serta penelitian tentang "Pengembangan Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Industri Rumah Tangga dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan di Pedesaan", oleh Roesminingsih dan kawan-kawan.



Hasil ketiga penelitian tersebut, menunjukkan bahwa banyak perlakuan (*treatment*) yang diberikan (bantuan peningkatan pendapatan) kepada masyarakat desa mengalami kegagalan (modal habis, alat kerja terbengkalai, ruang kerja kosong, modal ditolak), meskipun ada sebagian program bantuan yang berhasil dimanfaatkan oleh penerima bantuan, namun hasilnya belum optimal. Perbedaan dalam menyikapi bantuan atau perlakuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat inilah telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Proses ini sebenarnya juga merupakan tahap penjajagan yang telah dilakukan peneliti sebelum menyusun usulan penelitian untuk disertasi ini. Kegiatan penjajagan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan penelitian lain, yang telah dilakukan sejak tahun 1993/1994 s.d 1996/1997 di lokasi yang sama. Penelitian untuk disertasi ini sendiri dilakukan secara intensif sejak tahun 1995 hingga 1997.

Dari penelitian sebelumnya, peneliti mengamati bahwa kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan dengan memberikan berbagai perlakuan seperti *demoplot* ayam buras, pemanfaatan lahan pekarangan, keterampilan bubut kayu dan anyaman, keterampilan menyungging (membuat kerajinan kulit), semuanya tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Padahal dana yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut tidak sedikit. Sebagian kecil sasaran (penerima bantuan), memang ada yang memanfaatkan dengan baik (terbukti usahanya berkembang), tetapi sebagian besar lainnya, gagal dan bahkan menolak dengan mengembalikan bantuan yang diberikan.

Dengan melihat fenomena tersebut untuk sementara peneliti berasumsi, bahwa penerima bantuan memiliki variasi dalam memberikan makna (arti) terhadap bantuan yang diterimanya, sehingga berdampak pada cara penerima bantuan memperlakukan bantuan yang diterimanya.

### 2.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini mementingkan makna, proses, konteks, dan perspektif warga desa yang bertindak sebagai penerima bantuan terhadap bantuan (peningkatan pendapatan). Artinya dalam penelitian ini lebih banyak mengungkap tentang makna, serta simbol di balik realitas yang ada dari informan tentang bantuan peningkatan pendapatan.

Untuk dapat mengungkap makna bantuan peningkatan pendapatan, peneliti mengidentifikasi beberapa kategori penelitian yang telah ditemukan dalam tahap awal penelitian (tahap jelajah) yang telah dilakukan pada tahun 1995.

Kategori tersebut yang meliputi: (1) Pelaksanaan program bantuan peningkatan pendapatan (program pembangunan). Kategori ini meliputi sub kategori yaitu: (a) asal bantuan kepada masyarakat (miskin); (b) latar belakang (alasan) pemberian bantuan; (c) tujuan pemberian bantuan dilihat dari sisi si pemberi bantuan (aspek ekonomi, sosial, budaya, politik); (d) prosedur pemberian bantuan; (e) dasar pertimbangan dalam penentuan kelompok sasaran; (f) jenis bantuan yang diberikan; dan (g) konsekuensi pemberian bantuan.

(2) Kemampuan pasar/ekonomi yang menunjang pemanfaatan bantuan. Kategori ini membahas tentang: (a) banyaknya produk yang dijual dan dibeli anggota masyarakat desa terutama yang berkaitan dengan hasil produksi dari pengelolaan bantuan peningkatan pendapatan; (b) keberadaan pasar di sekitar tempat penelitian terutama pasar dalam arti fisik; (c) informasi tentang pasar yang diperoleh, yang dalam hal ini informasi mengenai harga dan tempat untuk menjual hasil pengelolaan bantuan.

(3) Karakteristik keluarga penerima bantuan meliputi: (a) Karakteristik Keluarga meliputi: (a.1) besar keluarga (jumlah tanggungan dalam setiap keluarga); (a.2) komposisi keluarga; (a.3) besarnya beban keluarga; (a.4) kontribusi hasil terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga (terpenuhi tidaknya kebutuhan keluarga dengan mengandalkan hasil pemanfaatan bantuan); (a.5) luas pemilikan dan tingkat kesuburan tanah; (a.6) tingkat pendidikan; dan (a.7) pengalaman dalam mengelola bantuan. (b) tingkat dan pemenuhan kebutuhan, meliputi: (b.1) tantangan dan tingkat kebutuhan yang ingin dipenuhi; (b.2) besarnya penghasilan dari bekerja, sub kategori ini dapat digambarkan dari kepuasan capaian (terpenuhinya) kebutuhan hidup, konsekuensi terhadap kerja dapat dilihat kesungguhan.

(4) Organisasi meliputi: (a) keterlibatan aktor (penerima bantuan peningkatan pendapatan) dalam aktivitas organisasi (kelompok); (b) kedudukan penerima bantuan dalam organisasi (kelompok); (c) hubungan antara penerima bantuan

dengan pengurus organisasi (kelompok); (d) interaksi penerima bantuan dengan seluruh anggota kelompok; (e) keterlibatan pamong desa dalam pembentukan organisasi.

Kategorisasi tersebut ditemukan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap subjek penelitian dan informan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan program bantuan peningkatan pendapatan.

#### 2.4. Memasuki Kancah Penelitian

Proses memasuki kancah penelitian didasarkan atas pertimbangan: (1) mencari, memilih dan menetapkan lokasi penelitian sesuai dengan substansi penelitian yaitu bantuan peningkatan pendapatan (pembangunan); (2) lokasi penelitian mampu menyediakan *entry* (orang/aktor, proses, program, interaksi) yang kaya informasi sesuai dengan kebutuhan deskripsi mendalam (*high probability of rich entries*), seperti subjek penelitian, informan, kelompok sasaran; (3) lokasi penelitian dapat menerima kehadiran peneliti untuk jangka waktu yang relatif lama (*prolonged engagement*); (4) mengukur dan membandingkan *properties* penelitian seperti subjek penelitian, aktivitas aktor, kompleksitas masalah, dengan sumber yang dimiliki peneliti seperti waktu, dana, mobilitas, keahlian, dan fasilitas lain (*accessibility dan feasibility*)(Schatzman dan Strauss, 1973:19; Emerson, 1984:27).

Persyaratan administratif dan teknis dipersiapkan juga untuk memasuki kaca penelitian. Diawali dengan pertemuan antara peneliti dan kepala desa, sebagai informan kunci untuk menentukan subjek penelitian (warga desa yang pernah menerima bantuan dari luar), serta informan lain yang mengetahui proses pemberian bantuan di desa penelitian (Bellah, 1984:47). Mereka adalah tokoh masyarakat, camat, staf kabupaten, pejabat Perguruan Tinggi. Penentuan informan dan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *snowball sampling*.

Agar proses memasuki lokasi penelitian dapat berjalan lancar peneliti memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) mencari koneksi yang dapat mempertemukan peneliti dengan subjek dan informan kunci yaitu kepala desa, (2) mempertimbangkan dengan seksama pandangan, posisi dan kepentingan para subjek dan informan terhadap proses penelitian, (3) peneliti berusaha beradaptasi dengan masyarakat di lokasi penelitian dengan menempatkan diri sebagai orang yang ingin belajar tentang desa atau masyarakat setempat, (4) berusaha santun dalam bahasa dan perilaku hingga mempermudah proses mencari dan menegosiasi data lapangan.

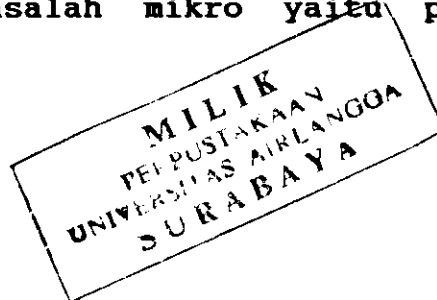
Pada tahap ini diobservasi secara intensif (*persistent observation*), segala aktivitas subjek penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan bantuan antara lain bagaimana tindakannya dalam merawat bantuan, perilaku dalam menyediakan sarana pemanfaatan bantuan seperti kandang

(kebersihannya, kondisinya). Selain itu juga dilakukan identifikasi masalah, data sekunder, serta pembuatan kategori penelitian yang menjadi fokus penelitian (Schegel, 1984:28). Setting penelitian (pemberian bantuan) di beberapa dusun dengan memperhatikan keterkaitan antara instrumen penelitian dan masalah etika penelitian (Lofland dan Lofland, 1984:21-23).

## 2.5. Menetapkan dan Menjalin Hubungan dengan Subyek Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif, peneliti berusaha menggambarkan objek penelitian secara alamiah (*naturalistik*). Proses penggalan data, dilakukan dengan memperhatikan refleksi dari ungkapan maupun perilaku dalam menghadapi bantuan.

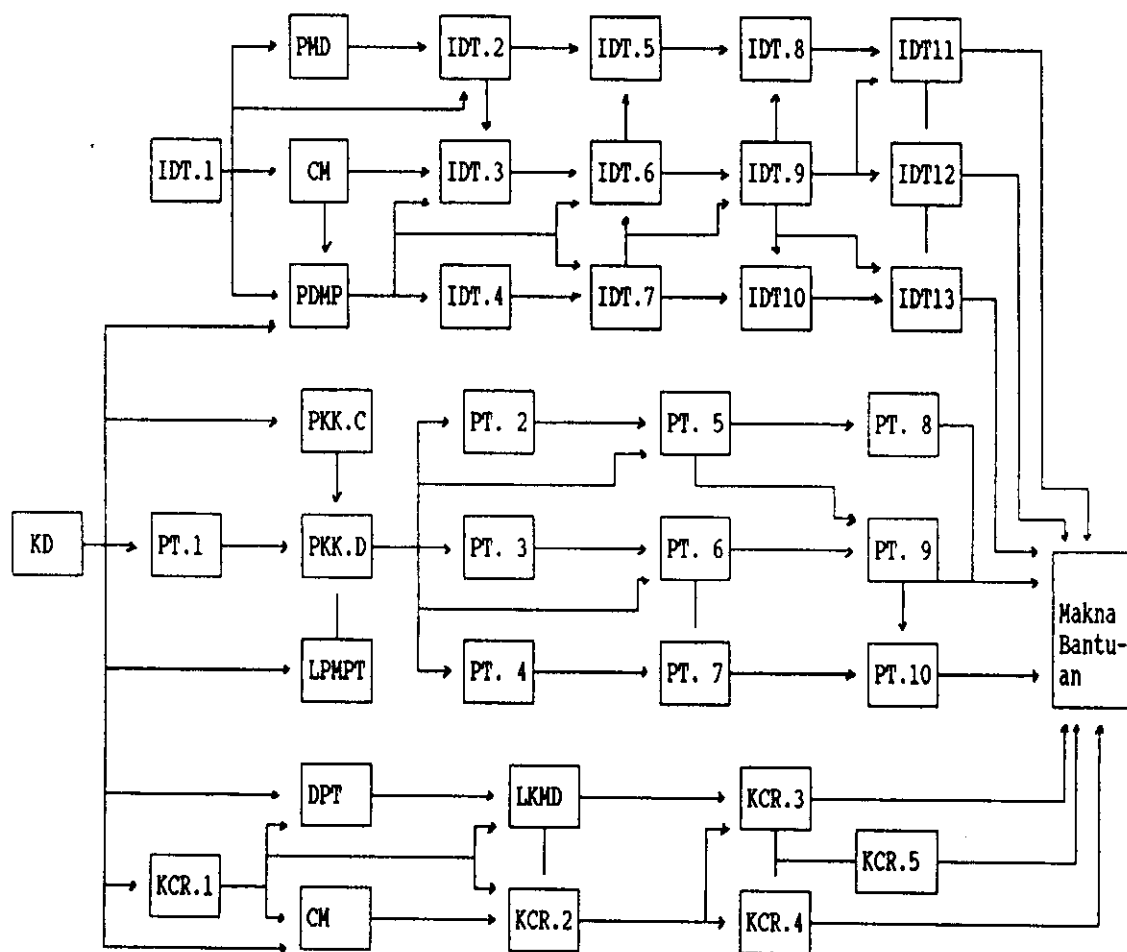
Ada empat unsur pokok yang menjadi perhatian peneliti yaitu: (1) perhatian terhadap aktor dalam hal ini adalah informan yang terkait dengan bantuan seperti penerima bantuan serta pemberi bantuan dan pengelola. (2) Memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau pokok serta sikap wajar atau alamiah yaitu dengan mengetahui bagaimana pernyataan, perilaku atau ungkapan yang diberikan oleh informan dan subjek penelitian, terkait dengan diterimanya bantuan baik dari pemerintah maupun swasta, serta mengetahui keterlibatan mereka dalam berhubungan dengan kelompok. (3) memusatkan perhatian pada masalah mikro yaitu proses



pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka dalam situasi tertentu (indeksikal), dalam hal ini diungkap tentang pernyataan atau perilaku para informan (subjek penelitian) tentang arti bantuan yang diterima dalam berbagai situasi, baik di rumah, di sawah, di sungai, atau di kelompok untuk mendapatkan kejernihan data tentang pemaknaan bantuan. (4) memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan unsur keempat ini dikaitkan dengan pengalaman atau perilaku terhadap bantuan peningkatan pendapatan oleh penerima bantuan sehingga berdampak pada persepsi yang bervariasi terhadap bantuan dengan memperhatikan keberadaannya dalam kelompok. Apakah informan pernah gagal dalam memanfaatkan bantuan yang diterima, apakah dia selalu memperoleh keuntungan, apakah dalam menerima ada unsur paksaan, semua diperhatikan dalam menerapkan pendekatan ini. Atas dasar inilah maka penggalian informasi tidak dapat dilaksanakan sekali selesai, melainkan dalam kurun waktu yang cukup lama (antara 1995 s.d. 1997)

Proses penelitiannya sendiri berbentuk siklus, pengumpulan data dan analisis data beserta, sampling yang lebih menekankan pada *theoretical sampling* berjalan secara simultan. Sampling terhadap subjek penelitian dilakukan secara *snowball sampling*, dengan mendasarkan pada subjek atau informan terdahulu. Subjek penelitian adalah penerima bantuan baik yang menerima maupun yang menolak. Selain itu peneliti juga menggunakan informan antara lain perangkat desa, pendamping kelompok, pemberi bantuan, warga yang tidak mendapat bantuan.

Proses penemuan informan itu sendiri dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Proses Pengumpulan Data

**Keterangan:**

- KD : Kepala Desa
- IDT : Penerima Bantuan dari IDT
- PT : Penerima Bantuan dari Perg.Tinggi
- KCR : Penerima Bantuan dari Kecamatan Rawan
- PMD : Kasi Pemb. Masy. Desa Dati II Kab. Lamongan
- CM : Camat
- DPT : Kasi Dinas Peternakan Dati II Kab Lamongan
- PDMP : Pendamping Pokmas
- LPMPT : Lembaga Pengabdian Masyarakat Perg.Tinggi



Ketika berada di lapangan, peneliti mengembangkan *imajinasi sosiologis*, untuk dapat mengenali dan memiliki *feeling* tentang objek penelitian secara alamiah, menangkap makna karakteristik, perilaku, ungkapan, subjek penelitian dengan cermat, kemudian dengan modal kepekaan teoritik yang ada, peneliti berusaha melepaskan diri (keluar) dari objek untuk mengembangkan analisis dengan tepat.

Untuk melaksanakan penelitian naturalistik ini peneliti berhadapan dengan dua macam realitas, yaitu realitas simbolik dan realitas empirik. Agar kedua realitas tersebut dapat dipahami dengan tepat, peneliti menggunakan seluruh kelebihan dan kekurangan yang ada sebagai manusia untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan, tata cara, adat, dan budaya latar penelitian (Moleong, 1990: 97).

Realitas empirik berkenaan dengan segala ucapan, perilaku serta tindakan yang tampak dari individu khususnya anggota kelompok penerima bantuan. Perilaku dan ucapan yang menunjukkan realitas empirik ini dapat diterima atau dilihat oleh siapa saja dan mungkin akan diartikan sama.

Sebaliknya realitas simbolik berkaitan dengan makna dibalik ucapan, ungkapan atau perilaku informan, realitas simbolik ini dapat diungkap dengan menginterpretasikan segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Sebagai misal peneliti melihat penerima bantuan tidak merawat bantuan (bibit tanaman) dengan baik, sehingga tanaman tersebut mati. Bila dilihat dari realitas empirik tampak penerima bantuan tidak sungguh-sungguh dalam menerima bantuan. Namun bila

dilihat dari realitas simbolik banyak makna yang dapat diambil dari tindakan tidak merawat tanaman tersebut, antara lain mungkin tidak cocok dengan bantuan (materi) yang diberikan sehingga tindakan tersebut sebagai bentuk protes, atau sekedar menyenangkan pamong desa karena keberadaan program tersebut pamong desalah yang mengusulkan, atau sengaja ingin menjatuhkan kepemimpinan pamong dengan membuat gagal program yang direncanakan.

Peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini berusaha menempatkan diri sejajar dengan mereka, dengan maksud untuk menghilangkan jarak sosial antara peneliti dengan subjek penelitian. Semuanya itu dilakukan agar peneliti memperoleh gambaran yang jelas dan wajar tentang data yang dicari. Untuk itu peneliti mengadakan *prolonged engagement* artinya peneliti tinggal di tempat penelitian dalam waktu yang cukup lama (dalam hal ini peneliti sudah mengadakan kajian terhadap desa penelitian sejak tahun 1992), dan sampai tahun 1996, setiap sebulan sekali peneliti juga ke lapangan untuk memonitor penelitian yang lalu.

Dengan cara tinggal di desa secara *in cognito* dan melakukan interaksi yang tidak terlalu protokoler memungkinkan dapat datang dan langsung berhadapan dengan warga desa secara informal sehingga tidak menimbulkan kesan yang menakutkan (Chambers, 1996:79). Semakin dekat jarak sosial antara peneliti dan subjek penelitian semakin lengkap data/informasi yang diperoleh.

Selama di lokasi penelitian peneliti tinggal di rumah sekretaris desa, kepala desa, dan salah seorang warga desa. Perpindahan tempat bermalam ini dilakukan untuk memudahkan proses pengumpulan data, mengingat dusun di lokasi penelitian tempatnya cukup berjauhan, yang dipisahkan oleh hamparan sawah dan tegalan. Dengan pertimbangan agar peneliti dapat melakukan penelitian setiap saat (siang dan malam), maka peneliti memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang berdekatan dengan lokasi penelitian. Selain itu peneliti mengikuti segala tradisi atau kebiasaan masyarakat desa. Sebagai misal harus mandi di sungai, cuci pakaian di sungai, setelah mandi di sungai kembali dengan membawa air dalam *klenting* (tempat air dari tanah liat). Bahkan juga ikut makan nasi jagung bila dijamu dengan nasi jagung.

Satu hal yang agak menjadi tantangan, yaitu waktu dijamu minum, peneliti merasa susah untuk minum, karena tahu bahwa air yang digunakan masak dari sungai. Sungai itu sendiri untuk berbagai kegiatan termasuk memandikan kerbau dan sapi. Namun peneliti berusaha untuk meminumnya, meski pada awalnya sempat muntah. Semuanya itu dilakukan agar hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian dilakukan dengan mengendalikan tindakan dan perasaan serta melihat hubungan penelitian itu sebagai proses perundingan. Hubungan tersebut terus menerus diusahakan hingga berakhirnya penelitian, agar data/informasi yang terjaring benar-benar natural dan bersih serta terbebas dari intern peneliti maupun eksternal lainnya.

## 2.6. Mengumpulkan Data

Penelitian kualitatif/naturalistik, memandang perilaku manusia (apa yang dilakukan dan dikatakan orang) sebagai produk dari orang tersebut menafsirkan dunianya. Peneliti telah berusaha menangkap proses penafsiran tersebut lewat metode "verstehen" yang diartikan sebagai kemampuan menangkap pengertian subjektif/empatik dari si aktor, yang kemudian dikeluarkan kembali dalam pikiran peneliti tentang perasaan, motif, tujuan dan pikiran yang ada di balik tindakan aktor tersebut. *Verstehen* (*interpretative understanding*) merupakan teknik dalam melaksanakan interpretasi terhadap setiap fenomena dan fakta yang terefleksi dan muncul, serta dipolakan dalam perspektif komunitas itu sendiri.

Studi tentang makna bantuan bagi masyarakat desa menggambarkan suatu fenomena kehidupan masyarakat (*social event*), Singarimbun dan Effendi (1989) menyatakan bahwa untuk menerangkan peristiwa tersebut diperlukan dua instrumen yaitu: (a) logika dan rasionalitas, (b) observasi atas fakta terpilih. Hubungan antara peneliti dan subjek penelitian bersifat dialogis (*dialogical interpretation*), interpretasi terhadap makna merupakan hasil negosiasi antara peneliti dan subjek penelitian (*negotiated meaning*).

Untuk memperoleh data sebagaimana digambarkan, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi (*participative*), wawancara mendalam dan dokumentasi. Metode

observasi yang digabung dengan wawancara tidak terstruktur banyak dipergunakan karena meskipun sasarannya individu (penerima bantuan), tetapi selalu disadari bahwa yang dipotret adalah *acting*-nya dalam berinteraksi sosial, serta perilaku dalam mengelola dan menyikapi bantuan yang diberikan, sehingga dapat ditampilkan film makna terhadap bantuan tersebut.

Menurut Spradly (1980: 53-58) dijelaskan bahwa metode observasi partisipatif mempunyai keuntungan yaitu menemukan aktivitas aktor yang sah (terpercaya) terhadap situasi sosial dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu dalam melakukan observasi jumlah sample atau responden bukanlah syarat mutlak (*conditio sine qua non*).

Dalam melaksanakan wawancara mendalam peneliti lebih banyak bertindak sebagai pendengar, dengan memperlakukan subjek sebagai orang yang ahli dalam kehidupan dan pengalamannya sendiri. Wawancara ini dilakukan sebagaimana yang dimaksud oleh Quinn (1980: 197-198) sebagai *technic of the informal conversation interview* terhadap subjek penelitian.

Tindakan sosial penerima bantuan diinterpretasikan sesuai dengan makna subjektifnya berdasarkan fenomena sosiologis yang ada. Analisis *emik* bisa menghasilkan *self validating* telah diatasi dengan melakukan proses *trianggulasi*, dengan (*snowballing*) yaitu mencari data banding dari informan kunci lain seperti staf desa, staf kecamatan, staf kabupaten, tokoh masyarakat, serta pemberi

bantuan. Konfirmasi data juga dilakukan lewat penggunaan wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci. Sumber data dari dokumen resmi (kantor desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya) dipergunakan pula untuk menggali dan melacak riwayat pelaksanaan program bantuan yang juga berguna untuk mengkonfirmasikan data lainnya.

Dalam proses pengumpulan data, sesuai dengan anjakan penelitian, peneliti bertindak sebagai *known investigator* (Lofland dan Lofland, 1984:24), karena untuk bisa melebur diri dengan latar penelitian secara baik, hal tersebut tidak bisa dihindari. Peneliti sebagai manusia bertindak sebagai instrumen penelitian.

Pencatatan data dan penulisannya dilakukan dengan memanfaatkan *field notes, interview write, mapping, photographing, sound recording dan copy dari document collections* (Lofland & Lofland, 1984:24; Marshall & Rossman, 1989:85). Ada catatan khusus mengenai penggunaan sarana *tape recorder* sebagai alat perekam data, beberapa informan ada yang menolak tetapi ada pula yang senang. Pemanfaatan sarana tersebut dimaksudkan untuk dapat memotret perilaku penerima bantuan dalam menyikapi dan memaknakan bantuan yang diterimanya secara menyeluruh dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan di setiap kesempatan yang memungkinkan untuk menggali informasi (data), seperti di rumah, di sawah, di warung, di balai desa, di kantor (kecamatan dan kabupaten), saat sendiri, maupun saat bersama orang lain. Semuanya itu dilakukan untuk mencari informasi

sejelas-jelasnya, terutama terkait dengan konsep "indeksikal".

Data yang telah terkumpul melalui rekaman, kemudian ditranskripsikan dalam bentuk tulisan, kegiatan ini dilakukan di lokasi penelitian. Namun bila tidak memungkinkan dilakukan di Surabaya.

Peneliti memang tidak menetap secara terus menerus hingga beberapa bulan di lokasi penelitian, namun paling tidak dalam satu bulan, minimal selama satu minggu peneliti berada di lokasi penelitian. Secara intensif penelitian ini dilakukan sekitar satu tahun dalam rentangan waktu antara tahun 1995 hingga 1997, meskipun peneliti telah mengenal lokasi penelitian tersebut sejak tahun 1993.

## **2.7. Menganalisis data**

Modus yang dipergunakan dalam proses analisis data ini adalah analisis yang dilakukan terus menerus selama pengumpulan data di lapangan dan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis datanya mengikuti anjuran Bogdan dan Biklen yang membaginya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan (Bogdan dan Biklen, 1990:189).

Secara rinci analisis data yang dilakukan meliputi: (1) analisis data dilakukan secara jalin menjalin dengan proses pengamatan, (2) berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan

berkenaan dengan fenomena sosial yang diamati, (3) membentuk klasifikasi fenomena sosial yang diamati, dan (4) mengevaluasi secara teoritis untuk menghasilkan kesimpulan (Babbie, 1979: 221-224).

Prosesnya sendiri meliputi tahapan *pengkodean terbuka*; *pengkodean aksial*; dan *pengkodean terpilih* (Strauss & Corbin, 1990; Glasser & Strauss, 1967).

Tahap Jelajah (*pengkodean terbuka*), berisi kegiatan pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan sample yang ditujukan untuk menjajaki dan menemukan kategori yang mencerminkan tindakan masyarakat desa terhadap bantuan, serta variasi pola budaya kerja (*dimensi-dimensinya*) yang terjadi dalam komunitas tempat penelitian ini berlangsung, termasuk situasi yang melingkungi pola tersebut.

Pengembangan kategori diperoleh melalui tahap penjelajahan yang lebih terbuka dengan tetap berpatokan pada *theoretical sampling*. Dasar teoretis untuk mendukung kejelian penggalian data adalah perspektif teori *Kelayakan Program* (Korten) yang terkait dengan teori pembangunan, selain itu juga *interaksi simbolik* serta *etnometodologis*, sebagaimana yang dibahas di depan. Penjelajahan dilakukan terhadap sumber data (orang, tempat, situasi, dokumen) yang potensial untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

Proses tersebut berlangsung secara simultan dengan analisis data, yang merupakan proses merinci, memeriksa, mengkomparasi, mengkonseptualisasi, dan mengkategorisasi



data yang diperoleh. Produk yang dihasilkan adalah labelisasi konsep, kategorisasi atas variasi yang ada (contoh kategorisasi tampak pada dimensi yang akan dikaji). Pengembangannya bertolak pada penelitian grounded teori (Strauss & Corbin, 1990; Glasser & Strauss, 1967). Kegiatan ini dilakukan hingga ditemukan kejenuhan secara teoretis, dalam arti sudah tidak ditemukan informasi baru yang memperkaya konsep. Semua data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk *field note*, dengan judul dan kode tertentu untuk memudahkan proses analisis data berikutnya.

Tahap berikutnya adalah Tahap Pemusatan (pengkodean aksial). Pada tahap ini pengumpulan data, analisis data dan pengambilan sampel ditujukan untuk pengembangan hipotesis, dengan memanfaatkan *open coding*, yang kategorinya diorganisir sesuai dengan posisinya dalam kerangka "model paradigma". Kategori yang terkait merupakan rangkaian logis yang berhubungan dengan sub-sub kategori.

Dalam hal ini yang ditempatkan sebagai "fenomena" (selaku ide, kejadian, peristiwa sentral) adalah "makna bantuan peningkatan pendapatan" pada warga masyarakat desa tempat penelitian ini berlangsung. Fenomena tersebut diperkirakan saling mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sejumlah kondisi atau konsekuensi tertentu seperti gambar 2.3.

Tahap berikutnya adalah tahap integrasi (pengkodean terpilih) dilakukan kegiatan pengumpulan data, analisis data dan pengambilan sampel yang ditujukan untuk menemukan kategori inti (fenomena sentral) yang merupakan lokus tempat

menyatunya kategori lain, yang dilakukan dengan komparasi atau mencari hubungan antar kategori dengan memanfaatkan *axial coding* dan memeriksa keabsahan pernyataan empiris. Deskripsi tentang proses pengkodean secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Proses analisis data baik ketika pengumpulan data maupun setelah selesai pengumpulan data, dimulai dengan:

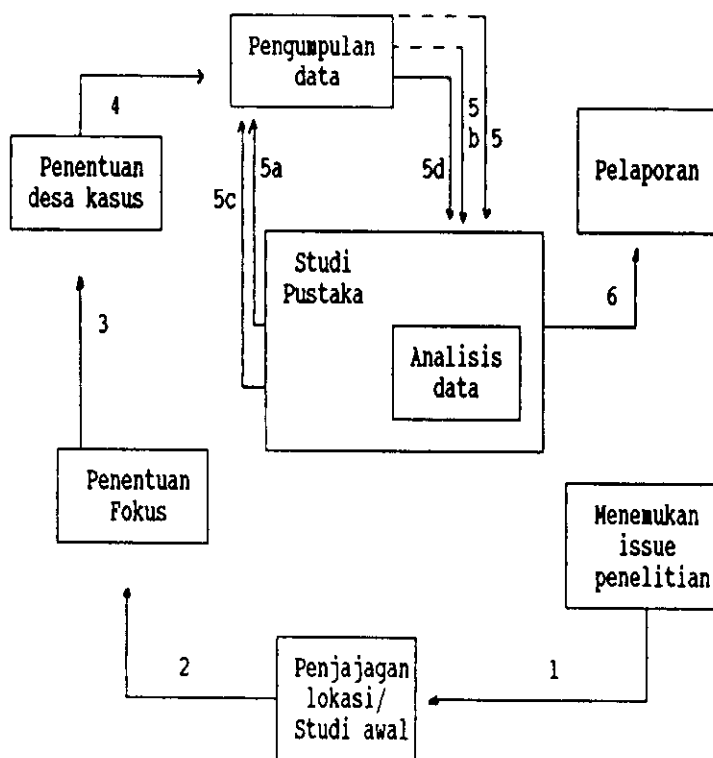
- (1) Penelaahan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber data lewat ancangan observasi, wawancara, dokumentasi, dibaca, dipelajari dan ditelaah dengan seksama.
- (2) Data direduksi sedemikian rupa sehingga tersusun secara sistematis, lebih nampak pokok yang penting yang menjadi fokus penelitian guna memberi gambaran yang lebih tajam tentang fenomena pemaknaan bantuan peningkatan pendapatan.
- (3) Data yang telah direduksi itu disusun dalam satuan yang berfungsi untuk menentukan atau mendefinisikan kategori.
- (4) Satuan yang telah dikategorisasi tadi seterusnya diberi kode tertentu untuk memudahkan pengendalian data dan penggunaannya setiap saat.
- (5) Pemeriksaan keabsahan data. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memperpanjang keterlibatan penelitian dengan latar penelitian, melakukan pengamatan lebih teliti, rinci dan mendalam, melakukan triangulasi/dengan sumber data, teori, metode penelitian lain, mendiskusikan hasil sementara dengan, menganalisis kasus negatif, dan dengan

memanfaatkan referensi yang ada seperti misalnya hasil rekaman, foto, laporan kegiatan periodik dan sebagainya.

- (6) Melakukan penafsiran data dengan menemukan atau membangun kategori inti mengenai hal, orang, peristiwa dengan segala karakteristik dan menghubungkannya satu sama lain. Bukan hanya menyajikan deskripsi analitis saja, tetapi juga sampai pada penyusunan teori substansi yang bermuatan dan bernuansa teori formal (Schatzman dan Strauss, 1973:110; Moleong, 1990:198).

Kegiatan analisis data yang ditujukan untuk menemukan kategori inti (fenomena sentral), yang merupakan lokus tempat menyatunya kategori lain, dilakukan dengan komparasi atau mencari hubungan antar kategori dan memeriksa keabsahan pernyataan empiris. Misalnya kategori program dikaitkan dengan keberadaan pasar; program dikaitkan dengan organisasi; program dikaitkan dengan penerima bantuan; penerima bantuan dikaitkan dengan kondisi pasar dan organisasi. Kemudian baru diperoleh hubungan antara kategori yang ada secara holistik. Sebagai misal bagaimana perilaku penerima bantuan yang berada dalam kehidupan organisasi tertentu, dalam keadaan pasar tertentu dan dengan tujuan program bantuan tertentu memaknakan bantuan peningkatan pendapatan khususnya dan pembangunan umumnya.

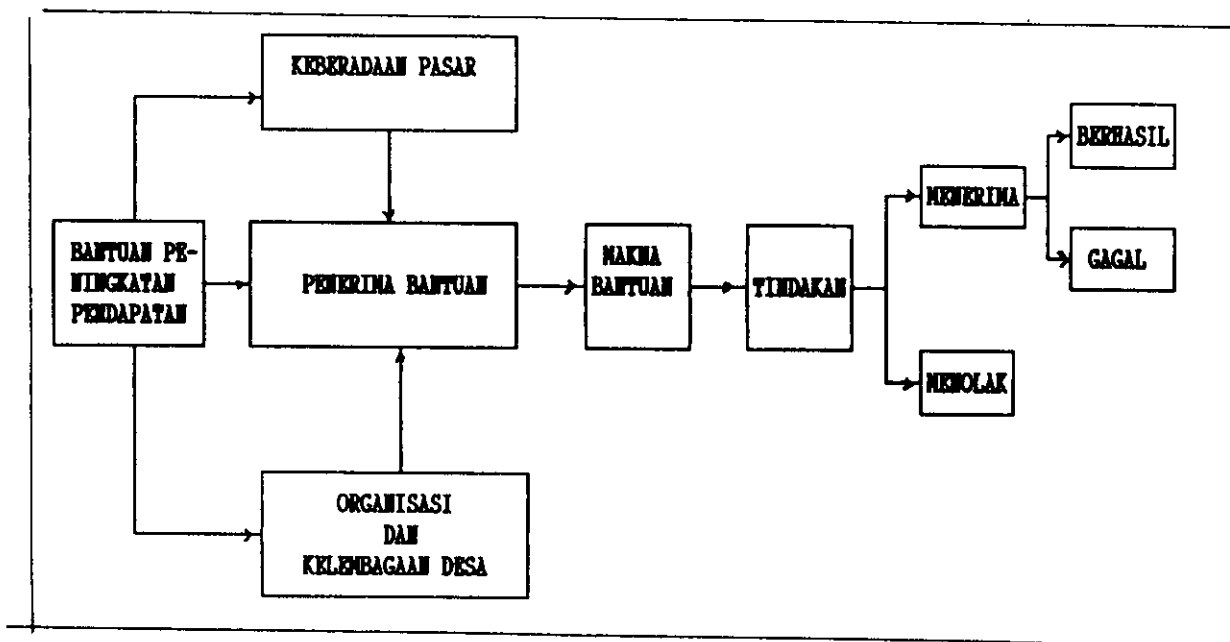
Proses penelitian tersebut secara garis besar tergambar sebagai berikut:



Gambar 2.2. Prosedur Penelitian

Bila dikaji lebih lanjut dalam penelitian kualitatif ini, tahap pengumpulan data dan analisis data berlangsung secara simultan, tidak dapat dipisahkan menurut tahapan atau penjenjangan yang tegas. Oleh karena itu peneliti tidak melakukan pemisahan antara pengumpulan data, kajian pustaka dan analisis data.

Secara konseptual, kerangka analisis digambarkan berikut:



Gambar 2.3. Keterkaitan antar dimensi

Untuk memperoleh standar kredibilitas (*validitas internal*) peneliti melakukan:

(1) *Persistent observation* yaitu observasi secara terus menerus guna menetapkan aspek penting dan kurang penting dengan mengacu pada dimensi yang dikaji. Pengamatan dilakukan secara terlibat, peneliti tinggal dalam salah seorang keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama (kurun waktu sekitar satu tahun, meskipun tidak penuh secara satu tahun), kemudian mengamati perilakunya dalam menerima bantuan, memanfaatkan bantuan yang diterima, serta memahami ungkapan terkait dengan

bantuan yang diterima, seperti: mengeluh, merasakan kesenangan, atau bahkan mengungkapkan kejengkelan. Hasil pengamatan dan wawancara disekripsikan dalam bentuk catatan lapangan (field note), serta rekaman dengan alat mekanika.

Dalam penelitian ini peneliti tinggal selama satu minggu di desa penelitian, kemudian kembali ke Surabaya untuk menganalisis temuan di lapangan setelah dirasakan ada kekurangan informasi, peneliti kembali lagi ke desa penelitian tinggal selama satu minggu lagi, kemudian menganalisisnya dan kembali ke desa lagi bila ada kekurangan informasi begitu seterusnya hingga ditemukan kejenuhan informasi yang dicari.

(2) *Peer debriefing* dengan teman sejawat dan kolega; Kegiatan ini dilakukan sesering mungkin dengan cara seminar atau diskusi diantara teman (seprofesi atau seangkatan) serta konsultasi dengan dosen atau pakar yang ahli dalam bidang pembangunan desa. *Peer debriefing* ini tidak hanya dilakukan di dalam kampus, tetapi pada setiap kesempatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan (di tempat kerja, pada waktu belajar kelompok). Banyak kritik dan masukan yang diperoleh dari kegiatan ini yang pada gilirannya digunakan untuk menyempurnakan penelitian itu sendiri.

(3) *Triangulation* baik dari sumber informasi, petugas pengumpul data, metode yang digunakan maupun teori. Triangulasi sumber data (informasi) dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti penerima bantuan, tokoh masyarakat, perangkat desa, pemberi bantuan, serta warga yang tidak menerima bantuan. Triangulasi petugas

pengumpul data dilakukan dengan melibatkan teman sejawat dan mahasiswa sebagai *cross check* terhadap data yang diperoleh peneliti sendiri. Triangulasi metode pengumpul data dilakukan dengan menggunakan variasi metode seperti observasi partisipasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan berberapa teori seperti teori pembangunan (bantuan) Korten, teori budaya (Thompson).

Peneliti mendasarkan penarikan simpulan pada *emic view* dan bukan pada *etic view* (Lincoln dan Guba, 1985: 305). Aktivitas ini dilakukan dengan membuat penafsiran terhadap setiap ucapan, perilaku dan fenomena yang ada menurut sudut pandang subjek penelitian dan informan.

Untuk mewujudkan ini setiap penafsiran atau interpretasi yang dibuat peneliti terhadap setiap ungkapan dan tindakan aktor (penerima bantuan), selalu dimintakan kesepakatan atau persetujuan kepada para aktor tersebut (*member check*). Apakah interpretasi yang dibuat peneliti tersebut sesuai dengan yang dimaksud para subjek penelitian dan informan atau sebaliknya. Dengan demikian semua simpulan yang dinyatakan dalam tulisan ini sebenarnya simpulan yang dibuat oleh subjek penelitian dan informan sendiri. Ini semua dilakukan tidak lain untuk menghindari pembuatan simpulan yang salah.

# BAB 3



## BAB 3

### MONOGRAFI DESA BRONJONG

Pada bagian ini diuraikan profil Desa Bronjong sebagai setting penelitian. Tujuannya tidak lain untuk memberikan gambaran secara ringkas dan menyeluruh tentang berbagai aspek kehidupan di Desa Bronjong yang meliputi: keadaan alam, penduduk, pendidikan, pekerjaan, agama dan adat kebiasaan, komunikasi dan transportasi, lembaga sosial kemasyarakatan serta aktivitas pembangunan.

Uraian pada bab ini juga dimaksudkan sebagai latar belakang pembahasan tentang aspek yang terkait dengan pemaknaan batuan peningkatan pendapatan (pembangunan) dalam proses transformasi sosial di desa.

#### 3.1. Keadaan Alam

Desa Bronjong terletak di sebelah barat laut Kab. Lamongan. Desa ini termasuk wilayah Kecamatan Bluluk. Sebelum tahun 1994 Kecamatan Bluluk memiliki 18 desa, satu diantaranya adalah Desa Bronjong. Namun sejak tahun 1994 Kec. Bluluk dipecah menjadi dua kecamatan, yaitu Kec. Bluluk dengan sembilan desa dan Kec. Sukorame dengan sembilan desa juga. Desa Bronjong termasuk salah satu desa miskin (tertinggal) dari 3 desa miskin lainnya, di wilayah Kecamatan Bluluk.

Desa Bronjong terletak lebih kurang 1,5 km dari ibu kota kecamatan, atau 54 km dari ibukota kabupaten (Lamongan). Desa Bronjong memiliki ketinggian 63 M dari permukaan laut, serta memiliki suhu maksimum  $32^{\circ}\text{C}$  dan suhu minimum  $22^{\circ}\text{C}$ .

Desa Bronjong berada di daerah pegunungan Kapur Utara, dan terletak disekitar hutan jati milik perhutani. Bentuk tanah, 50% tanah datar, 20% berombak, dan 30% berbukit. Sesuai dengan kondisi daerahnya yang merupakan pegunungan kapur dengan lapisan atas tanah kedap air karena permeabilitasnya agak lambat, maka ketersediaan air tanah sangat kurang.

Berdasarkan sifat lapisan atas tanah yang impermeabilitas, maka air hujan sedikit sekali yang dapat meresap ke dalam tanah, sementara lapisan dalam tanah tidak mampu mengikat air. Masyarakat menggantungkan air dari air hujan. Ada sekitar 15 sumur di Desa Bronjong, namun bila musim kemarau hanya 3 sumur yang masih mengeluarkan air (berfungsi), selebihnya kering. Oleh sebab itulah maka masyarakat lebih banyak menggunakan air sungai untuk semua keperluannya.

Disebabkan oleh sifat tanah yang tidak dapat menyimpan air, maka pada musim kemarau, terasa adanya kekurangan air, terutama untuk kegiatan pertanian.

Bila dilihat dari kondisi tanah yang ada, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan sawah untuk tanaman padi sangat tergantung dari curah hujan, sehingga tanaman padi rata-rata

hanya sekali tanam dalam setahun. Melihat sedikitnya curah hujan yang terjadi, serta wilayah yang ada (pegunungan kapur), dapat dikatakan bahwa lahan yang ada termasuk tandus. Bila musim kemarau tiba, tanah sawah (ladang) menjadi pecah-pecah (*nelo*), dan bila sudah demikian semua tanaman tidak dapat hidup.

Desa Bronjong berbatasan dengan beberapa baik yang terdapat di wilayah Kecamatan Bluluk maupun kecamatan lain. Bagian utara Desa Bronjong berbatasan dengan Desa Mojorejo (masuk wilayah kecamatan Modo), bagian selatan Desa Songo, barat dibatasi oleh Desa Bluluk, dan bagian timur Desa Primpen. Dari 487 Ha luas wilayah Desa Bronjong, 196 Ha diantaranya tanah sawah (tadah hujan), 10 ha (sawah dengan irigasi sederhana), 26 Ha (perumahan), 43 Ha (tegalan), dan 212 Ha hutan sejenis (*jati*).

Luasnya wilayah hutan *jati* membuat Desa Bronjong seakan-akan berada di tengah hutan, karena untuk memasuki Desa Bronjong tersebut, harus melewati hamparan pohon *jati* yang cukup lebat. Pada gilirannya hutan tersebut selain berfungsi sebagai sumber devisa negara, juga sebagai upaya untuk mengatasi erosi bila musim penghujan tiba dan yang tak kalah pentingnya juga menjadi sumber mata pencaharian penduduk sekitar.

Hutan *jati* yang ada milik pemerintah (perhutani dibawah KPH Lamongan), dan keberadaannya dilindungi undang-undang, namun tak jarang penduduk setempat berusaha memanfaatkan pohon *jati* meskipun mereka tahu bila hal itu melanggar

undang-undang. Pelanggaran yang sering dilakukan antara lain menebang pohon jati untuk bahan bangunan (keperluan sendiri). Pekerjaan mengambil ranting pohon untuk kayu bakar dan arang, serta pengambilan daun jati untuk pembungkus merupakan pekerjaan biasa bagi masyarakat desa setempat, dan memang hal seperti itu tidak dilarang. Namun bila mengambil kayu (pohon) yang utuh (sudah tua) bila tertangkap akan dikenai sanksi, dan sampai saat ini belum ada penduduk yang dikenai sanksi (di tahan), yang terjadi hanya ditegur.

Terdapat kecenderungan penduduk memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencaharian, karena lahan pertanian di desa tempat tinggal mereka tidak menajikan hasil yang memadai, akibat kondisi tanahnya yang tidak mendukung untuk pertanian (*sawah tadah udan*).

Dalam hal pertanian penduduk sangat bergantung pada bertanam tembakau, namun beberapa kali (3 kali) dalam kurun waktu empat tahun belakangan ini, penduduk banyak mengalami kegagalan bertanam tembakau, akibat musim tidak menentu.

Menurut penduduk tembakau sangat cocok ditanam pada musim kemarau (sekitar bulan Mei sampai dengan September), namun bila di sela-sela bulan itu (masa tanam tembakau) turun hujan, menyebabkan daun tembakau menjadi kotor, dan dampaknya harga jual rendah. Bila sudah demikian berarti panen tembakau dapat dikatakan gagal. Seperti yang dinyatakan Sunarto (26 Agustus, 1996):

Menanam tembakau pada tiga tahun  
belakangan ini banyak ruginya, soalnya

musim tidak menentu. Biasanya menanam tembakau dimulai sekitar bulan April (setelah panen padi), sehingga musim hujan sudah agak habis dan diperkirakan sekitar Juli sudah dapat panen. Namun belakangan ini pada waktu tembakau sudah tumbuh (siap panen), hujan turun tiada henti. Kalau sudah demikian berarti tembakau tidak ada harganya, dan biasanya dijadikan tembakau krosok. Kecuali kalau petani mau membersihkan daun yang terkena tanah akibat percikan hujan, helai demi helai, maka nilai jual tembakau agak tinggi. Tapi ini tidak mungkin dilakukan karena luasnya tanaman tembakau.

Kegagalan juga dapat terjadi bila waktu mulai tumbuh tanaman tembakau kekurangan air. Kurangnya air bagi tanaman tembakau yang mulai tumbuh menyebabkan daun tembakau menjadi keriting, sehingga nilai jualnya turun. Sebenarnya bila diperhatikan menanam tembakau itu cukup sulit, karena tidak boleh terlalu banyak air dan juga tidak boleh kekurangan air. Seperti yang terjadi pada musim tanam 1996/1997 warga mengalami kegagalan tanam akibat terlambat memulai tanam, sehingga tidak mendapat air (hujan) pada awal tanam, dan yang terjadi tahun 1995/1995 justru sebaliknya, diperkirakan bulan Mei hujan sudah habis namun ternyata masih turun, sehingga tanaman yang mulai tinggi diguyur hujan akibatnya nilai jual rendah. Rendahnya nilai jual ini karena kadar nikotin daun berkurang, selain daun kotor akibat percikan hujan.

Pemanfaatan lahan untuk pertanian ini dapat dilihat dari proporsi pemanfaatannya. Ternyata lahan untuk bertanam

tembakau sangat luas sekitar 150 Ha yang menghasilkan sekitar 1500 ton daun tembakau (ini bila tidak mengalami kegagalan), bertanam padi hanya sekitar 30 Ha dengan hasil sekitar 150 ton atau sekitar 5 ton per Ha, per tahun, tanaman jagung menggunakan sekitar 5 Ha lahan dengan hasil lebih kurang 25 ton atau 5 ton per Ha per tahun, tanaman kedelai dan cabai masing-masing hanya menggunakan 1 Ha lahan dengan hasil sekitar 4 ton per Ha per tahun untuk masing-masing jenis tanaman.

Tanaman tembakau bila tidak mengalami kegagalan memiliki harga jual yang cukup tinggi, yaitu sampai Rp. 700,- per kilogram untuk daun basah. Namun bila terjadi kerusakan, daun tembakau hanya laku Rp 250,- bahkan pernah tembakau laku hanya Rp 150,- per kilogram. Menurut penduduk dengan harga jual Rp 250,- per kilogram, petani tidak akan mendapat keuntungan bahkan rugi, karena dengan nilai jual Rp 250,- per kilogram habis untuk ongkos memetik saja, sehingga biaya pembibitan, penanaman, dan perawatan harus ditanggung sendiri. Apalagi bila hanya laku Rp. 150,-. Bila keadaan demikian yang terjadi, biasanya banyak petani harus menjual harta yang dimiliki untuk menutup kerugian tersebut.

Keadaan ini bertolak belakang dengan bila terjadi keberhasilan dalam menanam tembakau, biasanya setelah selesai panen tembakau, dan kemudian hasil panen telah laku dijual, penduduk berpesta-pora dalam arti membelanjakan sebagian besar hasil panen untuk kepentingan konsumtif. Seperti membeli sepeda motor, membeli perhiasan, memperbaiki

rumah dan yang perlu mendapat perhatian justru tidak ada yang membelanjakan untuk peningkatan pertanian mereka (misal beli bajak/traktor, alat penyemprot hama, pompa air atau membuat sumur, ini merupakan salah satu fenomena bahwa kesadaran berwirausaha warga desa penelitian masih rendah.

Meskipun curah hujan dapat dikatakan cukup, namun akibat kondisi tanah yang tingkat kesuburannya rendah, menyebabkan banyak lahan yang kurang produktif. Sebagian lahan yang ada menjadi lahan tidur (*sleeping lands*) terutama hutan negara yang tidak digarap penduduk dan hamparan tegalan (tanah tandus) karena jauh dari sumber air, dan ditumbuhi ilalang belaka. Kesemuanya itu semakin mempersulit upaya pengembangan budidaya pertanian seperti tanaman hortikultura.

Secara administratif Desa Bronjong terbagi menjadi lima dusun, 2 RW, dan 12 RT. Kelima dusun yang dimaksud yaitu: (i) Dusun Cumpleng, (ii) Dusun Ngrojo, (iii) Dusun Garas, (iv) Dusun Geneng, dan (v) Dusun Penjalin Ulung.

Dusun Cumpleng terbagi menjadi dua yaitu Cumpleng Kidul dan Cumpleng Lor. Cumpleng Kidul berada dekat jalan beraspal, namun berada di kawasan hutan. Jalan desa merupakan jalan makadam, terdiri atas campuran tanah dan batu. Keadaan jalan ini merupakan kendala bagi masyarakat untuk mengembangkan wilayah. Musim kemarau masih dimungkinkan untuk dilalui dengan baik, namun bila musim penghujan sangat sulit untuk dilalui, selain licin, batubatuan di jalan sangat tajam.

Dusun Cumpleng Lor berdekatan dengan dusun Cumpleng Kidul. Kedua dusun ini hanya dibatasi oleh sebuah sungai. Meskipun sungai tersebut tidak terlalu besar, namun sungai ini pernah meluap dan menghanyutkan beberapa perabot balai desa yang berada di sekitar sungai, serta menggenangi beberapa rumah. Di atas sungai terhampar sebuah jembatan kayu dengan lebar sekitar 2 meter dan panjang 10 meter. Kondisi jembatan ini sangat memprihatinkan' (agak rusak), pada bulan Juni 1997 jembatan tersebut telah meminta korban seorang anak karena jatuh dari atas jembatan). Jembatan ini merupakan satu-satunya sarana terdekat sebagai penghubungan sebagian besar warga Desa Bronjong (80%), dan Desa Primpen dengan ibukota kecamatan khususnya, dan jalan besar umumnya.

Keadaan jalan di dusun Cumpleng Lor tidak jauh berbeda dengan dusun Cumpleng Kidul. Dusun Garas berada di bagian Barat Daya. Dusun ini juga tidak jauh berbeda dengan dusun Cumpleng, hanya saja dusun ini terletak agak ke dalam, sehingga komunikasi dengan dunia luar lebih sulit dibanding dengan dusun Cumpleng. Seperti dusun-dusun yang lain juga, pemukiman penduduk berada di sepanjang jalan utama desa.

Dusun Ngrojo juga terletak agak ke dalam, namun masih berada di tengah desa. Dusun ini berbatasan dengan dusun Garas (bagian barat), dusun Cumpleng Lor (bagian selatan), dusun Penjalin Ulung (bagian Timur), dan desa Primpen (bagian Utara). Keadaan jalan dan perumahan tidak banyak berbeda dengan dusun lainnya, merupakan jalan tanah yang pada musim penghujan sulit dilalui kendaraan.



Dusun Geneng letaknya lebih ke dalam, dusun ini bertetangga desa dusun Garas, dan desa Cumpleng. Pemukiman penduduk terkonsentrasi di sepanjang jalan desa dan kondisi rumah penduduk tidak banyak berbeda dengan rumah penduduk di dusun lain yaitu merupakan rumah semi permanen dan non permanen yang berlantai tanah.

Rumah tempat tinggal pada umumnya campur dengan kandang ternak bagi penduduk pemilik ternak. Mereka merasa aman bila ternak tersebut berada di dekatnya, meskipun secara kesehatan hal tersebut sangat merugikan baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya. Hal itu sering kali tidak disadarinya, karena menempatkan ternak di dalam rumah dianggapnya sebagai warisan dari leluhurnya, dan tidak pernah terjadi hal-hal yang merugikan dirinya, meskipun ternak satu rumah dengan manusia.

Dusun Penjalin Ulung terletak paling masuk (agak terpencil). Untuk sampai ke dusun tersebut harus melewati hamparan sawah dan tegalan yang cukup luas. Jalan menuju ke dusun tersebut berupa tanah liat dan batu besar yang tidak tertata. Sangat sulit lalu lintas ke dusun tersebut, terutama bila musim penghujan. Gambaran tersebut menunjukkan dusun Penjalin Ulung terisolasi dari dusun-dusun lainnya.

Keberadaan dusun yang relatif jauh dari pusat pemerintahan baik desa, kecamatan, maupun ibukota kabupaten berdampak pada aksesabilitas di dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Dusun ini dibandingkan dengan empat dusun yang lain tergolong lebih tertinggal.

Bila dilihat dari konsentrasi dan distribusi pemukiman masyarakat, terdapat kecenderungan utama pola pemukiman yaitu belum terintegrasinya sebagian besar penduduk secara intensif ke dalam tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan, sehingga kontak sosial dengan masyarakat di tingkat kecamatan bahkan kabupaten belum intensif, karena letaknya yang dapat dikatakan terisolasi, jauh dari pusat dan keramaian desa, kecamatan bahkan kabupaten.

Keberadaan jalan poros desa nampaknya sangat kurang memadai dengan perkembangan kecamatan maupun kabupaten pada umumnya, sehingga sulit menjadi penghubungan antara desa dan kota, yang pada gilirannya menyebabkan komunikasi antara desa dan kota juga menjadi terhambat.

Satu-satunya angkutan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi ke kecamatan adalah ojek (angkutan dengan sepeda motor), mereka harus membayar Rp 500,- setiap kali naik ojek dari desa ke kecamatan. Bagi warga masyarakat yang akan ke luar kecamatan (ke kota), harus menuju ke pangkalan *angkudes* (angkutan pedesaan) yang berada di sekitar kantor kecamatan, baru kemudian menggunakan *angkudes* tersebut untuk tujuan kota Babat dan kecamatan Sukorame. Tidak setiap saat dapat memanfaatkan *angkudes* (angkutan pedesaan), karena terbatas jumlahnya. Karena keterbatasannya itu pula tidak mengherankan bila jumlah penumpang melebihi kapasitas yang seharusnya. Sering kali terjadi mobil L 300 yang seharusnya cukup untuk 12 orang ternyata diisi hingga 17 orang. Meskipun begitu masyarakat tetap menggunakannya

walaupun harus berdesak-desakan dengan alasan bila tidak mau naik secara berdesak-desakan mereka harus menunggu kendaraan berikutnya untuk waktu yang relatif lama kecuali bila mau membayar mahal dengan memanfaatkan ojek.

Transportasi di Kecamatan Bluluk tidak sebanyak dan seramai di Kecamatan Sukorame, karena Sukorame merupakan penghubung antara kota Jombang dengan Bojonegoro. Akibatnya meskipun Sukorame merupakan kecamatan baru, namun perkembangannya jauh lebih pesat dibandingkan Bluluk. Disamping itu nama *Sukorame* sendiri membawa makna bahwa daerah itu "menyenangi keramaian", akibatnya daerah tersebut selalu ramai baik ramai karena mobilitas penduduk, ramai karena banyaknya program pembangunan, maupun ramai karena transportasi.

Perkembangan Kecamatan Bluluk ternyata tidak sepesat perkembangan kecamatan Sukorame sebagai pecahan dari Kecamatan Bluluk. Ada kepercayaan dari masyarakat, bahwa Kecamatan Bluluk itu selamanya tidak akan dapat berkembang, karena nama *bluluk* atau *pentil buah kelapa* menandakan sesuatu yang kecil (tidak berkembang) bahkan sering kali, jatuh (runtuh) sebelum sempat besar (wawancara dengan Mantan kepala desa, pak Krt (sesepuh masyarakat), 15 September 1997). Ungkapan informan tersebut kiranya juga terbukti dari kondisi kehidupan masyarakatnya tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, berbeda dengan kehidupan warga masyarakat Sukorame.

Keadaan rumah penduduk hampir sama disetiap pedukuhan. Bentuk rumah terdiri atas dua macam yaitu *limasan* dan *srotong*. Rumah yang berbentuk *limasan* ini biasanya dimiliki oleh warga yang lebih berada, sebaliknya penduduk kurang mampu banyak memiliki rumah dengan bentuk *srotong*. Memang tidak ada satu pernyataan dari penduduk kalau rumah limas itu milik orang mampu, dan rumah *srotong* milik orang kurang mampu, tapi paling tidak dari biaya yang dikeluarkan rumah *limas* memerlukan biaya yang lebih banyak dibandingkan rumah *srotong*.

Selain bentuk rumah, dinding juga merupakan salah satu indikator dari keadaan perekonomian penduduk. Penduduk yang lebih mampu cenderung menggunakan papan (*jati*) sebagai dinding rumah, dan bagi penduduk kurang mampu biasanya hanya *topengan* (dinding depan dari kayu, namun samping dan belakang menggunakan *gedhek*), bahkan banyak diantara rumah penduduk kurang mampu terbuat dari *gelam* (lembaran kulit pohon *jati*) dan *gedhek*. Mengenai atap hampir seluruh rumah beratapkan genteng, walaupun *usuk* dan *reng* cukup bercariasi. Sebagian atap ada yang terbuat dari kayu *jati* yang sudah di *pasrah*, ada juga kayu *jati* belum dipasrah dan sebagian lagi dari bambu, demikian pula dengan *soko* (tiang) dari rumah.

Tidak semua rumah dilengkapi dengan kamar mandi dan WC, karena hampir semua penduduk melakukan kegiatan mandi, cuci, dan buang air besar di sungai. Bahkan untuk kepentingan memasakpun tidak jarang penduduk mengambil

air di *belikan* (sumur kecil di sepanjang sungai). *Pekiwan* (kamar mandi) hanya digunakan untuk keadaan darurat atau bila ada tamu. *Pekiwan* ini dibuat sangat sederhana dengan *jambangan* tempat air yang sering kali tidak diisi air. Tidak ketinggalan pula rumah Perangkat Desa (Kepala desa dan Carik), meskipun telah disediakan kamar mandi, namun tidak pernah digunakan oleh kalangan keluarga itu sendiri. Hal ini ditandai oleh tidak tersedianya air dalam bak mandi, baru setelah ada tamu (dari luar desa dan bukan kerabat sendiri) bak mandi itu diisi air.

Hasil wawancara dengan isteri kepala desa menunjukkan bahwa air di desa ini sangat sulit, sehingga bak mandi yang ada di rumah jarang diisi air, kecuali bila ada tamu. Untuk kepentingan keluarga lebih baik mandi di sungai, selain tidak capai harus membawa air ke rumah, ternyata mandi di sungai sekaligus dapat melakukan aktivitas yang lain seperti mencuci pakaian dan buang air besar (Dwt, 16 Oktober 1996).

Selain tidak tersedianya MCK pada masing-masing rumah tangga, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan rumah, juga ditengarai oleh banyaknya tempat tinggal manusia yang bersatu dengan ternak.

Perilaku penduduk untuk menempatkan ternak bersama manusia, karena menganggap bahwa ternak tersebut juga masih merupakan *bathihnya* (keluarga), oleh karenanya diperlakukan sebagaimana anggota keluarga yang lain. Perlakuan kepada ternak ini kadang kala tampak berlebihan, misalnya menjaga jangan sampai ternak digigit nyamuk, maka dibuatkan *bedhiang*

(pembakaran sampah di sekitar ternak), hal ini sangat mengganggu kesehatan manusia. Selain itu aktivitas memandikan ternak ke sungai dilakukan secara rutin, padahal untuk manusianya sendiri belum tentu mandi secara rutin. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan diri dan lingkungan masih rendah.

### 3.2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Bronjong dipimpin oleh Sunarto (kepala desa) yang saat ini telah menjabat selama tujuh tahun. Dapat dikatakan bahwa tinggal satu tahun lagi masa jabatan yang pertama. Bila dimungkinkan Sunarto dapat menjabat untuk yang kedua kalinya, semuanya tergantung kepada masyarakat apakah tetap menghendaknya atau tidak.

Sunarto menggantikan ayahnya yang telah tiga kali berturut-turut menjadi kepala desa. Ayah Sunarto menjabat kepala desa lebih duapuluh tahun. Pada saat itu memang belum ada aturan yang membatasi jabatan kepala desa maksimal dua kali, sehingga sangat dimungkinkan kepala desa menjabat lebih dari dua kali asal masih dikehendaki rakyat.

Dalam kepemimpinannya Sunarto dibantu oleh seorang sekretaris desa. Carik atau sekretaris desa tersebut, seharusnya tahun ini (1997) sudah memasuki masa pensiun, karena beliau telah berusia lebih dari 60 tahun, dan hingga saat ini belum ada calon yang layak dapat dijadikan sekretaris desa, maka dia masih menjabat. Beliau menjabat

sebagai sekretaris desa lebih dari tigapuluh tahun, tepatnya sejak pemerintahan kepala desa *dongkol* atau mantan yaitu ayah kepala desa sekarang.

Selain sekretaris desa, masih terdapat perangkat desa (*perabot dusun*) lain. Diantaranya seorang *kaur* (kepala urusan), lima orang *kasun* (kepala dusun) atau sering pula disebut *kamituwo* atau *kamisepuh*, seorang staf desa, enam RW, lima RT, lima belas orang pengurus LKMD, tujuh belas orang pengurus LMD, seorang *modin*.

Lurah (kepala desa) dan perangkatnya yaitu *carik*, *kaur*, dan *kasun*, tidak menerima gaji, melainkan memperoleh *bengkok*, yaitu tanah milik desa. Tanah tersebut boleh dikerjakan selama yang bersangkutan menjabat di desa, setelah tidak menjabat maka *bengkok* itu dikembalikan ke desa. Luas *bengkok* yang diberikan tidak sama, kepala desa mendapat 4 Ha, *Carik* 3 Ha, *Kaur* dan *kasun* masing-masing 2 Ha. Meskipun bila dilihat dari ukuran luas *bengkok* yang diperoleh masing-masing perangkat cukup luas, namun karena kondisi tanah yang kurang mendukung, maka hasil yang diperoleh dari mengelola sawah tersebut belum memadai, kecuali bila musim tanam tembakau berhasil.

Terbatasnya jumlah aparat pemerintahan desa, menyebabkan terhambatnya penyelesaian administrasi desa, serta kurang lengkapnya data desa, apalagi tidak didukung olah sarana perkantoran yang memadai menyebabkan administrasi desa kurang tertata dan tertib. Pernah dinyatakan oleh kepala desa bahwa dirinya harus mengetik

sendiri surat baik untuk keperluan warga maupun untuk kecamatan, bila diperlukan mendadak. Ini tidak lain karena komunikasi dan transportasi di desa kurang mendukung.

Lurah (kepala desa) merupakan perantara antara masyarakat desanya dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi. Semua komunikasi dari pemerintah atau badan di luar pemerintah, kepada penduduk desa, baik seluruhnya ataupun perorangan, termasuk komunikasi melalui pos seringkali terjadi dengan sepengetahuan kepala desa. Semua urusan surat-menyurat dilakukan melalui kepala desa. Penduduk secara perorangan jarang sekali melakukan komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi atau badan di luar desa, karena kantor desa sudah berfungsi sebagai penyaring, akibatnya komunikasi yang bebas antara masyarakat desa dengan masyarakat di luar desa menjadi sangat terbatas.

Pemerintah Desa Bronjong pada tahun anggaran 1996/1997 telah menetapkan tujuh keputusan desa, dan mengesahkan dua keputusan desa. Kantor pemerintahan desa terletak diatas tanah seluas 350m<sup>2</sup>, luas bangunan 160m<sup>2</sup>, dan dibangun tahun 1989. Tempatnya di dusun Cumpleng Lor. Pada tahun 1996 yang lalu kantor desa sempat dilanda banjir yang menghabiskan semua perabot (kursi, meja, lemari), serta merusak arsip desa. Akibatnya akvitas kantor desa semakin terhambat.

Dalam hal komunikasi antara penduduk dengan perangkat desa, masih tampak adanya nilai-nilai Jawa yang dianut, yaitu *prinsip hormat*. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap orang dalam hal bicara dan membawa diri selalu menunjukkan



sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Perasaan hormat ini terwujud dalam ungkapan *isin, wedi, sungkan*, yang kesemuanya merupakan suatu kesinambungan perasaan yang mempunyai fungsi sosial. Akibat ini semua maka hanya kepatuhan, *manut*, dan *mengiyakan*, terhadap semua ajakan, suruhan, larangan para perangkat desa khususnya kepala desa yang terjadi.

Prinsip hormat yang diugemi penduduk menyebabkan mereka pada umumnya tidak berani menyanggah setiap pernyataan pimpinan (desa), meskipun sebenarnya pernyataan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya, dan dibalik kepatuhannya itu tidak berarti bahwa apa yang diiyakan akan dilaksanakan, namun sering juga tidak dilakukan, sehingga sering timbul ungkapan *nggih nggih ning ora kepanggih*. Ini sebenarnya merupakan sikap penolakan secara halus dari penduduk terhadap pernyataan pimpinan yang tidak disetujui. Sikap ini pulalah yang seringkali menjadi salah satu penyebab kegagalan program di desa.

Melalui kepala desalah semua program dan kebijakan pembangunan baik di tingkat lokal maupun pusat mengalir. Balai desa dapat dianggap sebagai "kamar makan" tempat "makanan" pembangunan dibagikan dan dikonsumsi. Berbagai papan nama tertampang di depan Kantor Desa atau Balai Desa, seakan menunjukkan betapa sibuknya kepala desa, karena banyak aktivitas yang ditangani, meskipun kenyataannya tidaklah demikian.

Susunan pemerintah Desa Bronjong telah disesuaikan dengan Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yakni terdiri atas Kepala Desa beserta sejumlah pembantunya dan Lembaga Musyawarah Desa. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa sedangkan Lembaga Musyawarah Desa bertugas memberi pertimbangan kepada Kepala Desa dalam menyusun anggaran belanja pemerintahan desa dan peraturan desa serta menelaah pertanggungjawaban Kepala Desa. Kepala Desa diangkat oleh Bupati setempat berdasarkan hasil pemilihan langsung oleh rakyat desa. Namun demikian pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa hanya dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat. Terhadap Lembaga Musyawarah Desa, Kepala Desa hanya berkewajiban menyampaikan keterangan pertanggungjawaban.

Susunan keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa meliputi seorang ketua, seorang sekretaris, dan sepuluh orang anggota. Ketua dipegang oleh Kepala Desa, sedang sekretaris dipegang oleh sekretaris desa, kelima kepala dusun sebagai anggota, sehingga dari keanggotaan ini tampak bahwa hanya lima orang saja diantara anggota Lembaga Musyawarah Desa berasal bukan dari kalangan masyarakat. Kelima orang tersebut berasal dari unsur LKMD, PKK, dan tiga orang tokoh masyarakat. Meskipun dua orang anggota LMD bukan dari unsur pemerintah, tetapi mereka juga berasal dari organisasi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah yaitu LKMD dan PKK.

Perubahan susunan pemerintahan desa ternyata belum banyak dikenal oleh masyarakat (warga desa). Hal ini tampak masih digunakannya sebutan pejabat desa dengan sebutan lama, seperti Kepala Desa masih disebutnya dengan *Lurah* atau *pak Inggi*, Sekretaris Desa dipanggil *Carik*, dan jabatan perangkat desa yang lain seperti urusan agama disebut *Modin*, Kepala Dusun dipanggil *Kamituwo*. Kenyataan ini menjelaskan bahwa pemahaman dan penghargaan rakyat desa terhadap posisi pejabat desa tertentu dalam konteks hirarki, wewenang, dalam pemerintah desa masih didasarkan pada struktur lama meskipun secara formal struktur pemerintah desa telah mengalami perubahan.

### 3.3. Keadaan Penduduk

Desa Bronjong memiliki 1661 jiwa, terdiri atas 834 pria dan 827 wanita, serta 381 KK. Rata-rata jumlah jiwa per KK sekitar 5 jiwa. Bila dilihat ukuran jumlah per KK relatif tidak terlalu besar, namun bila dikaitkan dengan ukuran keluarga ideal (catur warga), dapat dikatakan telah melebihi standar tersebut.

Dari komposisi usia penduduk dapat digambarkan sebagai berikut: usia 0-4 tahun (116 jiwa), 5-9 tahun (150 jiwa), 10-14 tahun (156 jiwa), 15-19 tahun (174 jiwa), 20-24 tahun (164), 25-29 tahun (180 jiwa), 30-34 tahun (145 jiwa), 35-39 tahun (117 jiwa) dan diatas 40 tahun 455 jiwa.

Dari 455 jiwa penduduk diatas usia 40 tahun, yang berusia diatas 57 tahun hanya 25 orang. Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa harapan rata-rata hidup penduduk desa Bronjong relatif rendah, mengingat penduduk yang berusia diatas 57 tahun hanya sekitar 1,5%. Mungkin ini ada kaitannya dengan kehidupan ekonomi mereka (tergolong kurang mampu), yang pada gilirannya berdampak pada pemenuhan kebutuhan kesehatan.

Kelahiran di Desa Bronjong tahun 1996/1997 sebanyak 15 jiwa (0,9%), sedangkan jumlah kematian sebanyak 7 jiwa (0,42%). Jumlah penduduk datang sebanyak 5 orang dan pergi 3 orang. Jika dilihat dari tingkat mobilitas penduduk, maka tingkat pertumbuhan penduduk 0,6%. Tingkat pertumbuhan ini dapat dikatakan relatif rendah. Rendahnya mobilitas penduduk yang datang ini antara lain disebabkan oleh kurang menariknya penduduk untuk masuk ke desa akibat lesunya aktivitas perekonomian pedesaan, karena hanya digerakkan oleh sektor pertanian yang masih tradisional dengan ekonomi subsistensinya. Selain itu peluang ke luar desa juga kurang dapat dimanfaatkan karena tidak didukung oleh keterampilan yang memadai untuk bersaing dengan tenaga kerja lain. Semuanya itu akibat rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keterampilan yang dimiliki. Selain itu keadaan transportasi dan komunikasi yang relatif kurang memadai juga menjadi salah satu penyebab rendahnya mobilitas penduduk.

### 3.4.. Keadaan Pendidikan

Kemiskinan banyak terjadi di desa penelitian, hal ini tidak hanya sebagai problema struktural akan tetapi juga kultural dan natural. Sangat banyak faktor yang memperlemah bergeraknya roda ekonomi masyarakat di pedesaan, satu diantaranya adalah tingkat pendidikan masyarakat.

Keadaan penduduk menurut pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut: SD sebanyak 750 jiwa, SLTP 142 jiwa, SLTA 55 jiwa, perguruan tinggi 4 jiwa. Dari 1660 jiwa ternyata baru 901 jiwa yang mengenyam pendidikan, berarti 599 belum mengenyam pendidikan. Bila jumlah anak dibawah usia SD sebanyak 208 jiwa, sedangkan usia 0-3 tahun ada 112 jiwa, dan 4-6 tahun 96 jiwa, berarti masih ada 391 (25%) jiwa belum sempat menikmati pendidikan atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan di SD.

Sementara itu, saat ini pemerintah sedang menggalakkan wajib belajar pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu kondisi penduduk yang belum sempat menikmati pendidikan ini merupakan permasalahan tersendiri. Banyaknya anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) sebanyak 112 jiwa, dan 4-6 tahun sebanyak 96 jiwa tidak didukung oleh keberadaan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di Desa Bronjong hanya tiga buah, terdiri atas TK, SD, dan MI, masing-masing satu lembaga, didukung tenaga guru sebanyak 12 orang.

Pendidikan luar sekolah tampaknya tidak berkembang di desa ini. Terlihat dari tidak adanya kegiatan kelompok belajar baik Paket A maupun Paket B, serta aktivitas pondok pesantren, demikian pula dengan kursus-kursus. Kurang semaraknya atau tidak berkembangnya aktivitas pendidikan luar sekolah, di satu sisi disebabkan oleh kondisi geografi Desa Bronjong, dan di sisi lain kurangnya kesadaran warga terhadap arti penting pendidikan. Rutinitas sehari-hari para warga masyarakat, seakan telah menyita seluruh waktu mereka, sehingga tidak ada lagi minat untuk menambah pengetahuan.

Problema di bidang pendidikan berkaitan pula dengan upaya penciptaan lapangan usaha baru di luar sub sektor pertanian (*off-farm*) menjadi terhambat dan sulit berkembang. Diversifikasi usaha sukar terjadi. Peluang kerja di kota besar (Kabupaten dan Propinsi) dalam sektor perdagangan, industri dan jasa sukar ditembus oleh mereka. Mereka kalah bersaing ketika berada di luar daerah dalam merebut peluang kerja, karena terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Padahal untuk tetap bertahan di sektor pertanian mereka dihadapkan dengan berbagai kendala.

Selalu terjadi paradoks di dalam dunia pendidikan dan upaya penyediaan lapangan kerja terutama di pedesaan. Situasi dilematis antara pendidikan pekerjaan selalu menyertai penduduk miskin di pedesaan, dan menjadikan masalah tersendiri yang menghendaki jalan keluar untuk mengatasinya.

### 3.5. Keadaan Matapencaharian

Proporsi pekerjaan dari 1661 jiwa penduduk Desa Bronjong dapat digambarkan bahwa sekitar 54% (899 orang) bekerja, dari mereka yang bekerja tersebut porsi terbesar adalah petani (820 jiwa), PNS (8 orang), ABRI (8 orang) Tukang kayu (23 orang), wiraswasta (15 orang), Bakulan (mracang) 13 orang dan lain-lain 13 orang.

Mereka yang bekerja sebagai petani tidak seluruhnya sebagai petani pemilik, namun sebagian sebagai petani penggarap, jumlah mereka (penggarap) sebanyak 353 orang (43%) dan buruh tani sekitar 28 orang (3%).

Bila dilihat dari kondisi pemilikan lahan, dapat dikatakan bahwa masih cukup banyak penduduk desa pemilik lahan, namun mengingat kondisi alam yang kurang menguntungkan maka banyak lahan pekarangan dibiarkan terbengkalai (*bero*) atau menjadi lahan tidur. Penduduk merasa bahwa tanah pertanian di Desa Bronjong tidak banyak memberikan keuntungan, karena tidak tersedianya air sebagai penunjang pertanian. Mereka seakan pasrah dengan kondisi yang ada dan lingkungan seperti itu tampaknya tidak menjadi masalah bagi mereka. Oleh karena itu tidak nampak usaha memperbaiki kehidupan diri dan keluarganya, mereka jarang sekali yang mengadu nasib ke luar desa karena merasa tidak memiliki keberanian untuk mengadu nasib akibat tidak dimilikinya bekal keterampilan yang memadai, sehingga dapat dikatakan bahwa mobilitas penduduk Desa Bronjong rendah.

Ditilik dari matapencaharian penduduk, dapat ditengarai bahwa masih cukup besar penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada sektor pertanian, meskipun diketahui bahwa potensi lahan pertanian di Desa Bronjong, kurang menguntungkan. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kurang berani beralih kerja di luar pertanian, antara lain terbatasnya informasi, pengetahuan, serta komunikasi dengan dunia luar pada masyarakat desa.

Seperti yang dinyatakan oleh salah seorang anggota PKK bahwa:

Penduduk Desa Bronjong, banyak yang belum tahu kota Lamongan, apalagi Surabaya. Orang sini ini paling-paling ke pasar Bluluk, kalau mau beli emas yang paling jauh di kota Babat (Wawancara dengan Ibu Tandur, 10 Juni 1996).

Pernyataan warga PKK tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Desa Bronjong memiliki tingkat mobilitas yang rendah. Mereka terlalu puas untuk selalu menetap di desa meskipun kondisi desa kurang menguntungkan.

Dari gambaran tentang keadaan pekerjaan penduduk, dapat dinyatakan bahwa desa Bronjong merupakan desa pertanian, namun kondisi ini tidak didukung oleh tekstur tanah pertanian yang ada. Hasil pertanian yang sangat diandalkan penduduk adalah tanaman tembakau. Namun karena menanam tembakau tidak dapat dilakukan setiap saat, maka penduduk mengelola tanah untuk tanaman yang dirasakan cocok dengan keadaan musim, meskipun kadang kala tidak menjajikan hasil yang optimal.



Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari di samping memiliki kebiasaan menanam tembakau, penduduk desa Bronjong juga mengambil ranting pohon jati baik untuk keperluan bahan bakar sendiri, maupun dijual. Selain itu juga masih ada penduduk yang mengambil daun jati untuk dijual. Keadaan yang sangat memprihatinkan akan tampak jelas terutama bila musim kepompong jati (pada waktu daun jati mulai berguguran), banyak penduduk (dewasa dan anak, baik pria maupun wanita) mencari kepompong (*entung*) di hutan jati. Kepompong tersebut sebagian dijual, dan ada yang dimakan sendiri.

Dari gambaran aktivitas penduduk dalam memanfaatkan hutan, tampak bahwa masih banyak penduduk yang kurang menyadari akan pentingnya mengelola lingkungan terutama lingkungan hutan. Mereka merasa bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap kawasan hutan (menebang kayu) tidak berdampak pada kelestarian lingkungan.

Bila dikaji lebih jauh, seharusnya pembangunan pertanian di pedesaan oleh pemerintah seperti proyek inpres, padat karya, pembangunan infrastruktur di luar pertanian akan mempercepat masuknya sumber ekonomi ke luar pertanian. Sehingga hampir tidak ada lagi desa yang terlalu menggantungkan pada sektor pertanian semata. Tetapi kenyataan yang terjadi tidaklah demikian, karena proyek-proyek tersebut kurang mengena pada kehidupan masyarakat pedesaan akibat tidak didukung oleh berbagai hal, diantaranya pendidikan dan pemasaran.

Keterkaitan masyarakat desa dengan sistem ekonomi luar pertanian yang seharusnya dapat menciptakan sumber-sumber ekonomi dan menumbuhkan kesempatan kerja baru di daerah pedesaan, ternyata tidak terjadi di desa penelitian. Hal ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan dari tahun ke tahun tidak menunjukkan adanya pergeseran, sebagai misal kondisi tahun 1994 menunjukkan jumlah petani sebanyak 560 orang dan tahun 1996/1997 jumlah petani 820 orang. PNS menunjukkan jumlah yang tetap (8 orang) demikian juga ABRI.

Pekerjaan sebagai tukang kayu menunjukkan peningkatan dari 8 orang menjadi 23 orang. Peningkatan jumlah tukang di Desa Bronjong sebagai dampak sulitnya menggantungkan hidup di sektor pertanian, sehingga harus pergi ke kota menjadi buruh bangunan. Pekerjaan sebagai tukang batu dan tukang kayu dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang tidak banyak menuntut keterampilan khusus, karena dengan bermodalkan tenaga saja mereka dapat melakukannya.

Pekerjaan sebagai wiraswasta (pengusaha gamping) dalam kurun waktu 3 tahun juga tidak menunjukkan peningkatan, karena hanya orang yang sama bergerak di bidang usaha gamping. Demikian juga pekerjaan sebagai pedagang kiranya belum menyentuh masyarakat karena komunikasi dengan masyarakat luar dapat dikatakan sangat terbatas. Mereka sering kali menjual hasil tanamnya kepada para tengkulak atau pengijon yang datang ke desa, belum ada keinginan untuk membawa hasil panen langsung ke kota. Selain transportasi sebagai kendala, juga karena belum tahu pasar yang tepat.

### 3.6. Agama dan Adat istiadat

Seluruh penduduk Desa Bronjong beragama Islam. Kehidupan beragama di desa ini didukung oleh sarana ibadah antara lain 3 masjid dan 3 mushola. Dari pengamatan peneliti jumlah jamaah di masing-masing rumah ibadah tidak menggambarkan ketaatan dalam beragama, karena sedikitnya jumlah jamaah yang ada dibandingkan dengan pemeluk agama Islam. Sebagai contoh mereka yang melakukan sholat di masjid atau mushola tidak lebih dari duapuluh orang, sehingga masjid atau mushola tersebut seakan-akan hanya sebagai pelengkap sarana prasarana pemerintahan desa.

Bila dikaji lebih lanjut memang semua penduduk menyatakan beragama Islam, namun tidak melakukan ibadah secara taat. Menurut pernyataan salah seorang tokoh masyarakat (guru)

Masyarakat disini jarang yang melakukan sembahyang, karena sudah dari dulu-dulunya tidak pernah sembahyang. Mereka menyatakan Islam, namun hanya di KTP. Perkiraan saya ini ada kaitanya dengan Islam abangan, karena daerah selatan ini (Lamongan bagian selatan) dahulu dikenal sebagai daerah hutan tempat orang-orang abangan. Lain dengan daerah utara sebagai daerah pesisir, memang tempat orang yang taat beragama Islam (wawancara dengan Stn, 7 April 1997).

Dari pernyataan salah satu tokoh ini, menunjukkan bahwa kehidupan beragama di Desa Bronjong kurang semarak. Gambaran lain dari hasil pengamatan selama peneliti di lapangan, juga

menggambarkan bahwa penduduk yang melakukan Sholat Jumat di masjid depan balai desa tidak pernah lebih dari lima belas orang dewasa, dan anak-anak berjumlah sekitar sepuluh orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan jumlah tersebut relatif sangat kecil.

Meskipun tertulis bahwa di Desa Bronjong terdapat empat majelis taklim dengan 126 jemaah, namun aktivitas pengajian jarang sekali diadakan. Kegiatan keagamaan hanya dilaksanakan bila ada peringatan hari besar Islam seperti Nuzul Qur'an, Isra Mi'raj. Melihat kurang lancar dan efektifnya kegiatan majelis taklim yang ada, sehingga organisasi tersebut sulit dijadikan wadah komunikasi. Demikian juga kegiatan berpuasa (pada bulan Ramadhan), biasanya kegiatan ini lebih banyak dilakukan oleh anak-anak, sedangkan bagi orang dewasa dan tua jarang sekali yang melakukan ibadah puasa. Ini ditandai oleh sedikitnya warga desa (orang tua dan dewasa) yang mengikuti *shalat tarawih* di setiap rumah ibadah yang ada di Desa Bronjong. Selain itu kurangnya greget masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa tampak pula dari perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi makanan pada setiap waktu (di sawah, warung, di rumah).

Kehidupan beragama yang tampak belum semarak, ini kemungkinan disebabkan oleh kentalnya masyarakat Desa Bronjong dengan upacara adat. Sebagai misal masih dilakukan upacara bersih desa (*nyadran*), upacara ini dilakukan di tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai sejarah, antara lain sungai, sumur, serta makam. Upacara bersih desa ini

dilakukan setelah selesai panen padi. Tujuan upacara ini tidak lain sebagai ucapan terimakasih atas rejeki yang diberikan *sing gawe urip* melalui keberhasilan panen.

Selain itu penduduk masih senang dengan hiburan *tayub* atau *ledhek*, dalam acara-acara hajatan penduduk atau upacara desa. Penduduk merasa puas bila dapat melakukan hiburan *tayub*, apalagi bila *tandak*, *ledhek* atau penari yang dihadirkan adalah primadona penduduk. Mereka tidak peduli berapa biaya yang dihabiskan untuk upacara tersebut. Namun biasanya acara besar-besaran tersebut dilakukan bila panen dianggap berhasil.

Dalam kehidupan bermasyarakat, melaksanakan tatacara yang telah menjadi kebiasaan penduduk seakan-akan menjadi suatu keharusan, masyarakat tidak peduli biaya yang diperlukan untuk melakukan tatacara (upacara) tersebut.

Selamatan merupakan salah satu bentuk upacara di desa, misalnya upacara kelahiran (*brokohan, sepasar, selapan, bayi telu, bayi pitu, setahun*), selamatan mendirikan rumah, selamatan orang meninggal (*sur tanah, telung dina, pitung dina, patang puluh dina, pendak pisan, pendak pindo, nyewu*), selamatan mulai tanam, selamatan saat padi mulai berisi (*tingkepan*), selamatan pada waktu akan panen, selamatan saat ternak beranak (*brokohan*), upacara yang berkaitan dengan agama (*suroan, maleman, mapak (menjelang puasa), nutup setelah puasa berakhir, muludan*), upacara yang berkaitan dengan desa adalah bersih desa atau *nyadran*. Tampak adanya perpaduan antara adat dan agama, dan ini merupakan budaya mereka.

### 3.7. Komunikasi dan Transportasi

Komunikasi merupakan aktivitas pokok dalam kehidupan pokok sehari-hari warga desa. Komunikasi ini merupakan hubungan sosial antara pihak yang satu dengan lainnya. Pola komunikasi antar warga dilakukan secara langsung dan bersifat personal (*face to face communication*). Penyebaran berita dari mulut ke mulut yang biasa disebut *gethok tular*. Pola komunikasi seperti ini tidak tergantung dari jarak tempat tinggal, melainkan lebih banyak ditentukan oleh tingkat keintiman hubungan.

Gambaran tentang tingkat keintiman ini pernah dijumpai, pada waktu ada pertemuan mendadak dari tingkat kecamatan dan kunjungan dari Surabaya, secara sukarela orang di sekitar tempat pertemuan menjemput warga lain yang berada di dusun terpencil (Penjalin Ulung), ada penduduk yang meminjamkan sepeda motor untuk keperluan penjemputan warga yang diperlukan tersebut.

Meskipun perkembangan teknologi telah menyebar ke berbagai pelosok, namun tidak demikian yang terjadi di Desa Bronjong. Hal ini dapat dibuktikan belum tersedianya sarana telepon, maupun interkom untuk kepentingan masyarakat maupun pemerintahan. Bagi masyarakat sarana informasi dengan elektronik yang selama ini ada hanyalah radio, dan baru sekitar satu tahun terakhir ini telah dijumpai pesawat TV di beberapa rumah penduduk. Keberadaan surat kabar pada masyarakat tidak juga tidak banyak dijumpai, hanya surat

kabar milik desa yang merupakan pembagian dari kecamatan (*Karya Dharma*).

Keadaan saluran komunikasi yang kurang menguntungkan, karena tidak didukung oleh sarana transportasi, menyebabkan terbatasnya informasi yang diperoleh masyarakat. Ketersediaan prasarana perhubungan yang memungkinkan warga untuk berkomunikasi dengan masyarakat di luar desa juga sangat kurang memenuhi syarat. Keberadaan jalan beraspal hanya di luar desa (menghubungkan antara kecamatan Ngimbang dengan Kecamatan Bluluk). Sebaliknya keadaan jalan desa antar dusun satu dengan lainnya masih berupa jalan makadam (tanah dan batu), jembatan terbuat dari kayu dan keadaanyapun sudah sangat memprihatinkan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa keadaan sarana komunikasi dan transportasi di Desa Bronjong kurang memadai.

Keadaan ini tentunya berdampak pada terbatasnya pengetahuan dan wawasan penduduk terhadap dunia luar, sehingga juga berdampak terhadap upaya pengembangan diri ke arah yang lebih baik.

Demikian pula keadaan pemilikan kendaraan, di Desa Bronjong hanya tersedia 162 sepeda, dan 26 sepeda motor, sedangkan sarana transportasi yang lain tidak dijumpai. Selain karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dimilikinya kendar roda empat, terutama bagi penduduk di sebelah utara sungai, juga dikarenakan ekonomi masyarakat yang tergolong kurang. Meskipun demikian meningkatnya jumlah sarana transportasi yang dimiliki warga saat ini ternyata

juga sebagai akibat semakin berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, keadaan ini tentunya akan semakin berkembang dan diharapkan akan mampu menambah mobilitas penduduk ke masyarakat luas.

### 3.8. Sistem Kelembagaan Sosial Desa

Lembaga kemasyarakatan pada umumnya berfungsi sebagai wadah penyaluran minat dan kepentingan warga. Dalam beberapa bentuk, lembaga kemasyarakatan bersifat terbuka, artinya setiap warga bebas menjadi anggota dan terlibat di dalam aktivitas lembaga tersebut. Keterlibatan dalam suatu organisasi masih dimungkinkan untuk menjadi anggota organisasi lain, kesemuanya itu tergantung dari minat masing-masing warga. Keterlibatan dalam suatu organisasi paling tidak akan menambah wawasan, selain meningkatkan hubungan sosial maupun ketetanggaan. Secara tidak langsung aktivitas kelembagaan ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas pemerintahan.

Sistem kelembagaan sosial desa ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem kelembagaan sosial tingkat kampung (RT, RW atau dusun) dan sistem kelembagaan sosial tingkat desa. Kedua sistem kelembagaan tersebut berbeda satu sama lain, terutama dalam pola hubungan sosialnya. Sistem kelembagaan sosial tingkat kampung umumnya mengikat jalinan hubungan sosial antar anggotanya satu sama lain dalam ikatan hubungan bersifat komunal. Di desa penelitian ini lembaga sosial



tingkat kampung merupakan kelompok kerukunan seperti, sinoman. Kelompok ini berkembang atas prakarsa bersama warga setempat yang biasanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anggotanya. Di desa penelitian jumlah kelompok ini tidak banyak (3 kelompok).

Kelompok/lembaga sosial di desa penelitian ada juga yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dan intervensi dari pemerintah dalam rangka pembangunan masyarakat desa. Kelompok dan organisasi sosial di pedesaan terhimpun dalam LKMD melalui sepuluh seksinya antara lain: seksi agama, dengan kegiatan kelompok Majelis Taklim. Majelis Taklim kegiatannya hanya pengajian yang dilakukan satu minggu sekali.

Berikutnya adalah seksi pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK). PKK ini memiliki berbagai aktivitas diantaranya kelompok perpuluhan (dasa wisma), posyandu. PKK yang selalu mengadakan kegiatan rutin, namun aktivitasnya sebatas arisan dan penimbangan bayi, demikian pula Dasa Wisma. Seksi lain adalah seksi P4, melakukan kegiatan antara lain permainan simulasi. Secara terstruktur nama kelompok permainan simulasi P4 memang ada, namun dalam aktivitasnya ternyata dapat dikatakan hampir-hampir tidak pernah dilakukan secara rutin. Kelompok simulasi P4 melakukan aktivitasnya bila akan diadakan lomba khususnya antar desa. Demikian pula kegiatan karang taruna yang masuk seksi kesenian pemuda dan olah raga. Karang taruna beraktivitas bila akan memperingati hari kemerdekaan.

Kelompok sosial semacam ini terbentuk atas prakarsa pemerintah yang berjalan dan bekerja di bawah pengawasan birokrasi desa dan biasanya berorientasi untuk melaksanakan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Keadaan kelompok bentukan dari atas (pemerintah), kondisinya tidak berbeda jauh dengan kelompok atau organisasi yang dibentuk dari masyarakat (kelompok berdasarkan kepentingan) seperti kelompok sinoman, yang dibentuk untuk membantu masyarakat yang mengalami kerepotan seperti punya hajat, ada kematian. Kelompok sinoman ini biasanya terdiri atas karang taruna (para pemuda) yang ringan tangan dalam bekerja. Meskipun secara kegiatan sering tampak dilakukan, namun secara organisatoris belum merupakan organisasi formal.

Dari gambaran yang ada tampak bahwa organisasi sosial kemasyarakatan ini kurang kreatif dan proaktif, sehingga tampak pasif dalam beraktivitas. Keadaan keanggotaan menunjukkan bahwa orang yang terlibat di suatu organisasi juga terlibat pada organisasi lain, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka yang terlibat di organisasi adalah orang yang sama. Kurangnya keterlibatan masyarakat luas dalam keorganisasian karena masih adanya rasa rendah diri diantara masyarakat akibat kurangnya informasi dan rendahnya pendidikan mereka. Mereka malu untuk diajak *kumpul-kumpul*, karena tidak bisa apa-apa.

### 3.9. Lembaga Ekonomi di Desa

Salah satu lembaga perekonomian yang tampak di desa adalah pasar. Secara fisik pasar sebagai tempat penukaran barang dan uang merupakan satu indikator yang dapat menggambarkan dinamika ekonomi desa.

Desa Bronjong tidak memiliki pasar desa. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka membeli kepada para *wlijo* (penjual belanja keliling), atau berbelanja sendiri ke pasar Bluluk (di kecamatan) bila hari pasaran, yaitu setiap *Wage*. Pasar Bluluk berada di persimpangan jalan antara kecamatan Modo, Sambeng, dan Sukorame, namun karena transportasi ke daerah tersebut tidak lancar, menyebabkan pasar Bluluk tidak terlalu banyak dikunjungi orang (pembeli dan penjual).

Barang yang diperjual belikan pada setiap hari pasaran berupa bahan pokok seperti gula, garam, ikan asin, ikan teri, terasi, kopi, kain, peralatan di sawah (*pacul*, *arit*, *garu*), peralatan rumah tangga (*dapur*). Pedagang berdatangan dari luar Kecamatan Bluluk dengan menggunakan angkutan umum (mobil). Barang dagangan yang dijual di pasar ini biasanya dilakukan secara tunai, alat ukuran yang digunakan oleh para penjual (*bakul*) yang sudah menetap yaitu timbangan *kodok*, tapi bagi petani yang menjual barang hasil pertanian biasanya menggunakan ukuran *rinjing* (keranjang dari bambu yang biasa di *gendhong*), *pikulan* (dua keranjang), *jinahan* (sepuluh biji dengan bonus satu), *ondhokan* (satu onggok), *umplungan* (satu kaleng bekas mentega biasanya untuk ukuran

satu kilogram), *ombyokan* atau *unthingan* (merupakan ikatan dapat besar atau kecil. *Ombyokan* biasanya digunakan untuk jagung muda, sedangkan *unthingan* digunakan untuk bayam, kacang panjang, atau sayuran lainnya.

Pada saat pasaran ini biasanya banyak penjual makanan karena orang yang datang ke pasar diperkirakan akan mencari makanan. Selain itu juga merupakan ajang para tukang *ojek* untuk mengais rejeki.

Bagi penduduk desa dalam menjual barang dagangannya (hasil kebun), memberikan harga setelah mendengar berapa harga belinya. Sebagai misal sebelum membawa dagangan dia mencari tahu kepada *wlijo* berapa harga pisang satu sisir. Setelah tahu harga satu sisirnya kemudian dia memperkirakan harga untuk satu tandannya (ini bila akan menjual pisang secara tandanan, namun bila dijual sisiran maka pisang tersebut akan dipotong atau dibuat sisiran (*lirang/cengkeh*). Dalam menawarkan biasanya tidak lebih dari harga yang diketahui dari *wlijo* tersebut. Dia tidak berfikir apakah itu laba (*bathi*) atau rugi, tetapi yang jelas dari hasil kebun dia memperoleh uang untuk keperluan sehari-hari.

Setelah barang dagangannya habis biasanya para petani (penduduk desa), membelanjakan hasil jualnya untuk membeli kebutuhan dapur selama sepagar (lima hari), yang dibeli antara lain garam, gula, kopi, minyak kelapa, ikan (asin, teri), terasi serta bumbu dapur, kecap, sabun mandi dan cuci. Kebutuhan itu perlu dipenuhi karena tempat tinggal mereka umumnya jauh dari pasar sehingga bila kehabisan barang tersebut akan sulit untuk memperolehnya.

Tidak adanya pasar di Desa Bronjong, dan sepiunya pasar di Kecamatan Bluluk, menyebabkan laju ekonomi desa kurang dinamis. Masyarakat tidak terangsang untuk melakukan budidaya dalam bidang pertanian, mengingat pasar yang dapat digunakan sebagai tempat menjual hasil produksi mereka tidak mendukung. Untuk menjual hasil ladang (bagi yang memanfaatkan ladang pekarangan), biasanya cukup dilakukan melalui para *wlijo* bila panennya sedikit.

Pada waktu ditanyakan tentang kemana mereka menjual hasil ladang seperti kelapa, sayuran, telur ayam. (Mnrsh, 25 Oktober 1997) menjawab bahwa untuk menjual hasil ladang cukup dilakukan di rumah saja, biasanya ada para *mlijo* yang mau membelinya, meskipun harga yang ditawarkannya tidak terlalu tinggi. Saya selalu menjual atau kadang kala yang menukarnya dengan keperluan yang saya perlukan. Misalnya kelapa tiga butir ditukar dengan ikan asin, kemiri, terasi. Bila ternyata lebih, akan diberi uang (pengembalian), tapi bila kurang saya yang menambahnya. Pada waktu ditanya mengapa tidak dijual sendiri ke pasar?, dia menjawab pasar di sini hanya lima hari sekali (*sepasar*), dan keadaanya tidak seramai pasar di Sukorame atau di Modo. Karena tidak terlalu ramai biasanya pembeli hanya orang-orang sekitar sini saja. Sehingga bila menjual hasil ladang di pasar Bluluk, sering tidak laku, karena hampir semuanya sudah memiliki sendiri. Namun bila hasil ladang cukup banyak biasanya dibawa ke pasar Sukorame atau Modo, di sana lebih banyak pembelinya.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa kondisi pasar di Bluluk memang kurang mendukung perkembangan perekonomian di wilayah tersebut. Salah satu sebabnya letaknya kurang strategis meskipun di persimpangan jalan, namun sulit dicapai kendaraan, sehingga pedagang dari luar desa enggan berdagang ke pasar Bluluk. Mereka lebih senang berdagang di pasar Sukorame, Modo atau Ngimbang. Lokasi di ketiga pasar tersebut sangat strategis karena menghubungkan antara dua kabupaten Jombang dan Bojonegoro, selain itu transportasi ke arah tersebut sangat lancar.

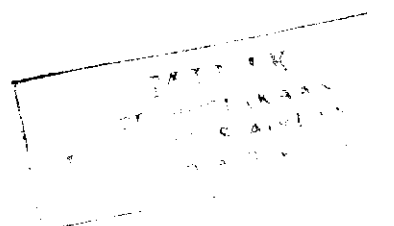
Pak Sitat (sekretaris desa) menyatakan bahwa matinya pasar Bluluk itu sejak tahun 1970-an, yaitu pada saat lalu lintas kereta api ditiadakan. Sebelum tahun 1970-an pasar Bluluk itu sangat ramai, karena berdekatan dengan stasiun kereta api. Kereta api yang lewat Bluluk pada saat itu menghubungkan kota Jombang dengan kota Babat. Namun setelah kereta api tidak ada, pasar di Bluluk ini seakan-akan mati. Penjual dan pembeli hanya warga di Kecamatan Bluluk itu sendiri. Pedagang lebih senang ke Sukorame karena Sukorame itu tempatnya strategis. Sukorame sendiri merupakan penghubung kota Jombang dan Bojonegoro, sehingga transportasi lebih lancar dan lebih banyak.

Karena kondisi pasar seperti kiranya menjadi salah satu sebab bagi penduduk kurang berani mengembangkan pekerjaan di luar pertanian, atau membuat pertanian sebagai suatu usaha. Mereka takut kemana harus memasarkannya bila ternyata produksi sudah berhasil. Peluang untuk pergi ke luar kota (mencari pasar di luar) juga sangat terbatas, terutama akibat terbatasnya pengetahuan warga desa.

Perdagangan kecil-kecilan (warung *pracangan*), jumlahnya tidak banyak. Di setiap dusun hanya ada sebuah warung, barang yang dijual terutama keperluan sehari-hari seperti minyak tanah, rokok, gula, kopi, sabun, makanan kecil. Mereka tidak berani menjual barang dagangan yang lebih banyak dan lebih lengkap. Disamping memang modalnya tidak ada, biasanya daya beli masyarakat relatif kurang (Sng, 20 Oktober 1997).

Pengenalan masyarakat terhadap Bank dapat dikatakan relatif kurang. Para petani sebagian besar memang menjadi anggota KUD (khususnya bagi pemilik tanah), ini berkaitan dengan perolehan *saprodi* (sarana produksi) seperti pupuk, obat-obatan dan bibit tanaman. Mereka biasanya meminjam pada saat akan mulai tanam dan mengembalikannya setelah panen, dengan cara menjual hasil panen kepada KUD. Keterlibatannya dalam KUD karena perintah dari kepala desa, karena kalau tidak menjadi anggota KUD, mereka tidak akan dapat memperoleh pupuk, obat-obatan (*saprodi*), karenanya semuanya hanya dijual di KUD. Pemanfaatan Bank (koperasi) untuk kegiatan lain tidak pernah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat belum banyak tahu tentang manfaat bank di satu sisi, dan di sisi lain merasa takut untuk berhubungan dengan bank karena dianggapnya terlalu repot.

Kehidupan seperti inilah seringkali kurang meningkatkan daya saing pada masyarakat untuk lebih mengembangkan dirinya termasuk kehidupan ekonominya, sehingga mereka selalu berada dalam keadaan pas-pasan.



**BAB 4**



## BAB 4

### KARAKTERISTIK KELUARGA PENERIMA BANTUAN DI DAERAH PENELITIAN

#### 4.1. Keadaan Ekonomi Keluarga

Pendapatan rumah tangga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat ekonomi keluarga atau seseorang. Semakin rendah pendapatan semakin rendah tingkat ekonomi keluarga dan berarti semakin kentara tingkat kemiskinan yang bersangkutan. Bagi mereka yang memiliki pendapatan (menurut batas toleransi tertentu) Rp. 19.973,- per kapita per bulan untuk pedesaan dan Rp. 24.513,- untuk perkotaan (BPS, 1992), dapat dikategorikan miskin.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga penerima bantuan rata-rata tiap bulannya berkisar antara Rp. 80.000,- hingga Rp.100.000,- dengan jumlah anggota rumah tangga sekitar enam orang (Stn, 17 Mei 1996). Pendapatan itu diperoleh dari *buruh-macul* (mencangkul sawah), dengan upah Rp. 2.500,- per setengah hari (07.00-12.00) dengan makan satu kali atau Rp. 5000,- untuk satu hari (07.00-16.00) dengan makan dua kali. Pada umumnya mereka tidak setiap hari dapat bekerja.

Melihat jumlah pendapatan rumah tangga yang ada, bila dibandingkan dengan patokan dari BPS menunjukkan bahwa

keluarga penerima bantuan termasuk kategori miskin, karena pendapatan mereka per bulan per orang hanya sekitar Rp.18.000,-, dan ini berada dibawah batas toleransi BPS. Meskipun ada di antara rumah tangga penerima bantuan yang memiliki pendapatan sekitar Rp 200.000,- per bulan, namun jumlahnya tidak banyak.

Setelah diamati, mereka ditengarai sebagai orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para pamong desa, sehingga mereka sebenarnya dapat dikatakan tidak miskin. Bila dikaitkan dengan persyaratan bagi para penerima bantuan, mereka sebenarnya tidak termasuk kategori tersebut.

Memperhatikan fenomena tersebut tampak ketidak-beresan dalam penentuan kelompok sasaran, karena penentuan kelompok sasaran lebih banyak ditentukan oleh pimpinan desa (menurut apa yang disenangi) dari pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemberi bantuan.

Rendahnya pendapatan keluarga penerima bantuan ini menyebabkan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup juga rendah. Kondisi ini menentukan tingkat kesejahteraan kehidupan mereka secara keseluruhan. Bagi keluarga miskin (berpendapatan rendah), upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus dibayar mahal dengan keharusan untuk siap memasuki berbagai kesulitan dan mencari alternatif untuk mempertahankan hidup.

Pendapatan yang diperoleh dari bekerja sebagai buruh tani, mencari kayu maupun kerja serabutan lainnya, sebagian besar dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

keluarga (makan nasi dua kali dalam sehari, dan itupun tidak sepenuhnya nasi beras namun dicampur dengan jagung), di samping untuk keperluan rokok bagi para pria.

"Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menabung, jangankan menabung, untuk makan setiap hari dapat cukup saja sudah senang, walaupun ada sering kali tabungan itu hanya sementara, karena biasanya segera dipakai untuk keperluan mendesak seperti keluarga sakit, beli pupuk (Ds., 15 Oktober 1997).

Kebiasaan lelaki merokok juga merupakan fenomena yang tampak dalam kehidupan keluarga penerima bantuan, mereka menyatakan lebih baik kurang makan dari pada tidak merokok. Merokok dianggapnya sebagai pengisi kekosongan waktu dan menghilangkan beban pikiran. Meskipun rokok yang digunakan bukan dalam kategori mahal, dan bahkan mungkin rokok *tingwe* (nglinting dewe atau membuat sendiri dari tembakau dan *klobot* (bungkus buah jagung). Kebiasaan ini didukung oleh potensi alam yang ada yaitu tanaman tembakau sebagai salah satu komoditas yang diandalkan penduduk, walaupun dengan menanam tembakau, mereka sering kali merasakan kerugian akibat musim yang tidak pasti. Tersedianya tembakau di desa juga mengkondisi anak (anak laki-laki) sejak kecil sudah mengenal rokok, biasanya mereka menggembalakan ternak sambil merokok.

Kecenderungan penduduk desa menanam tembakau karena mereka sudah terbiasa dengan pola tanam tersebut. Sawah setelah ditanami padi (panen hanya sekali dalam setahun), kemudian diolah untuk ditanami tembakau.

Penanaman tembakau ini dilakukan sekitar bulan April sehingga pada bulan Juli atau Agustus tembakau sudah dapat dipanen. Namun karena musim tidak dapat dipastikan (yang seharusnya sudah musim kemarau namun kenyataannya hujan masih ada) dan penduduk tetap berpegang pada rutinitas, sering kali terjadi kegagalan panen tembakau. Menurut warga desa bila tanaman tembakau sudah terkena hujan maka daun tembakau tidak ada harganya, karena rasa tembakau akan tercemar akibat kadar nikotin rendah. Bila sudah demikian berarti kerugian yang dihadapi. Kerugian akibat gagal tanam tembakau ini kadang kala harus dibayar dengan menjual segala harta yang dimiliki, seperti sapi, sepeda motor, dan bahkan perhiasan yang diperoleh ketika tanam tembakau berhasil.

Pendapatan keluarga tidak hanya diperoleh dari penghasilan kepala keluarga semata, tetapi juga isteri dan anak mereka. Isteri tidak jarang membantu bekerja apa saja yang dapat dikerjakan untuk menambah pendapatan keluarga. Pekerjaan yang sering dilakukan para wanita antara lain *dhaut* (mencabut bibit padi dari persemaian, kemudian dicuci lumpurnya dan dipotong ujungnya untuk kemudian ditanam di sawah), *matun* (membersihkan rumput disela-sela tanaman padi) dan *derep* atau menuai padi dengan ani-ani atau untuk saat ini sudah digunakan sabit. Selain itu juga menyiram tanaman tembakau di sawah orang lain, serta membantu orang atau keluarga yang punya hajat (khitanan, mantu).

Dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, tampak perlakuan berbeda dalam bidang distribusi pekerjaan antara

pria dan wanita misalnya pria mencangkul, *nggaru*, membajak sedangkan wanita melakukan pekerjaan *tandur*, *matun*, *derep*. Perbedaan jenis pekerjaan ini membawa konsekuensi dalam pemberian upah kepada tenaga kerja menurut jenis kelamin.

Memang penghasilan mereka tidak dapat diharapkan dengan pasti, karena tidak setiap hari pekerjaan tersebut selalu ada. Namun paling tidak, tampak usaha dari anggota keluarga lain termasuk isteri untuk menambah penghasilan keluarga. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kontribusi anggota keluarga lain (selain kepala keluarga) untuk menambah pendapatan keluarga telah dilakukan.

Beberapa alasan yang dapat dikumpulkan tentang mengapa isteri ikut bekerja antara lain untuk menambah penghasilan keluarga (Slsh, 16 Oktober 1997). Kiranya alasan tersebut masih berorientasi pada peningkatan pendapatan, karena memang kondisi serba kekurangan masih menghimpit sebagian besar warga.

Kondisi yang terjadi di desa penelitian belum menampakkan terjadinya pergeseran struktur tenaga kerja yang ada, karena bagaimanapun tenaga kerja wanita di desa penelitian masih berorientasi pada ekonomi subsisten dan bergerak di bidang pertanian. Ini tidak lain disebabkan oleh berbagai hal diantaranya lokasi yang terisolir, sulitnya transportasi, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya komunikasi dan informasi dari luar.

Dilihat dari perspektif teoretis, alternatif untuk mengatasi kemiskinan dihadapkan dengan berbagai kendala.

Memposisikan wanita pada sektor publik juga berarti memerangkap mereka pada kemiskinan, karena mereka akan memperoleh perlakuan yang berbeda dengan pria dalam menerima upah. Namun demikian melibatkan kaum wanita khususnya di dalam meningkatkan pendapatan keluarga merupakan bagian penting dari upaya mengatasi kemiskinan di dalam rumah tangga miskin itu sendiri. Sebagaimana seorang anak, seorang isteripun memegang nilai ekonomi dalam menggerakkan ekonomi rumah tangga.

Keadaan keluarga penerima bantuan dari IKIP Surabaya, yang sasarannya adalah ibu-ibu anggota PKK, keadaannya tidak jauh berbeda dengan keluarga penerima bantuan pada umumnya. Ibu-ibu rumah tangga yang menjadi sasaran penelitian ini pada umumnya bekerja sebagai petani termasuk didalamnya sebagai buruh tani (78.75%), dan sisanya hanya sebagai ibu rumah tangga dalam arti hanya mengurus rumah dan keluarga. Bagi wanita (istri) yang bekerja sebagai buruh tani kenyataannya mereka tidak bekerja penuh (*full time*), tetapi hanya separo hari (dari jam 07.00 hingga 12.00). Bekerja dalam kurun waktu 5 jam mereka memperoleh upah Rp 2.500,-. Bagi orang desa uang sebesar itu sangat berarti, sehingga mereka selalu berharap ada orang yang menyuruhnya mengerjakan sawah (buruh).

Pekerjaan suami dari keluarga penerima bantuan pada umumnya adalah petani (95%), hanya 2 orang (5%) yang bekerja di luar sektor pertanian yaitu sebagai tukang "ojek". Mereka yang bekerja sebagai petani, tidak seluruhnya sebagai petani

pemilik, namun lebih banyak sebagai buruh tani (mengerjakan sawah orang lain). Mengingat kondisi lahan pertanian di desa Bronjong kurang menguntungkan, maka banyak di antara mereka bekerja di luar desa (tetangga desa). Bila pekerjaan di sawah sudah habis biasanya mereka mencari ranting kayu di hutan dan dijualnya sebagai kayu bakar atau dibuat arang.

Terbatasnya pendapatan keluarga pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) faktor internal dalam keluarga antara lain jumlah tanggungan, keterampilan yang dimiliki, serta semangat kerja yang ada, dan (2) faktor eksternal seperti keadaan alam (kondisi tanah berkapur), kurangnya sarana komunikasi dan transportasi, peluang kerja, serta terbatasnya teknologi yang ada.

Besarnya jumlah tanggungan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Seperti yang terjadi di desa penelitian ada beberapa macam rumah tangga, pertama rumah tangga dengan anggota suami, isteri dan anak; kedua rumah tangga yang terdiri atas suami, isteri, anak, orangtua dari suami atau isteri; ketiga rumah tangga yang beranggotakan suami, isteri, anak yang belum berkeluarga, anak yang sudah berkeluarga, nenek-kakek, dan cucu. Bila dilihat dari jumlah jiwa dalam keluarga, rata-rata tiap keluarga terdiri atas empat sampai lima jiwa, atau sekitar tujuh sampai delapan jiwa tiap rumah (rumah tangga).

Pendidikan anggota keluarga penerima bantuan relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dan sedikitnya keterampilan yang dimiliki oleh anggota keluarga,

menyebabkan keluarga penerima bantuan hanya mengandalkan tenaga (otot) sebagai bekal pencari nafkah, yang kesemuanya itu berdampak pada hasil yang diperoleh relatif sedikit. Sebagai gambaran upah mencangkul di sawah dari jam 7.00 hingga jam 12.00 sebesar Rp. 2.500-Rp.3.000,-, atau Rp. 5.000,- bila bekerja hingga pukul 16.00 dengan waktu istirahat antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00. Pekerjaan itu tidak dilakukan setiap hari (hanya bila sedang menyiapkan sawah untuk ditanami), selebihnya mereka menganggur atau bekerja seadanya seperti mencari kayu bakar, mencari daun jati di hutan untuk dijual. Bahkan bila dirasakan ada kesulitan bekerja di desa akibat musim yang tidak bersahabat, di antara kepala keluarga bekerja ke kota (di Surabaya), sebagai kuli bangunan.

Meskipun mereka telah berupaya mencari kerja ke kota, namun karena tidak didukung keterampilan yang memadai, sering kali kalah bersaing dengan pencari kerja lain yang lebih berpengalaman. Bila mereka memperoleh pekerjaan kadang kala hasilnya habis dikonsumsi sendiri. Hal ini disebabkan karena jenis pekerjaan yang dilakukan hanya memberikan penghasilan yang relatif sedikit akibat pekerjaan yang ditekuni tidak memerlukan keahlian, misalnya sebagai kuli bangunan, tukang becak (wawancara dengan Prd, 12 September, 1996). Akibatnya mereka terpaksa kembali ke desa, dan bekerja seadanya.

Selain keterampilan yang dimiliki sangat terbatas, kondisi internal lain adalah terbatasnya peralatan dan



pengetahuan untuk mengolah tanah yang dimiliki. Dengan kondisi tanah yang ada pengolahan akan efektif bila menggunakan bajak, namun dari satu desa hanya ada satu bajak tangan yang dimiliki kepala desa. Bila warga masyarakat memerlukan mereka harus sewa, ini berarti harus mengeluarkan biaya untuk menyewa bajak, belum upah tenaga kerja yang mengoperasikan, karena dirinya sendiri belum mampu mengoperasikan.

Penghasilan keluarga yang diperoleh (baik dari suami maupun istri) bila dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari dapat dikatakan pas-pasan, bahkan ada yang menyatakan kurang.

Keadaan ini disesuaikan dengan ukuran mereka, yang pada dasarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja yaitu makan nasi (2 kali sehari), serta kebutuhan primer lainnya dalam batas minimal. Nasi sebagai makanan pokok penduduk desa di tempat penelitian ini tidak selamanya terbuat dari beras, namun lebih banyak merupakan campuran antara beras dan jagung, bahkan ada yang berasal dari jagung saja. Penerima bantuan tidak pernah memikirkan mampu memenuhi kebutuhan sekunder, karena memang tidak ada dana untuk itu. Oleh karenanya tidak mengherankan bila Desa Bronjong dengan 381 KK, hanya terdapat 23 pesawat TV, dan 50 pesawat radio.

Hal ini didukung oleh pengakuan mereka tentang penghasilan yang diperolehnya dalam tiap bulan rata-rata hanya berkisar Rp. 100.000,- dengan 6 anggota keluarga.

Meskipun sebenarnya tampak kondisi kekurangan pada keluarga tersebut, namun dari pernyataan mereka selalu "nggih cekap" (ya cukup). Memang tampak kepuasan dalam menjalani hidup, terutama bila mereka sudah dapat makan untuk setiap harinya berarti sudah cukup. Tidak tampak perilaku kompetitif untuk lebih meningkatkan taraf hidupnya. Pernyataan yang seringkali menunjukkan sikap kepasrahan terhadap kondisi yang ada, yang senantiasa melingkupi mereka seperti "ngaten kemawon sampun remen" (begini saja sudah senang), yang penting untuk sehari-harinya sudah cukup, menabung itu kalau ada kalau tidak ada yang penting cukup untuk dimakan sehari-hari (Tndr, Krtn, Smng, 7 Desember 1996).

Makan (nasi) dua kali sehari dirasakannya sudah cukup, meskipun untuk ukuran yang layak adalah makan sebanyak tiga kali sehari. Pagi hari mereka cukup minum kopi (untuk orang dewasa), dan makan ubi rebus, singkong rebus atau kadang kala tidak makan pagi. Menurut pernyataan penduduk desa, makan itu yang penting kenyang sehingga dapat *ngganjel weteng* (menganjal perut), oleh karena itu nasi yang utama (tidak harus nasi putih (beras), tetapi nasi jagung lebih terasa). Soal ikan itu kalau ada, bila tidak ada dengan makan sambel saja sudah enak, apalagi kalau perut sedang lapar betul (Tndr, 17 Oktober 1997).

Dari pengamatan yang dilakukan pada beberapa keluarga penerima bantuan menggambarkan bahwa makanan penduduk sehari-hari terdiri atas nasi (nasi beras campur jagung, bahkan ada yang hanya jagung saja), dilengkapi dengan sayur

(lodeh, asem, bayem) yang biasanya sebagian bahan dicari di tegalan. Lauk-pauknya cukup tahu, tempe goreng, gimbal jagung, teri, atau udang kali bila ada uang untuk membelinya, bahkan sering kali cukup dengan krupuk.

Menu makan itu dianggapnya sudah sangat baik. Bila dilihat dari sudut makanan sehat memang dapat dikatakan belum sempurna (belum ada buah dan susu), tetapi paling tidak secara minimal sudah memenuhi syarat. Hanya saja komposisi (perbandingan) antara hidrat arang, protein tidak seimbang, karena biasanya hidrat arang paling banyak.

Merubah pola makan dan sekaligus mengurangi porsi jumlah dan jenis makanan merupakan suatu kebiasaan bagi rumah tangga miskin yang terisolasi. Apabila mereka mendapat hasil yang lebih baik biasanya porsi makan dan jenis makanan "membaik" pula, dan dalam kondisi penurunan perolehan akan berpengaruh pada menu dan porsi yang disajikan. Meskipun demikian dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya rumah tangga yang mengalami kemiskinan absolut sehingga tidak ada satu jenis makananpun yang dapat dimakan, mereka pada umumnya masih mampu memanfaatkan hasil subsisten.

Melihat menu makan dan frekuensi makan yang dilakukan warga masyarakat menunjukkan bahwa hidup yang mereka alami diterima apa adanya, mereka menyatakan pasrah dan menerima dengan apa yang diberikan (*nrimo ing pandhum*).

Sebenarnya telah ada usaha untuk memperbaiki kehidupannya, ini dibuktikan oleh usaha melakukan pekerjaan

sampingan atau tambahan, karena bila hanya melalui pekerjaan utama saja tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Mencari pekerjaan sampingan atau tambahan ini dengan melibatkan seluruh anggota keluarga.

Para kepala rumah tangga jarang yang melakukan alih pekerjaan (profesi) bila masih berada di desa sendiri. Hal ini berbeda bila mereka terpaksa hijrah ke kota, mereka bekerja apa yang dapat dikerjakan. Semuanya tidak lepas dari kebiasaan di masyarakat tempat tinggalnya. Mereka tidak biasa menunjukkan kelebihan dari anggota masyarakat yang lain. Mereka takut ditertawakan atau dibicarakan oleh tetangga, dan tampaknya ada perasaan bersalah, berdosa, serta malu bila kehidupannya jauh berbeda dari yang lain. Hidup *sak podho-podho* (sama dengan lain), merupakan kebahagiaan tersendiri. Seperti pernyataan Srn dan Wrn (7 Oktober 1996): "di desa ini pokoknya bisa hidup *lumrah*, seperti lainnya sudah senang, kalau bekerja macam-macam yang tidak biasa dikerjakan penduduk di desa ini malah ditertawakan dan *dirasani*."

Sebagai misal pada umumnya sawah atau ladang di desa ini ditanami tembakau, bila tidak ikut menanam tembakau dan menanaminya dengan tanaman lain (jagung) warga lain akan mentertawakan. Sikap hidup demikian masih banyak terdapat di masyarakat desa. Seperti yang dinyatakan oleh Mnrsh (7 Oktober 1996) bahwa "awal membudidayakan lahan pekarangan dengan tanaman sayur, buah-buahan yang tidak biasa di tanam masyarakat, saya sempat diolok-olok tetangga, katanya lahan

di sini tidak cocok, pasti akan mati apa yang ditanam. Tapi saya tetap saja menanam dan merawatnya dengan baik, dan Alhamdulillah dapat berhasil, dan para tetangga juga sempat menikmati hasilnya".

Dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari, bila mereka merasakan kekurangan, upaya untuk mengatasinya dilakukan dengan mengurangi pembelian barang yang diperlukan, bila sangat terpaksa, menjual barang yang dimilikinya atau pinjam pada tetangga serta saudara. Mereka tidak mengenal pinjam pada rentenir atau di bank, karena tidak pernah berhubungan dengan bank. Menyimpan uang atau menabung lebih baik dirupakan perhiasan, karena selain dapat digunakan juga dapat dijual bila sewaktu-waktu membutuhkan uang. Di samping itu ada sebagian penduduk menabung uangnya (bila ada sisa dalam jumlah besar) berupa hewan (ternak) seperti kambing atau sapi, mereka mengatakan ternak sebagai *rojo koyo* (harta yang tak ternilai bagi orang tani). Karena selain dapat membantu dalam bidang pertanian juga dapat dijual.

Meskipun mengalami kekurangan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, namun pada dasarnya telah ada usaha (ihtiyar) dan tetap bekerja keras yang kadang kala juga tidak mengenal waktu untuk mengatasi kekurangan tersebut. Pada waktu dihadapkan pertanyaan apakah tujuan mereka bekerja keras hingga tidak kenal waktu, mereka agak tampak keheranan dan tidak mengerti, namun akhirnya mereka menjawab bahwa mereka bekerja keras itu agar dapat makan (*ngupoyo upo*). Meskipun telah berusaha bekerja keras namun hasil yang dinikmatinya

belum maksimum, bila sudah demikian keadaanya, terkesan sikap menyerah pada kesukaran dengan mengungkapkan bahwa "orang itu harus *ingkang nrimah* (menerima) atau *pasrah dan sumarah* yang mengandung arti kurang lebih menyerah dan menerima keadaan karena itu mungkin sudah nasibnya.

Konsep mengenai nasib tersebut, juga menentukan sikap penduduk terhadap alam, dengan berupaya hidup menyelaraskan diri dengan alam. Ini terbukti dalam kegiatan pertanian, mereka bekerja sesuai musim. Tidak ada upaya untuk merubah pola cocok tanam agar meningkatkan produktivitas pertanian.

Dari gambaran ini menunjukkan bahwa orientasi kerja mereka masih pada pemenuhan kebutuhan pokok (menekankan pada aspek ekonomi), belum tampak pemenuhan di luar kebutuhan pokok, misalnya untuk memenuhi kebutuhan rekreasi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan prestise. Bila dikaitkan dengan piramida kebutuhan dari Maslow, warga penerima bantuan di desa penelitian masih berada pada tingkat pemenuhan kebutuhan fisik atau kebutuhan dasar.

Hal ini didukung bahwa kerja keras yang mereka lakukan lebih banyak digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup atau sekedar mencari makan (*ngupoyo upo*), mereka belum memikirkan melakukan investasi untuk menjamin masa depan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan masih berorientasi pada subsistensi. Meskipun demikian tampak dari perilaku warga sehari-hari tidak adanya sikap *ngongso* atau *ngoyo* dalam bekerja, mereka seakan puas dengan apa yang dialaminya. Ini disebabkan karena mereka tidak

memiliki keterampilan lain di luar pertanian, sehingga pekerjaan sebagai petani itulah yang dianggapnya paling baik. Mereka beranggapan bahwa tani itu selalu berhubungan dengan tanah, sehingga bagaimanapun kalau berada di desa hidup sebagai petani, maka mereka bekerja dengan mengelola tanah. Seperti yang dinyatakan oleh mantan Kepala desa bahwa tani dan tanah itu tidak dapat dilepaskan, tanah seakan telah merupakan bagian dari hidup orang desa.

#### 4.2. Keadaan Sosial Budaya

Dilihat dari segi tingkat pendidikan dapat dikatakan bahwa pada umumnya tingkat pendidikan kepala keluarga penerima bantuan relatif rendah. Dari studi dokumentasi (monografi desa Bronjong, 1996), diperoleh informasi bahwa dari 160 KK yang termasuk kategori miskin 60% diantaranya lulusan SD, 30% tidak lulus SD dan tidak pernah bersekolah, dan hanya 10% dari keluarga miskin yang berpendidikan SLTP.

Bagi rumah tangga miskin yang tingkat pendidikan kepala rumah tangganya sangat rendah, akan berdampak pada aspek kehidupan yang lain. Dengan kata lain siklus dan mata rantai ini akan menjerat mereka. Segala "predikat" serba kekurangan menyertai tingkat pendidikan yang rendah tersebut. Paradoks tentang pendidikan ini dapat saja timbul, mengingat apabila terdapat warga masyarakat dengan pendidikan yang baik, belum tentu mereka dapat memasuki atau menemukan pekerjaan yang cocok dengan bidang ilmu dan

keterampilannya, mengingat di pedesaan jenis dan macam pekerjaan sangat terbatas. Atas dasar ini dapat dijelaskan bahwa dalam menganalisis aspek pendidikan dikaitkan pula dengan tersedianya pekerjaan di desa.

Tingkat pendidikan ini juga berpengaruh pada persepsi keluarga terhadap masa depan anggota keluarga dan lingkungannya, serta kesehatan keluarga. Selain itu keadaan tingkat pendidikan yang ada ini ternyata juga terkait erat dengan lapangan kerja yang tersedia di desa itu sendiri dan lembaga pendidikan. Di Desa Bronjong lapangan kerja yang menuntut tingkat pendidikan tinggi dapat dikatakan tidak ada, karena tidak ada lembaga yang memerlukan karyawan selain pemerintahan desa, dan sekolah dasar (sebagai guru dan tenaga administrasi). Terbatasnya peluang kerja yang menuntut persyaratan tingkat pendidikan ini menyebabkan motivasi keluarga untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi menjadi rendah. Bahkan masih ada di antara keluarga yang beranggapan bahwa tidak perlu bersekolah terlalu tinggi, karena bekerja sebagai petani tidak perlu sekolah, yang penting kuat dapat macul (wawancara dengan St dan Amr, 15 September 1996).

Selain terbatasnya lapangan kerja yang menuntut pendidikan lebih tinggi, ternyata juga ketersediaan lembaga pendidikan sangat terbatas. Lembaga pendidikan yang tersedia di Desa Bronjong adalah satu SD Inpres dan satu lagi SD Negeri, pendidikan pada jenjang sekolah lanjutan dan sekolah menengah tidak ada. Lulusan SD bila akan



melanjutkan berarti harus pergi ke luar desa (di Kecamatan sendiri atau kecamatan lain). Jarak SLTP terdekat sekitar empat kilometer, dan itupun daya tampungnya sangat terbatas. Apalagi bila harus melanjutkan ke SLTA paling tidak harus menempuh perjalanan sekitar 15 km. Keadaan fasilitas pendidikan yang ada berdampak pada keinginan untuk menempuh pendidikan yang lebih baik terhambat.

Tingkat pendidikan pada kepala keluarga ini, ternyata juga tidak jauh berbeda dengan para ibu rumah tangga. Bahkan keadaannya lebih memprihatinkan. Rendahnya tingkat pendidikan para ibu rumah tangga ini berdampak pada upaya keterlibatan mereka dalam menambah pendapatan keluarga, dan dalam perawatan anak atau pemeliharaan kesehatan keluarga.

Salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan wanita dibanding kaum laki-laki karena masih adanya anggapan bawah pendidikan milik laki-laki, *wong wedok pintero sundul langit ya paling-paling ning pawon* (orang wanita meskipun sangat pandai sekali hingga mencapai langit, ya paling-paling kerja di dapur) (wawancara dengan bu Tndr, 9 Oktober 1996). Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek kultural masyarakat sangat berpengaruh terhadap keluarga dalam memandang pendidikan, terutama bagi kaum tua karena nilai-nilai tersebut telah mendarah daging dalam hidupnya. Mereka selalu bercermin pada orang terdahulu. Keadaan ini tidak sepenuhnya terjadi pada kaum muda, bagaimanapun pada diri kaum muda keinginan untuk mengembangkan diri tetap ada, hanya saja tidak didukung oleh sarana dan prasarana.

Budaya yang menempatkan peranan "ibu" sebagai suri rumah tangga, juga menggiring mereka lepas dari hak dan kewajiban memasuki dunia pendidikan, padahal mendidik anak agar menjadi baik memerlukan pula basis pendidikan yang baik di kalangan orang tuanya. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan ibu rumah tangga penerima bantuan menggeluti pekerjaan subsistensi dengan basis pendidikan rendah, seperti beternak unggas dan bercocok tanam di sekitar rumah. Bila harus bekerja di luar rumah paling-paling sebagai buruh tani di desa sendiri.

Keadaan ekonomi keluarga juga berdampak pada tingkat pendidikan anak mereka. Rendahnya tingkat pendidikan anak selain tergantung faktor ekonomi keluarga, juga disebabkan oleh terbatasnya lembaga pendidikan yang tersedia.

Dalam posisi yang tidak banyak berbeda dengan pendidikan orang tuanya, dapat dikatakan bahwa pendidikan bagi anak usia sekolah yang terdapat pada keluarga penerima bantuan cukup memprihatinkan. Sebagian besar hanya sempat mengenyam pendidikan hingga lulus SD, meskipun juga ada beberapa anak yang sempat duduk di bangku SLTP namun jumlahnya tidak banyak.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan anak, diantaranya adalah: (1) Persepsi orang tua terhadap pendidikan. (2) Keadaan ekonomi orang tua (keluarga), terutama menyangkut biaya pendidikan (SPP, seragam sekolah, buku pelajaran, alat tulis, serta keperluan lain). Selain itu juga fungsi anak sebagai pembantu pencari

nafkah bagi keluarga sehingga waktu yang seharusnya untuk belajar dihabiskan untuk bekerja. (3) Keadaan geografis, terutama jauhnya lembaga pendidikan yang memadai dengan rumah tempat tinggal mereka.

Tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab keterbelakangan masyarakat di pedesaan. Kasus di Desa Bronjong menunjukkan banyak kendala utamanya terletak pada terbatasnya dana yang dimiliki masyarakat, akibat kemiskinan dan tenaga kerja sehingga banyak anak usia sekolah mencurahkan perhatian pada kegiatan ekonomi. Keadaan ini menjadikan anak-anak di desa merasa sulit untuk mencari waktu bersekolah dan belajar, sementara waktu dan energi mereka umumnya habis untuk membantu mencari nafkah.

Berkaitan dengan ekonomi keluarga fungsi anak untuk membantu orang tuanya mencari nafkah menjadi penting, sehingga waktu yang semestinya digunakan belajar banyak digunakan untuk bekerja membantu orang tua. Pada musim *enthung* (kepompong jati), biasanya anak-anak pergi ke hutan untuk mengumpulkan *enthung* tersebut.

Menurut orang tua anak-anak lumayan kalau dapat sebagian dapat dijual dan sebagian lagi dimakan. Harga *enthung* di pasar satu *kobokan* (mangkok dari seng untuk cuci tangan), sekitar Rp. 2000,-, mereka sehari dapat menghasilkan sekitar dua *kobokan* (wawancara dengan Smd, September 1996). Pernyataan ini didukung oleh guru di SDN

setempat:

Kalau musim *enthung*, banyak anak yang tidak masuk sekolah, mereka biasanya membantu orang tuanya mencari *enthung* di hutan. Mesim ini berlangsung sekitar 2 bulan. Sehingga praktis sekitar dua bulan itu angka absensi tinggi (Pak Sukirno, 10 Oktober 1996).

Kondisi ini dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang biasa, karena memang dari dulu pekerjaan ini selalu ditekuninya. Untuk mengatasi masalah belajar biasanya guru memberi pekerjaan rumah agar anak tetap belajar di malam hari, atau kalau tidak, jam belajar diadakan sore hari meskipun tidak rutin.

Bagi anak sendiri tampak tidak ada rasa rugi bila mereka tidak belajar, karena dengan dapat membantu orang tua mencari tambahan penghasilan sangat menggembirakan. Mereka menyatakan mencari *enthung* itu tidak setiap hari, hanya bila musim saja mereka mencarinya itupun hanya bila pagi hari, sehingga siangya masih dapat belajar.

Seperti yang dinyatakan Yanto murid kelas IV SD Inpres di Bronjong bahwa:

Pada waktu musim *enthung* saya selalu ikut mak saya ke hutan untuk mencari *enthung* itu. Cari *enthung* harus pagi, kalau siang baru cari tidak kebagian lagi, soalnya sudah dicari orang. Kalau sudah cari *enthung* ya terpaksa tidak masuk sekolah, tapi kebetulan saya masuk jam 09.00, jadi masih sempat ikut pelajaran (Ynt, 10 Oktober 1996).

Bagi orang tua, anak memang merupakan fungsi ekonomi, sehingga setiap ada kesempatan bagi anak untuk mendapatkan uang akan menyenangkan bagi orang tua. Lumayan setiap harinya anak saya dapat mengumpulkan satu *kobokan enthung*, paling tidak dapat dijual untuk tambahan belanja atau dapat juga untuk dimakan sendiri.

Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi suatu "lingkaran setan". Kemiskinan telah menjadikan tingkat pendidikan masyarakat rendah, sehingga kualitas sumber daya manusia pun menjadi rendah, dan karenanya sulit pula bagi mereka untuk keluar dari belenggu kemiskinan.

Selain masalah pendidikan, kiranya faktor tradisipun menjadi salah satu fenomena yang menarik pada keluarga penerima bantuan. Hampir di setiap daerah budaya tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Demikian pula yang terjadi di Bronjong. Upacara adat atau selamatan dalam setiap peristiwa selalu ada, misalnya upacara kelahiran (*brokohan, sepasaran, selapanan, bayi telu, bayi pitu, setahun*), selamatan mendirikan rumah, selamatan orang meninggal (*sur tanah, telung dina, pitung dina, patang puluh dina, pendhak pisan, pendhak pindho, nyewu*), selamatan mulai tanam, saat padi mulai berisi, selamatan pada waktu akan panen, selamatan saat ternak beranak (*brokohan*), upacara yang berkaitan dengan agama (*suroan, maleman, mapak (menjelang puasa), nutup setelah puasa berakhir, muludan*), upacara yang berkaitan dengan desa adalah bersih desa atau *nyadran*.

Berkaitan dengan keadaan rumah, dapat dijelaskan bahwa penduduk penerima bantuan yang dikategorikan "miskin", tidak seluruh rumahnya berbentuk *srotong* (biasanya untuk keluarga kurang mampu), namun ada juga yang berbentuk *limas*. Ini juga menjadi indikator bahwa keluarga penerima bantuan (peningkatan pendapatan), tidak seluruhnya orang miskin, melainkan ada yang termasuk kategori orang cukup. Mereka yang memiliki rumah berbentuk *limas* ini pada umumnya perangkat desa, dan keluarga terdekatnya, yang sebenarnya bukan termasuk kategori penerima bantuan.

Kondisi rumah keluarga penerima bantuan, sebagian berdinding *gedhek*, berlantai tanah, tidak berventilasi. Rumah rata-rata tidak dilengkapi dengan kamar mandi dan WC. Untuk keperluan mandi, cuci dan kakus lebih banyak dilakukan di sungai. Demikian juga untuk kepentingan masak banyak di antara keluarga penerima bantuan menggunakan air *belik* (sumur kecil di tepi sungai). Ini terjadi karena jumlah sumur di desa Bronjong hanya empat buah, dan bila musim kemarau sumur tersebut tidak ada airnya.

Mereka tidak menyadari bahwa dengan menggunakan air sungai untuk keperluan hidup sehari-hari sangat rawan dengan penyakit. Seperti yang dinyatakan oleh St (25 Maret 1997) dari dulu orang di desa ini ya hanya menggunakan air sungai untuk keperluan hidup (mandi, mencuci, memasak, memandikan ternak), ya semuanya baik-baik saja. Malah kalau ke sungai itu sangat menyenangkan selain bekerja (mencuci atau mandi) juga bisa ngobrol dengan yang lain.

Dari pernyataan itu menunjukkan bahwa sebenarnya mandi atau bekerja di sungai itu memiliki tujuan ganda yaitu mandi, cuci, atau buang air besar sebagai tujuan pokok atau sebagai fungsi *manifes*, dan mencari hiburan atau sebagai selingan untuk menghilangkan kejenuhan dalam bekerja di rumah, sebagai tujuan terselubung (*fungsi laten*). Seperti yang dinyatakan warga setempat: *teng lepen niki kejawi umbah-umbah, adus, nggih saged ngobrol kalih konco, yen wangsul saged mbeto toyo kangge masak* (Smng, Slsh, 20 Oktober 1996).

Keadaan ini menunjukkan bahwa sebenarnya penduduk desa haus akan hiburan (terutama yang tidak memiliki TV atau radio), dan mereka selalu disibukkan oleh rutinitas pekerjaan rumah tangga yang tidak pernah selesai. Untuk menghilangkan kejenuhan tersebut kesempatan yang baik pada waktu di sungai.

Dengan kata lain kegiatan di sungai itupun berdampak pada terpenuhinya kebutuhan akan hiburan atau rekreasi sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia.

Kehausan mereka akan hiburan ini juga dibuktikan oleh berbondong-bondongnya warga desa untuk menyaksikan setiap pertunjukkan yang ada di desa setempat atau desa lain yang tidak terlalu jauh. Misalnya bila ada tontonan pada saat orang punya hajat seperti *tayub*.

Dalam kehidupan beragama, meskipun dapat dikatakan bahwa penerima bantuan adalah pemeluk agama Islam, namun tidak dapat dikatakan sebagai pemeluk agama Islam yang taat

dalam arti menjalankan rukun Islam secara tepat. Mereka menyatakan bahwa dirinya adalah orang Islam, namun pada waktu ditanyakan apakah mereka juga menjalankan sholat lima waktu, jawabnya tidak. Demikian pula ketika ditanyakan apakah mereka juga berpuasa pada bulan Ramadhan, mereka pada umumnya juga menyatakan tidak. Keadaan ini didukung oleh pengamatan yang dilakukan di masjid desa Bronjong, dapat dikatakan jumlah jamaah pada shalat Mahgrib berkisar antara 8 hingga 13 orang, dan dari jumlah tersebut pada umumnya anak-anak yang menghadirinya. Jumlah jamaah agak banyak pada saat shalat Jumat, jumlahnya sekitar 20 hingga 25 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 1661 jiwa (834 pria dan 827 wanita), dapat dikatakan bahwa kehidupan beragama mereka kurang semarak.

Selain karena memang warisan dari para pendahulu, sebagai pemeluk Islam "KTP", rupanya masalah ekonomi juga menjadi salah satu penyebabnya. Dalam kehidupan yang serba sulit, orang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tekanan struktural pada kehidupan rakyat sangat berat sehingga hampir sepanjang waktu, mereka harus bersaing satu sama lain untuk memperoleh atau membagi ruang ekonomi yang sempit. Hampir setiap usaha diarahkan terutama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam konteks ini tampaknya tidak mengherankan bila rakyat cenderung menimbang masalah kultural ideologis dalam cara yang praktis.

Kebutuhan ekonomi atau material berada pada urutan pertama, sedangkan masalah ideologis keagamaan menduduki



urutan berikutnya. Kondisi material menjadi semakin penting dalam kehidupan mereka sehingga agama (dalam arti sempit sebahyang lima waktu dan berpuasa) menjadi kebutuhan mewah atau kebutuhan sekunder.

Sitat (tokoh masyarakat), menyatakan kerja keras adalah nilai yang dipegang oleh penduduk, rakyat menyadari bahwa bila tidak kerja maka tidak akan makan, ini disebabkan karena memang kondisi tanah yang kurang mendukung, menuntut warga harus bekerja keras.

Adanya pandangan *ono dino ono upo*, yang berarti tiap hari ada nasi, tampaknya ada sesuatu yang kontradiksi. Pernyataan ini menyiratkan bahwa tanpa kerjapun nasi itu akan selalu ada, sehingga orang tidak perlu kerja keras. Namun yang terjadi tidaklah demikian, nasi itu tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan harus dicari. Ini memberikan arti bahwa setiap hari orang harus bekerja untuk mencari nasi, meskipun kesempatan kerja di desa itu sendiri sangat terbatas.

Kerja keras penduduk tampak dari aktivitas mereka dalam mengelola lahan pertanian, terutama pada saat musim tanam tembakau dapat dikatakan para petani termasuk keluarga penerima bantuan tidak mengenal waktu. Untuk menyiram tembakau pada waktu mulai tanam mereka rela melakukannya hingga malam hari di sawah. Apalagi debit air di Desa Bronjong sangat terbatas, sehingga petani harus rela memikul air dari sungai dengan jarak yang cukup jauh dari sawah mereka.

#### 4.3. Aktivitas Berorganisasi

Di desa penelitian tidak banyak dijumpai kelompok organisasi sosial kemasyarakatan. Secara umum ada tiga macam kelompok di Desa Bronjong. Kelompok tersebut adalah: *Pertama* kelompok yang secara spontan tumbuh dari kemauan masyarakat sendiri, seperti *sambatan*. Sebenarnya kuranglah tepat untuk memasukkan *sambatan* sebagai kelompok, karena *sambatan* ini bukanlah organisasi formal. Namun melihat relevansinya dalam pembentukan kelompok, maka *sambatan* dimasukkan dalam kelompok.

Pranata *sambatan* didasarkan pada hubungan ketetanggaan dan prinsip resiprokal. Untuk meringankan biaya, membangun rumah, biasanya dapat meminta pertolongan tetangga sekitar. Untuk *nyambat* tetangga, biasanya cukup diberitahukan kepada tetangga yang tidak sibuk, dan sebaliknya jika tetangga yang disambat membutuhkan, maka ia harus siap membantu, kecuali bila ada halangan.

Dalam melakukan *sambatan* untuk membangun rumah, tidak semua pekerjaan ditangani oleh orang yang disambat. *Sambatan* dilakukan dalam hal menggali fondasi, memasang fondasi, serta memasang atap ini bagi rumah tembok. Bagi rumah kayu, *sambatan* dilakukan dalam hal mendirikan tiang-tiangnya dan memasang atap (pasak) termasuk pemasangan genteng. Bagi orang yang *nyambat* (meminta bantuan) biasanya hanya menyediakan konsumsi selama sehari berupa makan pagi dan makan siang beserta minuman dan makanan kecil sekadarnya, karena *sambatan* pada umumnya dilakukan hanya sehari, dengan

pertimbangan agar tidak terlalu merugikan warga yang disambat, karena mereka harus bekerja mencari nafkah.

Kelompok kedua yakni kelompok yang keberadaannya didorong oleh individu dalam masyarakat. Kelompok ini yang di dasarkan pada prinsip *pirukunan*. Kelompok kedua ini diantaranya adalah kelompok *sinoman*, mereka terdiri atas para pemuda yang siap membantu orang yang melakukan hajatan. Meskipun kegiatan dari kelompok ini ada, namun struktur organisasinya belum memenuhi syarat, karena tidak dilengkapi oleh program serta kepengurusan, tapi paling tidak ada orang yang selalu menggerakkan kelompok *sinoman* bila ada keperluan. Ketua kelompok *sinoman* ini adalah salah seorang Kasun di Desa Bronjong dan anggotanya semua pemuda desa. Ada beberapa orang dari penerima bantuan ini yang menjadi anggota kelompok *sinoman*, keterlibatan mereka sekedar sebagai pengembira. Pada waktu ditanya apakah ada jadwal pertemuan mereka menjawab tidak pernah ada. Bila hanya akan ada orang yang punya hajat saja setiap anggota diberi tahu secara *gethok tular* (estafet dari mulut ke mulut) (Swj, Nry, dan Prn, 20 Maret 1997).

Bentuk kelompok ketiga adalah kelompok-kelompok bentukan pemerintah seperti PKK, Dasa Wisma, Karang Taruna, LKMD. Kelompok atau organisasi ini secara formal ada. Mereka yang terlibat pada kelompok tersebut pada umumnya keluarga para perangkat desa. Seperti yang dinyatakan salah satu informan bahwa yang duduk dalam kepengurusan PKK adalah semua isteri perangkat desa, penduduk biasa jarang atau

bahkan tidak mau menjadi pengurus. Bagi isteri perangkat desa menjadi pengurus di desa karena berkaitan dengan tugas suaminya sebagai perangkat desa, sehingga paling tidak jabatan suaminya dapat lebih langgeng. Tidak maunya para wanita desa lain (bukan isteri perangkat desa) untuk terlibat dalam kegiatan organisasi antara lain warga disibukkan oleh kegiatan rumahtangga, dan upaya untuk mencari tambahan pendapatan. Biasanya pada malam hari energi mereka sudah habis, sehingga waktu yang tersisa lebih baik digunakan istirahat.

Diantara penerima bantuan memang ada yang terdaftar sebagai anggota karang taruna, namun keterlibatan dalam organisasi tersebut sebatas bila ada lomba Volly saja. Pada pertemuan lain yang bersangkutan tidak pernah terlibat. Alasan mengapa tidak hadir pada pertemuan yang diadakan antara lain dinyatakan bahwa *kumpul-kumpul* saja malas, selain sering kali pertemuan tidak pernah tepat waktu juga tidak banyak manfaat yang diperoleh. Lebih baik tidur, karena siang sampai sore sudah bekerja. Ia menyatakan bahwa rapat itu merupakan kegiatannya orang yang banyak waktu (punya waktu lebih), sedangkan bagi yang kerja sepanjang hari sudah tidak punya waktu lebih dan sudah capai karena seharian kerja, oleh karena itu waktu yang tersisa lebih baik digunakan istirahat (*ngeluk geger*).

Termasuk kelompok jenis ketiga ini adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang mewadahi penerima bantuan IDT. Meskipun namanya kelompok swadaya masyarakat, namun

pembentukannya sendiri ternyata bukan karena keinginan warga yang memiliki tujuan sama, tetapi karena bentukan dari pimpinan desa. Oleh karena itu kelompok swadaya masyarakat (KSM) ini dimasukkan kategori kelompok yang dibentuk oleh pemerintah.

Warga penerima bantuan dari IDT menyadari bahwa mereka diwadahi dalam suatu kelompok, di desa penelitian terdapat lima kelompok swadaya masyarakat yaitu *Sumber Lancar, Sri Rejeki, Langgeng jaya, Sidodadi, dan Sumber Makmur*. Masing-masing kelompok memiliki seorang ketua dan anggota sekitar 20 orang, mereka berada dalam satu wilayah dusun.

Kelima kelompok ini didampingi oleh Ketua LKMD dan Sekretaris Desa. Dilihat dari keberadaan pendamping sendiri tampak adanya penyimpangan. Pendamping seharusnya berasal dari petugas lapangan dari berbagai departemen di tingkat kecamatan, LSM, Perguruan Tinggi, atau Organisasi Kemasyarakatan. Kenyataan di lapangan tidaklah demikian, pendamping adalah ketua LKMD dan Sekretaris Desa. Mereka seharusnya lebih berfungsi sebagai penasehat.

Keadaan ini menggambarkan bahwa kehidupan berorganisasi di desa penelitian belum menunjukkan fungsinya. Penyebab belum berfungsinya kelompok antara lain ditengarai oleh keberadaan kelompok (organisasi) itu sendiri bukan karena kehendak anggota, melainkan kehendak penguasa karena aturan yang ada. Anggota kelompok belum mengetahui fungsi kelompok secara pasti sehingga mereka tidak merasakan kemanfaatan dari organisasi tersebut.

**BAB 5**

## BAB 5

### PELAKSANAAN BANTUAN (PEMBANGUNAN)

#### PADA DESA PENELITIAN

Pembangunan bagi masyarakat desa pada dasarnya lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup warga. Hal ini disebabkan karena berbicara tentang pedesaan identik dengan kemiskinan. Dengan melaksanakan pembangunan di pedesaan diharapkan dapat menambah pendapatan warga yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam membahas pelaksanaan bantuan peningkatan pendapatan khususnya dan pembangunan di lokasi penelitian umumnya, ada beberapa hal yang diuraikan. Diantaranya adalah prosedur pemberian bantuan, jenis bantuan, asal bantuan, dan tujuan pemberian bantuan. Secara berturut-turut, masing-masing aspek tersebut dibahas dalam bagian ini.

#### \*5.1. Prosedur Pemberian Bantuan

Tidak ada satu patokan pemberian bantuan kepada masyarakat yang berlaku universal. Hal ini disebabkan antara lain bantuan tidak hanya berasal dari satu sumber, dalam hal mana setiap sumber bantuan memiliki ketentuan sendiri. Demikian pula yang terjadi di desa Bronjong.

Menurut warga (penerima bantuan) setiap pemberi bantuan memiliki perbedaan persyaratan, terutama dalam pengelolaan atau pemanfaatan bantuan yang diberikan.

Bantuan (peningkatan pendapatan) untuk masyarakat miskin di Desa Bronjong dimulai sejak tahun 1993. Bantuan tersebut berupa ternak sapi dari dinas Peternakan Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan.

Sebelumnya penduduk tidak pernah menerima bantuan langsung untuk meningkatkan pendapatan mereka, baru pertama kali bantuan dari Dinas Peternakan yang tampaknya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Bantuan ternak sapi tersebut menurut kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan memang diarahkan pada kecamatan rawan (kecamatan yang memiliki problem kemiskinan akibat keadaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya tidak mendukung) dan satu diantaranya adalah desa Bronjong.

Ternak sapi yang diberikan saat itu sebanyak lima ekor berupa sapi betina *doro* (yang belum pernah bunting/hamil), umur sapi bantuan sekitar satu hingga satu setengah tahun. Pemberian sapi yang siap bunting ini dimaksudkan agar warga tidak terlalu lama menunggu hasilnya (anak sapi yang dilahirkan).

Bantuan tersebut bukanlah bantuan cuma-cuma (*charity*), namun merupakan bantuan bergulir, dengan harapan setelah modal dikembalikan akan digulirkan kepada sasaran lain. Strategi ini dimaksudkan agar program pengentasan kemiskinan (bantuan peningkatan pendapatan) dapat membentuk sikap kemandirian bukan ketergantungan.



Bantuan ternak sapi diberikan kepada lima orang. Tiga orang dari dusun Garas dan dua orang lainnya dari dusun Cempleng. Penerima sapi dari dinas peternakan ini ternyata sebagian besar adalah pamong desa (kades, carik, kasun), dan bukan warga biasa. Wawancara dengan Kepala Desa diperoleh informasi

Sapi dari Dinas Peternakan memang diberikan kepada para pamong, karena jumlahnya sedikit kalau diberikan kepada warga nanti menimbulkan masalah. Soalnya orang miskin di desa ini banyak. Kalau sapi diberikan pada pamong tidak ada yang protes (Kades, 5 September 1996).

Dari hasil wawancara diketahui bahwa prosedur dalam menentukan sasaran ini tidak dipenuhi oleh pamong desa, karena bantuan tersebut diberikan kepada perangkat desa (kepala dusun, perangkat desa termasuk kepala desa). Kenyataan itu didukung oleh informasi dari salah seorang tokoh masyarakat (guru) yang menyatakan bahwa bantuan dari dinas peternakan diambil oleh perangkat desa, bukan untuk penduduk miskin (Skn, 5 Nopember 1996). Demikian pula yang dinyatakan oleh Smn, (5 Nopember 1996) bahwa bantuan dinas peternakan itu untuk perangkat desa, bukan untuk rakyat miskin. Hal ini tampak dari orang yang mendapat bantuan itu semuanya perangkat desa meskipun yang memelihara adalah warga masyarakat. Smn mengira bahwa sapi bantuan dinas peternakan tersebut memang jatah perangkat desa, sebagai rangsangan pamong untuk bekerja lebih giat.

Alasan kepala desa dalam menentukan kelompok sasaran itu antara lain, kalau pamong yang diberi akan memotivasi pamong untuk bekerja lebih giat, selain itu untuk menjaga jangan sampai bantuan itu habis (dijual), sehingga tidak mengalami kesukaran dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan bantuan kepada pemberi bantuan (Kepala Desa, 5 September 1996). Ada ketakutan dari kepala desa bila bantuan itu langsung diberikan penduduk (dengan kriteria yang telah ditentukan dinas peternakan), terutama bila bantuan tersebut tidak berkembang karena dijual oleh si penerima bantuan, mereka pada umumnya orang yang secara ekonomi masih sangat kurang.

Dari pernyataan kepala desa tersirat bahwa ada kekhawatiran akan terjadi kegagalan dalam melaksanakan program pembangunan (bantuan pemerintah), dalam hal mana kegagalan tersebut akan berdampak pada kelangsungan jabatan. Dia beranggapan bahwa bila akan tetap menjabat, maka harus sukses dalam melaksanakan program dari atas, atau selalu mendukung program dari atas. Oleh karenanya setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, harus dipilih siapa yang ditengarai dapat melaksanakan program tersebut dengan baik, tidak peduli apakah sesuai aturan atau tidak yang penting programnya lancar.

Mekanisme pengembalian bantuan kepada pemilik modal dilakukan setelah sapi beranak dua ekor. Anak sapi dikembalikan ke pemerintah (dinas peternakan), dan induk menjadi milik pemelihara. Anak sapi (pedet) yang

dikembalikan kepada pengelola (pemerintah), akan diberikan (digulirkan) kepada warga lain (calon penerima) yang layak menerima, demikian seterusnya sehingga lima ekor sapi (modal awal), dalam waktu tiga tahun diharapkan telah dapat dinikmati oleh sekitar 15 warga miskin. Namun kenyataannya tidaklah demikian, kelima ekor sapi tetap berada ditangan yang sama, meskipun telah ada tiga ekor sapi yang beranak (empat ekor), sedangkan dua ekor sapi yang lain (induk) tampak kurang terawat (kurus), dan belum beranak.

Pengembalian modal lebih ditekankan pada jumlah anak yang harus disetor bukan pada waktu. Tidak dibatasinya waktu pengembalian tersebut disebabkan berbedanya kemampuan sapi untuk melahirkan anak, ada sapi *reden* (sering beranak), dan ada yang tidak (sukar beranak), maka jangka waktu pengembalian tidak sama (Kepala Dinas Peternakan Lamongan, 15 Februari 1997).

Bantuan peningkatan pendapatan masyarakat berikutnya dilaksanakan sekitar tahun 1994 berupa dana IDT. Dalam penentuan kelompok sasaran program IDT, kriteria yang ada sebenarnya tidak jauh berbeda. Mereka yang dipilih adalah keluarga tidak mampu. Sehingga dengan bantuan yang diberikan, mereka (kelompok sasaran) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Bantuan yang diberikan bukanlah bantuan sosial (amal), melainkan bersifat bantuan bergulir (pinjaman lunak), dengan harapan dalam tempo yang telah ditentukan bantuan tersebut dapat dikembalikan, untuk kemudian digulirkan lagi kepada warga lain yang memerlukan.

Menurut Kepala Kantor Pembangunan Desa Tingkat II kabupaten Lamongan, program IDT dimaksudkan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin agar dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha.

Dalam rangka itu maka program IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial-ekonomi untuk mewujudkan kemandirian penduduk miskin di desa-desa miskin dengan menerapkan prinsip keswadayaan dan partisipasi. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan merupakan kegiatan produksi dan pemasaran bagi sumber daya yang tersedia di lokasi setempat. Meskipun program tersebut datang dari atas (dana langsung disalurkan melalui BRI), namun daerah tingkat II tetap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Dalam kaitan dengan upaya menanggulangi kemiskinan inilah maka prosedur pemberian bantuan mengikuti tatacara yang telah ditentukan. Tatacara tersebut antara lain: pelaksanaan program IDT di pedesaan mendasarkan pada prinsip keterpaduan, kepercayaan, kebersamaan, kemandirian, ekonomis, dan berkelanjutan (wawancara dengan Kepala Kantor Bangdes Lamongan, 5 Februari 1997).

Demikian pula dalam penentuan sasaran penerima bantuan IDT. Dari pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa peranan aparat desa cukup banyak terlibat dalam pembentukan kelompok swadaya masyarakat, dimulai sejak menentukan kelompok sasaran, membagi kelompok, menentukan pendamping, hingga menentukan pengurus kelompok.

Pak RT atas perintah pak Kasun dan pak Kades mendaftarkan warga yang tidak mampu di RT nya, namun yang menentukan miskin dan tidaknya adalah pak RT berdasarkan saran pamong desa. Ada warga yang lebih miskin dari saya, tapi tidak terdaftar dan bahkan ada yang mampu di daftar. Saya tidak tahu apa ukuran yang dipakai. Pokoknya saya didaftarkan mau saja. (Trj, Smn, penerima bantuan, 15 September 1996).

Ada suatu anggapan dari warga bahwa mereka yang didaftarkan oleh pak RT adalah warga yang mudah diajak bekerja dan merupakan orang-orang yang dekat dengan pamong (Smn, 17 Oktober 1996). Warga yang mudah diajak kerja ini maksudnya adalah mereka yang manut dengan segala perintah pamong, artinya tidak suka membantah atau menghindari tugas yang diberikan, mudah diatur karena selalu manut, sedangkan orang yang dekat adalah mereka yang masih ada hubungan kekerabatan dengan para pamong, seperti anaknya pak carik, misannya pak Kades, adiknya Kasun, RW dan RT. Pernah ditanyakan kepada salah seorang tokoh masyarakat apakah mereka yang menerima bantuan adalah penduduk yang dikategorikan miskin?.

Diantara mereka yang menerima bantuan sebenarnya dapat dikatakan tidak terlalu miskin, bahkan tergolong berkecukupan untuk ukuran desa ini. Masih banyak yang lebih miskin dari mereka tapi tidak mendapat bantuan (Trd, 20 Oktober 1996). Wawancara ini didukung pula dari hasil

observasi, bahwa cukup banyak penerima bantuan yang kondisi rumahnya cukup bagus (dari papan jati, ada listrik), memiliki sepeda motor. Sebaliknya ditengarai pula banyak keluarga tidak mampu (rumah dari gedeg (bambu), tidak memiliki perabot rumah tangga, anggota keluarga lebih dari enam orang, tidak memperoleh bantuan (Observasi, 20 Oktober 1996).

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak penduduk yang lebih layak menerima bantuan namun tidak mendapatkannya. Tampaknya faktor tidak mau menanggung resiko terhadap kegagalan program bantuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan kepala desa dalam menentukan kelompok sasaran.

Dalam penentuan kelompok sasaran memang pihak kabupaten telah menyerahkan sepenuhnya kepada desa sesuai kriteria yang ada. Petugas Kabupaten percaya bahwa mereka yang memperoleh bantuan tersebut adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat. Alasannya karena perangkat desalah yang lebih tahu keadaan warga desanya sehingga semua penentuan kelompok sasaran diserahkan kepada desa. Pemberi bantuan (pemerintah daerah) tinggal menyetujui apa yang telah ditentukan oleh desa (Petugas Bangdes Kabupaten Lamongan, 19 Nopember 1996).

Dilihat dari proses perencanaan program pada umumnya Kelompok penerima bantuan tidak tahu menahu soal pembuatan usulan karena semuanya sudah beres (usulan tersebut sudah jadi), seperti yang dinyatakan oleh penerima bantuan bahwa

yang membuat rencana pengajuan dana adalah pamong desa dengan pendamping, dan anggota kelompok tinggal mengiyakan dan ketua kelompok menandatangani (Ds dan Smn, 5 September 1996). Mereka tidak mengalami sendiri proses pembentukan kelompok dan pembuatan usulan kegiatan, karena kalau disuruh membuat usulan sendiri mereka mengalami kesulitan, sebab rendahnya tingkat pendidikan warga (Strn, 6 Oktober 1996). Sebenarnya dalam pembuatan usulan kegiatan (proyek) tampak adanya dominasi kepala desa (birokrat), sehingga masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut. Meskipun masyarakat tidak bisa membuat usulan, tapi paling tidak diajak berembung tentang apa yang dibutuhkan, bagaimana mengelola bantuan tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab, pasti akan mau dan bisa, tapi warga tidak pernah diajak bicara, tahu-tahu sudah ada kelompok, kemudian dibagikan kepada warga kambing sebanyak tiga ekor, yang itu harus dikembalikan setelah tiga tahun (Ds dan Smn, 6 Oktober 1996).

Bantuan diberikan melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang dibentuk sendiri oleh mereka (penerima bantuan) dengan seorang pendamping dari petugas lapangan dinas pemerintah atau organisasi masyarakat yang ada.

Pendamping bertugas sebagai fasilitator, komunikasi, maupun dinamisator KSM. Pembentukan kelompok itu sendiri mendasarkan pada: (1) kebutuhan keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, (2) tidak dipaksakan termasuk oleh aparat desa, (3) merupakan wadah kegiatan

sosial ekonomi produktif, (4) dapat memanfaatkan kelompok yang sudah ada.

Program IDT yang diluncurkan ke setiap desa besarnya Rp.20.000.000,- untuk satu tahun. Penyaluran dana langsung dari BRI unit desa serta diterima langsung oleh pengurus KSM dengan didampingi oleh pendamping. Dana tersebut diberikan atas dasar usulan yang telah dibuat oleh KSM dengan mendapat persetujuan dari LKMD dan diketahui oleh pendamping.

Usulan dari KSM ini kemudian menjadi usulan Kepala Desa yang mendapat persetujuan dari Camat dan diketahui oleh Pendamping (Camat Bluluk, 5 Nopember 1996). Secara prosedural usulan tersebut dibuat sendiri oleh kelompok dengan bimbingan pendamping. Pendamping diambil dari petugas lapangan pada tingkat kecamatan dari berbagai departemen yang ada di daerah setempat. Mereka adalah orang yang setiap saat dapat berkomunikasi dengan kelompok untuk memberdayakan kelompok.

Tidaklah demikian yang terjadi di desa Bronjong, pendamping KSM dijabat oleh ketua LKMD, dan Sekretaris Desa. Dipilihnya mereka berdua karena tidak ada orang lain yang "dianggap" dapat menjadi pendamping. Pertanyaan yang diajukan kepada kelompok swadaya masyarakat tentang proses pengajuan program (usulan), siapa yang membuat program kegiatan atau usulan kegiatan?. Beberapa penerima bantuan menyatakan bahwa program atau usulan kegiatan dibuat oleh kepala desa, perangkat desa (sekretaris desa, kepala dusun), dan ketua LKMD selaku pendamping. Merekalah yang menentukan



jenis bantuan apa yang tepat diberikan kepada warga desa, dan siapa saja yang memperoleh bantuan tersebut. Warga sendiri tinggal menerima dan melaksanakan usulan tersebut.

Model pelaksanaan pembangunan seperti ini selalu memanjakan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan dan sekedar pemanfaat (*the user*) pembangunan bukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Masuknya suatu program pembangunan di suatu wilayah bagi kelompok tertentu dipandang sebagai *charity project*, dan mempertebal kesan bahwa masyarakat hanya menunggu, sehingga mereka kurang memiliki andil dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi menurut frame dan kaca mata mereka sendiri yakni apa yang dibutuhkan terformulasi dengan apa yang diinginkan.

Proyek pengembangan kawasan terpadu sebagai misal setelah paket diluncurkan hanya sebagian kecil yang mampu mengembangkan (*recovery*) atau menggulirkan (*revolving*) ke kelompok masyarakat lainnya. Selain itu tidak jarang terjadi misalokasi proyek baik secara spasial, sektoral dan kelompok sasaran (*target groups*). Program semacam ini lebih banyak berorientasi pada program, dan bukannya kebutuhan.

Proses perencanaan program yang terjadi di desa penelitian menunjukkan adanya dilema, di satu sisi perencanaan program yang berpusat pada masyarakat (*bottom up*) secara teori (*tertulis*) ingin diterapkan, namun kenyataannya tetap *top down*.

Demikian halnya dengan bantuan dari Perguruan Tinggi diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga warga. Bantuan tersebut dilaksanakan melalui organisasi PKK, maka organisasi tersebutlah yang diharapkan dapat mengelola program bantuan yang ada. Melalui para kader di setiap dusun (lima dusun), Perguruan Tinggi mengucurkan bantuan berupa bibit tanaman, modal usaha, peralatan pertanian, dan pupuk serta obat-obatan.

Pembentukan kelompok sasaran didasarkan pada kepengurusan PKK dusun. Setiap dusun memiliki satu kelompok percontohan (beranggotakan lima orang pengurus PKK). Pemilihan kelompok dilakukan atas dasar informasi dari kepala desa. Setelah diberi pelatihan tentang masalah lingkungan hidup dan peningkatan pendapatan sekitar 4 kali pertemuan, mereka langsung praktek bercocok tanam di lahan pekarangan sekitar rumah, dengan harapan tidak ada lagi lahan kosong, serta hasil bercocok tanam dapat dikonsumsi serta dijual untuk menambah pendapatan.

Berbagai program bantuan yang telah diluncurkan ke desa, dalam hal penentuan kelompok sasaran diketahui kurang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemilik modal (dana). Salah satu penyebab ketidaksesuaian pemilihan kelompok sasaran dengan prosedur yang ditentukan adalah adanya ketentuan dari pemberi bantuan bahwa bantuan tersebut harus berhasil (dana) tidak habis.

Ketentuan ini paling tidak merupakan beban bagi kepala desa (pimpinan desa) untuk merealisasinya, akibatnya

kepala desa sebagai aparat pemerintah di tingkat desa berupaya untuk mewujudkan atau memenuhi ketentuan tersebut.

Dari sisi kepala desa sendiri, tampak perilaku serba hati-hati, serta keinginan melakukan kebijakan dari atas seperti apa yang diharuskan. Kurang adanya pertimbangan serta pelibatan warga masyarakat untuk membahas setiap kebijakan dari atas, menyebabkan setiap program seakan merupakan paksaan.

Kepala desa kurang mampu menterjemahkan setiap kebijakan dan menyesuaikan dengan kondisi desa karena segala sesuatu hanya diputuskan oleh beberapa orang (pamong), mungkin karena usianya yang relatif masih muda sehingga sulit berkomunikasi dengan anggota masyarakat yang lebih tua. Akibatnya banyak kebijakan yang dilakukan hanya sekedar mencapai target, namun tidak berdampak pada kemaslahatan orang banyak dalam arti kualitas dan kemanfaatan.

## 5.2. Jenis Bantuan dan Asalnya

Bantuan untuk masyarakat pedesaan lebih diarahkan pada pekerjaan *off-farm*, mengingat lahan pertanian semakin menyempit. Demikian juga bantuan peningkatan pendapatan yang diberikan kepada masyarakat pedesaan di desa penelitian. Seperti yang dinyatakan kepala desa Bronjong bahwa:

Dalam rangka mengentas kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan penduduk miskin, desa Bronjong telah beberapa kali

menerima bantuan. Diantaranya bantuan untuk kecamatan rawan dari Dinas Peternakan pemda tingkat II kabupaten Lamongan, berupa enam ekor sapi dan 3000 batang bibit kelapa dari Dinas Pertanian. Kosgoro Tingkat II memberikan bantuan berupa penanaman rumput gajah. Mahasiswa KKN dengan pemberian keterampilan bubut kayu. Tim Peneliti Perguruan Tinggi berupa bibit tanaman untuk pembudidayaan lahan pekarangan. Program IDT berupa ternak kambing dan sapi (Snt, 10 Oktober 1995).

Pernyataan kepala desa tersebut ternyata juga didukung oleh ketua LKMD desa Bronjong (11 Oktober 1996) antara lain:

Dinas pertanian Tingkat II Lamongan selama 3 tahun ini telah memberi bibit kelapa sebanyak 3000 batang. Namun kelapa yang diberikan itu bukan kelapa hibrida, melainkan kelapa biasa, yang pohonnya tinggi. Bibit itu akhirnya ditanam di sepanjang *galengan*, dan tepi jalan. Selain dari Dinas Pertanian, dinas peternakan juga pernah memberikan bantuan sapi dalam rangka membantu kecamatan rawan. Program IDT juga ada, berupa kambing dan sapi dimulai sejak tahun 1994. Di desa ini ada lima kelompok penerima IDT.

Kurang lebih dalam kurun waktu empat tahun terakhir, cukup banyak bantuan yang diluncurkan ke desa Bronjong. Baik bantuan yang langsung (berupa material) seperti pemberian bibit tanaman dan ternak, maupun bantuan yang tidak langsung berupa peningkatan keterampilan bagi warga desa, seperti pendidikan dan pelatihan kerja bagi warga desa.

Bantuan dari IDT diberikan dalam tiga tahun (periode). Periode pertama (1994/1995) bantuan berupa kambing (menurut penerima bantuan masih berupa *cempe* atau anak kambing) sebanyak 80 orang masing-masing sebanyak 3 ekor seharga Rp.250.000,-. Jumlah ini sesuai dengan jumlah dana IDT yang diterima untuk tiap desa sebanyak Rp.20.000.000,-. Kambing di beli dari pasar hewan di sekitar desa atau kecamatan setempat, karena para pedagang hewan tahu bahwa kambing itu akan digunakan sebagai bantuan untuk program IDT, para pedagang tersebut cenderung menjual dengan harga mahal.

Ini merupakan salah satu dampak dari pencairan dana IDT yang bersamaan untuk semua desa, dan dana tersebut pada umumnya dirupakan hewan. Oleh karena ada peningkatan permintaan sedangkan persediaan terbatas, akibatnya harga menjadi naik. Dalam keadaan wajar harga kambing tersebut sebenarnya tidak lebih dari Rp. 50.000,- per ekor, namun karena diperlukan untuk program pemerintah harga kambing naik hingga 50 persen (Amt, 10 Desember 1996).

Dalam keadaan seperti ini timbul fenomena yang menarik, ada sebagian keluarga yang berusaha memanfaatkan *moment* yang sangat penting tersebut, yaitu dengan menjual ternak yang sudah dimiliki kepada penyandang dana (proyek), namun kemudian yang bersangkutan juga menjadi peserta proyek dengan memperoleh bantuan serupa. Dalam keadaan seperti ini timbul rekayasa dua perilaku sekaligus yaitu *social-economic engineering* di satu sisi ekonomi dan *prestise* di sisi lain. Secara ekonomi yang bersangkutan diuntungkan karena dapat

menjual ternaknya dengan harga wajar, sehingga uang yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan lain, tapi di sisi lain secara prestise dia tidak merasa jelek atau jatuh gengsinya dimata masyarakat atau tetangga, karena tetap merawat ternaknya sendiri.

Seperti yang dinyatakan Tms (25 Oktober 1996) sebagai berikut:

Saya senang dengan bantuan ini, karena yang saya rawat adalah kambing saya sendiri, yang sudah saya jual kepada IDT. Saya dapat keuntungan ganda yaitu pertama saya dapat uang karena menjual kambing, tapi dengan kambing yang tetap saya rawat banyak orang yang tidak tahu kalau kambing itu kambingnya proyek, mereka tahunya itu yang kambing saya.

Pada waktu ditanya mengapa kambing itu dijual kepada proyek?, alasannya adalah *mumpung* ada yang membutuhkan sehingga harga jualnya tinggi. Ini merupakan satu gambaran bahwa telah ada penduduk yang mampu melakukan analisis ekonomi secara jeli, dengan memanfaatkan setiap peluang ekonomi yang ada, namun uniknya masih berpegang pada harga diri.

Bila dikaji secara makro sikap demikian ini merupakan perpaduan dari dua pendekatan. Di satu sisi menempatkan manusia sebagai *economic animal* dengan mengejar tujuan ekonomi, namun di sisi lain merupakan mengarah pada *increasing attainment of one's cultural values*, yang tetap memperhatikan gengsi dalam sistem sosial. Ini merupakan

fenomena bahwa bagaimanapun juga keadaan kehidupannya sebenarnya, gengsi agi orang Jawa masih tetap mendapat perhatian.

Fenomena lain yang menarik adalah adanya peluang bagi aparat desa dan orang tertentu mengambil manfaat dari pengadaan hewan ternak tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Ali (bukan nama yang sebenarnya), bahwa hewan ternak itu dibeli oleh orang-orang tertentu (aparat dan beberapa orang dekat pimpinan), dicurigai mereka mengambil untung dari pembelian ternak tersebut, dengan melihat mahalnnya nilai beli ternak. Ini juga sebagai suatu indikator bahwa sebenarnya orang-orang tertentu yang lebih banyak mengambil manfaat dari setiap program pembangunan yang dilakukan di pedesaan.

Pemberian batuan IDT pada periode II (1995/1996) dan periode III (1996/1997) berupa sapi, seharga Rp. 800.000,- per ekor. Tiap orang menerima satu ekor sapi. Bantuan ini diberikan kepada 25 orang per tahun atau 50 penerima bantuan untuk dua tahun. Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi ternyata 50 orang penerima bantuan itu tidak semuanya warga baru, hanya 20 orang yang baru dan 30 orang lainnya adalah warga penerima bantuan periode I. Tiga puluh orang lama (penerima bantuan periode I), menerima sapi pada tahun kedua dan ketiga tersebut, ternyata sebagian besar keluarga dari perangkat desa.

Pendamping KSM menyatakan bahwa bantuan sapi untuk penerima kambing (I) memang dimaksudkan untuk meningkatkan

pendapatan mereka, karena sapi memiliki nilai jual yang lebih tinggi, dan penerima bantuan yang lain, nantinya juga akan menerima bantuan sapi setelah mereka mulai mengembalikan modal (Skrn, 13 Desember 1996). Ini sebenarnya merupakan indikator bahwa program IDT tidak mencakup seluruh warga yang telah terdaftar (160 KK), karena yang menerima bantuan selama 3 tahun (untuk tahun 1998 sudah tidak menerima lagi), hanya sekitar 105 orang. Berarti masih ada sekitar 55 KK lagi yang belum menerima. Ironisnya dari 105 penerima IDT tidak semuanya keluarga miskin.

Pada waktu ditanyakan kepada kepala desa mengapa tidak semua yang telah didaftar mendapat bantuan dari IDT. Kepala desa menyatakan bahwa mereka yang telah didaftar itu sebenarnya tidak tahu kalau dirinya termasuk orang-orang yang telah didaftar untuk menerima bantuan, sehingga walaupun tidak diberi ya tidak apa-apa. Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana yang telah dibuat.

Bantuan dari Perguruan Tinggi berupa pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan disertai pemberian bibit tanaman dan perlengkapan serta modal perawatan tanaman. Bantuan diberikan kepada 25 orang anggota kelompok PKK yang terbagi dalam lima kelompok (menurut dusun yang ada). Masing-masing kelompok memperoleh dana pengelolaan lahan sebanyak Rp. 1.000.000,-. Dana itu berupa bibit seharga Rp.250.000,- perlengkapan cocok tanam (alat penyemprot hama, pupuk, insektisida) seharga Rp.250.000,- dan dana pengembangan sebanyak Rp.500.000,-.



Seperti halnya bantuan yang lain, bantuan inipun sifatnya bukan cuma-cuma, melainkan bersifat *revolving*. Harapan dari model ini tidak lain agar semua warga (keluarga kurang beruntung) dapat menikmati bantuan tersebut. Penentuan jenis bantuan (bibit tanaman) sudah didahului dengan studi kesesuaian lahan yang dilakukan oleh dosen pertanian Universitas Pembangunan Nasional dan dilengkapi dengan analisis laboratorium (Wawancara dengan Ketua Tim PT, 15 Desember 1996).

Studi kesesuaian lahan ini dilakukan dengan harapan agar tanaman yang dikembangkan dapat hidup dan berproduksi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Menurut petugas studi kesesuaian lahan dinyatakan bahwa untuk menentukan jenis tanaman yang akan dipilih memang perlu didahului oleh studi ini, agar apa yang dikerjakan membuahkan hasil (Strsn, 5 Februari 1997), dan menurut dia bahwa apa yang dilakukan oleh tim PT tersebut sudah benar, karena memang tidak setiap tanaman dapat ditanam di desa penelitian. Ini disebabkan karena kondisi tanahnya berkapur dan sumber air sulit diperoleh. Atas dasar studi kesesuaian lahan ini PT memilih beberapa jenis tanaman yang dianggap cocok dengan kondisi tanah di desa penelitian. Semuanya merupakan upaya agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.

### 5.3. Tujuan Pemberian Bantuan

Semua pemberian bantuan kepada masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya memiliki bentuk yang berbeda. Kantor Dinas Peternakan memberi bantuan kepada desa di kecamatan rawan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, sehingga dapat terbentuk desa swasembada. Program IDT memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda, yaitu mengentas kemiskinan di pedesaan, dengan memberikan bantuan yang dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Demikian pula PT, tujuan jangka panjang dari program bantuan yang diberikan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IDT sebagai program pengentasan kemiskinan memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha, dan pemantapan kelembagaan usaha bersama. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemampuan permodalan dalam kelembagaan kelompok yang berkembang sesuai kebutuhan dan keinginan orang miskin, dapat memperkuat kemampuannya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Tujuan tersebut merupakan tujuan normatif dari setiap program pengentasan kemiskinan, namun dibalik itu ternyata masih terdapat tujuan tertentu (untuk kepentingan pemerintah) yang kadang kala tidak disadari oleh setiap

orang. Terselip dari pernyataan aparat pemerintah (Camat) saat menyampaikan bantuan (sapi IDT) kepada kelompok penerima bantuan bahwa pemerintah sangat memperhatikan penduduk (rakyat kecil) antara lain: masyarakat diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah, dan senantiasa melaksanakannya, karena pemerintah selalu memperhatikan masyarakat (Strn, 8 Agustus 1997). Demikian pula organisasi Kosgoro (tingkat II kabupaten Lamongan), melalui dinas kehutanan pernah memberikan bantuan tanaman rumput gajah sebagai pakan ternak.

Organisasi ini melalui pengurusnya yang kebetulan juga staf di dinas kehutanan bersama perangkat desa dan penduduk melakukan penanaman rumput gajah di sepanjang sungai (di desa Bronjong). Penanaman tersebut dilakukan bertepatan dengan hari bakti organisasi Kosgoro, sehingga tampak bahwa seakan-akan kegiatan tersebut memang program dinas kehutanan, karena yang memberi bibit dinas kehutanan. Namun dibalik itu semua, ditengarai adanya tujuan yang tersembunyi yaitu upaya organisasi untuk mencari simpati dari masyarakat, karena yang diketahui masyarakat petugas dari dinas kehutanan tersebut adalah fungsionaris KOSGORO, dan Kosgoro sendiri selalu diidentikkan dengan GOLKAR. Dampak dari semua kegiatan tersebut adalah tertanamnya anggapan pada masyarakat bahwa Golkar telah memperhatikan kebutuhan rakyat, memperhatikan nasib rakyat, sehingga pada pemilu nanti mereka diharapkan memilih Golkar.

Di sisi lain melihat begitu antusiasnya petugas (pemerintah), melaksanakan program bantuan tersebut (ditandai oleh seringnya datang ke desa, bahkan hari Minggu pun petugas datang ke desa untuk mempersiapkan bantuan tersebut terkesan ada motivasi yang menyebabkan mereka giat bekerja.

Pernah ditanyakan apakah ada dana untuk pengelola (pelaksana proyek), jawabnya adalah bahwa dana untuk pelaksana disediakan, namun bila pelaksana pandai mengelola dana bantuan tersebut dia akan memperoleh lebih banyak dari yang seharusnya diterima. Apalagi bila bantuan berupa barang, nilai barang tersebut dapat disesuaikan menurut kebutuhan. Artinya secara fisik jenis barangnya sama, namun secara ekonomi mungkin nilainya berbeda. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemberian bantuan oleh kelompok organisasi tertentu memiliki *fungsi manifest* dan *fungsi laten*, dan ini secara tidak langsung telah ditangkap oleh para kelompok sasaran.

Dari sisi pemberi bantuan, bantuan peningkatan pendapatan dimaknakan sebagai berikut: (1) sebagai upaya untuk membantu masyarakat lemah agar dapat mandiri, (2) upaya untuk mengambil hati masyarakat guna mendukung program pemerintah, (3) sarana untuk mempertahankan kedudukan atau jabatan bahkan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi bila berhasil, (4) sarana untuk mendapatkan tambahan penghasilan.

Masyarakat sendiri memiliki penafsiran yang berbeda terhadap tujuan pemberian bantuan antara satu lembaga

dengan lembaga lainnya. Pada waktu menerima natuan dari Perguruan Tinggi, masyarakat menyatakan bahwa bantuan yang diberikan bertujuan untuk menambah pengetahuan ibu-ibu terutama dalam hal pemanfaatan pekarangan, sehingga ibu-ibu dapat berperan dalam menambah penghasilan keluarga ( Ibu Skrn, Ibu Mnrt, Ibu Aswtl, 7 Oktober 1997). Pernyataan ini terutama disampaikan oleh ibu-ibu yang memiliki wawasan luas karena mereka banyak berkomunikasi dengan dunia luar.

Namun bagi sebagian ibu-ibu yang relatif kurang berkomunikasi dengan orang luar, pada umumnya menyatakan bahwa bantuan tersebut, sebenarnya merupakan kepentingan PT sendiri. Warga kurang memerlukan bantuan seperti yang diberikan PT tersebut, selain repot memanfaatkannya, juga karena di desa ini tidak ada air untuk menyiram tamanan yang diberikan.

Meskipun pihak pemberi bantuan telah melakukan identifikasi kebutuhan, dengan ditengarainya sesuatu kebutuhan pada masyarakat sasaran, namun kenyataannya pihak kelompok sasaran (penerima bantuan), tidak merasakan bahwa pada dirinya membutuhkan sesuatu. Semuanya ini disebabkan antara lain mereka terbiasa hidup dengan kepasrahan (menerima apa adanya), sehingga beban yang beratpun mereka terima dengan pasrah.

Lain halnya pandangan masyarakat penerima bantuan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah program IDT dan dinas peternakan. Kalau pemerintah yang memberi bantuan, tujuan utamanya agar masyarakat mendukung program pemerintah. Ini

terkukti karena warga desa di sini hampir semuanya golkar (96%). Pak kades pernah menyampaikan penjelasan pada saat menyampaikan bantuan antara lain pemerintah memperhatikan nasib rakyat, sehingga rakyat harus mendukung setiap program pemerintah. Kalau tidak mendukung program pemerintah, masyarakat tidak akan mendapat bantuan lagi. Rakyat (masyarakat) cukup paham dengan himbauan kepala desa terutama dengan kata-kata untuk mendukung pemerintah itu adalah bila dalam pemilihan umum memilih Golkar, karena Golkar itu milik pemerintah (St, Dsm, Krmn; 10 Oktober 1997).

Sikap itu telah dibutikannya pada waktu pemilu yang lalu, diantara pemilih ternyata hanya 16 orang (4%) yang tidak memilih golkar. Ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan kepada warga dapat memiliki berbagai kepentingan atau tujuan, terutama bila dilihat dari si pemberi bantuan.

Pemberian bantuan yang mengatas-namakan pemerintah disikapi oleh rakyat sebagai aktivitas membantu suksesnya program atau kebijakan pemerintah. Sehingga sering kali rakyat merasakan adanya tekanan pemerintah dalam hubungannya dengan hidup berbangsa dan bermasyarakat. Meskipun demikian rakyat senantiasa mematuhi karena memang dapat dikatakan tidak ada pihak di luar pemerintah yang memberikan bantuan kepada masyarakat di desa penelitian. Selain itu mereka menerima bantuan tersebut karena adanya perasaan sungkan kepada pamong bila tidak melaksanakan program dari pemerintah.

Sikap demikian ini tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (nilai-nilai Jawa), terutama nilai patuh kepada pimpinan, sehingga apapun yang diberikan oleh pemerintah senantiasa diiyakan.

Selain unsur kepatuhan juga karena hubungan *patron klien* antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah sebagai *patron* dan masyarakat sebagai *klien*. Sikap kepatuhan tersebut tidak selamanya dilaksanakan dengan tulus, karena sering terjadi penolakan secara terselubung terhadap keputusan yang diambil oleh pimpinan desa yaitu dengan tidak melaksakannya secara benar atau merawat dengan baik.

Tingkah laku warga desa yang melakukan penolakan secara halus, yang tercermin dalam ungkapan *nggih-nggih ora kepanggih*, semuanya itu terbukti dengan tidak dilaksanakan segala sesuatu yang telah diputuskan.

#### 5.4. Pemanfaatan Bantuan

Tidak semua bantuan yang diterima warga desa dapat dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi bantuan. Bantuan ternak sapi dari Dinas Peternakan Daerah Tingkat II berupa lima ekor sapi (betina), dalam waktu tiga tahun baru berkembang menjadi 9 ekor. Menurut perkiraan dari dinas peternakan, dalam kurun waktu tiga tahun, paling tidak anak sapi sudah dapat digulirkan kepada 10 orang lagi (15 dengan yang lama), karena tiap induk sapi harus mengembalikan dua anak (*pedet*), tapi kenyataannya para

penerima bantuan belum mengembalikan modal kepada pemiliknya, sehingga sapi masih tetap berada pada penerima pertama.

Dari pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa para penerima bantuan, memiliki keinginan berlama-lama untuk tidak mengembalikan modal, sehingga mereka lebih lama dapat memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Salah satu cara yang dilakukan penerima bantuan untuk tidak segera mengembalikan ternaknya adalah menjual atau menyerahkan anak sapi kepada famili, sehingga kesan yang tampak sapi yang dipelihara belum berkembang.

Sikap demikian ini ternyata didukung oleh sistem yang berlaku di desa tersebut, karena memang tidak ada peringatan kepada para penerima bantuan untuk segera mengembalikan anak sapi, agar dapat digulirkan kepada yang lain. Apalagi penerima bantuan itu adalah para perangkat desa, walaupun bukan mereka sendiri yang memelihara. Sehingga bantuan tersebut tetap berkisar pada keluarga perangkat desa saja.

Penduduk pada umumnya tidak mengetahui bagaimana prosedur pemberian bantuan tersebut, yang mereka ketahui bahwa sapi yang dipelihara itu milik perangkat desa, apakah sapi itu harus dikembalikan atau tidak mereka (pemelihara) tidak mengetahuinya. Seperti yang dinyatakan Bowo (bukan nama sebenarnya), bahwa sapi yang dipelihara Suro (bukan nama sebenarnya) adalah milik Pamong desa, Demikian pula sapi yang dipelihara Muksin (juga bukan nama sebenarnya) juga milik pamong desa. Sapi itu sudah beranak dua, tapi



sampai sekarang tetap dipelihara dia (penggadu), dengan alasan mereka *nggadu pada pamong*, sehingga anak yang diperoleh akan dibagi dua antara pemelihara dan pemilik (yang dalam hal ini adalah pamong desa) (16 Oktober 1997).

Dari pernyataan Bowo ini terkesan bahwa ada tiga kepentingan dalam pelaksanaan bantuan. Kepentingan pertama bagi pemberi modal (pemerintah) timbul kesan bahwa sapi (bantuan) telah jatuh pada sasaran yang tepat (warga desa yang kurang mampu seperti Suro dan Muksin). Kepentingan kedua bagi aparat desa berusaha menyelamatkan bantuan dengan cara memilikinya dan kemudian menggadukan kepada warga desa. Kepentingan ke tiga dari pihak penggadu mereka dapat keuntungan dengan menggadu tersebut. Terkait dengan kepentingan pihak aparat ini muncul keuntungan ekonomi dan sosial. Dalam hal keuntungan ekonomi yang diperoleh dari bantuan tersebut paling tidak anak sapi yang dilahirkan oleh sapi hasil bantuan akan menjadi miliknya, di sisi lain secara sosial yang bersangkutan memiliki prestise di mata masyarakat. Dalam kenyataan ini paling tidak manfaat bantuan justru lebih banyak diperoleh para pamong, sedangkan pihak masyarakat (sebagai penggadu), meskipun juga memperoleh keuntungan, namun diperolehnya karena rasa kepatuhan kepada pamong desa.

Kasus lain adalah bantuan peningkatan pendapatan dari program IDT. Selama kurun waktu tiga tahun, telah 105 orang yang mendapat bantuan. Dalam perkembangannya tidak semua bantuan dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan. Dari 18

orang penerima bantuan IDT yang terhimpun pada kelompok Sidodadi (dusun Garas), ada delapan orang yang ditengarai tidak memiliki kambing lagi, dan ada dua orang yang jumlah kambing yang dimiliki berkurang.

Pada tahun 1994 mereka (penerima bantuan), masing-masing memperoleh tiga ekor kambing seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Orang yang sama pada tahun 1995 dan 1996 mendapat tambahan seekor sapi (seharga Rp 800.000), sehingga jumlah bantuan yang diterima setiap orang (keluarga) adalah tiga ekor kambing dan seekor sapi. Diantara penerima bantuan tersebut (18 orang), tidak hanya kambing yang habis, bahkan ada dua orang (penerima bantuan) baik kambing maupun sapi juga habis.

Pengamatan yang dilakukan kepada para penerima bantuan IDT, menunjukkan ada sebagian penerima bantuan yang merawat dengan baik ternak yang diterimanya, ini ditandai oleh kondisi ternak yang dapat dikatakan sehat, gemuk, bersih. Ada dua sapi yang sedang hamil dan tiga keluarga telah mendapat tambahan anak kambing hasil bantuan tersebut. Namun banyak juga yang tidak merawat ternaknya dengan baik, ini diketahui oleh keadaan kambing kurus dan kurang sehat, serta keadaan kandang kotor (observasi ternak di dusun Garas, 17 Oktober, 1997). Mereka yang kondisi kandangnya relatif kotor, ternyata sebagian ternak yang dipelihara sudah habis.

Bagi penerima bantuan yang sebagian bahkan seluruh ternak bantuan IDT habis, memberikan alasan bervariasi, antara lain:

Pak Prmn menyatakan bahwa mereka butuh uang untuk memperbaiki rumah, karena rumahnya hampir roboh, maka dijuallah kambing yang dimiliki. Pada waktu ditanya tentang kepemilikan kambing, dia menjawab bahwa kambing itu kan sudah diserahkan kepada saya ya berarti dapat saya gunakan menurut kebutuhan. Dari pada rumah saya roboh. (Prmn, 17 Oktober 1997).

Lain halnya dengan jawaban pak Joko bukan nama sebenarnya, bahwa kambing dan sapi yang diperoleh telah dijual untuk beli sawah. Karena kalau untuk beli sawah, kan dapat digunakan untuk bercocok tanam, dan hasilnya dapat dinikmati setiap saat (Joko, 17 Oktober 1997).

Bapak Lmn memberikan jawaban berbeda, kambing yang diberikan kepada dia dijual untuk punya hajat (menikahkan putranya), karena tidak punya modal maka kambing itu dijual sebagai modalnya (18 Oktober 1997).

Sn, memberikan pernyataan bahwa dua ekor kambing dari tiga ekor yang diterimanya telah mati (Sn, 18 Oktober 1997).

Dari beberapa pernyataan yang diberikan oleh para penerima bantuan khususnya yang kurang berhasil, dapat diidentifikasi tiga macam perilaku penerima bantuan, yaitu (1) lebih mengutamakan prestise (gengsi) daripada faktor ekonomi; (2) memanfaatkan peluang yang dianggap lebih menguntungkan; (3) pasrah dengan keadaan yang tidak diimbangi dengan usaha, mereka cenderung bersikap *nrimo*.

Ungkapan dari para penerima bantuan sebenarnya juga merupakan cerminan tentang bagaimana mereka memberikan arti terhadap bantuan yang diberikan kepadanya.

Bagi penerima bantuan yang relatif telah berhasil dalam memanfaatkan bantuan, menyatakan bahwa ternak yang diperoleh paling tidak telah memberikan pekerjaan untuk mengisi waktu luang bagi keluarga setelah bekerja di sawah. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa bila cepat beranak, segera akan memiliki ternak sendiri (tidak menggadu lagi).

Keadaan para penerima bantuan dari PT, dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan, tidak jauh berbeda dengan penerima bantuan dari IDT. Dari 25 orang penerima bantuan yang terbagi dalam lima kelompok, ternyata hanya satu kelompok (lima orang) yang menunjukkan keberhasilan dalam mengelola lahan pekarangan dan empat kelompok (20 orang) lainnya tidak berhasil memanfaatkan bantuan tersebut, bahkan bantuan yang diberikan telah habis.

Dari pengamatan yang dilakukan pada kebun percontohan kelompok Cempleng Kidul (kelompok yang berhasil), diketahui bahwa bibit tanaman jeruk super yang diberikan kepada kelompok sebanyak dua pohon, telah berhasil dikembangkan menjadi 24 batang, selain itu dari lima orang anggota kelompok ternyata 3 diantaranya telah menanam lahan pekarangan yang dimiliki dengan tanaman semusim (cabai, tomat, terung, semangka, ketimun, kacang panjang, sehingga hasilnya dapat segera dijual untuk menambah uang belanja (Observasi kebun percontohan, 16 Oktober 1996).

Keberhasilan dalam mengelola kebun percontohan terutama didukung oleh tersedianya air untuk menyiram tanaman, kemauan dan kemampuan dua orang anggota kelompok yang secara intensif merawat dan mengembang-biakkan tanaman. Ini membuktikan bahwa tidak semua anggota kelompok mau merawat atau bertanggung jawab terhadap keberhasilan kebun percobaan yang dikelolanya.

Alasan tidak ikut merawat kebun percontohan tersebut karena tempatnya agak jauh dari rumah tempat tinggalnya, selain itu juga tidak tersedianya waktu untuk datang ke kebun percontohan. Alasan lain adalah mereka tidak dapat bebas menikmati hasilnya, karena tanah yang dijadikan kebun percontohan tersebut milik perseorangan bukan milik desa. Ada perasaan *sungkan* bila ikut menikmati hasilnya.

Bagi pemilik tanah sebagai lokasi kebun percontohan menyatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh PT, dirasakan sangat besar manfaatnya. Semula tanah yang ada tidak dimanfaatkan sama sekali, karena memang tidak berminat untuk menanamnya. Selain tidak tahu harus ditanami apa, juga tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan tanah itu sebaik mungkin. Tapi setelah dilakukan kegiatan oleh PT, serta mencarikan jenis tanaman yang cocok maka timbul keinginan untuk menanam dan memelihara tanaman itu sebaik mungkin. Hasilnya setelah dua tahun, bibit yang diberikan oleh PT telah membuahkan hasil, selain dapat dijual untuk menambah uang belanja, juga dapat digunakan untuk membeli bibit lagi.

Pada waktu ditanya tentang manfaat yang diperoleh dari bantuan PT, dijawabnya:

Banyak keuntungan yang saya peroleh, selain tanah saya dapat ditanami dengan bibit yang tidak harus saya beli sendiri, ternyata hasil panennya pun lumayan. Hampir setiap dua hari sekali saya dapat menjual hasil kebun tersebut kepada tengkulak (*bakul mlijo*) yang selalu datang ke sini. Seperti kacang panjang, jeruk pecel, tomat, terung. Sebagian hasil panen itu saya biarkan untuk bibit, dan sebagian lagi untuk dimasak sendiri (Mnrtek, Skrn, 18 Oktober 1997).

Memang untuk merawat tanaman itu memerlukan tenaga, selain harus menyiram setiap hari, juga harus memupuk dan melakukan penyemprotan hama. Kegiatan ini kadang kala memerlukan tenaga dan waktu, apalagi bila musim kemarau, air tidak mudah diperoleh, sehingga harus mencari ke tempat yang agak jauh. Ini yang biasanya menyebabkan Ibu-ibu malas melakukannya.

Bagi penerima bantuan lain (empat kelompok), pada waktu dilakukan observasi kebun percontohan mereka sudah tidak berbekas. Hanya tinggal sepetak tanah kosong, dalam keadaan kering dan *nelo*. Pada waktu ditanyakan kepada anggota kelompok mana tanaman yang diberikan oleh PT, dijawabnya semua bibit yang diberi oleh PT sudah mati, mereka tidak sempat menikmati hasilnya. Matinya bibit yang diberikan karena tidak ada air untuk menyiram tanaman tersebut.

Sebenarnya tidak adanya air bukanlah alasan yang sebenarnya, karena bila mau mencari air di desa Bronjong masih tetap ada meskipun debitnya berkurang, hanya saja jaraknya agak jauh dari lokasi kebun percontohan tersebut. Dari wawancara dan observasi yang dilakukan kepada para penerima bantuan terkesan bahwa mereka merasa tidak memperoleh manfaat langsung dari bantuan tersebut (masih menunggu hasil panen yang relatif agak lama), di samping itu juga terkesan bahwa dengan bantuan yang diberikan menyita waktu mereka sehari-hari untuk merawatnya. Mereka seolah tidak berkepentingan dengan adanya bantuan tanaman tersebut.

Berkaitan dengan itu, konsekuensinya si penerima bantuan tampak kurang bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan. Mereka menyatakan bahwa *wong tanamannya sudah mati apa yang mau dikembangkan, saya sudah menanam di samping rumah, namun tanaman itu dimakan ayam.*

Pernyataan lain tentang keterlibatannya dalam kegiatannya tersebut salah seorang penerima bantuan mengungkapkan: *saya disuruh masuk anggota kelompok itu, bukan kemauan saya, tapi ditunjuk oleh pak Kades, ya kalau tidak berhasil bukan salah saya (Tndr, 19 Oktober 1997).* Ini merupakan suatu indikator bahwa *rasa ikut handarbeni* bantuan yang diberikan belum ada, mereka masih beranggapan bahwa bantuan itu bukan miliknya, dan kalau berhasil bukan dirinya yang akan mengambil manfaat. Oleh karenanya dalam merawatpun tidak sepenuh hati.

Keadaan yang terjadi pada bu Tndr ini, juga banyak terjadi pada para penerima bantuan lainnya. Mereka pada

umumnya menyatakan bahwa pemberian bantuan itu bukan karena keinginannya, namun ditunjuk pak Kades (pamong) dan yang bersangkutan tidak berani menolak, ketika dirasakan bahwa bantuan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannya. Akhirnya yang terjadi suatu sikap penolakan halus atau yang oleh Hotman (1996) dinyatakan pembangkangan terselubung. Meminjam istilah Jawa disebutnya *nggih-nggih ora kepenggih*.

Pelaksanaan program bantuan di desa penelitian dapat divisualisasikan dalam matrik berikut:

Tabel : 5.1  
Ringkasan Pelaksanaan Program Bantuan Peningkatan Pendapatan  
di Desa Penelitian

Aspek Yang Diamati	Din.Ternak	IDT	PT
Penentuan kelompok sasaran Sasaran	Pamong KK/Pamong	Pamong KK	Pamong PKK
Bentuk Bantuan	Sapi	Kamb.&Sapi	Bibit&Modal
Tujuan (dari Pemberi)	- memberdayakan masy. - mendukung pemerintah - mendapatkan uang	-memberdayakan masy. -mendukung pemerintah -mendapatkan uang	-memberdayakan masy. -mendapatkan kum -mendapatkan uang
Tujuan (dari penerima)	- Membantu pamong merawat ternak - Mendapat upah	-Melaksanakan perinth -mendpt.tambahan uang -mendukung tugas pmg.	-Melaksanakan perintah -mendpt.tambahan hasil -mendukung tgs.suami
Pelibatan klp.sasaran dalam perencanaan program	tidak ada	hanya orang tertentu	hanya orang tertentu
Hasil pengelolaan bantuan	kurang berkembang	sebagian kecil baik	sebagian kecil baik
Kepentingan Pamong	dominan	dominan	dominan
Keadaan Organisasi pelaksana	tidak ada	ada/tdk. sesuai	ada/tdk. sesuai



Peneliti melihat adanya perbedaan kelompok sasaran (penerima bantuan) dalam memanfaatkan bantuan yang diterimanya. Diantaranya adalah (1) warga menerima bantuan dan memperlakukannya secara baik, namun hasil pemanfaatan bantuan tidak optimal; (2) penerima bantuan menerima dan memanfaatkan bantuan secara optimal, ditengarai oleh berkembangnya bantuan yang diberikan kepadanya; (3) penerima bantuan mau menerima bantuan namun tidak memanfaatkan secara baik, bahkan mengembalikan bantuan kepada pemberi; (4) warga diberi bantuan tetapi justru menolak bantuan yang diberikan.

Tindakan terhadap bantuan peningkatan pendapatan ini banyak ditentukan oleh karakteristik penerima bantuan itu sendiri, di samping juga disebabkan oleh faktor program bantuan dan organisasi pengelola program tersebut.

**BAB 6**

## BAB 6

### MAKNA PEMBANGUNAN BAGI ANGGOTA MASYARAKAT DESA

Bagian ini merupakan diskusi antara temuan di lapangan dengan teori yang terkait. Pembahasan atau diskusi yang dilakukan merupakan proses analisis data kualitatif dengan tujuan menemukan keterkaitan antara berbagai kategori penelitian yang dihasilkan dalam studi lapangan. Kategori penelitian tersebut meliputi: (1) pelaksanaan pembangunan di pedesaan khususnya pelaksanaan program bantuan peningkatan pendapatan, (2) karakteristik keluarga penerima bantuan, (3) organisasi pelaksana program, serta (4) kondisi pasar di desa. Dengan melihat keterkaitan antara ketiga kategori penelitian ini dapat dideskripsikan secara lengkap tentang makna program pembangunan khususnya bantuan peningkatan pendapatan oleh masyarakat desa.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa kajian penelitian ini lebih memfokus pada "bantuan peningkatan pendapatan". Peneliti menekankan pada program pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat desa, sehingga pembangunan dalam penelitian ini lebih terfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat. Peneliti tidak melihat program pembangunan di bidang lain seperti fisik, politik,

hankam, budaya secara detail, meskipun dari temuan yang diperoleh kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan.

Bab 6 ini membahas dua hal pokok yaitu temuan dan pembahasan. Pembahasan itu sendiri merupakan perpaduan antara temuan di lapangan dengan teori yang terkait. Secara rinci dijelaskan pada bagian berikut.

### 6.1. Temuan

Dari temuan di lapangan diketahui bahwa bentuk program peningkatan pendapatan yang langsung dapat dirasakan oleh anggota masyarakat berupa pemberian bibit pohon kelapa oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dati II Lamongan, pemberian ternak sapi untuk kecamatan rawan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan, program IDT berupa kambing dan sapi, serta pemberian bibit tanaman dan modal untuk pemanfaatan lahan pekarangan dari Perguruan Tinggi. Semua program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan anggota masyarakat khususnya kelompok sasaran.

Pemberian bantuan kepada Desa Bronjong disebabkan karena Desa Bronjong (desa penelitian) ditengarai sebagai desa tertinggal. Sekitar 160 KK dari 381 KK termasuk miskin menurut ukuran desa dan bila merujuk pada kriteria BKKBN lebih sekitar 90% termasuk keluarga pra sejahtera.

Penunjukkan sebagai desa tertinggal didasarkan pada instrumen dari BPS yang dikelompokkan menjadi tiga bagian utama yaitu: potensi desa, perumahan dan lingkungan, serta

potensi penduduk (BPS, 1995). Menurut pendapat dari Badan Pusat statistik tahun 1994 di Jawa Timur dari 8361 desa, 1969 diantaranya termasuk kategori desa miskin, salah satunya adalah Desa Bronjong tempat penelitian ini dilakukan.

Jenis bantuan yang diluncurkan ke desa penelitian meliputi: (1) bantuan ternak sapi untuk kecamatan rawan dari Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan. (2) bantuan IDT, dan (3) bantuan dari perguruan tinggi dalam pemanfaatan lahan pekarangan.

Bantuan tersebut bukanlah bantuan cuma-cuma (charity), namun merupakan bantuan bergulir, dengan harapan setelah modal dikembalikan akan digulirkan kepada sasaran lain. Strategi ini dimaksudkan agar program pengentasan kemiskinan (bantuan peningkatan pendapatan) dapat membentuk sikap kemandirian bukan ketergantungan.

Diantara mereka yang menerima bantuan sebenarnya dapat dikatakan tidak terlalu miskin, bahkan tergolong cukup untuk ukuran desa ini. Masih banyak yang lebih miskin dari mereka tapi tidak mendapat bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak penduduk yang lebih layak menerima bantuan namun tidak mendapatkannya.

Dilihat dari proses perencanaan program pada umumnya Kelompok penerima bantuan tidak tahu menahu soal pembuatan usulan karena semua sudah disiapkan (usulan tersebut sudah jadi), seperti yang dinyatakan oleh penerima bantuan bahwa yang membuat rencana pengajuan dana adalah pamong desa

dengan pendamping, dan anggota kelompok tinggal mengiyakan dan ketua kelompok menandatangani (Ds dan Smn, 5 September 1996). Mereka tidak mengalami proses pembentukan kelompok dan pembuatan usulan kegiatan, karena kalau disuruh membuat usulan sendiri mereka mengalami kesulitan sebab rendahnya tingkat pendidikan warga (Strn, 6 Oktober 1996). Ini menunjukkan bahwa dominasi pamong lebih besar dalam penentuan program, maupun pembentukan organisasi penerima bantuan.

Dalam pembuatan usulan kegiatan (proyek) tampak adanya dominasi kepala desa (birokrat), sehingga masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut.

Semua pemberian bantuan kepada masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya memiliki bentuk yang berbeda. Kantor Pembangunan Desa memberi bantuan kepada desa di kecamatan rawan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, sehingga dapat terbentuk desa swasembada.

Program IDT memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda, yaitu mengentas kemiskinan di pedesaan, dengan memberikan bantuan yang dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Demikian pula PT, tujuan jangka panjang dari program bantuan yang diberikan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IDT sebagai program pengentasan kemiskinan memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk

miskin melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha, dan pemantapan kelembagaan usaha bersama. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemampuan permodalan dalam kelembagaan kelompok yang berkembang sesuai kebutuhan dan keinginan orang miskin, dapat memperkuat kemampuannya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Dari sisi pemberi bantuan, bantuan peningkatan pendapatan dimaknakan sebagai berikut: (1) sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat lemah agar dapat mandiri, (2) pancingan untuk mengambil hati masyarakat guna mendukung program pemerintah, (3) sarana untuk mempertahankan kedudukan atau jabatan bahkan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi bila berhasil (pamong desa), (4) sarana untuk mendapatkan tambahan penghasilan (pengelolaan program).

Makna yang diberikan oleh penerima bantuan (individu) bermacam-macam yaitu: (1) bantuan peningkatan pendapatan dari pemerintah merupakan sarana untuk mengambil hati masyarakat agar masyarakat mendukung setiap kebijakan pemerintah. (2) bantuan peningkatan pendapatan merupakan sesuatu yang menguntungkan kepala Desa untuk melaksanakan kewajiban sebagai aparat. (3) bantuan merupakan beban bagi yang menerima. (4) bantuan peningkatan pendapatan untuk menambah penghasilan. (5) bantuan peningkatan pendapatan untuk dinikmati kerabat pamong desa.

Pelaksanaan program peningkatan pendapatan di desa penelitian menunjukkan tidak semua program membawa hasil. Diantara mereka yang menerima kambing dan sapi dari program IDT menunjukkan bahwa dari 18 orang yang diwawancarai 8 diantaranya menyatakan bila bantuan yang diberikan pemerintah telah habis (dalam arti dijual dan ada yang mati). Demikian pula dengan tanaman kelapa sebanyak 3000 batang, tiap keluarga mendapat 10 batang, ditengarai bahwa kurang dari 50% yang masih hidup (tumbuh). Bantuan lain berupa bibit tanaman dan modal untuk kelompok PKK ternyata dari 20 warga PKK yang mendapatkan bantuan bibit dan modal, hanya 2 orang menunjukkan keberhasilan dalam pengembangannya. Ini semua merupakan fenomena yang menarik.

Bantuan yang seharusnya diterima dan diperlakukan positif oleh penerima bantuan ternyata tidak semuanya ditindaklanjuti secara optimal, banyak bantuan dirasakan kurang bermanfaat untuk mengembangkan diri si miskin, seperti yang diharapkan oleh setiap program.

Adanya perbedaan kelompok sasaran (penerima bantuan) dalam memanfaatkan bantuan yang diterimanya. Diantaranya adalah (1) warga menerima bantuan dan memperlakukannya secara baik, namun hasil pemanfaatan bantuan tidak optimal; (2) penerima bantuan menerima dan memanfaatkan bantuan secara optimal, ditengarai oleh berkembangnya bantuan yang diberikan kepadanya; (3) penerima bantuan mau menerima bantuan namun tidak memanfaatkan secara baik, bahkan mengembalikan bantuan kepada pemberi; (4) warga diberi bantuan tetapi justru menolak bantuan yang diberikan.



Dilihat dari karakteristik penerima bantuan, ada berbagai variasi dalam menindaki bantuan yang diberikan.

- 1) Ada sebagian penduduk yang menerima bantuan dan menggunakan bantuan itu sebaik-baiknya karena kepatuhannya, takut, sungkan kepada kepala desa. Mereka ini mendapat sebutan *tiyang manut*, *tiyange pak lurah*.
- 2) Penerima bantuan yang lain mengelola bantuan secara baik, dan berkembang, karena mereka merasakan bantuan itu bermanfaat untuk keluarganya. Orang yang perilaku seperti ini disebut *tiyang ulet*, *tiyang pintar*, *tiyang ngoyo*.
- 3) Ada pula penerima bantuan yang tidak bereaksi (*acuh*) terhadap apa yang diterimanya. Apakah yang dikelola itu berkembang atau habis, seolah-olah tidak dipikirkannya. Orang seperti ini disebut *tiyang keset*, *tiyang nglokro*.
- 4) Sebagian lain justru menolak bantuan yang diberikan, karena dianggap tidak adil dalam penentuan kelompok sasaran. Mereka menolak diberi, karena ada orang lain yang seharusnya pantas diberi justru tidak diberi. Orang ini disebut *tiyang sae*.

## 6.2. Pembahasan

Pembangunan yang dilakukan sejak pemerintah Orde Baru ternyata menempatkan negara pada posisi yang dominan dalam proses pembangunan. Dalam konteks pedesaan, banyak program pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan teknokratis

yang bersifat *top down*. Pembangunan pertanian melalui *revolusi hijau*, sebagai misal ditujukan untuk mencapai swasembada beras. Pengenalan dan ekspansi berbagai program seperti Bimas, Inmas, Insus, dan berbagai institusi lain yang menyertainya diantaranya BUUD dan kemudian KUD dari semula tergantung langsung pada intervensi pemerintah (Alfitri, 1993).

Demikian juga pendekatan *top down* menunjukkan kuatnya peran negara dalam proses pembangunan di hadapan massa rakyat desa yang menjadi objek pembangunan dan konsumen pembangunan. Dalam keadaan demikian masyarakat desa memandang bahwa negara sebagai produsen dan penyedia pembangunan mencakup pembiayaan, perencanaan, dan pelaksanaan (Soetrisno, 1988). Akibatnya masyarakat desa menjadi pasif dan tergantung pada negara (pemerintah).

Masyarakat Desa Bronjong merupakan sebagian dari penduduk Indonesia yang hidup dalam kondisi miskin. Sayogya (1991) menyatakan bahwa penduduk miskin pada umumnya hidup di wilayah pedesaan dan bekerja di bidang pertanian, mereka berasal dari golongan petani berlahan sempit, buruh tani, nelayan dan pengrajin. Kemiskinan pada masyarakat desa sebagai gejala struktural dan alami (White dan Sinaga, 1978), dan umumnya merupakan fenomena pedesaan (Berger, 1992: 147).

Kemiskinan sebagai akibat struktur sosial yang dominatif dan kurang memberi peluang pada golongan bawah untuk memiliki akses terhadap sumberdaya ekonomi, disamping

juga karena langkanya sumber daya alami yang terdapat diwilayahnya.

Dengan kondisi lahan berkapur, Desa Bronjong secara geografis kurang mendukung masyarakatnya untuk mengembangkan bidang pertanian. Namun kiranya tidak hanya faktor alam saja yang terjadi, keterisolasian desa dengan dunia luar, sarana komunikasi dan transportasi yang kurang memadai juga menyebabkan mereka hidup dalam keterbelengguan dan keterbelakangan.

Kondisi kemiskinan yang membelenggu masyarakat ini menyebabkan sikap kepatuhan pada pimpinan sangat tinggi, serta hubungan *patron client* sebagai salah satu strategi agar tetap hidup (Mubyarto dkk, 1979), yang lama kelamaan hubungan tersebut dapat menciptakan hubungan eksploitatif (Mubyarto dkk, 1991 dan 1993), tidak hanya pada tahap proses produksi tetapi juga pada hubungan non produksi.

Bantuan yang seharusnya diterima dan diperlakukan positif bagi penerima bantuan ternyata tidak semuanya dimanfaatkan secara optimal, banyak bantuan dirasakan kurang bermanfaat untuk mengembangkan diri si miskin, seperti yang diharapkan oleh setiap program.

Tindakan seseorang dalam menyikapi suatu rangsangan dipengaruhi oleh makna yang ada pada sesuatu rangsangan tersebut (Blummer, 1969:2). Pemberian makna pada setiap bantuan dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki terhadap bantuan yang pernah diterimanya atau pengalaman orang lain yang telah diketahui atau didengar.

Makna diperoleh dari interaksi seseorang dengan lingkungannya, sehingga makna bukan semata-mata karena proses mental. Kegagalan yang dialami, kesulitan prosedur pemberian bantuan, tingkat kemanfaatan dari bantuan baik yang dirasakan sendiri maupun yang dialami oleh orang lain membentuk pemberian makna dalam dirinya terhadap bantuan tersebut.

Makna dalam penelitian ini tidak dilihat sebagai proses mental, tetapi sebagai hasil interaksi sosial (Ritzer, 1988:182-183), oleh karenanya makna dibentuk dalam proses interaksi pada umumnya dan proses sosialisasi khususnya. Makna dipilih, diperiksa, dan kemudian ditransformasikan oleh aktor ke dalam situasi di mana aktor itu berada, untuk kemudian menjadikan arah dalam bertindak (Ritzer, 1988:185).

Makna terhadap bantuan peningkatan pendapatan pada diri penerima bantuan telah membentuk sikap dalam menghadapi bantuan yang diberikan. Ada si penerima bantuan yang mau menerima dan mengelolanya dengan baik, ada pula yang menerima namun tidak mengelolanya sehingga gagal, sebagian lagi ada yang menerima namun kemudian mengembalikan, dan bahkan ada yang langsung menolak. Sikap terhadap bantuan peningkatan pendapatan tersebut terjadi karena makna yang diberikan kepada bantuan oleh penerima bantuan sangat bervariasi.

Variasi dalam memperlakukan bantuan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kelayakan atau kemanfaatan suatu bantuan. Program bantuan yang diberikan kepada masyarakat

dikatakan layak, tergantung pada beberapa faktor, diantaranya penerima bantuan, serta organisasi pengelola bantuan, serta program termasuk pasar. Semua faktor tersebut berpengaruh terhadap pemberian makna bantuan.

Berikut akan dijelaskan pemberian makna terhadap bantuan peningkatan pendapatan dilihat dari berbagai faktor yang berpengaruh tersebut.

#### 6.2.1. Makna Bantuan Dilihat Dari Karakteristik Program

Pada bagian terdahulu dijelaskan bahwa bantuan yang berasal dari pemerintah daerah (Dinas Peternakan, Kantor Pembangunan Desa, Dinas Perkebunan) telah dimaknakan bermacam-macam oleh pemberi bantuan maupun penerima bantuan. Makna bantuan oleh pihak pemberi bantuan (pemerintah) antara lain: (1) Upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat (*fungsi manifes*), (2) Upaya untuk mengambil hati masyarakat guna mendukung program pemerintah (*fungsi laten*). (3) Adanya proyek berarti ada dana, yang pada gilirannya pelaksana proyek mendapatkan tambahan pendapatan juga (*fungsi laten*), (3) "Keberhasilan" proyek berdampak pada konduite, yang pada gilirannya berdampak pada prestasi kerja dan jenjang pekerjaan atau sebagai sarana untuk memperbaiki kedudukan (*fungsi laten*).

Program bantuan peningkatan pendapatan khususnya dan program pembangunan dapat berasal dari baik pemerintah, swasta maupun perorangan. Meskipun secara empirik setiap

tujuan itu diarahkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun secara simbolik tidak demikian seluruhnya. Bantuan yang diberikan dapat memiliki bermacam-macam kepentingan atau fungsi, baik *fungsi manifest* maupun *fungsi latent*. Akibatnya bantuan peningkatan pendapatan atau program pembangunan tersebut dapat dimaknakan dengan seribu arti oleh si penerima bantuan, semuanya tergantung pada pandangan penerima bantuan terhadap orang atau lembaga yang memberikan bantuan, dan juga proses serta jenis bantuan yang diberikan.

Pemaknaan ini berbeda dengan yang diberikan oleh penerima bantuan. *Pertama* bantuan peningkatan pendapatan dari pemerintah merupakan sarana untuk mengambil hati masyarakat agar masyarakat mendukung setiap kebijakan pemerintah. *Kedua*, bantuan sebagai sarana mendukung kewajiban kepala desa. *Ketiga*, bantuan dimaknakan sebagai beban, karena terlalu repot dalam mengelola dan menambah pekerjaan. *Keempat*, bantuan peningkatan pendapatan sebagai sesuatu yang berguna untuk menambah penghasilan keluarga. *Kelima*, bantuan peningkatan pendapatan kepentingan pamong, bukan untuk kepentingan orang yang memerlukannya.

Ada perbedaan dalam memaknakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa, oleh pemerintah (pemberi bantuan) dan masyarakat (penerima bantuan). Pemerintah dalam memaknakan didasari oleh aspek normatif dari pemberian bantuan tersebut, dan beranggapan bahwa setiap orang yang diberi bantuan akan merasakan manfaatnya. Pemerintah merasa

bahwa proyek pemberian bantuan dikatakan berhasil bila bantuan tersebut sudah disalurkan kepada "sasaran" (secara norma atau sesuai dengan aturan yang ada). Pemaknaan ini tidak semuanya salah, karena bagaimanapun juga pengertian kata pembangunan tergantung pada kekuasaan hegemonik dominan yang berada di penguasa (Fakih, 1997:92), yang selanjutnya bantuan pembangunan seringkali didasarkan pada pelanggaran *status quo*.

Bagi penerima bantuan, pemberian makna lebih didasarkan pada motivasi dalam menerima bantuan. Tindakan terhadap bantuan salah satunya didasarkan pada kemanfaatan serta kemudahan dalam pengelolaan, sehingga paling tidak bantuan yang diberikan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Bantuan dikatakan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan paling tidak dari hasil pengelolaan bantuan tersebut, penerima bantuan akan mendapatkan tambahan penghasilan yang pada gilirannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Munculnya berbagai makna yang diberikan oleh penerima bantuan terhadap bantuan peningkatan pendapatan (program pembangunan) tidak dapat dilepaskan dari strategi pembangunan atau strategi pelaksanaan program bantuan yang selama ini pernah diketahuinya tersebut. Diantaranya dalam seleksi calon penerima bantuan dan proses perencanaan program.

Penerima bantuan yang ditentukan oleh dinas Peternakan antara lain: keluarga yang menurut ukuran desa termasuk

paling miskin, namun masih potensial untuk merawat sapi. Rekrutmen si penerima bantuan tidak dilakukan sendiri oleh dinas peternakan, melainkan diserahkan kepada kepala desa (Wawancara dengan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan, 25 Oktober 1996). Kriteria yang diajukan adalah keluarga (lengkap) yang secara ekonomi tidak mampu (miskin), namun memiliki kemampuan dan waktu untuk merawat ternak.

Seperti program pembangunan dan bantuan yang terjadi saat ini termasuk diantaranya di desa penelitian ditengarai bahwa masyarakat sebagai sasaran pembangunan memiliki harapan tidak hanya sebagai objek pembangunan namun sekaligus sebagai subjek pembangunan, dengan meningkatkan keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian suatu program. Namun kenyataannya warga masyarakat (keluarga peneriman bantuan) merasa tidak pernah diajak berbicara tentang program pembangunan dan bantuan di desanya, akibat dari peristiwa ini keterlibatan mereka dalam pembangunan maupun pemanfaatan bantuan (peningkatan pendapatan), tidak optimal, yang pada gilirannya banyak program pembangunan maupun bantuan kurang memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Keadaan ini merupakan dampak kebijakan pembangunan yang bersifat "top down", dan kenyataannya kebijakan ini selalu dikritik karena sifatnya terlalu mementingkan stabilitas demi tercapainya target kuantitatif hasil pembangunan melalui penetapan dari atas, penetapan kebijaksanaan sepihak, kurang aspiratif, terlalu bersifat fasilitatif kurang memberikan otoritas dan kemandirian bagi masyarakat.



Program pembangunan dan bantuan yang dilakukan di Indonesia, khususnya IDT secara teori telah menggunakan prinsip pembangunan yang berorientasi pada manusia yaitu dengan menerapkan prinsip: (1) keterpaduan karena harus terkait dan terpadu dengan kegiatan lain di desa sehingga saling mendukung dan memberi manfaat secara optimal, (2) kepercayaan dalam arti masyarakat desa sebagai kelompok sasaran diberi kepercayaan memilih dan menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan potensi desa, masalah yang dihadapi, dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat desa itu sendiri, (3) kebersamaan karena setiap kegiatan harus berasal dari dan untuk masyarakat desa secara bersama, (4) kemandirian, karena kegiatan yang dilaksanakan akan mendorong kelompok sasaran untuk menolong dirinya sehingga tidak ada kemungkinan menjadi miskin kembali, (5) ekonomi, karena setiap kegiatan yang dipilih oleh kelompok sasaran harus dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka sehingga tingkat hidup mereka harus lebih baik dari sebelumnya, dan (6) berkelanjutan (Panduan Pelaksanaan IDT, 1994).

Demikian pula yang dinyatakan Siagian (1995:50) bahwa IDT yang dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan menjadikannya sebagai gerakan dan bukannya proyek. Penduduk miskin diberi kepercayaan dan peluang untuk melakukan usaha bersama dalam wadah Kelompok Masyarakat (Pokmas), yang mereka bentuk sendiri.

Pendekatan ini dibentuk dengan maksud agar penduduk miskin dapat diberdayakan sehingga mampu mengentas dirinya

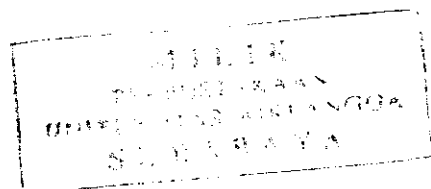
sendiri dari kemiskinan, karena tujuan utama program IDT adalah untuk mengembangkan potensi perekonomian desa tertinggal, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang bermukim di desa tertinggal (Baswir, 1997:36-37).

Pelaksanaan perencanaan pada IDT ini sebenarnya mendasarkan pada pendekatan *bottom up*. Pendekatan *bottom up* itu sendiri ditandai oleh: (1) Prakarsa atau inisiatif proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap diletakkan pada masyarakat itu sendiri; (2) Fokus utamanya adalah berusaha meningkatkan kapabilitas masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber produktif yang terdapat di dalam komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka; (3) Mentolerir peran variasi lokal sehingga memiliki sifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi lokal; (4) Menekankan pada *social engineering process*, yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas melalui proses perencanaan sampai evaluasi dengan mendasarkan pada saling belajar; (5) Budaya kelembagaan ditandai dengan organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi yang menandai unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri, berinteraksi satu sama lain, sehingga kesinambungan vertikal dan horisontal dapat terwujud; (6) Proses pembentukan jaringan (*networks*) antara struktur kekuasaan (birokrat) dengan Lembaga Swadaya, satu-satunya organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini.

Prinsip tersebut ternyata tidak semuanya dapat dilakukan, karena bagaimanapun juga dominasi pimpinan desa dalam pengelolaan program pembangunan termasuk diantaranya program bantuan peningkatan pendapatan sangat besar, sehingga timbul sikap memperlakukan orang miskin hanya sebagai objek pembangunan dan sekedar pemanfaat (*the user*), dan sebaliknya memperlakukan masyarakat sebagai subjek atau pelaku (aktor) pembangunan belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Selain itu juga karena belum sesuai pendekatan baru ini dengan kondisi infrastruktur pedesaan sebagai pendukung pendekatan tersebut.

Dampak belum dilaksanakannya prinsip tersebut antara lain perilaku masyarakat dalam memperlakukan setiap program pembangunan yang diluncurkan ke desa kurang responsif, mereka beranggapan bahwa setiap program yang diluncurkan ke desa semata-mata bukan kepentingan dirinya melainkan kepentingan para pamong desa. Anggapan itu muncul karena setiap dilaksanakannya program pembangunan termasuk bantuan peningkatan pendapatan, masyarakat tidak pernah dilibatkan dari awal. Mereka tinggal melaksanakan setiap program (bantuan peningkatan pendapatan) sesuai petunjuk yang diberikan oleh pimpinan (pamong desa), yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisinya.

Penerima bantuan sering kali menyatakan bahwa "hidup seperti yang dialami selama ini sudah cukup, sebenarnya tidak butuh bantuan, tapi karena diberi, ya diterima saja. Kalau ada waktu akan dikerjakan apa yang telah dianjurkan



oleh PT, kalau tidak ada waktu, ya bagaimana lagi ya semampunya" (Tndr, Krtn, Slsh, 7 Oktober 1997).

Desa penelitian ternyata sering didatangi perguruan tinggi untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat, biasanya mereka juga memberi bantuan kepada desa baik bantuan fisik maupun keterampilan untuk masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang berkepentingan dengan adanya bantuan tersebut adalah pihak pemberi bantuan, sedangkan bagi penerima bantuan, sebenarnya mereka tidak merasakan pentingnya bantuan tersebut.

Pembangunan sebagai fenomena perubahan (*self-contained meaning*), dalam memahami pembangunan dalam konteks proses kiranya masalah yang berhubungan dengan tingkat perubahan lebih berarti dari pada mengetahui ada tidaknya perubahan itu sendiri. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: mengapa suatu masyarakat menunjukkan perubahan yang cepat dan masyarakat lain lambat?; faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana pengaruhnya?; serta apakah ada tingkat optimal umat manusia? (Lauer, 1989:11).

Pembangunan memuat kandungan isi perubahan kearah perbaikan, sedangkan perubahan itu sendiri dapat bermakna positif (maju) dan negatif (mundur), sebagaimana arti perubahan masyarakat oleh Susanto (1983: 157) dapat berupa kemunduran (*regress*), maupun kemajuan (*progress*). Pembangunan merupakan suatu dinamika yang berproses, dan bukan suatu kondisi yang statis (Misra dan Honjo, 1981:8), pemahaman ini telah menggiring pada pemikiran adanya gerak

dinamik yang mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*), dan pemberantasan kemiskinan absolut (*absolute poverty*) (Todaro, 1983:124).

Dalam konteks sosial-ekonomi, pembangunan berusaha meminimalkan disparitas *income* dan memaksimalkan distribusi pendapatan baik antar wilayah (*horizontal distribution*) maupun antar strata sosial (*vertical distribution*).

Apabila kondisi ini tidak dapat tercapai, maka problema sosial yang berlatar belakang disparitas ekonomi dan polarisasi sosial dapat membuka jalan yang lebar bagi jurang pemisah di dalam masyarakat (*social gap*), hal ini tidak hanya sekedar menjadi *public issues* yang kasat mata, yang seyogyanya menjadi agenda pembangunan, namun suatu saat dapat menjadi efek *snow-ball phenomena*, yang terakumulasi kemudian menggelinding dengan muatan kekuatan destruktif yang maha dasyat dan pada akhirnya berimplikasi pada rusaknya tatanan sosial ekonomi yang ada.

Disinilah moralitas pembangunan selalu dipertaruhkan, apakah misi dan substansi pembangunan yang selalu memuat kata-kata manis bahwa pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dapat menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah (*the poorest of the poor*), ataukah strategi pembangunan yang selama ini dijalankan hanya lebih membuka jalan bagi pertumbuhan tanpa diiringi pemerataan (*development without distribution*).

Keadaan ini banyak terjadi di Indonesia (termasuk di desa penelitian), pembangunan merupakan *jargon* dengan kata-kata dari, oleh, dan untuk rakyat. Kenyataan di desa penelitian, kata-kata manis tersebut belum terealisasi, karena bagaimanapun juga pembangunan lebih banyak didominasi oleh kelompok elit tertentu, yang dampaknya tampak bahwa masyarakat bawah hanya sebagai *pelengkap penderita*, dan yang menikmati adalah kelompok lain yang lebih beruntung.

Tujuan strategi pembangunan di suatu negara, tidak terlepas dari politik pembangunan yang dianut suatu negara. Strategi pembangunan yang berorientasi pada *problematic approach* akan melahirkan skala prioritas dalam pembangunan. Pembangunan di Indonesia selama orde baru nyaris diidentifikasi dengan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi. Kondisi ini didukung oleh justifikasi teoretis dengan berkembangnya berbagai teori pembangunan di belahan Barat, seperti teori *the stage of economic growth* oleh Rostow, "pertumbuhan ekonomi dan fungsi produksi" model Harold dan Romar, serta konsep Hirschman tentang *unbalanced growth*.

Ditinjau secara makro, dengan jujur disadari bahwa pendekatan pembangunan dengan menempatkan pembangunan ekonomi sebagai panglima, telah mampu memacu dan memicu perbaikan kondisi ekonomi diberbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Namun pembangunan yang terlalu bertumpu pada pembangunan ekonomi dan GNP (*Gross National Product*) berakibat pada semakin melebarnya jurang antara kaum miskin dan golongan kaya (Ul-haq, 1976; Baswir, 1997)).

Upaya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, membuat perekonomian hanya berada ditangan sekelompok kecil golongan yang bermodal. Mereka berkiprah dalam industri manufaktur, dan industri besar untuk mensuplai kebutuhan pasar luar, dan sebaliknya kurang memperhatikan kepentingan pasar domestik. Seperti yang dinyatakan Grabowski (1995: 42-43) bahwa: *dualistic theory of development, distinguishes between an agricultural and an industrial sector. Growth of the domestic market that allows for the establishment of increasing-returns to scale technology in industry. Specifically, firm can overcome the problem of small domestic by increasing production for foreign markets.*

Pentingnya keberadaan pasar domestik ini juga dinyatakan oleh Douglas North yang dikutip oleh Tornquist (1999:86). Salah satu "pillar" model pembangunan asli seperti di Taiwan dan Korea Selatan memungkinkan sebagian besar penduduk meningkatkan produksi dan membuat lebih efisien, dengan menggunakan basis pasar domestik. Dibentuknya institusi baik eksternal maupun institusi asing di negara yang sedang berkembang seharusnya merupakan bagian integral dari pembangunan pasar, sehingga keberadaannya tidak perlu mengganggu fungsi pasar.

Dari segi politik ekonomi, kemiskinan dipandang sebagai konsekuensi dari proses yang telah mendorong konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di satu pihak dan menumbuhkan massa pinggiran yang memiliki posisi penawar yang lemah di lain pihak (Chambers, 1984: 37). Ini merupakan suatu kesalahan

karena pembangunan tidak bertujuan menghapus bentuk kemiskinan, tetapi mengejar tingginya pendapatan per kapita.

Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berakibat pada terabaikannya kelompok miskin dalam menikmati program pembangunan. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan pemerataan pembangunan menjadi isu sentral dalam proses dan agenda pembangunan.

Salah satu upaya pemerintah dengan menempatkan pembangunan ekonomi sebagai *leading sectors*, bertujuan untuk mendorong pendapatan perkapita penduduk yang kenyataannya belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara normatif memang dirasakan sangat tepat terjadinya pergeseran strategi pembangunan dari pertumbuhan ke pemerataan, namun secara empirik yang terjadi tidaklah demikian, karena kurangnya pembagian porsi "kue nasional" yang ditujukan kepada masyarakat miskin di pedesaan maupun rekan mereka yang berdomisili di wilayah permukiman kumuh perkotaan, justru akan membagi beban kronis pembangunan di kemudian.

Banyak pakar yang menerima tesis bahwa tingginya laju pertumbuhan ekonomi jika tidak diiringi dengan kebijaksanaan memaksimalkan distribusi pendapatan dan kesempatan memanfaatkan hasil dari laju pertumbuhan, maka hasil nyata pembangunan tidak lain semakin lebarnya jurang perbedaan pendapatan dan kesejahteraan baik antar kelompok masyarakat, maupun antar wilayah.

Djojohadikusumo (1976) sebagai misal menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat meluaskan



kesempatan kerja, dan sejalan dengan itu terdapat kecenderungan seakan-akan sifat dan pola pertumbuhan justru menambah kepincangan pembagian pendapatan. Alasan yang dikemukakan antara lain:

1. Karena dalam upaya mencapai laju pertumbuhan yang tinggi, maka sektor modern pasti mendapat tempat yang utama di dalam pembangunan perekonomian dan salah satu sifat sektor ini adalah padat modal.
2. Strategi yang berusaha mengejar pertumbuhan, sama artinya dengan mengutamakan pertumbuhan daerah yang sebelumnya sudah maju (*well-developed*), sehingga daerah yang sudah maju semakin maju, dan daerah terbelakang (*less developed*) semakin tertinggal.

Kondisi ini menimbulkan konsekuensi pada sentralisasi pembangunan di wilayah perkotaan, sehingga akses pembangunan dan subsidi pemerintah bagi layanan publik dalam bentuk program pembangunan mengalami bias pada kepentingan masyarakat golongan menengah ke atas yang bermukim di kota, meskipun seharusnya golongan miskin yang lebih berhak memperolehnya (Effendi, 1986).

Memperhatikan sifat pembangunan seperti ini berdampak pada tidak meratanya pembagian pendapatan dan kesempatan kerja, serta timpangnya pembangunan antar daerah sebagai akibat dari pola dan orientasi pembangunan bersifat *urban bias* dan *capital intensive*. Keduanya menjadi penghambat dalam mencapai pemerataan dan pembagian pendapatan.

Situasi pembangunan yang "tenang" di permukaan secara tidak terduga menjadi *social unrest* dan pada skala tertentu dapat menggelinding menjadi debat hangat di berbagai situasi, serta gugatan atas kondisi yang dialami masyarakat terhadap aparat pemerintah sebagai *policy maker*. Ini disebabkan karena selama ini dominasi elit penguasa sangat besar terhadap pelaksanaan program pembangunan umumnya dan program bantuan khususnya. Semua program lebih didasarkan pada kepentingan pemerintah, bukan kepentingan sasaran.

Melihat berbagai kelemahan strategi pembangunan yang memitoskan paradigma pertumbuhan ekonomi semata, di kebanyakan negara berkembang, termasuk Indonesia mulai beralih pada strategi alternatif untuk mencapai pembangunan yang lebih komprehensif dengan tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. Diantaranya adalah "*redistribution with growth model*" dan strategi pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*The Human Basic needs Approach*).

Strategi dengan model *redistribution with growth* memuat empat elemen substansial yakni: (1) tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat; (2) berusaha menstabilkan penghasilan golongan yang berpenghasilan tinggi (10 persen dari totalitas penduduk); (3) menyalurkan sumber pembangunan yang diperoleh dari sektor pajak yang terkonsentrasi pada golongan kaya yang pada tahap awal pembangunan memperoleh kemudahan dari pemerintah; (4) pemerintah mengalokasikan sumber dana dan daya melalui pembangunan fasilitas sosial ekonomi dan investasi publik ke dalam bentuk paket program

dan proyek pembangunan bagi empat puluh persen golongan penduduk berpenghasilan rendah (Jolly, 1983).

Pendekatan pembangunan yang bersifat *basic human needs* memiliki tiga kategori sebagai indikator sosial-ekonomi seseorang untuk hidup layak yaitu: *basic consumption goods*, *basic service*, dan *participatory right* (Conyer, 1982: 28).

Pendekatan pembangunan yang bersifat *Basic Human needs*, dalam rangka pelaksanaan pembangunan memiliki arti penting karena:

- 1) Banyak diantara kaum miskin yang tidak mempunyai kekayaan produktif kecuali kekuatan jasmani, kemauan untuk bekerja, dan kecerdikan mereka. Berkembang atau tidaknya kemampuan mereka tergantung pada semakin baik atau tidaknya kesempatan mereka dalam memperoleh pelayanan umum.
- 2) Peningkatan pendapatan kaum miskin mungkin tidak akan memperbaiki taraf hidup mereka, apabila barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia.
- 3) Peningkatan pendapatan kaum miskin mungkin tidak akan memperbaiki taraf hidup mereka, apabila barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia.
- 4) Peningkatan taraf hidup golongan miskin memakan waktu yang lama. Paling tidak dalam jangka pendek, dan kemungkinan selamanya, program subsidi kemungkinan dibutuhkan bagi orang miskin agar mereka memperoleh

bagian dari hasil pembangunan yang telah dicapai (Korten, 1983:3).

Pendekatan pembangunan melalui penyediaan kebutuhan dasar sebagaimana yang secara implisit bagi negara berkembang masih sangat perlu menjadi fokus kebijakan pembangunan, terutama pada pemikiran ketiga dan keempat sesungguhnya juga memuat masalah. Pendekatan yang bersifat subsidi dan *charity* berkecenderungan pula menjadikan sifat program ke *delivered development*, memanjakan masyarakat dan semakin memperkuat kebijaksanaan yang bertumpu dari atas.

Dalam penerapan model pendekatan kebutuhan pokok ini ternyata lebih menjerumuskan masyarakat secara pasif dan kurang mampu memberdayakan masyarakat yang dibantu (*unpowerment*), sehingga dikembangkan model Pembangunan yang berorientasi pada rakyat (*people centered development*). Karakteristik pembangunan ini merefleksikan substansi positif yaitu: (1) *welfare*, (2) *access to resources of development and its benefit*, (3) *consciousness*, dan (4) *participation*, dan (5) *control over the use of resources and its benefit* (Longwee, 1990:4). Tingkat kesejahteraan (ekonomi rumah tangga) diukur dari pendapatan perkapita rumahtangga yang bersangkutan.

Apabila paradigma pertumbuhan dan model pemenuhan kebutuhan dasar bersifat *top down planning*, maka model pembangunan yang berpusat pada masyarakat ini menerapkan mekanisme *bottom up* yang bercirikan: (1) prakarsa atau inisiatif proses pengambilan keputusan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat diletakkan pada masyarakat itu sendiri; (2) fokus utamanya adalah berusaha meningkatkan kapabilitas masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber produktif yang terdapat di dalam komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka; (3) mentolerir peran variasi lokal, sehingga sifatnya lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi lokal; (4) lebih menekankan pada *social engineering process*, yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas; (5) budaya kelembagaan ditandai oleh organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi; (6) proses pembentukan jaringan antara struktur kekuasaan (birokrat) dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), satu-satunya organisasi yang mandiri merupakan bagian integral dari pendekatan ini. Melalui proses *networking* ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur pembangunan di tingkat lokal (Korten, 1983: 26-27).

Cooke (1989) menggunakan studi lokalitas untuk melihat pembangunan, terutama gap antara teori ekonomi politik dan proses makro pada tingkat lokal. Istilah lokalitas sendiri benar atau salah, saat ini digunakan secara luas dalam literatur ternyata memiliki dua sudut pandang, pertama sebagai pendekatan teoretikal (*locality studies*), dan kedua sebagai gambaran dari istilah itu sendiri (*studies of locality*) (Wilson, 1995:418). Meskipun demikian lokal tidak mungkin dipisahkan dari nasional, karena bagaimanapun juga *the ability of individuals to recognize and capitalize in*

*these opportunities depends on the processe of entrepreneurs, but can be facilitated by maximising what Bryant termed the "enabling environment" (formed by the attitude and actions of the local community, local government and national government).*

Ide dasar pembangunan dari bawah dan berpusat pada masyarakat, menempatkan masyarakat bukan sebagai *unit cost* dari faktor ekonomi, dan tidak pula ditujukan kepada kebijaksanaan yang kurang memanusiakan manusia, sebagaimana yang lebih nampak pada pendekatan ekonomi, begitu pula masyarakat bukan semata-mata sebagai objek pembangunan yang pasif akan tetapi masyarakat harus dipandang sebagai subjek yang proaktif atas tuntutan dari dalam dan rangsangan dari luar, dalam hal mana mereka dapat mandiri dan memiliki kepentingan sendiri.

Acuan dari rakyat kiranya sulit dilakukan, terutama kaum profesional, birokrat maupun teknokrat karena mereka pada umumnya dibayar oleh pemerintah. Sehingga benarlah kiranya bahwa sejak dari semula pembangunan memang tidak "dari rakyat", dan akhirnya bukan hanya tidak untuk rakyat" tetapi juga tidak "oleh rakyat" (Chambers, 1988: xix).

Sifat program bantuan peningkatan pendapatan bukanlah *charity* melainkan untuk meningkatkan kemandirian, namun dalam pelaksanaannya tidak ada pemantauan dan evaluasi terhadap setiap program yang diluncurkan ke desa. Dampaknya penerima bantuan merasa tidak perlu bertanggungjawab dalam mengelola setiap bantuan yang diberikan.

Rendahnya bahkan tidak adanya tanggung jawab dalam mengelola bantuan, diantaranya disebabkan karena penerima bantuan (masyarakat) merasa bahwa program tersebut bukan karena kepentingannya, melainkan kepentingan orang lain yang dalam hal ini adalah pimpinan desa dan perangkat di atasnya. Sebab lain adalah banyak program bantuan yang tidak mengarah langsung pada *income generating capacity*, namun peningkatan pendapatan itu harus melalui proses yang masih panjang. Bahkan *income generating capacity* tersebut hanya dirasakan oleh sekelompok orang yang sebenarnya bukan sasaran utama program tersebut.

Untuk meningkatkan *income generating capacity*, paling tidak harus ada perbaikan pada: (1) akses terhadap sumberdaya, (2) akses terhadap modal, (3) akses terhadap pasar, dan (4) akses terhadap teknologi. Sulitnya memenuhi keempat persyaratan tersebut seringkali menyebabkan program-program pembangunan lebih banyak dinikmati oleh mereka yang berkesempatan memiliki akses, dan ini pada umumnya berada pada masyarakat (keluarga) yang lebih beruntung atau lebih berdaya.

Keadaan ini senada dengan temuan penelitian Erler (1989: 3), bahwa bantuan hanya mendatangkan musibah bagi kelompok sasaran, sementara kelompok lain yang mengambil keuntungan. Investasi modal (asing) di suatu negara belum tentu menjamin tercapainya perbaikan taraf hidup rakyat yang membutuhkan pekerjaan (Sutrisno, 1995:41).

Persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari masalah kemiskinan adalah "*the working poor*", yakni orang yang bekerja tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dan keluarganya, karena upah yang diterima sangat kecil. Ini disebabkan karena dari segi politik ekonomi, kemiskinan dipandang sebagai konsekuensi dari proses yang telah mendorong konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di satu pihak dan menumbuhkan massa pinggiran yang memiliki posisi tawar menawar yang lemah di lain pihak (Chambers, 1984:37).

Di sinilah pentingnya memperhatikan kelayakan setiap program bantuan peningkatan pendapatan guna mengangkat mereka dari ketakberdayaan, sehingga paling tidak dapat memiliki posisi tawar menawar yang lebih baik.

Kelayakan program pembangunan, khususnya bantuan peningkatan pendapatan dapat dilihat dari manfaat hasil-hasil program dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan atau penerima bantuan (Korten, 1988: 240).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu program pembangunan (bantuan peningkatan pendapatan) baru dilihat dari satu sisi, yaitu sisi pemberi bantuan (pemberi program pembangunan) atau pengelola di tingkat desa, sehingga dampaknya program yang diberikan belum mencapai tujuan seperti apa yang diharapkan. Penerima bantuan sebagian besar menganggap bahwa bantuan yang diberikan bukan untuk kepentingan dirinya melainkan kepentingan desa khususnya kepentingan pamong desa.



Tergambar dari ungkapan Kepala Desa bahwa bila gagal dalam mewujudkan ketentuan tersebut akan berpengaruh terhadap kedudukannya sebagai kepala desa, sebaliknya bila berhasil dalam melaksanakan ketentuan berarti tugas sebagai kepala desa telah berhasil dan dampaknya kelangsungan jabatan yang dimiliki dapat terjamin.

Penetrasi pusat ke dalam kehidupan desa telah merasuk pada kehidupan masyarakat desa. Atas nama "loyalitas" yang merupakan kata suci dalam kehidupan birokratis para aparat (dari kabupaten hingga desa), perangkat di tingkat desa selalu menunjukkan kepatuhan dalam mengikuti petunjuk dari atas untuk menekan atau mempengaruhi rakyat desa agar mereka mematuhi pusat.

Kata pusat menjadi begitu penting dan sekaligus menakutkan bagi aparat desa. Karena kegagalan dalam melaksanakan program dari pusat berdampak pada kelangsungan tugasnya. Sehingga sering kali terjadi bahwa objektivitas pelaksanaan pembangunan dan khususnya bantuan peningkatan pendapatan dilakukan menurut pesanan dari pihak pemberi proyek (Erler, 1989:113).

Kesemuanya itu merupakan konsekuensi dari hubungan yang bersifat patronase dan patrimonial dalam hubungan struktur modern. Peran banyak dimainkan oleh lembaga (institusi) dalam konteks sosial dan ekonomi luas semakin kecil. Sehingga bagaimanapun juga kelompok sasaran (klien) tetap berada pada kondisi modern yang tidak lengkap (Torngquist, 1999:59).

Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon terpilih (Pasal 6 UU No. 5/1979). Selanjutnya Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa, urusan pemerintah umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa (Pasal 10, ayat 1, UU No.5/1979). Oleh karenanya Kepala Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada LMD (Pasal 10 ayat 2 UU No.5/1979).

Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama pembangunan di desa, oleh karenanya dia selalu berusaha agar pembangunan di desanya berhasil, bila tidak berhasil berarti dia telah gagal melaksanakan kewajibannya. Pola komando (hirarki) yang berlaku dalam birokrasi di Indonesia, termasuk di pedesaan akan membawa dampak pada pelaksanaan pembangunan.

Kepala Desa meskipun dipilih oleh rakyat namun diangkat oleh Bupati atas nama Gubernur, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Kepala Desa memiliki kedudukan dualistis. Selain

harus membela kepentingan penduduknya, dia juga dianggap pemerintah pusat sebagai kunci pembangunan. "Lurah (kepala desa) adalah kunci pembangunan di wilayahnya, pak Lurah adalah Penguasa tunggal" (Nordholt, 1987: 205), merupakan betapa tingginya kedudukan lurah (Kades) di desa.

Adanya dugaan bahwa Kepala Desa dapat bekerja sama dengan LKMD dalam memenuhi kepentingan desa. Dugaan ini di dasarkan pada pendapat bahwa Kepala Desa sebagai kuasa tunggal dan sebagai Kepala Desa terpilih mewakili seluruh penduduk. Namun karena bagaimanapun juga dia sebagai aparat pemerintah, orientasi vertikal ke atas terdapat di semua tingkat birokrasi. Hal ini seringkali memperkuat mentalitas "asal bapak senang" dalam segala program pembangunan, karena pembangunan atas dasar perintah (Nordholt, 1987: 503).

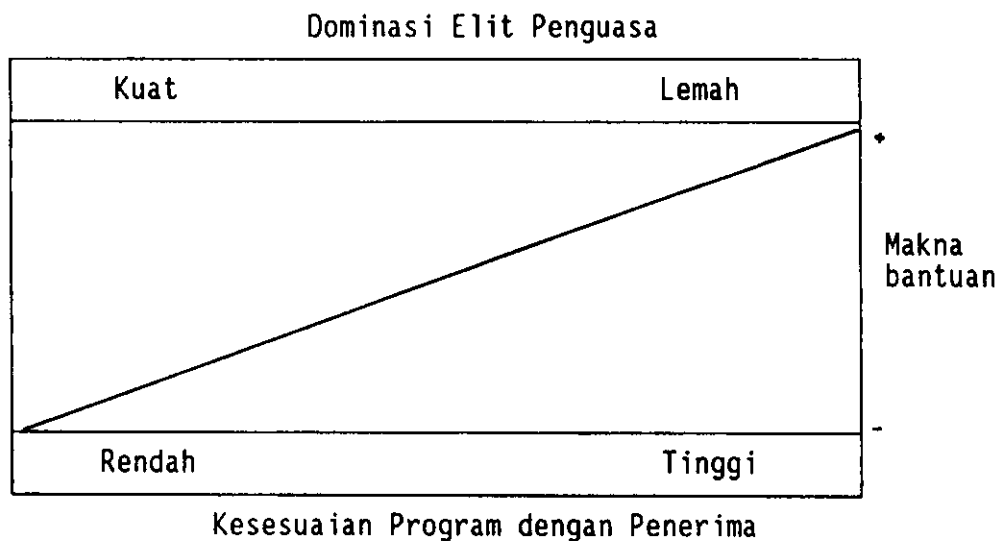
Untuk itulah maka sangat tepat bila Chambers (1988) menghendaki bahwa setiap program pembangunan desa dimulai dari belakang, atau perencanaan dari bawah, dengan menempatkan masyarakat (desa) sebagai pijakan atau titik tolak setiap program pembangunan. Konsep yang dikembangkan oleh Chambers maupun Korten sebenarnya sudah banyak dinyatakan orang lain, seperti Basyaah (1993:4) dengan konsep dasar perencanaan pembangunan di daerah, Ndraha (1990: 152) melalui alur pemikiran partisipatif, Anton Lowa (dalam Hagul, 1992: 159) mengetengahkan konsep strategi pembangunan desa berdasarkan sasaran.

Bargel (1996:55) mengemukakan "*Endogenous development ideas - The Basic for Participative Project Planning*". Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan yang mendasarkan perencanaan partisipatif yaitu: (1) Analisis masalah dan situasi yang dihasilkan harus kaya informasi. (2) Pertanyaan tentang berbagai masalah dan masalah yang diprioritaskan dan selanjutnya mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut bersama kelompok sasaran. (3) Pertanyaan tentang kebutuhan kelompok sasaran, pilihannya dan harapan yang berhubungan dengan pembangunan dan menyajikannya dalam *shopping list*. Melalui survai yang dilakukan, hasilnya digunakan sebagai dasar membuat perencanaan pembangunan.

Meskipun demikian konsep tersebut belum sepenuhnya dapat dioperasionalkan, sehingga perencanaan pembangunan masih bersifat *top down*, dan bukan partisipatif.

Dari uraian tersebut, tampak bahwa proses pemberian bantuan termasuk di dalamnya keterlibatan pihak penguasa dalam perencanaan program, sumber bantuan, jenis bantuan, serta strategi program bantuan, telah berperan dalam memberi pemaknaan terhadap program bantuan itu sendiri, yang kesemuanya itu dapat ditengarai pada bagaimana memperlakukan program bantuan yang diterimanya.

Keterkaitan pemaknaan dengan kesesuaian program bantuan tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 6.1  
Keterkaitan Makna Bantuan dengan Dominasi elit  
Penguasa serta Kesesuaian Program Bantuan

#### 6.2.2. Makna Bantuan dilihat dari Penerima Bantuan

Dari temuan di lapangan menunjukkan bahwa penerima program bantuan tidak semuanya keluarga yang dikategorikan miskin menurut ukuran desa. Ada sebagian penerima bantuan adalah keluarga yang termasuk berkecukupan. Masuknya keluarga dalam kategori cukup sebagai kelompok sasaran program bantuan disebabkan antara lain masih adanya hubungan kekerabatan dengan para pamong desa, meskipun jumlah penerima bantuan dalam kategori ini tidak banyak.

Makna yang diberikan oleh penerima bantuan (individu) bermacam-macam yaitu: (1) bantuan peningkatan pendapatan sebagai sarana untuk mengambil hati masyarakat agar

masyarakat mendukung setiap kebijakan pemerintah, (2) bantuan peningkatan pendapatan merupakan sarana untuk mendukung kepala desa dalam melaksanakan kewajiban, (3) bantuan merupakan beban, (4) bantuan peningkatan pendapatan bermanfaat untuk menambah penghasilan. (5) bantuan peningkatan pendapatan untuk dinikmati orang yang dekat dengan pamong desa.

Pemberian makna yang bermacam-macam itu banyak dipengaruhi karakteristik masing-masing orang khususnya yang berhubungan dengan nilai serta budaya yang dimilikinya. Memang saat ini tidak ada lagi desa yang dinyatakan sebagai desa tradisional, namun belum banyak desa yang dapat dikategorikan sebagai desa modern, termasuk Desa Bronjong tempat penelitian ini dilakukan. Masyarakat seperti ini sering disebutnya sebagai masyarakat transisi, yaitu suatu masyarakat yang sedang menuju ke masyarakat modern, atau suatu masyarakat dari post-agraris menuju ke praindustri.

Berubahnya masyarakat tradisi menuju modern merupakan indikator telah mudarnya masyarakat tradisional (Lerner, 1958), yang ditandai oleh dimensi struktural, dimensi kultural, dan dimensi interaksional. Pada masyarakat transisi terjadi percampuran antara tradisi dengan nilai modern. Keadaan masyarakat yang demikian dapat dikatakan sebagai masyarakat prismatic atau *prismatic society* (Riggs, 1964).

Pada masyarakat transisi, orientasi tindakan sosial masyarakatnya menunjukkan sikap keraguan antara mengejar

prestasi dan mengikuti tradisi. Mereka ingin mengejar prestasi namun bila berhasil banyak resiko yang harus ditanggungnya oleh karena itu mereka lebih banyak berada pada kebimbangan.

Ini dibuktikan dengan sikap para penerima bantuan dalam mengelola bantuan yang diberikan. Sebagian dari mereka merasakan bila berhasil memanfaatkan bantuan, sebenarnya keberhasilan itu hanyalah milik pimpinan desa, yang berarti sukses bagi kepemimpinannya dan pada gilirannya akan memperkuat kedudukan kepala desa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Seperti pernyataan penerima bantuan *menawi desa mriki maju, pak inggi (lurah) sing angsal nami*" (bila desa ini maju maka kepala desa yang mendapat nama.

Kesuksesan kepala desa berarti nama desa menjadi mencuat kepermukaan, dampaknya kunjungan untuk melihat keberhasilan desa menjadi lebih banyak, sehingga perlu banyak biaya yang dikeluarkan desa untuk menjamu para tamu. Pengeluaran desa berarti beban bagi penduduknya.

Memahami cara berfikir yang dilakukan oleh masyarakat, tampak bahwa sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang masih berfikir *lugu*, namun pertimbangan ekonomipun telah dilakukan. Ini suatu bukti bahwa mereka bukan lagi sebagai masyarakat tradisional, namun juga bukan sebagai masyarakat modern karena belum berani mengambil resiko atas perbuatan yang dilakukannya.

Penerima bantuan pada umumnya adalah mereka yang termasuk petani gurem, berlahan sempit hidup dalam serba

kekurangan dan ketakberdayaan. Terjadinya kemiskinan pada keluarga penerima bantuan bukanlah disebabkan faktor tunggal melainkan oleh beberapa faktor yaitu struktural, kultural, dan natural (Tan, 1982:92).

Aspek struktural antara lain meliputi administratif, pemerintahan, politik, ekonomi. Aspek kultural terutama menyangkut budaya, dan natural terkait dengan lingkungan fisik. Kesemuanya terkombinasi dan menggiring polarisasi sosial ekonomi dan bahkan politik bagi si miskin.

Masyarakat desa di Indonesia dapat dipandang sebagai masyarakat yang secara ekonomis terbelakang dan harus dikembangkan dengan berbagai cara. Karena kondisi kurang beruntung menyebabkan mereka pasrah pada keadaan yang ada, tidak ada upaya untuk melawan tantangan yang dihadapi, sehingga timbul budaya apatis (Rachbini, 1995:5).

Semuanya terjadi akibat model pembangunan yang berparadigma pertumbuhan. Model ini cenderung menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, karena peluang ekonomi lebih banyak dinikmati oleh segelintir konglomerat. Demikian pula ketidak-stabilan politik seperti yang terjadi saat ini, berdampak pada munculnya kecemburuan sosial, yang pada gilirannya berdampak pula pada aspek ekonomi dan akhirnya mempertinggi angka kemiskinan.

Peran pemerintah yang lebih banyak sebagai upaya mempertahankan *status quo*, aparat senantiasa berorientasi pada *product* yaitu *pokoknya program berhasil*, dan tidak



memperhatikan proses. Ini semuanya akhirnya berdampak pada penyimpangan dalam penentuan kelompok sasaran, sehingga layanan pembangunan lebih banyak diarahkan pada kelompok yang lebih berdaya, beruntung.

Aspek kedua penyebab kemiskinan adalah aspek natural atau kondisi fisik lingkungan, sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Seperti desa penelitian (Bronjong), selain tanahnya berkapur, sumber air tidak ada, terisolasi dari kehidupan kota, membuat desa ini seakan desa mati (sulit berkembang). Tidak ada sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dinamika perekonomian desa.

Aspek kultural kiranya juga banyak memiliki andil dalam membentuk kemiskinan dan ini akan berakibat pada pemberian makna terhadap program-program bantuan di pedesaan terutama masih lekatnya masyarakat dengan nilai-nilai hidup bermasyarakat seperti sikap *nrimo ing pandhum*, menyebabkan kurang adanya motivasi guna mengembangkan diri. Sikap atau cara hidup orang Jawa yang tertuang pada kata-kata: "*ono dino ono upo, urip iku ora ngoyo, sing penting cukup kanggo sakbendinane*", (ada hari ada nasi; hidup itu tidak perlu ambisi; yang penting cukup untuk setiap harinya), hal ini sedikit banyak berpengaruh pada etos kerja mereka.

Masyarakat petani khususnya di Jawa juga beranggapan bahwa hidup harus sejajar dengan lingkungannya, sehingga bila ada yang bekerja terlalu keras mereka dianggap berambisi dan dampaknya dianggap menyimpang norma yang ada,

sehingga masyarakat petani berusaha hidup sejajar dengan yang lain (Mulder, 1982).

Kenyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Sobari tentang orang Jawa di Tanjung Pinang menyatakan bahwa dalam menghadapi kesulitan dan tekanan hidup, terutama di luar daerah orang Jawa memang betul-betul bekerja keras, gigih, dan hemat, namun demikian mereka tidak mau dianggap *ngoyo* karena mereka merasa tidak ada persaingan, dan tidak ada ambisi untuk lebih mengungguli yang lain (Sobari, 1986: 100). Dari pada mengganggu lebih baik tidak bertindak, dari pada ambisius dan ingin serba lebih, lebih baik puas dengan yang sedikit dan hidup miskin, hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan mereka lebih banyak bersikap *nrimo* (menerima apa adanya), karena bagaimanapun orang akan menerima sesuai jatah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan (Sobari, 1986: 98).

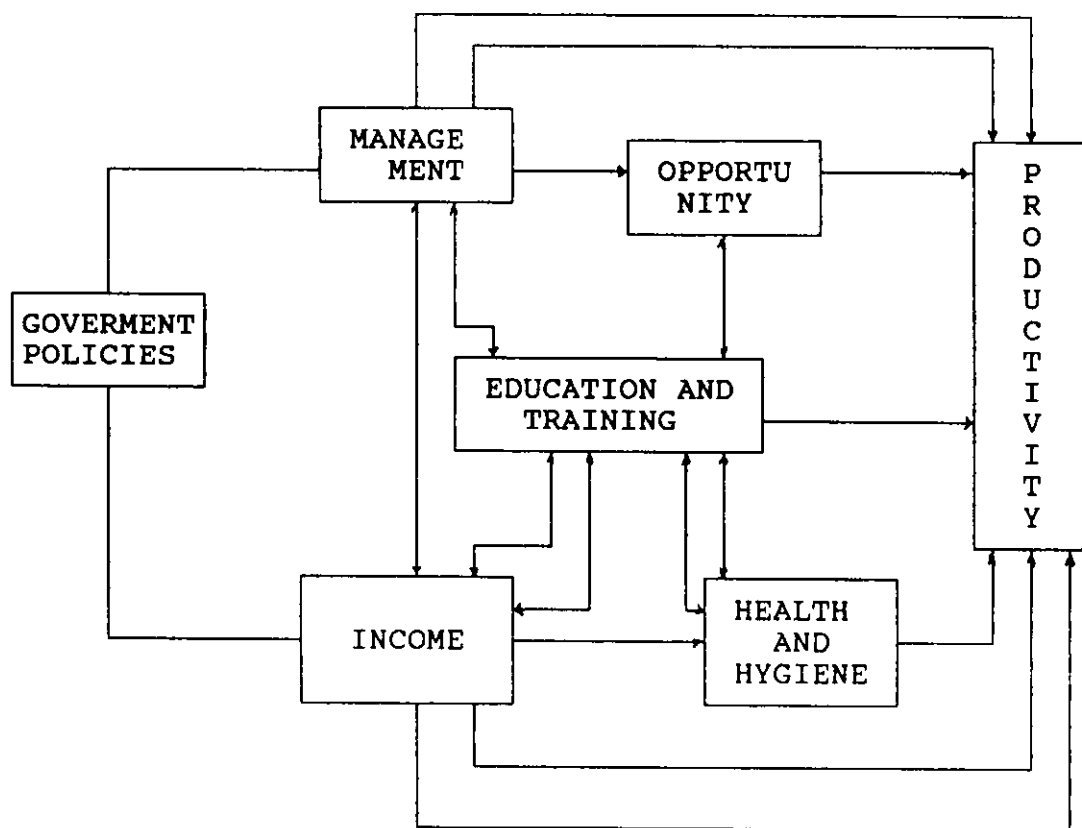
Semuanya itu merupakan bentuk perwujudan budaya kemiskinan, di samping perilaku tidak berani mengambil resiko, lebih kuat dalam mempertahankan kebiasaan lama, sehingga untuk memenangkan perasaan tidak puas itu diciptakanlah sikap "*nrimo ing pandum*".

Mereka masih beranggapan bahwa bila terjadi kemiskinan, hal itu dianggapnya sebagai suatu takdir yang harus diterimanya, dan oleh sebab itu sebagian dari mereka mengatakan bahwa hidup ini tidak perlu *ngoyo* (berambisi) karena hidup hanya sekedar *mampir ngombe* (singgah untuk minum) dan harus berbuat sesuai dengan *lakon* (peran) yang telah digariskan atau ditentukan oleh *dalang* (Tuhan).

Budaya mengadakan upacara dalam setiap peristiwa kehidupan juga merupakan salah satu bentuk pemborosan. Demikian pula pandangan yang menempatkan wanita pada posisi *subordinat*, membatasi ruang gerak wanita terutama dalam peningkatan pendapatan.

Demikian juga dengan tingkat pendidikan yang dimiliki penerima bantuan. Rendahnya tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap keadaan ekonomi keluarga mereka, mengingat aksesabilitas mereka terhadap berbagai alternatif pekerjaan di luar pertanian semakin terbatas, yang pada akhirnya berpengaruh pula pada produktivitas.

Mengacu pada pemikiran Simanjuntak (1983), tentang model pengembangan produktivitas kerja (lihat gambar 6.2), dijelaskan bahwa pendidikan sebagai pusat dari suatu model pengembangan produktivitas kerja. Rendahnya pendidikan mempengaruhi pendapatan (*income*), kesempatan (*opportunity*), kesehatan dan gizi (*health and hygiene*) serta produktivitas kerja (*productivity*).



Gambar 6.2

### MODEL PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS KERJA

Sumber: Simanjuntak Payaman P. 1983

Bagi rumah tangga miskin yang tingkat pendidikan kepala rumah tangganya sangat rendah, siklus dan mata rantai ini akan menjerat mereka. Segala "predikat" serba kekurangan menyertai tingkat pendidikan yang rendah tersebut. Paradoks tentang pendidikan ini dapat saja timbul, mengingat apabila terdapat warga masyarakat dengan pendidikan yang baik, belum tentu mereka dapat memasuki atau menemukan pekerjaan yang cocok dengan bidang ilmu dan keterampilan yang dimiliki,

mengingat di pedesaan jenis dan macam pekerjaan sangat terbatas. Atas dasar ini dapat dijelaskan bahwa dalam menganalisis aspek pendidikan dikaitkan pula dengan tersedianya pekerjaan di desa.

Selain masalah pendidikan, kiranya adat-kebiasaan yang hidup di desa juga menjadi salah satu sebab munculnya kemiskinan. Banyaknya selamatan yang harus diikuti oleh warga masyarakat menyebabkan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Namun bagaimanapun juga upacara tersebut dilakukan masyarakat agar tidak dikucilkan oleh tetangga. Seperti yang dinyatakan oleh Samun warga desa penerima bantuan bahwa:

Orang-orang di desa ini masih taat mengikuti tatacara adat dan agama, bila ada keluarga yang kehilangan salah satu anggota keluarga (meninggal), maka selamatan tetap dilakukan mulai diberangkatkan ke makam, hingga seribu hari. Selamatan itu diundang tetangga sekitar paling tidak untuk satu RT atau sekitar 30 sampai 40 orang. Biasanya *berkatan* nya cukup dibungkus daun (pisang dan jati) terdiri atas nasi (beras), lauknya (tempe, tahu, bandeng/ ayam/ daging/ *rempeyek*, dan sayur (urap-urapan/ sayur lodeh) (Smn, 12 Oktober 1996).

Dari ungkapan warga masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat dan khususnya keluarga penerima bantuan masih tetap terikat oleh tatacara hidup bermasyarakat. Tatacara tersebut ditaati oleh siapa saja, tidak melihat apakah mereka keluarga mampu atau kurang mampu. Untuk meringankan beban keluarga yang sedang melakukan selamatan para tetangga datang menyumbang (biasanya berupa beras), dan pada waktu pulang, *ember* tempat beras tersebut akan diisi oleh *berkatan* yang terdiri atas nasi dan lauk pauk.

Di satu sisi tampak bahwa hubungan sosial warga erat dengan ikut meringankan beban dengan memberikan sumbangan, namun dari sisi ekonomi ternyata justru menjadi beban bagi keluarga yang disumbang, karena antara besar sumbangan dan *angsul-angsul* (*berkatan*) yang diberikan (*dikembalikan*) kepada penyumbang tidak banyak berbeda, ini berarti suatu pemborosan. Namun bagaimanapun juga hal itu harus diikuti karena sudah merupakan tradisi setempat.

Masyarakat Desa Bronjong dalam memberikan makna terhadap pembangunan dan program bantuan peningkatan pendapatan tidak dapat dilepaskan dari budaya sebagai cara hidupnya sendiri. Peneliti melihat bahwa bervariasinya pemberian makna terhadap suatu fenomena (*pembangunan dan program bantuan peningkatan pendapatan*) terkait erat dengan pandangannya terhadap hidup dan kehidupan yang telah terkonstruksi sejak lama yang kesemuanya itu merupakan hakikat dari budaya masyarakat.

Budaya sebagai cara hidup (*way of life*) suatu masyarakat mencerminkan kesepakatan tentang norma, nilai dan kepercayaan yang membuat jadi mungkin warga suatu masyarakat untuk hidup bersama secara relatif harmonis (Babbie, 1982); ia mencakup idea dan praktik yang disetujui dan dilakukan oleh kebanyakan warga masyarakat tentang bagaimana mereka merespons kondisi alam maupun sosial yang dihadapinya (White, 1988).

Budaya sebagai cara hidup berhubungan dengan hakekat tentang alam dan manusia serta pilihan untuk mengelola kebutuhan dan sumber daya serta pilihannya tentang ide dan benda yang dianggap baik. Pandangan tentang hakekat alam dan manusia dikonstruksi secara sosial karena pandangan tentang alam dan manusia yang ada dalam dunia kehidupan (*life-world*) terdiri atas fenomena dunia atau semesta yang rumit dan lengkap terdiri atas lingkungan fisik, sosial, dan interaksi antar manusia (Berger dan Luckman, 1990: xiv).

Peneliti melihat bahwa perilaku para penerima bantuan merupakan perwujudan dari budayanya sendiri-sendiri, dalam hal mana budaya itu sendiri sebenarnya hasil perpaduan antara hubungan sosial di satu sisi serta nilai dan norma yang diyakini di sisi lain. Budaya sebagai cara hidup diklasifikasikan atas dasar dua dimensi, yaitu kuat-lemahnya ikatan kelompok (*group*) dan regulasi yang datang dari atas atau secara vertikal (*grid*).

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan peningkatan pendapatan sangat bervariasi. Ada

sebagian penduduk yang menerima bantuan dan menggunakan bantuan itu sebaik-baiknya karena "kepatuhannya" kepada kepala desa. Penerima bantuan yang lain mengelola bantuan secara baik karena mendatangkan keuntungan untuk keluarganya. Ada pula penerima bantuan yang "tidak bereaksi" terhadap apa yang diterimanya. Apakah yang dikelola itu berkembang atau habis, seakan biasa saja. Sebagian lain justru "menolak" bantuan yang diberikan, dirasa adanya ketidakadilan dalam penentuan kelompok sasaran.

Bervariasinya pengelolaan atau pemanfaatan bantuan (tindakan terhadap bantuan) ini, didasari oleh makna yang telah melembaga pada masing-masing individu. Pengetahuan tentang bantuan yang dimiliki seseorang, baik yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, maupun informasi dari orang lain akan memberikan "tipifikasi" terhadap bantuan itu sendiri yang pada gilirannya akan membentuk makna terhadap bantuan tersebut.

Pertama perilaku penduduk dalam menyikapi bantuan, tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan kepala desa di satu sisi dan hubungan dengan sesama anggota masyarakat atau kelompok di sisi lain. Bagi orang yang menyikapi bantuan secara positif karena kepatuhannya kepada kepala desa menunjukkan bahwa dominasi kepala desa sangat kuat. Adanya kepatuhan kepada pimpinan (pamong) karena didasari oleh kuatnya regulasi dari atas, menyebabkan mereka senantiasa berusaha mendukung setiap kebijakan kepala desa meskipun dengan terpaksa.

Hal itu dilakukan semata-mata untuk menjaga kesinambungan kekuasaan kepala desa bersangkutan, yang pada



gilirannya akan mempertahankan kedudukannya dimata pamong. Orang yang demikian ini biasanya "selalu sendiko dawuh" terhadap setiap tugas yang diberikan kepala desa kepadanya. Mereka biasanya dikenal dengan sebutan *tiyange pak lurah* (orangnya pak lurah) atau *tiyang manutan*.

Kedua, penerima bantuan lain menunjukkan perilaku positif dalam mengelola bantuan. Apa yang diterima, kemudian dirawat dan dikembangkan. Mereka berhasil dalam mengelola setiap bantuan yang diberikan. Ini disebabkan karena memang mereka merasakan manfaat untuk pengembangan diri dan keluarganya sendiri. Mereka dapat hidup lebih layak dengan mengelola bantuan yang diterimanya. Di desa penelitian (Bronjong) orang yang demikian ini dikenal dengan istilah *tiyang ulet* (orang ulet atau rajin), *tiyang pinter*.

Orang-orang dalam tipe ini tidak banyak terdapat di desa penelitian, mereka pada umumnya lebih banyak berkomunikasi dengan pihak luar (sering ke kota), dan mengetahui peluang pasar. Karenanya mereka selalu mencoba melakukan apa saja yang dapat mendatangkan uang. Memang orang ini biasanya dikenal sebagai orang cetil (kikir), dan kurang mau bergaul (*nonggo*), karena seakan tidak ada waktu kosong bagi dirinya untuk kegiatan yang kurang mendatangkan hasil (kurang bermanfaat).

Orang semacam ini banyak menjalin hubungan dengan dunia luar, baik secara fisik maupun secara informatif. Karena kenyataannya penerima bantuan bertipe ini didukung oleh kemauan yang tinggi untuk berkembang. Mereka sering mendengarkan radio, melihat TV serta membawa hasil tanamannya sendiri ke pasar di luar desa.

Ketiga, orang yang tidak bereaksi terhadap bantuan yang diterimanya, tampak dari perilaku seenaknya sendiri. Sebagai misal bila malas mencari rumput maka ternak (bantuan) dibiarkan makan seadanya. Contoh lain diberi bibit tanaman, setelah ditanam dibiarkan saja, tidak disiram atau dipupuk. Apakah tanaman itu mati atau hidup tidak peduli.

Model orang seperti ini cukup banyak di desa penelitian. Mereka disebut sebagai *tiyang nrimah*, *tiyang keset*, *tiyang nglokro*. Mereka merasa bahwa hidup ini sudah *digariskan kalih sing damel gesang*. Meskipun bekerja keras namun bila belum waktunya menjadi kaya tetap saja akan miskin. Hidup yang seperti dialami saat ini dirasakan telah cukup, yang penting dapat makan tiap hari.

Keempat, masyarakat yang langsung menolak bantuan yang diberikan. Alasannya kepala desa dianggap tidak adil. Orang yang seharusnya menerima tidak diberi, tapi orang yang dianggap berkecukupan justru diberi. Orang bertipe ini jumlahnya tidak terlalu banyak, di desa penelitian.

Mereka biasanya tokoh informal, seperti guru agama (guru ngaji), sesepuh desa. Di desa penelitian mereka dikenal sebagai *tiyang sae* (orang baik). Dikatakan sebagai orang baik, karena dianggap selalu memperhatikan kehidupan sesama, semuanya dikembalikan pada tatanan hidup bermasyarakat (gotong-royong) dan norma keagamaan.

Orang yang berkarakteristik ini biasanya terkenal orang yang senang protes kepada kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak pas. Sikap protes tersebut biasanya

dinyatakan dalam perilaku tidak hadir dalam pertemuan. Sikap demikian ini menurut mereka sebenarnya merupakan penolakan terhadap apa yang diharuskan (diperintahkan) oleh pimpinan.

Perilaku anggota masyarakat seperti ini dalam kelompok cenderung loyal, mereka sangat memperhatikan sesamanya. Mereka sangat loyal terhadap sesamanya (*sak podo-podo*). Semboyan hidupnya bahwa *urip ing donyo iku mung sak dermo mampir ngombe, mulo kudu tumindak sing becik, rukun lan ora gawe serike atining liyan* (hidup di dunia itu sekedar singgah untuk minum, maka harus bertingkah laku yang baik, rukun dan tidak membuat sakit hati orang lain). Ini menunjukkan bahwa mereka senantiasa menjaga keseimbangan, kenyamanan, kesejahteraan dalam hidup.

Budaya sebagai cara hidup, (Thompson, 1990) menyatakan bahwa ada lima tipe budaya masyarakat, yaitu hirarkhi, individualism, fatalism, egalitarian, dan hermit. Budaya hirarki memandang alam secara *isomorpik*, memandang manusia ketika lahir penuh penyimpangan tetapi akan "disembuhkan" oleh institusi yang baik. Budaya individualis memandang alam bermurah hati kepada setiap individu yang mau berupaya keras, sedangkan manusia dipandang sebagai pencari kepentingan sendiri. Budaya *fatalis* memandang alam dan manusia sebagai sesuatu yang tidak terduga dan tak dapat dikontrol sehingga hidup ini tak lebih sebagai pemain judi, yang banyak ditentukan oleh nasib atau keberuntungan. Oleh karenanya semua diserahkan pada takdir. Budaya *egalitarian*

melihat manusia pada dasarnya baik, namun dirusak oleh lembaga yang mengeskplotasi, sedangkan alam dianggapnya bermurah hati pada semua manusia bila keseimbangan tetap terjaga, tapi bila tidak, maka sedikit saja akan terjadi kesenjangan. Budaya hermit adalah tipe orang yang tidak mau peduli sama sekali dengan lingkungan sekitar, mereka mengucilkan diri dari lingkungan (Thompson, 1990:3).

Bila dikaji memang ada kemiripan cara hidup masyarakat desa penelitian dalam menindaki bantuan peningkatan pendapatan dengan budaya sebagai cara hidup menurut Thompson. Namun tidak berarti bahwa budaya sebagai cara hidup menurut Thompson itu dapat digunakan dengan tepat pada daerah penelitian. Mengingat lokasi kajiannya jelas berbeda baik secara struktural, natural, maupun kultural.

Budaya Hermit (Thompson), tampaknya memang tidak terdapat di daerah penelitian, karena tidak ada seorangpun yang terkucil dari lingkungannya. Demikian pula untuk budaya egalitarian, meskipun mirip dengan *tiyang sae*, namun orang inipun sedikit banyak masih tetap mengikuti regulasi yang ada, meskipun sering kali dilaksanakan dengan *nggrundel*, atau *nggih nggih ora kepanggih* sebagai bentuk protes. Maunya *tiyang sae* ini melaksanakan perintah dari aparat, karena sedikit banyak hubungan *patron-client* masih mewarnai kehidupan birokrasi di Indonesia, khususnya di pedesaan.

Demikian pula dengan budaya individualis (Thompson), tidak begitu saja sama dengan *tiyang ulet*, *tiyang sregep* di daerah penelitian. Individualis melihat manusia sebagai

pencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Budaya seperti ini tidak tampak di desa penelitian, namun yang ada adalah orang yang senang bekerja keras dan berani melakukan inovasi. Nilai gotong royong masih tampak mewarnai kehidupan masyarakat desa, meskipun kadar kegotong-royongan tersebut antara orang yang satu dengan lain tidak sama.

Pemaknaan terhadap bantuan peningkatan pendapatan banyak didasari oleh budaya individu (penerima bantuan), bila digambarkan keberadaan budaya individu dalam pemberian makna dapat dilihat pada gambar 6.3.

Ulet (+)	Manut (+)	Makna Bantuan (+) (-)
(-) Kesed,nrimo	(-) Sae	

Gambar 6.3  
Makna Bantuan dilihat dari Karakteristik  
Budaya sebagai cara hidup Si Penerima Bantuan

### 6.2.3. Makna Bantuan Dilihat dari Keberadaan Pasar

Pembangunan adalah persoalan mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi (yang terdistribusi dengan adil) dengan membuat perubahan yang cepat dan langgeng dalam kapasitas produktif dan organisasi sosial masyarakat. Pasar sebagai lembaga perekonomian memiliki tugas memproduksi dan

mendistribusikan kekayaan. Dalam rangka menggerakkan keairahan masyarakat dalam memproduksi barang maupun jasa ketersediaan pasar merupakan faktor yang utama.

Masyarakat petani merupakan "*part-societies with part-cultural*" (Foster, 1967; Redfield, 1985), disatu pihak mereka tinggal di pedesaan dengan lingkungan tradisi yang telah terpelihara secara turun temurun, namun di pihak lain hidupnya akan dipengaruhi oleh kehidupan pasar, kekuasaan, peradaban kota. Sehingga kehidupan pertanian mereka bukanlah sebagai petani *primitif* yang ditandai dengan upaya untuk memenuhi konsumsi sendiri dan kerabatnya, tetapi juga bukan sebagai pengusaha pertanian (*farmer*) yang ditandai dengan orientasi pasar atau bisnis.

Ada kendala yang dihadapi petani dalam mengembangkan produksi pertaniannya terutama untuk memasuki dunia perdagangan. *Transportation, marketing, establishing a reputation in product markets, and most importantly overcoming trade barriers all take cost* (Grabowski, 1995:42-43). Dengan kegiatan pertaniannya mereka lebih menekankan agar dapat hidup.

Ekonomi uang dan pola kegiatan produksi untuk tujuan pertukaran (karena alasan pasar dan mengejar profit) sangat sedikit mewarnai pemikiran ekonomi dan aktivitas kerja mereka sehari-hari. Apa dan seberapa banyak yang mereka produksi, serta kapan saja suatu kegiatan produksi itu perlu dilakukan biasanya juga diorientasikan sebatas kebutuhan hidup rumah tangga masing-masing. Orientasi semacam itu biasanya menuntun pola dan irama kerja sehari-hari.

Pentingnya pasar bagi kehidupan manusia dinyatakan pula oleh Garry Wills (1970), dipasarlah manusia ekonomi, manusia politik dan sebagainya mencari keuntungan masing-masing (Penny, 1990:85). Namun demikian kompetitif yang diciptakan pasar menguntungkan golongan yang kuat di setiap wilayah yang mendasarkan diri pada keberhasilan kaum yang berkuasa dan menawarkan hanya sedikit bantuan dan dorongan pada kaum papa yang tak berkuasa, sehingga ekonomi pasar bukanlah sebuah model pembangunan bagi masyarakat miskin (Rachbini, 1995:26).

Keadaan pasar dan kebijakan pasar di desa penelitian (Bronjong), dapat dikatakan sangat kurang mendukung. Kondisi pasar secara fisik kurang memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan produksi sehingga berakibat pada rendahnya dinamika pertukaran uang di pasar. Hal ini disebabkan oleh keberadaan pasar Bluluk kurang strategis, di samping juga karena informasi pasar tentang keadaan harga pun juga sulit dijangkau. Akhirnya keberadaan pasar (informasi) hanya menguntungkan bagi pihak yang memiliki mobilitas dan modal tinggi, terutama mereka yang selalu berkomunikasi dengan dunia luar (kota).

Keberhasilan perkembangan perekonomian di pedesaan tidak dapat dilepaskan dengan perekonomian kota, Murphy (1989) menjelaskan bahwa *cottage industry is linked with the urban industrial sector* dan yang lebih penting adalah bahwa produksi dan pemasaran harus dikoordinasikan dalam skala yang lebih besar. Demikian juga keberadaan pasar

domestik, merupakan langkah awal yang harus diperhatikan sebelum pasar internasional melakukan penetrasi.

Seperti yang dinyatakan Grobowshi, 1995:44) *production for the domestic market would appear to be a necessary first step before international markets can be penetrated*. Selain itu juga dinyatakan bahwa *growth of the domestic market that allows for the establishment of increasing - returns to scale technology in industry. Specifically, firms can overcome the problem of small domestic markets by increasing production for foreign markets*.

Ada kontradiksi antara pendapat Grobowshi dengan Penny, di satu sisi Grobowshi menyatakan bahwa keberadaan pasar domestik merupakan langkah awal yang harus diperhatikan sebelum meluas ke pasar internasional.

Dengan kata lain keberadaan pasar mutlak diperlukan, namun di sisi lain Penny menyatakan bahwa "Sistem pasar (pasarisasi) dan Komersialisasi tidak membawa kemajuan dan keberuntungan tapi kesengsaraan dan kelaparan", hal ini disebabkan karena sistem pasar mendorong petani miskin menjual hasil produksinya untuk membeli pangan yang lebih murah dan rendah gizinya. Sistem persaingan pasar berkaitan dengan kehidupan sosial dan politik seperti meningkatkan individualisme, kewajiban tradisional terabaikan (Penny, 1990: 85).

Pandangan Grobowshi didukung North (dalam Tornquist, 1999:86), untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang lebih menguntungkan pada sebagian besar penduduk di



pedesaan maka produksi harus berbasis pasar domestik. Ini menunjukkan bahwa keberadaan pasar domestik sangat diperlukan dalam memberdayakan perekonomian penduduk miskin.

Nasikun (1995) menyatakan bahwa kebijaksanaan harga macam apapun tidak dengan sendirinya menguntungkan lapisan penduduk miskin di bawah kontrol kekuatan monopoli. Dilakukannya monopoli terhadap produksi masyarakat, akan memperlemah usaha meningkatkan produksi, dampaknya masyarakat menjadi enggan untuk berkompetisi, akibat tidak didukung oleh sarana dan prasarana untuk berkompetisi.

Baik Racbini, Penny maupun Nasikun, menyatakan bahwa ekonomi pasar, sistem pasar, kebijaksanaan harga akan menyebabkan kesengsaraan bagi lapisan penduduk miskin, karena kemampuan berkompetisi tidak mereka miliki. Keadaan ini sering kali dihadapi oleh para petani dalam memasarkan hasil pertaniannya. Seperti pemasaran tembakau, mereka cenderung banyak ditentukan oleh pemilik uang (tengkulak atau taoke), sehingga kemampuan *bargaining* mereka seakan hilang, bahkan dalam perdagangan tembakau sering muncul hubungan *patron-client*, antara petani dengan taoke.

Asumsi dasar munculnya hubungan ini karena adanya perbedaan status dan posisi yang asimetrikal, karena adanya divergensi penguasaan aset dan faktor produksi dalam pola hubungan ekonomi.

Meskipun determinasi mutualistik dan interdependensi merupakan bentuk ideal di dalam hubungan ini, namun dalam banyak kasus, hubungan yang pada awalnya atau dalam

permulaan kelihatan paralel dan interdependensi lama kelamaan menjadi non-paralel dan dependensi dan bahkan dominatif dan eksploitatif, karena *bargaining position power* berada di tangan *patron* (taoke).

Lembaga ekonomi lainnya adalah "koperasi", yaitu KUD yang berada di tingkat kecamatan. KUD di tingkat desa (Bronjong) tidak ada, alasannya KUD kecamatan berdekatan dengan lokasi Desa Bronjong, sehingga dirasakan lebih efektif dan efisien bila menjadi KUD di tingkat kecamatan.

Koperasi melalui jalur organisasi seharusnya tetap bergerak kuat pada sendi-sendinya yaitu mengutamakan kesejahteraan para anggotanya dengan gerakan yang sepat dan tepat. Koperasi memiliki fungsi antara lain (1) mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta serta daya usaha rakyat, (2) meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut, (3) mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia, (4) berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi, dan (5) berperan serta aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.

Apa yang diidealkan oleh koperasi, ternyata tidak sepenuhnya dapat terwujud, karena sebagian besar anggota koperasi di pedesaan keikutsertaannya bukan karena kemauan sendiri, namun karena paksaan dari aparat desa.

Petani menganggap bahwa koperasi tidak mencerminkan *feel needs* dari para anggotanya (rakyat), dan dampaknya anggota (rakyat) merasakan bahwa koperasi belum memberi

keuntungan ekonomi kepada anggotanya, sebaliknya hanya menguntungkan pihak pengurus, karena uang koperasi lebih banyak digunakan menggaji pegawai. Disamping itu rakyat desa yang mayoritas rendah tingkat pendidikannya mudah diperdaya oleh pengurus yang relatif lebih tinggi tingkat pendidikannya.

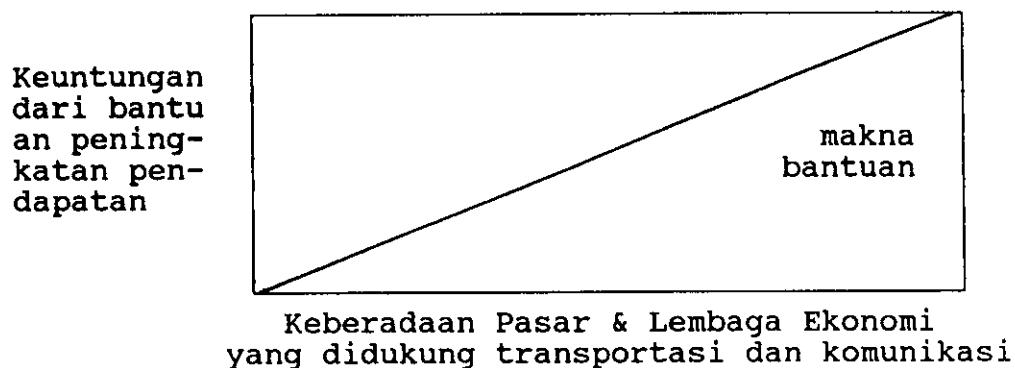
Rendahnya tingkat pendidikan anggota, sebagai salah satu faktor penyebab pasifnya anggota dalam berorganisasi. Ada rasa takut salah dalam berbicara atau dalam mengusulkan sesuatu karena dirinya menyadari sebagai *wong bodo*.

Ketidakjujuran pengurus semata-mata bukan karena sikap mental, namun lebih banyak berkaitan dengan perubahan struktural yang terjadi di masyarakat. Para pemimpin koperasi merasa bahwa dirinya sebagai pemimpin formal, bukan sebagai pemimpin gerakan koperasi, dampaknya mereka bertingkah laku secara formal dan menganggap anggota sebagai rakyat biasa bukan sebagai teman senasib dan selalu mengambil jarak dengan para anggota.

Koperasi lebih banyak melaksanakan program pemerintah, khususnya dalam rangka pencapaian target pembangunan, seakan-akan koperasi lebih mengutamakan kepentingan pemerintah dari pada kepentingan anggotanya. Koperasi hanya menjual "Saprodi" kepada masyarakat, tetapi sebaliknya KUD tidak mau membeli gabah petani sesuai dengan harga dasar yang telah ditentukan, dengan alasan kadar airnya masih tinggi atau dananya kurang. Keadaan inilah sering kali menjadi penyebab munculnya pandangan yang negatif terhadap koperasi.

Atas dasar pembahasan tersebut dapat dirumuskan suatu proposisi bahwa: Tindakan terhadap bantuan peningkatan pendapatan ditentukan oleh keberadaan pasar serta lembaga ekonomi di daerah dan keuntungan yang diperoleh dari program bantuan tersebut.

Dengan kata lain pemberian makna terhadap bantuan peningkatan pendapatan berkaitan dengan nilai ekonomi (nilai jual), yang diberikan oleh bantuan bantuan peningkatan pendapatan tersebut. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh dari bantuan yang diterima, makin positif makna bantuan.



Gambar 6.4  
Keterkaitan antara Makna Bantuan dengan Keberadaan Sarana Transportasi Komunikasi dan Pasar serta lembaga ekonomi

#### 6.2.4. Makna Bantuan dilihat dari Kehidupan Organisasi Masyarakat

Keikutsertaan warga desa dalam organisasi yang lain tidak berbeda jauh dengan keikutsertaannya dalam Koperasi. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), merupakan bentukan atas dasar swadaya masyarakat, artinya dibentuk atas dasar kepentingan masyarakat, untuk memenuhi tujuan secara bersama (berkelompok). Temuan di lapangan tidaklah demikian KSM dibentuk oleh pemimpin desa, atas dasar perintah dari pemerintah di atasnya. KSM ini merupakan target yang harus dipenuhi desa dalam "mengentas kemiskinan".

Pada era orde baru, kata pembangunan seakan menjadi sesuatu yang suci, sehingga harus dihayati, dipahami, dan dilaksanakan dengan tanpa memberi kritik, atau mengkaji ulang. Karena sifatnya yang demikian ini seringkali aparat pemerintah (birokrat) memiliki tugas untuk mengamankan pembangunan sesuai juklak dan juknis yang telah ditentukan.

Meskipun proses pengusulan program pembangunan juga memperhatikan usulan dari bawah (melalui LKMD), namun kiranya usulan tersebut tetap sebagai usulan dan tidak pernah direalisasi. Ini disebabkan bahwa apa yang diusulkan masyarakat hanya sekedar keinginan, sedangkan yang ditentukan dari atas lebih dianggap sebagai kebutuhan masyarakat, sehingga harus segera dipenuhi. Keadaan inilah yang seringkali juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk bantuan.

Pada waktu ditanyakan kepada masing-masing ketua kelompok tentang keadaan administrasi kelompok, secara serempak dijawab tidak punya, semua catatan tentang IDT ini berada pada Carik (Smn, Ds, Strsn, Wrt dan Swj, 21 Maret 1997). Baik jumlah bantuan dan siapa yang dibantu dicatat oleh Carik, saya sebagai ketua hanya jabatannya saja, tapi apa tugas saya tidak tahu. Selama ini tugas ketua adalah menghubungi anggota bila akan dikumpulkan atau diadakan pertemuan oleh Kades.

Diantara mereka yang menjadi ketua kelompok ada 3 orang yang merupakan famili perangkat desa, dan tidak hanya yang menjadi ketua sebagai kerabat aparat desa, tetapi hampir sepertiga penerima bantuan (IDT) merupakan keluarga perangkat desa. Dari pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa unsur kekerabatan masih mendominasi dalam pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Kelompok swadaya masyarakat di Desa Bronjong sebagai suatu organisasi (memiliki struktur organisasi), ternyata tidak tumbuh dari keinginan warga, tetapi dibentuk atas instruksi kepala desa, karena perintah aparat pemerintah di atasnya. Oleh karena itu meskipun namanya kelompok swadaya masyarakat, ternyata bukan karena swadaya masyarakat sendiri. Tampak adanya unsur dominasi elit dalam pembentukan kelompok. Penentuan sasaran, pembentukan kelompok, dan perencanaan program, semuanya belum melibatkan anggota kelompok secara maksimal.

Ini merupakan salah satu sebab mengapa masyarakat atau penerima bantuan tidak memanfaatkan setiap pembangunan (bantuan) dengan baik.

Dalam pengambilan keputusan, struktur otoritas ditandai oleh lemahnya posisi berunding rakyat dalam menghadapi pemerintah desa, sehingga setiap keputusan diambil oleh kepala desa atau lembaga musyawarah desa yang notabene anggotanya adalah aparat pemerintah sendiri.

Rendahnya keterlibatan anggota kelompok (si penerima bantuan) dalam aktivitas kelompok, antara lain disebabkan oleh belum disadarinya akan fungsi kelompok sebagai wadah kegiatan baik oleh anggota maupun pengurus kelompok sendiri. Hal ini tampak dari beberapa fenomena seperti tidak pernah diadakannya pertemuan.

Pada waktu ditanyakan kepada penerima bantuan, berapa kali dalam satu bulan kelompok swadaya masyarakat (mereka mengenalnya dengan kelompok *IDT*) mengadakan pertemuan, dijawab *tidak pernah ada pertemuan*. Kemudian ditanyakan lagi apa gunanya dibentuk kelompok kalau tidak pernah ada pertemuan, jawabnya tidak tahu, pokoknya diberitahu bahwa penerima *IDT* yang berada di Cumpleng lor ini namanya kelompok Sumber Makmur. Nama kelompok itu juga dibuat pak Kades dengan LKMD (Tmdjn, Prd, Spl, 21 Oktober 1996).

Mereka dikumpulkan bersama-sama hanya pada saat menerima kambing dan ternak itu saja, setelah itu tidak pernah dikumpulkan lagi. Pada waktu dikumpulkan apa yang dibicarakan, pertanyaan ini dijawab bahwa mereka diberitahu

kalau akan mendapat bantuan kambing dan sapi, yang ini katanya harus dikembalikan setelah tiga tahun, jadi bantuan itu bukan diberikan cuma-cuma.

Pertanyaan senada juga ditujukan kepada ketua kelompok (lima orang), jawab dari kelima kelompok tersebut pada intinya sama yaitu disuruh oleh pak lurah dan ketua LKMD untuk menjadi ketua kelompok penerima IDT, tugas ketua sendiri tidak diketahuinya, mereka menyatakan bahwa tugasnya hanya mengumpulkan anggota bila dikehendaki pak Kades dan ketua LKMD (Smn, Ds, Strsn, Wr, dan Swdj, 21 Oktober 1996). Demikian pula pada waktu ditanyakan berapa kali dalam sebulan, kelompok yang dipimpinnya mengadakan pertemuan, semuanya menyatakan belum pernah mengadakan pertemuan, karena selama ini pertemuan diadakan pada saat penyerahan bantuan, setelah itu pertemuan dengan seluruh anggota kelompok.

Seperti telah disinggung sebelumnya faktor yang menyebabkan mengapa rakyat sebagai anggota organisasi (swadaya masyarakat), tidak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian antara lain disebabkan oleh

- 1) partisipasi dianggap sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program pemerintah yang dirancang dan ditentukan oleh pemerintah (Soetrisno, 1995: 207),
- 2) adanya budaya untuk mencari selamat dikalangan aparat pemerintah, akibat ketakutannya akan kehilangan jabatan karena dianggap gagal dalam melaksanakan pembangunan.



Dengan adanya budaya untuk mencari selamat, dan keinginan mempertahankan *status quo*, aparat desa senantiasa mengamankan pembangunan secara ketat. Dengan kata lain perhatian utama adalah bagaimana supaya pembangunan itu berhasil, tidak memperhatikan apakah program itu sesuai dengan sasaran atau tidak. Karena sikap semacam inilah membuat rakyat seringkali tidak peduli terhadap setiap program pembangunan yang dilaksanakan di desanya.

Kelompok yang dibentuk dalam rangka mewadahi suatu program pembangunan, termasuk bantuan peningkatan pendapatan nyaris bukan didasarkan atas pilihan rakyat, tetapi didasarkan kepentingan aparat pemerintah.

Melalui struktur yang cenderung birokrastis memang mudah untuk mengontrol kinerja anggota kelompok. Sehingga bagaimanapun juga negara tetap berperan secara dominan untuk mengatur pengorganisasian rakyat desa peserta program dari pemerintah. Lemahnya organisasi dalam melaksanakan program pembangunan yang diluncurkan pemerintah menunjukkan proses pelemahan kekuatan rakyat oleh kekuatan negara sehingga ketika rakyat berhadapan dengan posisi pihak pemilik modal mereka tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat.

Korten (1988) menyatakan bahwa salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan kelayakan program bantuan adalah keberadaan organisasi. Organisasi sebagai wadah dalam melaksanakan program pembangunan (bantuan), diharapkan memiliki *kemampuan khusus* dalam bidang program pembangunan (bantuan), selain itu organisasi dalam membuat

keputusan hendaknya memperhatikan keadaan penerima bantuan, sehingga apa yang dilakukan organisasi bermanfaat bagi kelompok sasaran.

Kemampuan khusus organisasi dalam melaksanakan program tentunya tidak terlepas dari tingkat pendidikan dan pengetahuan atau profesionalitas para anggotanya. Pengorganisasian masyarakat pada dasarnya merupakan proses penyadaran dan mobilisasi melalui pertemuan, dialog, diskusi kelompok (Gran, 1983: 182). Apa yang diharapkan Gran pada umumnya belum dapat diwujudkan secara optimal pada organisasi di pedesaan (organisasi petani), salah satu kendala adalah rendahnya tingkat pendidikan yang tercermin dalam budaya bisu (*silent culture*) dalam organisasi.

Demikian pula proses keputusan yang dihasilkan organisasi merupakan salah satu faktor keberhasilan organisasi (tidak hanya dalam arti memenuhi target, tapi yang lebih penting kemanfaatannya bagi rakyat (anggota organisasi)). Dalam prakteknya masih banyak proses pengambilan keputusan yang belum memperhatikan unsur anggota (kelompok sasaran). Banyak keputusan organisasi yang ditentukan oleh elit penguasa, dengan pertimbangan dapat mengamankan program-program yang ditangani organisasi tersebut.

Organisasi merupakan alat dari para elit (Gran, 1983:14). Elit ini pada umumnya berada di luar organisasi, mereka memiliki posisi dalam pemerintahan, sehingga

kelompok elit inilah yang memiliki dominasi terhadap pengambilan keputusan organisasi dapat dinyatakan sebagai kekuasaan. Gran (1983:16) menyatakan bahwa "*an external force or force, which he terms "mandators", shape fundamental aspects of the nature and procedures of each organization.*

Kuatnya pengaruh kekuatan dari luar organisasi ditengarai sebagai aspek yang mendasar dari prosedur maupun hakikat setiap organisasi khususnya di daerah pedesaan. Dampak dari fenomena ini adalah terbelenggunya kebebasan para anggota untuk menyatakan kehendak maupun pendapatnya. Anggota organisasi hanya merupakan pelaksana dari setiap keputusan yang dibuat oleh elit penguasa.

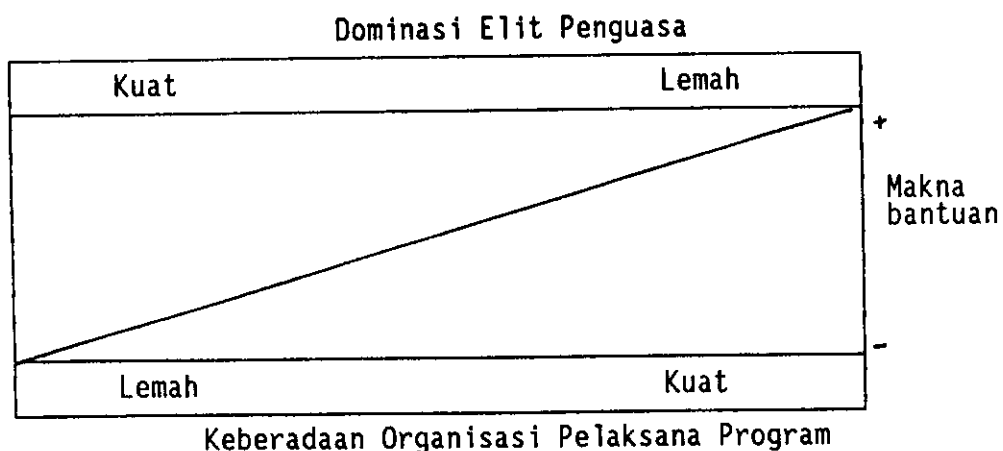
Ada alasan yang cukup masuk akal, mengapa para elit penguasa memiliki pengaruh dalam pelaksanaan organisasi?, tidak lain karena mereka ingin supaya tidak gagal dalam mengelola setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Semuanya terkait dengan munculnya *budaya mencari selamat* dikalangan aparat pemerintah sendiri, sehingga mereka dapat tetap mempertahankan jabatan. Munculnya *budaya mencari selamat* ini berdampak pada timbulnya sikap otoriter dalam melaksanakan pembangunan.

Dominasi aparat pemerintah dalam program pembangunan termasuk didalamnya pembentukan organisasi penerima program (bantuan), menyebabkan warga menjadi pasif. Warga hanya dianggap *user*, sehingga harus melakukan apa yang diputuskan dari atas.

Sikap kepatuhan untuk melaksanakan apa yang diputuskan pimpinan merupakan nilai kehidupan (perilaku) masyarakat yang masih lekat yaitu *hormat pada pimpinan, rasa sungkan, dan emuh pakewuh pada atasan*.

Rendahnya dinamika berorganisasi, termasuk kelompok swadaya masyarakat sebagai kelompok penerima bantuan, ditengarai pula oleh keberadaan anggota organisasi yang tidak didasarkan pada kepentingan anggota, namun lebih banyak atas dasar kepentingan aparat pemerintah, dengan dimasukkannya orang-orang yang dianggap masyarakat sebagai *wonge pak lurah*. Penempatan ini dimaksudkan agar program yang digariskan dari atas dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, karena dilaksanakan atau dimanfaatkan oleh orang yang dianggap mendukung aparat pemerintah.

Bila digambarkan keterkaitan antara pemberian makna terhadap bantuan peningkatan pendapatan dengan keberadaan organisasi pengelola program dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 6.5  
Keterkaitan Makna Bantuan dengan Dominasi elit Penguasa serta Keberadaan Organisasi Pelaksana

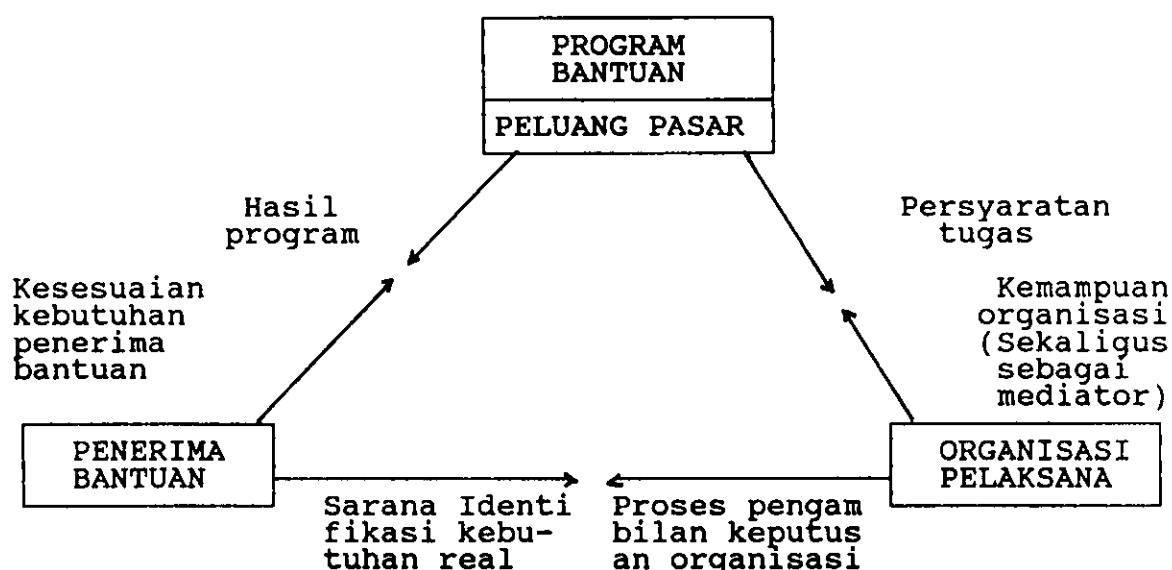
Pada proses transformasi sosial, pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat modernpun terjadi. Namun yang terjadi saat ini sebenarnya masyarakat masih berada pada tahap transisi. Dalam tahap ini lembaga masyarakat tradisional berinteraksi terus, bahkan menentukan dalam bentuk kekuatan otoriter, patriakal, tak berubah, nilai yang dihayati adalah kepatuhan, kesetiaan, dan kepasrahan. Kekuatan tradisional ini terus berpengaruh kepada masyarakat transisi, meskipun hanya terlihat secara terselubung (Soelaiman, 1996:95). Meskipun telah ada upaya untuk menerapkan suatu gagasan atau aspirasi baru yang lebih bersifat rasional, namun hasil yang diperoleh sering kali terjadinya jurang pemisah antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti melihat bahwa pemaknaan bantuan peningkatan pendapatan dari pemerintah kepada penerima bantuan sangat bervariasi. Munculnya berbagai makna terhadap program bantuan peningkatan pendapatan dan juga program pembangunan oleh penerima bantuan terutama disebabkan oleh motif dan atau tujuan dalam menerima atau menolak bantuan.

Faktor yang melatarbelakangi tindakan penerima bantuan dalam memperlakukan bantuan meliputi: (1) Bermanfaat tidaknya bantuan yang diterima untuk kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, atau orang yang dihormatinya. Kesemuanya itu berkaitannya dengan karakteristik khususnya budaya si penerima bantuan. (2) Strategi pelaksanaan bantuan

peningkatan pendapatan. Dalam strategi tersebut faktor program hendaknya disertai dengan tersedianya pasar baik dalam arti fisik maupun informasi untuk memasarkan hasil pengelolaan bantuan. (3) Organisasi pengelola bantuan. Dengan memberi peluang sebesar-besarnya keterlibatan penerima bantuan sebagai anggota kelompok dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai setiap program, dapat memberi kesempatan kepada warga untuk menunjukkan kemampuan dan kemandiriannya sehingga yang dirasakan bahwa mereka tidak hanya diperlakukan sebagai objek (pemanfaat program), tetapi sekaligus sebagai subjek (pelaku program).

Hubungan ketiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kelayak suatu program bantuan peningkatan pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6.6.  
Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Peningkatan Pendapatan

**BAB 7**

## BAB 7

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

#### 7.1. Kesimpulan

Hasil analisis data lapangan menunjukkan bahwa tidak semua bantuan peningkatan pendapatan khususnya dan program pembangunan umumnya yang ditujukan kepada masyarakat desa, ditindaki secara positif oleh kelompok sasaran atau penerima bantuan.

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti merumuskan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Beragamnya tindakan warga desa terhadap bantuan peningkatan pendapatan (pembangunan) ditentukan oleh pemaknaan program bantuan tersebut.
2. Bantuan peningkatan pendapatan di desa penelitian pada umumnya berasal dari pemerintah, tidak ada bantuan yang berasal dari swasta dan perorangan.
3. Proses perencanaan program lebih banyak bersifat *top down*, meskipun ketentuan yang ada menyatakan bahwa keterlibatan warga desa sebagai penerima bantuan sangat diharapkan.
4. Peran kepala desa sangat dominan dalam pelaksanaan program, karena kepala desa sebagai aparat pemerintah berkewajiban sebagai penanggung jawab pembangunan.



4. Tindakan penerima bantuan terhadap bantuan yang diterima sangat bervariasi, hal ini disebabkan oleh pemaknaan bantuan peningkatan pendapatan juga sangat bervariasi, makna tersebut meliputi:

a. Dari sisi pemberi bantuan, bantuan peningkatan pendapatan dimaknakan sebagai berikut:

- 1) sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat lemah agar dapat mandiri,
- 2) pancingan untuk mengambil hati masyarakat guna mendukung program pemerintah,
- 3) sarana untuk mempertahankan kedudukan atau jabatan bahkan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi bila berhasil (pamong desa),
- 4) sarana untuk mendapatkan tambahan penghasilan (pengelolaan program).

b. Makna yang diberikan oleh penerima bantuan (individu) meliputi:

- 1) bantuan peningkatan pendapatan merupakan sarana agar masyarakat agar masyarakat mendukung setiap kebijakan pemerintah.
- 2) bantuan peningkatan pendapatan merupakan sesuatu yang menguntungkan Kepala Desa dalam melaksanakan kewajiban sebagai aparat.
- 3) bantuan dianggap sebagai beban bagi yang menerima.
- 4) bantuan peningkatan pendapatan untuk menambah penghasilan.
- 5) bantuan peningkatan pendapatan hanya untuk dinikmati kerabat pamong desa.

5. Pemaknaan bantuan peningkatan pendapatan ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ditandai oleh karakteristik penerima bantuan sendiri. Faktor eksternal ditandai oleh strategi program bantuan termasuk pasar, dan organisasi pengelola program.
6. Karakteristik penerima bantuan terkait erat dengan budaya sebagai cara hidup. Pada warga desa sebagai penerima bantuan ditengarai ada empat macam karakteristik. Mereka mendapat sebutan: (1) *tiyang manutan*, *tiyange pak lurah*; (2) *tiyang ulet*, *tiyang sregep*; (3) *tiyang keset*, *tiyang nglokro*; dan (4) *tiyang sae*.
7. Prosedur pemberian bantuan berdampak pada pemaknaan penerima bantuan terhadap bantuan yang diberikan.
8. Keberadaan pasar secara tidak langsung berdampak pada pemaknaan terhadap bantuan tersebut.
9. Keberadaan organisasi (lembaga) pengelola (pelaksana) bantuan, menjadi salah satu faktor yang mendasari pemaknaan kelompok penerima bantuan terhadap bantuan yang diterimanya.
10. Dalam memanfaatkan bantuan, timbul rekayasa perilaku social-ekonomi, dan prestise, bagi warga yang pandai membaca peluang (*tiyang ulet*).

Disertasi ini menemukan proposisi sebagai berikut:

- a. Makin kuat dominasi elit penguasa menyebabkan makin banyak program yang ditentukan dari atas, dampaknya pembangunan dimaknakan negatif oleh penerima bantuan.
- b. Keberadaan pasar yang ditunjang oleh tersedianya infrastruktur akan mendorong penerima bantuan

menindaki program peningkatan pendapatan secara positif.

c. Makna bantuan peningkatan pendapatan ditentukan oleh karakteristik perilaku si penerima bantuan.

1) *Tiyang Manut*, memaknakan bantuan peningkatan pendapatan sebagai sesuatu yang menguntungkan Kepala Desa untuk melaksanakan kewajiban sebagai aparat.

2) *Tiyang Ulet*, memaknakan bantuan peningkatan pendapatan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan dan bermanfaat untuk dirinya.

3) *Tiyang Kesed, Nglokro*, memaknakan bantuan merupakan beban bagi yang menerima.

4) *Tiyang Sae*, memaknakan bantuan peningkatan pendapatan sebagai sesuatu yang hanya untuk dinikmati kerabat pamong desa.

Selain itu bantuan peningkatan pendapatan dari pemerintah dimaknakan sebagai sarana untuk mengambil hati masyarakat agar masyarakat mendukung setiap kebijakan pemerintah.

## 7.2. Implikasi Penelitian

Secara akademik temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan analitik-informatik bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya teori sosiologi pembangunan dan lebih khusus lagi sosiologi pedesaan. Mengingat selama ini

penelitian yang dilakukan pada umumnya lebih terfokus pada perilaku yang tampak, serta keterkaitan diantara berbagai komponen dari pembangunan.

Di samping itu, temuan penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para perencana dan pelaksana pembangunan terutama dalam memilih strategi yang tepat dalam melakukan pembangunan umumnya dan pemberian bantuan peningkatan pendapatan khususnya, dengan unit analisis individu penerima bantuan.

Mengacu pada kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa implikasi penelitian baik secara teoretik maupun praktik.

#### 7.2.1. Implikasi Teoretik

Salah satu paradigma pembangunan adalah paradigma yang berorientasi (berpusat) pada rakyat, paradigma ini menekankan pada partisipasi masyarakat. Faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah kelayakan program (bantuan) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. David Korten dan Syahrir (1984), dalam bukunya yang berjudul *People Centered Development: Contribution toward Theory and Planning Framework*, menyatakan bahwa ada tiga faktor yang menentukan kelayakan program yaitu: program itu sendiri, penerima program (bantuan), dan organisasi.

Temuan di Desa Bronjong, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi atau menentukan keberhasilan program bantuan peningkatan pendapatan tidak hanya tiga faktor tersebut, melainkan ada faktor lain yang cukup penting untuk diperhitungkan yaitu keberadaan pasar baik dalam arti fisik maupun pasar dalam arti informasi.

Peneliti tidak menempatkan pasar sebagai komponen tersendiri, karena keberadaannya sangat erat dengan program bantuan (pembangunan). Seorang perencana program dalam membuat suatu program peningkatan pendapatan senantiasa memperhitungkan juga pasar yang dapat digunakan untuk memasarkan hasil program peningkatan pendapatan tersebut. Oleh karenanya peneliti memasukkan pasar dalam komponen program.

Kesimpulan ini didasarkan bahwa program peningkatan bantuan sebagai salah satu program pembangunan, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kelompok sasaran. Kesemuanya itu terkait erat dengan masalah hasil produksi dan pada gilirannya berkenaan dengan uang.

Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mendapatkan uang adalah memasarkan produksi (hasil pengelolaan bantuan peningkatan pendapatan) melalui pasar. Meskipun mereka berhasil meningkatkan produksi, namun bila barang yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan, karena tidak tersedianya pasar yang dapat menjadi wadah pemasaran, menyebabkan bantuan tersebut kurang memberikan manfaat bagi penerimanya. Disinilah pentingnya pasar dalam menunjang keberhasilan program bantuan peningkatan pendapatan.

Dari berbagai komponen yang mempengaruhi kelayakan suatu program bantuan peningkatan pendapatan inilah orang (penerima bantuan) dapat memberikan makna yang beragam terhadap bantuan peningkatan pendapatan.

Teori Korten tentang kelayakan program dengan tiga komponen kelayakan program, akan sesuai bila diterapkan pada pembangunan fisik, namun bila diterapkan dalam pembangunan ekonomi (peningkatan pendapatan), keberadaan pasar sebagai salah satu aspek dalam komponen program sangat diperlukan untuk menentukan apakah program peningkatan bantuan tersebut layak atau tidak.

Baik Rachbini, Penny maupun Nasikun, menyatakan bahwa ekonomi pasar, sistem pasar, kebijaksanaan harga akan menyebabkan kesengsaraan bagi lapisan penduduk miskin, karena kemampuan berkompetisi tidak mereka miliki.

Dalam melihat pasar memang lebih ditekankan pada keberadaan pasar baik secara fisik maupun informatik) sebagai sarana untuk menjual hasil pemanfaatan bantuan peningkatan pendapatan yang telah diterima warga desa. Oleh karenanya peneliti tidak membandingkannya dengan "pasarisasi" dari Penny, "kebijakan harga " dari Nasikun, atau "ekonomi pasar" menurut Rachbini.

Peneliti sependapat bahwa model dari ketiga pakar tersebut dapat terjadi menyempang model tersebut tidak didukung oleh keberadaan infrastruktur baik fisik maupun kelembagaan yang memadai. Namun bila infrastruktur baik fisik, kelembagaan dan perundangan dipersiapkan untuk lebih

banyak memihak kepada golongan miskin, maka pasar akan bermanfaat dalam mengentas mereka dari kemiskinan.

Peneliti sependapat dengan Grobowshi bahwa keberadaan pasar domestik merupakan langkah awal yang harus diperhatikan sebelum terjadi penetrasi pasar internasional. Ini menunjukkan bahwa keberadaan pasar baik secara fisik maupun informatif perlu diperhatikan. Ini juga senada dengan pendapat Tornquist.

Temuan lain dari penelitian ini adalah karakteristik perilaku masyarakat desa (penerima bantuan) ditengarai dengan beberapa sebutan yaitu: *tiyang manut*, *tiyang ulet*, *tiyang kesed*, dan *tiyang sae*, temuan ini mirip dengan konsep budaya dari Thompson (1990), yang menyatakan bahwa ada lima budaya sebagai cara hidup yaitu budaya *hirarki*, *individualistik*, *egalitarian*, *falistik*, dan *hermit*.

Peneliti tidak menyatakan bahwa lima macam budaya dari Thompson itu terdapat di desa penelitian, namun paling tidak ada unsur-unsur yang mirip, seperti *tiyang manut* dan budaya *hirarki* memiliki kemiripan dalam hal kepatuhan pada atasan, budaya *individualistik* dengan *tiyang ulet* ada kemiripan dalam mencari keuntungan sendiri, *tiyang sae* dengan *egalitarian* ada kemiripan dalam hal membela kelompok, serta *tiyang kesed* dengan *fatalistik* ada kemiripan dalam hal tidak mau berusaha untuk berkembang.

Perbedaannya seperti *tiyang sae*, tidak selamanya menolak regulasi, karena hubungan *patron-client* masih lekat dalam kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Demikian

pula dengan *tiyang ulet*, *sregep*, meskipun dalam dirinya sikap mencari keuntungan untuk diri sendiri kuat, namun dia tidak dapat lepas dari lingkungannya terutama adanya nilai gotong royong yang masih tertinggal di masyarakat pedesaan.

Fenomena yang timbul adalah timbulnya kecenderungan untuk memanfaatkan bantuan namun tetap menjaga gengsi (*prestise*) agar tidak diketahui orang lain ("*Social-economic engeneering*"), terutama pada kelompok *tiyang sregep (ulet)*, dan *tiyang manutan*.

Apalagi untuk budaya *hermit*, dapat dikatakan tidak terdapat di desa penelitian, karena memang tidak ada warga yang hidup terisolasi dari lingkungannya. Perbedaan ini salah satunya disebabkan karena perbedaan *structural*, *natural* dan *cultural* lokasi penelitian.

Peneliti sependapat dengan Thompson tentang budaya, karena peneliti melihat bahwa meskipun mereka (penerima bantuan) berada dalam suatu wilayah yang sama, ternyata perilakunya menunjukkan perbedaan terutama dalam menyikapi (menindaki) suatu rangsangan yang sama. Dengan kata lain budaya sebagai cara hidup tidak berlaku secara universal, namun lebih bersifat individual dan dipengaruhi oleh hubungan sosial baik dengan kelompok formal maupun informal.

Dilihat dari strategi pembangunan sendiri tampak bahwa dominasi elit penguasa (*apararat*) sangat kuat dalam perencanaan program, yang pada gilirannya berdampak dalam pemaknaan terhadap program (*bantuan*) yang diluncurkan kepadanya.



Dalam era orde baru kata pembangunan menjadi paradigma dan ideologi utama dan dominan. Demi pembangunan semuanya harus tunduk. Sehingga menempatkan kaum miskin yang awalnya dituju akan mendapat keuntungan utama dari program pembangunan (bantuan) kenyataannya justru dimarginalisasikan secara ekonomi oleh proses pembangunan itu sendiri. Kaum miskin didominasi dan dikontrol baik melalui cara *coersion* maupun melalui hegemoni sehingga mereka secara sukarela "terpaksa" menerima kesengsaraan mereka. Pembangunan seakan hanya merupakan "bungkus baru kue lama Kapitalisme".

Peneliti sependapat dengan Fakih yang menyatakan bahwa "pembangunan dan lembaga-lembaga yang bekerja untuk pembangunan telah gagal memenuhi janjinya". Karena banyak kaum miskin yang seharusnya menjadi aktor dalam pembangunan justru teralienasi oleh program pembangunan itu sendiri. Untuk itulah perlu dilakukan reorientasi pembangunan.

Dekonstruksi diskursus *Developmentalisme* dengan visi baru perlu dilakukan dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* seperti yang dinyatakan oleh Chambers, sehingga keberpihakan pada rakyat miskin lebih diperhatikan.

Bila dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif melalui interaksi simbolik dan etnometodologi untuk mengungkap makna "tindakan" aktor (penerima bantuan) dalam memperlakukan bantuan peningkatan pendapatan. Karena pada dasarnya peneliti melihat bahwa tindakan seseorang (penerima bantuan) tidak lepas dari lingkungannya. Seperti yang

dikatakan oleh Ritzer makna dibentuk dari hasil interaksi dengan lingkungan sosialnya, dan bukan sekedar proses mental.

Peneliti sependapat dengan Ritzer, bahwa pemaknaan terhadap sesuatu objek lebih ditentukan oleh hasil interaksi dengan lingkungan sosial. Meskipun yang bersangkutan (aktor) belum pernah memanfaatkan (menerima) secara langsung objek yang dimaknakan, namun melalui interaksi dan sosialisasi dengan orang yang terkena objek itu, seseorang dapat memberi makna terhadap objek tersebut.

Proses kebersamaan ini dapat terjadi karena dalam memandang suatu gejala yang dialami, bisa dialami oleh orang lain sebagaimana dia mengalaminya. Dia beranggapan bahwa makna terhadap suatu gejala, sama dengan makna yang diberikan oleh lain terhadap gejala tersebut.

Peneliti tidak sependapat dengan Philipppson (1972) yang menyatakan bahwa Etnometodologi ditujukan pada proses interaksi sosial serta bagaimana pelaku yang terlibat di dalamnya bisa berinteraksi dan memahami proses itu sendiri. Philipppson beranggapan bahwa etnometodologi seakan-akan hanya memperhatikan bahasa atau percakapan yang ada diantara para pelaku dan tidak memperhatikan tindakan para pelaku. Bahasa merupakan alat untuk membangun kenyataan sosial dan sarana untuk mengkomunikasikan kenyataan sosial serta makna yang dimiliki oleh para pelaku yang terlibat dalam suatu interaksi.

### 7.2.2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, terutama dalam memilih strategi pembangunan yang akan digunakan.

Mengacu pada temuan penelitian, bahwa ada tiga faktor plus yang berpengaruh pada kelayakan suatu program, yaitu program yang disertai pasar, penerima bantuan dan organisasi, maka para pengambil kebijakan dalam memilih strategi pembangunan diharapkan memperhatikan ketiga faktor plus bagi kelayakan program tersebut.

Meskipun secara teori program pemberian bantuan dan pembangunan pada umumnya diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat, namun konsep partisipasi dikalangan aparat diartikan sebagai kemauan untuk mendukung secara mutlak program yang telah dirancang oleh pemerintah.

Disini ditemukan bias yang mendasar tentang konsep partisipasi itu sendiri, karena di dalamnya terkandung maksud bahwa masyarakat hanya dijadikan objek dalam pelaksanaan program. Perencana program tidak memperhatikan potensi yang ada pada masyarakat, termasuk potensi untuk mengembangkan dirinya sendiri. Ini salah satu indikator bahwa program pembangunan hanya memperhatikan kepentingan pemerintah dan bukannya kepentingan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu bagi para pengambil kebijakan hendaknya dalam melaksanakan program pembangunan untuk meningkatkan

taraf hidup masyarakat (desa), hendaknya dapat menerapkan konsep partisipasi secara tepat, bukan hanya slogan semata.

Salah satu pendekatan yang perlu diperhatikan dalam melakukan kajian pembangunan di pedesaan adalah dengan memahami desa secara partisipatif (*Participatory Rural Appraisal*), karena melalui pendekatan ini masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dana kebijakan secara nyata.

Untuk melaksanakan pendekatan ini perlu dilakukan kegiatan seperti: (1) Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan masyarakat. (2) Mengembangkan alternatif pemecahan masalah, sejalan dengan kebutuhan dan potensi desa. (3) Mengenali faktor kendala dan sumber pendukung. (4) Menyusun program pembangunan sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, dan (5) Melakukan pemantauan dan penilaian secara terlibat dan berkesinambungan. Semua kegiatan tersebut dilakukan bersama antara aparat (penyandang dana), warga masyarakat, dan bila mungkin bersama pendamping.

Untuk menunjang keberhasilan program pembangunan di pedesaan, dan khususnya program peningkatan pendapatan masyarakat desa, keberadaan infrastruktur sangat diperlukan. Infrastruktur dalam hal ini bukanlah bangunan fisik semata (jalan, jembatan, irigasi, listrik), melainkan infrastruktur yang lebih luas seperti kelembagaan dalam arti ekonomi dan sosial, serta perundangan yang lebih memihak kepada rakyat kecil diterapkan secara tepat.

# DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Taufik (Ed), 1993. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES
- Adjid, Dudung Abdul, 1985. "Pola Partisipasi masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Pertanian Berencana (Kasus Usahatani Berkelompok Sehamparan dalam Insus Padi, suatu survai di Jawa Barat)". *Desertasi UNPAD Bandung*
- Ahimsa, Putra Heddy Shri, 1985. *Etnosains dan Etnometodology: Sebuah Perbandingan, dalam Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-ilmu Sosial*. Agustus 1985 Jilid XII No.2. Jakarta: LIPI
- Alfian, 1986. *Transformasi Sosial Bydaya dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI Press
- Alfian dan Nazarudin Syamsudin, 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Grafiti
- Alhabsyi, Taher, 1992. *Pemanfaatan Inpres Dana bantuan Desa Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Prospeknya*. Laporan Penelitian Universitas Brawijaya Malang.
- Ali, Saleh, 1986. *Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Program Penghijauan dan reboisasi*. Lembaga Penelitian Universitas Hasanudin Ujung Pandang.
- Allen, V.L., and J.M.Levine, 1985. "Social Support and Conformity: The Role of Independent Assersment of Reality". *Journal of Experiment Social Psychology*, No.7: 48-58.
- Amaludin, Mohamad, 1987. "Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi kasus di Desa Bulugede Kab. Kendal Jawa Tengah". *Tesis IPB Bogor*.
- Ampang, Jacob, 1984. "Identifikasi dan Analisis Faktor Sosial Ekonomi Yang mempengaruhi Pendapatan Petani Miskin di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan". *Tesis FPS UGM Yogyakarta*.
- Arfani, 1987. "Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Tani Dalam Penerapan Pancausaha Tanaman Padi Usaha (Studikasu Kelompok Tani Kab. Lampung Tengah Prop. Lampung)". *Tesis IPB, Bogor*.
- Ariadi, Endang Suwarno, 1993-1995. *Pengembangan Paket Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Rangka meningkatkan Peran Wanita dalam Pengelolaan Lingkungan Melalui PKK di Pedesaan*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing II, Ditbinlitamas Ditjen Dikti. IKIP Surabaya

- Atmoko, Tjipto, 1987. "Persepsi Penduduk Setempat terhadap Proyek Perkebunan Inti Rakyat: Studi Kasus Tentang Pembebasan Tanah dan Perubahan Ekonomi Petani di Proyek PIR Khusus I Sintang Kalimantan Barat". Tesis. UGM Yogyakarta
- Aves, P. and D. Byrne, 1976. *Evaluating Adoptive Parents: Attitude Similarity and Topic Relevance*. Purdue University
- Azman, Sjamsidar, 1987. "Partisipasi kelompok tani Dalam Pengembangan KUD". Tesis. IPB Bogor
- Babbie, Earl R, 1982. *Understanding Sociology: A Context for Action*. California: Wadsworth Belmont
- Baiquini, 1995. Pendekatan dan Metode Participatory Action Research (PAR) dalam Nurimansjah, Hasibuan (Ed), *Metode Alternatif Pengentasan Kemiskinan*. Palembang : Universitas Sriwijaya
- Barnes, J.A., 1954. *Class And Committees in A Norwegian Island Parrish*. *Human relation* Volume 7, hal. 34-58.
- Barudi, Rudin, 1986. *Faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Modernisasi*. Lembaga Penelitian Universitas Hasanudin Ujung Pandang.
- Basyaah, Ali Amin, 1993. *Konsep Perencanaan Pembangunan di Daerah*. Jakarta: Kerjasama UNSYIAH dan DEPDAGRI BAPPENAS
- Baswedan, Rasyid, 1986. "Ciri-ciri Tenaga Kerja Di Daerah Pedesaan: Studi Kasus di Dukuh Yapak Daerah Istimewa Yogyakarta". Tesis. UGM Yogyakarta.
- Baswir, Revrison, 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IDEA.
- Benson, Douglas dan Jon A. Hughes, 1983. *The Perspective of Ethnomethodology*. London and New York: Longmann
- Berger, Guy, 1992. *Structural and Rural Development in third World* Review dalam *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 44, No. 1, October 1995
- Berger, Peter, L., 1976. *Pyramids of Sacrifice. Political Ethics and Sosial Change*. New York: Anchon Press
- Berger, Peter, dan Luckmann Thomas, 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, diterjemahkan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES

- Berkovitz, L. and J.T. Aliotto, 1973. "The Meaning Of An Observed Event as A Determinant of Its Aggressive Consequencer". *Journal of Personality and Social Psychology*. No. 28: 206-217.
- Bertrand, Alvin L, 1967. *Basic Sociology: An Introduction to Theory and Method*. New York: Meredith Publishing Company
- Blummer, Herbert, 1969. *Symbolic Interaction: Perspective and Method*. NJ: Prentice Hall, Englewood Cliffs
- Boeke, JH, 1980. *Prakapitalis di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Bogdan, Robert C, dan Sari Knop Biklen, 1982. *Qualitative Research for Education*. New York: Allyn and Bacon Inc. Englewood Cliffs
- Bottomore, TB. dan Maximilen Rubel, 1956. *Karl Marx, Selected Writing in Sociology and Social Philosophi*. London: CA, Watts and Co.
- Broom, Leonard dan Philip Selznick, 1957. *Sociology: A tex With Adapted Readings*. New York: Row. Peterson and Company
- Bryant, Coralie and White, Louise, G., 1987. *Managing Development In The Third World*. Colorado: West View Press, Boulder
- Bryant, C., 1989. "Enterpreneurs in the Rural Environment". *Journal of Rural Studies*. No. 5: 337-348
- Budiman, Arief & Quarles van Ufford (ed), 1988, *Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
- \_\_\_\_\_, 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia
- Campbell, Tom, 1994. *Tujuh Teori Sosial*, Diterjemah oleh F. Hari Budiman. Yogyakarta: Kanisius
- Cargan, Leonard dan Jeanne H Ballantine, 1985. *Sociological Footprint: Introductory Reading in Sociology*. California: Weadworth, Belmont
- Chambers, Robert, 1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES
- \_\_\_\_\_, 1996. *Participatory Rural Appraisal* . Yogyakarta: Kanisius



- Collier, William, 1980. *Declining Labor Absorption in Javanese Rice Production*. Bogor: SAE
- Collier, William, dan kawan-kawan, 1996. *Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Conyers, 1984. *An Introduction to Social Planning in Third World*. John Wiley Sons.
- Cooke, P. (ed)., 1989. *Localities, The Changing Face Of Urban Britain*. London: Unwin Hyman
- Dillon, HS., dan Hermanto, 1993. *Kemiskinan di Negara Berkembang: Masalah Konseptual dan Global*. Prisma No.3 Th. XII/1993, Jakarta: LP3ES. Hal. 11-21
- Djaenuri, M Aries, 1989. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tumbuli". *Tesis*. UI Jakarta.
- Dressrose, Gouter, 1994. "Decreasing Assistance To Agriculture in Developing Countries: Change of Paradigm or Temporary Sag? ". *Agricultural and Rural Development*. Vol.I No.I, hal. 8-12.
- Effendi, Sofyan, 1986. "Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru". *Prisma No. 12*. Jakarta: LP3ES
- Effendi, Tadjuddin N. dan Chris Manning, 1991. *Rural Development Non-farm Employment in Java*. Hawaii: Resources System Institute, East West Centre
- Erler, Brigitte, 1989. *Bantuan Yang Mematikan*. diterjemahkan oleh Hanafi. Jakarta: LP3ES
- Fakih, Mansour (1997). *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Featherstone, 1995. *Global Modernities*. London, New Delhi: Sage Publication
- Foster, George M, 1967. "Introduction: What is a Peasant?" dalam Jack, M.Potter (Ed), *Peasant Society*. Bpston: The Little, Brown and Company, hal.2-14
- Frank, Andre Gunder, 1969. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America-historical Studies of Chili and Brazil*. New York: Modern Reader Paper Backs
- Friedman, David, 1988. *The Misunderstand Miracle Industrial Development and Political Change in Japan*. Ithaca New York: Cornell University Press.

- Friedman, J. and Alonso (Ed), 1979. *Regional Development And Planning*. Cambridge: A Reader
- Freire, Paul, 1985. *Pendidikan Untuk Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES
- Gadamer, H., 1975. *Truth and Method*. London: Sheed and Ward
- Garna, Judistira K., 1993. *Tradisi Transformasi Modernisasi dan Tantangan Masa Depan di Nusantara*. Bandung: PPS Unpad
- Geertz, Clifford, 1970. *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*. University of California Press.
- \_\_\_\_\_, 1989. *Penjaja dan Raja*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- \_\_\_\_\_, 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Refleksi Budaya
- Giddens, Anthony & Turner Jonathan (Ed), 1988. *Social Theory Today*. California: Stanford University Press
- Glaser, Berney G, dan Ansel L Strauss, 1967. *The Discovery of Grounded Theory*. Chicago: Aldine
- Glewwe, Paul, 1989. *The Poor in Latin America during Adjustment: A Case Study of Peru*. Living Standards Measurement Study Working Paper 56, Washington, D.C.: World Bank.
- Goni, Jourdan, 1984. "Hubungan antara Peranan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan di Minahasa". Tesis, UGM Yogyakarta.
- Grabowski, Richard, 1995. "Commercialization, Non-agricultural Production, Agricultural Innovation, and Economic Development". *The Journal of Developing Areas*. Vol. 30 No.1 October 1995, hal. 41-62
- Grand, Guy, 1983. *Development by People*. Praeger Special Studies, Praeger Publishers USA.
- Griffitt, W. and T. Jackson, 1970. "The Influence of Ability and Non Ability Information on Personal Selection Decisions". *Psychological Report*. No. 27: 959-962
- Hage, Jerald dan Charles H. Powers, 1994. *Post Industrial Lives: Role and Relationships in the 21st Century*. London, New Delhi: Sage Publication

- Hagul, Peter (Ed), 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat* (Terjemahan). Jakarta: Rajawali Press
- Hasan, M.Z. 1989. *Modernitas Individu yang Berorientasi Kepada Pembangunan di Indonesia*. Forum Penelitian IKIP Malang th. 1, Nomor 1.
- Hayami, Yujiro dan Toshihiko, Kawagoe, 1993. *The Agrarian Origins of Commerce and Industry: A study of Peasant marketing in Indonesia*. New York: St. Martin's Press
- Hermassi, Elbaki, 1978. *Changing Pattern in Research on The Third World*. *Annual Review of Sociology* 4.
- Hoogvelt, M.Ankie M., 1981. *The Sociology of Developing Societies*. London: The Macmillan Press LTD
- Hossain, Mahahub dan Sen Binayak, 1992. "Rural Poverty: Trends and Determinants". *Asian Development Review*. Vol.10 No.1 1992 hal 1-34)
- Huntington, Samuel, 1976. *The Change to Change: Modernization, Development, and Politic* dalam Cyril E. Black (ed). *Comparative Modernization*. New York: The Free Press.
- Hussin, Muhammad, 1992. *Dampak Dana Bantuan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa, Studi di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie*. Laporan hasil penelitian, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
- Ihromi, T.O., 1981. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia
- Inkeles, Alex, 1983. *Exploring Individual Modernity*. Columbia, New York: University Press.
- Jazairy, Idriss dan kawan-kawan, 1992. *The State of World Rural Poverty: An Inquiry into Causes and Consequences*. Review dalam *Economic Development and Cultural Change*. Volume 44, No. 1, October 1995
- Jolly, R., 1983. "Redistribusi dan Pemerataan", dalam The Kian Wie (Ed). *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*. Jakarta: LP3ES
- Keesing, Roger, M., 1981. *Cultural Antropology: A Contemporary Perspective*. Sidney: CBS Publishing Asia Ltd.
- Koentjaraningrat, 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- \_\_\_\_\_, 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
- Korten, D.C., dan Sjahrir, 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Korten, David, C. dan Klauss, Rusdi, 1984. *People Centered Development. Contribution Toward Theory and Planning Frameworks*. Kumarian Press.
- Kretch, D. dan R.S. Crutfield, 1977. *Perceiving The World: The Process and Effects of Mass Communication*. University of Illinois Press
- La Belle, Thomas, J., 1976. *Nonformal Education and Social Change in Latin America*. Los Angeles: UCLA Latin American Center Publications University of California
- Lauer, Robert H., 1989. *Perspectives on Social Change*. diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta: Bina Aksara
- Lea, David A.M dan D.P. Chaudhri, 1983. *Rural Development and The State*. London and New York: Methuen
- Lenski, Gerhard, 1970. *Human Society*. New York: McGraw Hill Books Co.
- Lincoln, Yvonna S, dan Egon G Guba, 1985. *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park California: Sage Publication Ltd.
- Lofland, John dan Lyn H. Lofland, 1984. *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont California: Wadsworth Publishing Company A Division of Wadsworth, Inc.
- Long, Norman, 1987. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Bina Aksara
- Longwee, Sarah, 1990. *Women's Participation Criteria*. UNICEF, Participation Manual
- Mar'at, 1988. *Perubahan Sosial*. Fakultas Pasca sarjana Unpad Bandung.
- Mardimin, Johannes, 1994. *Pandangan dan Sikap Hidup Orang Jawa*. Dalam Kritis. No. 1 Th.IX Juli-September 1994
- Mishra, Ramesh and Honjo, M., 1981. *Changing Perception of Development Problems*. Hongkong: Maruzen, Asian
- Mubyarto, 1991. *Etos Kerja dan Kohesi Sosial: Masyarakat Sumba, Rote, Sabu dan Timor Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta: P3PK-UGM

- \_\_\_\_\_, 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta: Aditya Media
- Mulder, Niels, 1981. *Kepribadian Orang Jawa*. Yogyakarta: Sinar Harapan dan Gajah Mada University Press
- Munandar, Utami, 1981. *Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga, Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Munch, Richard, 1989. "Code, Structure and Action: Building a Theory of Structuration from a Parsons Point View" dalam Turner, JH (Ed). *Theory Building in Sociology*. Newbury Park California: Sage Publication
- Murphy, Kevin, M., Andre Shleifer dan Robert Visluy, 1989. "Income Distribution, Market Size and Industrialization". Dalam *Quarterly Journal of Economics*. No.04, August 1989: 537-564.
- Nasikun, 1995. "Pengembangan Tenaga Off-Farm Dalam Pemecahan Masalah Ketenagakerjaan dan Kemiskinan Pedesaan". *Sintesis*. No. 12 Th. 3, Juli-Agustus 1995.
- Ndraha, 1990. *Taliziduhu, 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nordholt, Nico Schulte, 1987. *Ojo Dumeh: Kepemimpinan Lokal Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Harapan
- Nurdin, Thamrin, 1993. "Profil Sumberdaya dan Kemiskinan Komunitas Desa Nelayan". Dalam Chairul A.R. Irzal Kamaruddin, *Prospek IDT Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Nelayan*. Padang: Faperta UNPAD
- Parikh, Alka dan Thorbecke Erik, 1996. "Impact of Rural Industrial on Village Life and Economy: A Social Accounting Matrix Approach". *Economic and Development and Cultural Change*. Vo.44, No. 2 January 1996.
- Penny, David, H., 1990. *Kemiskinan dan Peranan Pasar*. Jakarta: UI Press
- Phillipson, M., 1972. *Phenomenological Philosophy and Sociology*. dalam *New Directions in Sociological Theory* oleh Filmer, et. al. (eds). London: Collier McMillan.
- Poespowardojo, Soerjanto, 1993. *Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Budaya. Sebuah Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Grasindo
- Poloma, Margaret M, 1987. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

- Prayitno, Hadi dan Arsyad Lincoln, 1987. *Petani Desa dan Kemiskinan*. Yogyakarta: BPF
- Prayitno, Hadi dan Budi Santoso, 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Protes, Kelompok Penerima IDT. Surabaya Post, Jumat 30 Juni 1995, hal: 5
- Rahardjo, Dawam, 1992. "Keswadayaan dalam Pembangunan Sosial Ekonomi". Dalam *Pengembangan Swadaya Nasional: Tinjauan ke Arah Persepsi yang Utuh*. Jakarta: LP3ES
- Redfield, Robert, 1985. *Masyarakat Petani dan Kebudayaan* diterjemahkan dari *The Little Community Peasant Society and Culture (1956)*. Jakarta: Rajawali
- Peet, Richard, 1991. *Global Capitalism : Theories of Societal Development*. London and New York: Roudledge
- Poppe, Manfred, 1997. "Decentralized Development Planning in Indonesia: Linking Organization Structure and Planning Strategy". *Spring Research Series No. 15*. Dortmund.
- Richter, Jr, M.N., 1987. *Exploring Sociology*. Illionis: FE Peacock Publisher
- Ritzer, George (Ed), 1990. *Frontiers of Social Theory*. New York: Columbia University Press
- \_\_\_\_\_, 1988. *Contemporary Sociological Theory*. second edition. New York: Alfred A Knopf.
- \_\_\_\_\_, 1992. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Diterjemahkan oleh Alimandan Jakarta: Rajawali
- Roesminingsih, MV., 1994-1996. *Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Industri Rumah Tangga di Pedesaan*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi III Ditbintitabmas Ditjen Dikti. IKIP Surabaya
- Rogers, Everette, M, and Shoemaker, F.F. 1971. *Communication of Innovation A Cross Cultural Approach*. New York : The Free Press
- Rogers, 1969. *Modernization Among Peasants, The Impact of Communication*. New York: Reinhart and Winston Inc.
- Roupps, Phillip, 1983. *Approach To Community Development*. The Hague
- Sajogyo dan Pujiwati Sajogyo, 1989. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Sanderson, Stephen K, 1993. *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Schatzman, Leonard & Anselm Strauss, 1973. *Field Research: Stratifies for A Natural Sociology*. New Jersey: Prentice Hall., Inc.
- Schoorl, J.W., 1988. *Modernisasi. Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Schultz, Alfred, and Luckmann, Thomas, 1973. *The Structure of Life World*. Evanston, III: Northwestern University Press.
- Shanin, Theodore, 1971. "Peasant As Political Factor", dalam Shanin Theodore (ed), *Peasant And Peasant Societies*. Punguin Modern Reading, Harmonds Worth, hal. 238-263.
- Siagian, HH., 1995. "Pembangunan Infrastruktur Pedesaan" dalam *Sintesis*. No.12 Th. 3. Agustus. Hal. 47-53.
- Sihombing, Marlon, 1992. *Dimensi Pembangunan Masyarakat desa Melalui Implementasi Proyek Inti Rakyat Perkebunan (Proyek PIR): Suatu Studi Kasus Pada Proyek PIRBUN ADB Besitang Langkat Sumatera Utara*. Penelitian Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sobari, Mohamad, 1986. *Orang Jawa di Tanjung Pinang: Potret Keluarga Tukang Ojek*, Lembaga Riset Kebudayaan Nasional- LIPI, *Majalah Masyarakat Indonesia*. Tahun XIII No. 1 Tahun 1986.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Soedjatmoko, 1986. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Soelaiman, Munandar, M., 1996. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Soemardjan, Selo dan Kennon Breazeale, 1993. *Cultural Change in Rural Indonesia*. Sebelas Maret University Press.
- \_\_\_\_\_, 1992. "Potensi Desa Untuk Membangun", Makalah disajikan pada Semiloka Nasional tentang *Pembangunan Masyarakat Pedesaan Terpadu dan Berkesinambungan*. tanggal 28 Juli 1992
- Soetrisno, Loekman, 1988. *Beberapa Permasalahan Yang Menghambat Pelaksanaan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan*. Makalah disampaikan pada Seminar bulanan P3PK UGM Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius

- \_\_\_\_\_, 1995. "Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Liberalisasi Ekonomi" dalam *Sintesis*. No.12 Th. 3. Agustus. Hal. 39-46.
- \_\_\_\_\_, 1991. "Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan Ekonomi dan Masalah Perbaikan Kehidupan Ekonomi Rakyat Desa". *Kritis*, No.4 Th. V April 1991 Hal. 7-12.
- Soewarsono dan Alvin Y. So, 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Speier, Matthew, 1970. "The Everyday World of The Child", dalam Jack Douglas (ed), *Understanding Everyday Life*. Chicago: Aldine: 188-217.
- Spradley, James, P., 1980. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart & Winston
- Susanto, Astrid S., 1984. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Binacipta
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, 1990. *Basic of Qualitative Research*. Newbury Park: Sage Publication
- Sutrisno, Slamet, 1984. *Sorotan Budaya Jawa dan Yang Lainnya*. Yogyakarta: Andi Offset
- Tan, Melly, G., 1982. *Keadaan Kemiskinan di Daerah Pedesaan (Pokok-pokok Pikiran)*. Dalam Buletin Leknas Nomor 2.
- Thompson, Michael, Ellis Richard and Wildavsky Aaron, 1990. *Cultural Theory*. San Francisco & Oxford: Westview Press, Boulder
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1993 (a). *Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*. Makalah Seminar Bulanan P3PK-UGM, Yogyakarta, 13 September
- \_\_\_\_\_, 1993 (b). *Dalam Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tjondronegoro, Soediono, M.P., Irlan Soejono dan Joan Harjono, 1992. *Trends, Issues, and Policies, Asian Development Review*. Vol. 10 NO.1 th. 1992, hal. 67-90
- Tjondronegoro, Soediono, M.P., dan Gunawan Wiradi, 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Gramedia: Jakarta
- Todayo, Michel, P., 1979. *Economics for A Developing World: An Introduction to A Principles, Problems and Policies for Development*. London: Longman



- Todaro, Michael P., 1983. *Development Planning: Models and Methods*. Oxford University Press, Dar es Salaam
- Toefler, Alvin, 1992. *Gelombang Ketiga*. Bagian kedua. Jakarta: Pantja Simpati
- Tony, Fredian, 1988. *Dinamika Kelompok Tani dan Partisipasi Petani Dalam Program Konservasi Tanah dan Air di Daerah Aliran Sungai Citanduy: kasus Pengorganisasian Petani dalam Kelompok tani Model Farm dan Dampaknya*. Tesis. IPB Bogor.
- Tornquist, 1999. *Politics and Development*. London. Thousand Oaks. New Delhi: Sage Publications
- Ul Haq, Mahbub, 1983. *Tirai Kemiskinan Tantangan Untuk Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
- Yacob, Hasbi, 1993. *Pemanfaatan Uang Bantuan Desa Bagi Peningkatan Pembangunan Masyarakat Desa di Daerah Tingkat II Pidie*. Laporan hasil penelitian, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
- White, Bryant dan Sinaga, R.S., 1978. (Terjemahan) "Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa Barat dalam Hubungannya dengan Kemiskinan Struktural". Dalam Selo Soemardjan (Eds) *Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai*, Sangkala Pulsar Jakarta.
- White, Williams, David C, 1988. *Naturalistic Inquiry Materials*. FPS IKIP Bandung
- Wills, Garry, 1970. *Nixon Agonistes, The Crisis of the Self-Made Man*. Boston: Houghton Mifflin
- Wilson, Olivia, J., 1995. "Rural Restructuring and Agriculture-Rural Economic Linkages a New Zealand study". *Journal of Rural studies*. Vol. 11. No.4 hal. 417-431.
- World Development Report*, 1995. Published for The World Bank. Oxford University Press

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: 1

## Proses Analisis Data (Proses Pengkodean)

Pengkodean merupakan proses memilah, mengkonsepsualisasikan dan menyusun kembali data guna membangun teori melalui data yang telah terkumpul. Ada tiga proses pengkodean, yaitu pengkodean terbuka, pengkodean terpusat, dan pengkodean terpilih.

### 1. Pengkodean Terbuka

1.1. Fenomena: Tindakan terhadap bantuan sebagai dasar pemberian makna terhadap bantuan

### 1.2. Kategori:

1.2.1. Tindakan terhadap Bantuan didasari oleh karakteristik program bantuan.

#### 1.2.1.1. Properti:

Karakteristik program, diantaranya proses pemberian bantuan, perencanaan program, penentuan kelompok sasaran membentuk pandangan terhadap bantuan itu sendiri. Penentuan kelompok sasaran bersifat *top down*, warga (penerima bantuan), belum dilibatkan dalam *rekrutment*, perencanaan program, maupun evaluasi program, dominasi aparat (pamong)

## Lampiran 1 (lanjutan)

sangat besar. Pelibatan warga dalam penentuan kelompok sasaran, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program akan membentuk rasa percaya diri, yang pada gilirannya akan tumbuh rasa memiliki program tersebut.

Demikian pula sesuai tidaknya jenis bantuan dengan kebutuhan warga juga membentuk pandangan terhadap bantuan yang diberikan, yang pada gilirannya juga berdampak pada tingkat kemanfaatan bantuan tersebut. Dalam penentuan jenis bantuan yang akan diberikan, *need assesment* sangat diperlukan, sehingga ada kesesuaian antara kebutuhan dengan program yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

## 1.2.1.2. Dimensi: Perilaku aktor ditandai oleh:

- a. Orientasi dalam menerima bantuan -- lebih didasarkan pada kepatuhan, *sungkan* atau takut pada pimpinan.
- b. Bantuan ditentukan dari atas, keterlibatan kelompok sasaran dalam perencanaan-- rendah
- c. Penentuan kelompok sasaran -- tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, dominasi elit penguasa lebih besar
- d. Memanfaatkan bantuan sekehendak dirinya (tidak sesuai dengan ketentuan yang ada), tampak ada rasa keterpaksaan dalam menerima bantuan.
- e. Bantuan bibit tanaman mati, ternak kurus dan belum berkembang-- tidak terawat.

Lampiran 1 (lanjutan)

- f. Pengembalian modal (angsuran) dalam tempo yang telah ditentukan -- belum dilakukan
- g. Tanggung jawab terhadap bantuan--bervariasi-- rendah.

1.2.2. Kategori: Perilaku terhadap bantuan didasari oleh karakteristik penerima bantuan.

1.2.2.1. Properti:

Penerima bantuan memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut antara lain dalam hal budaya (sebagai cara hidup), menyebabkan perbedaan dalam memandang (menyikapi) bantuan.

Ada penerima bantuan yang memiliki budaya taat pada atasan (loyal kepada atasan), ada masyarakat yang mementingkan diri sendiri, ada pula masyarakat yang mementingkan kelompok (memiliki rasa solidaritas tinggi), sementara ada juga yang menerima hidup, sebagaimana adanya (pasrah).

Budaya sebagai cara hidup berkaitan dengan hubungan dengan atasan dalam hal menerima regulasi tertentu di satu sisi dan hubungan dengan sesama (sosial) di sisi lain. Kuat lemahnya hubungan dengan atasan serta hubungan dengan sesama membentuk jenis budaya tertentu, yang pada gilirannya berdampak pada penyikapan terhadap suatu rangsangan tertentu, termasuk bantuan peningkatan pendapatan.

## Lampiran 1 (lanjutan)

## 1.2.2.2. Dimensi:

1. Sikap pada pimpinan (pamong) --- sangat patuh
  2. Keinginan untuk mempertahankan kedudukan -- kuat
  3. Kedekatan pada pamong -- erat
  4. Perilaku terhadap perintah pamong -- manut
  5. Penolakan -- terselubung
  6. Pengelolaan bantuan -- tidak optimal
- 
1. Perintah pamong yang menguntungkan dirinya -- diterima
  2. Orientasi terhadap perolehan keuntungan -- kuat
  3. Komunikasi dengan dunia luar -- sering
  4. Kesempatan untuk bergaul dengan tetangga -- kurang
  5. Keikutsertaan dalam organisasi sosial -- kurang
  6. Pengelolaan bantuan -- optimal
- 
1. Hubungan dengan pamong -- rendah
  2. Hubungan dalam organisasi -- kurang
  3. Komunikasi dengan dunia luar -- kurang
  4. Sikap terhadap program bantuan -- biasa saja
  5. Pendidikan -- rendah
  6. Pengelolaan terhadap bantuan -- tidak optimal
- 
1. Rasa solidaritas -- tinggi
  2. Sikap terhadap pamong (pejabat) -- negatif
  3. Komunikasi dengan dunia luar -- cukup

Lampiran 1 (lanjutan)

4. Hubungan dalam organisasi -- baik
5. Hubungan sosial -- tinggi
6. Sikap terhadap bantuan -- menolak

1.2.3. Kategori: Perilaku terhadap bantuan didasari oleh karakteristik organisasi pelaksana.

1.2.3.1. Properti:

Keterlibatan warga dalam organisasi, didasari oleh proses pembentukan organisasi tersebut. Organisasi hanyalah nama, tidak didukung oleh aktivitas yang memadai, serta administrasi yang tertib. Organisasi sebagai wadah orang yang memiliki kepentingan sama belum tercermin. Upaya untuk membuat organisasi lebih hidup belum dilakukan, karena keterbatasan pendidikan, pengetahuan tentang organisasi, serta kepatuhan pada pimpinan.

1.2.3.2. Dimensi:

- a. Proses pembentukan organisasi *top down*
- b. Penentuan pengurus-- ditentukan pamong
- c. Hubungan pengurus dengan pamong (kekerabatan) -- kuat
- d. Hubungan dalam organisasi-- tidak intensif
- e. Pemahaman tentang organisasi-- rendah, karena rendahnya tingkat pendidikan
- f. Aktivitas organisasi-- kurang, karena tidak pernah diselenggarakan pertemuan anggota

## Lampiran 1 (lanjutan)

- g. Orientasi pendirian organisasi karena kepentingan pemerintah -- tinggi
- h. Keterlibatan warga dalam pembentukan organisasi -- rendah

1.2.4. Kategori: Perilaku terhadap bantuan didasari oleh keberadaan pasar.

## 1.2.4.1. Properti:

Dalam meningkatkan perekonomian di desa, keberadaan pasar sangat diperlukan. Pasar tidak hanya secara fisik (bangunan gedung atau kompleks pasar), tetapi juga informasi tentang harga serta tempat-tempat pemasaran. Untuk menunjang fungsi pasar, infrastruktur dalam bidang ekonomi dan fisik sangat diperlukan.

## 1.2.4.2. Dimensi:

- a. Keberadaan pasar di desa -- tidak mendukung, pasar secara fisik dan informasi kurang
- b. Mekanisme pertukaran uang di pasar (ramai-tidaknya proses jual beli) produk yang berkaitan dengan bantuan-- rendah,
- c. Transportasi dan komunikasi-- kurang
- d. Kelembagaan ekonomi (koperasi dan Bank)--belum banyak dikenal masyarakat
- e. Peran pemerintah sebagai mediator dalam mencari pemasaran-- rendah



Lampiran 1 (lanjutan)

## 2. Pengkodean Aksial

Tabel  
Matrik Tentang Proses Pengkodean Aksial

No.	Fenomena	Kondisi sebab akibat	Konteks	Kondisi-kondisi Intervening	Strategi aksi-Interaksi	Konsekuensi
1.	Perilaku terhadap program bantuan peningkatan pendapatan	<p>1. Strategi program Proses penentuan kelompok sasaran, Dominasi aparat (pamong)</p> <p>2. Karakteristik penerima bantuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budaya</li> <li>- pendidikan</li> <li>- hubungan dengan pejabat (regulasi)</li> <li>- hubungan dengan lingkungan (kelompok)</li> </ul>	-bantuan dari 3 sumber (IDT, PT Dinas Petermk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai patron client yang masih kental</li> <li>- Takut kehilangan kedudukan</li> <li>- Keberadaan pasar</li> <li>- Tingkat pendidikan</li> </ul> <p>- Hubungan dengan aparat sangat kuat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilaksanakannya perencanaaan top down</li> <li>- Pemasaran hasil pengelolaan bantuan tidak tersedia</li> <li>- Upaya aktor untuk melakukan perintah aparat</li> <li>- Upaya aktor untuk men dapat tambahan penghasilan</li> <li>- Upaya aktor untuk mem perjuangkan warga miskin (sesama)</li> <li>- Upaya aktor menerima apa yang diberikan kepadanya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menerima dengan terpaksa karena takut pada aparat</li> <li>- menolak bantuan</li> <li>- pengelolaan bantuan tidak optimal</li> <li>- hasil dijual murah kepada tengkulak</li> <li>- Menerima karena kepatuhan (mendukung aparat)</li> <li>- Menerima untuk mencari keuntungan bagi dirinya dan keluarganya (ekonomi)</li> <li>- Menolak bantuan dengan maksud aparat bertindak adil</li> <li>- Menerima dengan tanpa beban tanggung jawab</li> </ul>

## Lampiran 1 (lanjutan)

No.	Fenomena	Kondisi sebab akibat	Konteks	Kondisi-kondisi Intervening	Strategi aksi-Interaksi	Konsekuensi
2.	Perilaku aktor dalam organisasi	Kehidupan Organisasi pengelola - dominasi pamong - tingkat pendidikan rendah - kurang berpengalaman dalam berorganisasi	Kelompok Swadaya masyarakat	- Hubungan kerabat dengan perangkat desa - Campur tangan pemimpin formal desa dalam organisasi - Keterlibatan anggota kurang	- Upaya aktor untuk memanfaatkan hubungan kerabat dengan pamong - Upaya aktor untuk memenuhi persyaratan penerimaan bantuan	- menerima bantuan tidak optimal hasilnya - pasif dalam berorganisasi - tidak pernah ada kegiatan

## Lampiran 1 (lanjutan)

### 3. Pengkodean Terpilih

#### 3.1. Kategori Inti:

3.1.1. Dari berbagai karakteristik program yang mendasari perilaku warga dalam menyikapi bantuan, kategori karakteristik program merupakan salah satu kategori inti. Kategori karakteristik program ini meliputi:

- a. Penentuan kelompok sasaran
- b. Jenis bantuan (program)
- c. Tingkat kemanfaatan
- d. Proses pemberian bantuan

3.1.2. Kategori karakteristik penerima bantuan, yang utama meliputi:

- a. Budaya penerima bantuan
- b. Tingkat pendidikan
- c. Komunikasi dengan dunia luar
- d. Interaksi sosial (vertikal dan horisontal)
- e. Kebutuhan hidup
- f. Jenis pekerjaan

3.1.3. Kategori Organisasi Pelaksana, yang utama adalah

- a. Proses Pembentukan organisasi
- b. Aktivitas (fungsi) organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggota
- c. Keberadaan pengurus
- d. Pengetahuan tentang berorganisasi

## Lampiran 1 (lanjutan)

3.1.4. Kategori Karakteristik Pasar yang utama adalah:

- a. Keberadaan pasar di desa
- b. Keberadaan informasi tentang pasar (sesuai produk desa)
- c. Tingkat pertukaran uang di pasar (ramai-tidaknya proses jual beli di pasar) yang berkait dengan produk desa.
- d. Infrastruktur yang mendukung.

Keempat kategori inti (program, penerima bantuan, organisasi, dan pasar) yang terdapat di desa penelitian membentuk perilaku penerima bantuan dalam menyikapi bantuan yang diterimanya. Ini berarti keempat kategori inti tersebut telah berperan dalam membentuk perilaku aktor dalam menerima bantuan yang pada gilirannya juga membentuk makna bantuan pada diri penerima bantuan.

Kategori ini tidak dapat dilepaskan satu persatu karena keempatnya saling melengkapi. Bila program yang diluncurkan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun tidak didukung oleh penerima bantuan, pasar, maupun organisasi pelaksana yang memadai maka program tersebut akan sia-sia. Demikian pula bagi penerima bantuan, kondisi penerima bantuan yang telah memadai perlu didukung oleh program yang sesuai, pasar yang memadai serta organisasi pengelola yang layak. Keempat kategori ini memiliki hubungan fungsional, yang saling mendukung satu dengan lainnya.

Berdasarkan proses pengkodean tersebut dapat disusun proposisi sebagai berikut:

## Lampiran 1 (lanjutan)

1. Makin kuat dominasi elit penguasa menyebabkan makin banyak program yang ditentukan dari atas, dampaknya pembangunan dimaknakan negatif oleh penerima bantuan.
2. Keberadaan pasar yang ditunjang oleh tersedianya infrastruktur akan mendorong penerima bantuan menindaki program peningkatan pendapatan secara positif.
3. Makna bantuan peningkatan pendapatan ditentukan oleh karakteristik perilaku si penerima bantuan.
  - a) *Tiyang Manut*, memaknakan bantuan peningkatan pendapatan sebagai sesuatu yang menguntungkan Kepala Desa untuk melaksanakan kewajiban sebagai aparat.
  - b) *Tiyang Ulet*, memaknakan bantuan peningkatan pendapatan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan dan bermanfaat untuk dirinya.
  - c) *Tiyang Kesed, Nglokro*, memaknakan bantuan merupakan beban bagi yang menerima.
  - d) *Tiyang Sae*, memaknakan bantuan peningkatan pendapatan sebagai sesuatu yang hanya untuk dinikmati kerabat pamong desa.

Selain itu bantuan peningkatan pendapatan dari pemerintah dimaknakan sebagai sarana untuk mengambil hati masyarakat agar masyarakat mendukung setiap kebijakan pemerintah.

**Lampiran: 2****Contoh Profil Empat Karakteristik Penerima Bantuan**

Penggambaran lebih utuh dan detail tentang kehidupan beberapa keluarga penerima bantuan merupakan suatu upaya untuk lebih menjelaskan realita dan mengangkat kepermukaan suatu fenomena sosial. Dalam bagian ini dipaparkan karakteristik empat keluarga penerima bantuan yang memiliki perbedaan dalam menyikapi bantuan peningkatan pendapatan yang diberikan kepadanya, nama yang ditulis dalam paparan ini adalah singkatan dengan maksud untuk merahasiakan identitas sebenarnya. Keempat keluarga tersebut adalah (1) keluarga yang menerima bantuan dan menyikapinya secara baik, namun hasil pemanfaatan bantuan tidak optimal; (2) keluarga penerima bantuan, menerima dan memanfaatkan bantuan secara optimal, ditengarai oleh berkembangnya bantuan yang diberikan kepadanya; (3) keluarga penerima bantuan yang menerima bantuan namun tidak memanfaatkan secara baik, bahkan mengembalikan bantuan kepada pemberi; (4) keluarga yang diberi bantuan tetapi justru menolak bantuan yang diberikan.

1. Tjm. berusia lebih kurang 30 tahun, seorang ibu rumah tangga, anak dari pamong desa. Keluarga Tjm berjumlah enam orang (hidup bersama ayah dan ibunya), terdiri atas Bapak, ibu, dua orang anak, dua orang tua Tjm (kakek dan nenek). Pekerjaan sehari-hari tani, sawah yang dimiliki cukup luas (lebih kurang satu hektar), sawah tersebut

## Lampiran 2 (lanjutan)

cukup luas (lebih kurang satu hektar), sawah tersebut adalah bengkok yang diterima orang tuanya sebagai pamong desa dan sebagian sawah milik keluarga. Menjabat pamong desa sudah sekitar empat puluh tahun, yaitu pada waktu jabatan lurah *dongkol* (mantan kepala desa, yang juga ayah kepala desa saat ini).

Meskipun sawah yang dimiliki tergolong luas, namun karena keadaan tanah kurang mendukung (tandus), menyebabkan hasil yang diperoleh juga tidak optimal. Sawah hanya dapat ditanami padi bila musim penghujan, sedangkan musim kemarau sering kali ditanami tembakau. Bila tanaman tembakau berhasil mereka dapat merasakan keuntungan, tapi menurut Tjm. beberapa tahun terakhir ini tanaman tembakau sering kali gagal, karena musim tidak menentu. Suami bekerja sebagai petani (mengerjakan sawah mertuanya). Sawah hanya ditanami oleh tanaman yang lazim ditanam di desa setempat seperti padi, jagung, kedelai, tembakau (masih secara konvensional). Keluarga ini belum pernah mencoba tanaman lain memiliki nilai jual lebih tinggi, seperti mangga, melon atau tanaman agrobisnis lainnya yang cocok dengan kondisi lahan.

Walaupun dapat dikatakan hasil sawah kurang optimal, tapi paling tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup enam jiwa (satu keluarga), masih berlebihan. Mereka tidak pernah memasarkan hasil panen ke pasar sendiri, tetapi

## Lampiran 2 (lanjutan)

cukup melalui tengkulak yang data ke desa, sehingga tidak terlalu repot, meskipun harganya agak rendah.

Sebagai ibu rumah tangga dan anak dari pamong desa, Tjm. mewakili ibunya untuk mengikuti setiap aktivitas (PKK), meskipun dalam kegiatan tersebut dia cukup berperan dan keikutsertaanya dalam setiap kegiatan (PKK) tidak lain karena jabatan ayahnya dan mandat yang diberikan oleh ibunya (sudah cukup tua), kalau ayahnya tidak sebagai sekretaris desa, dia mengatakan lebih baik dirumah saja. Tjm. merasa bangga sebagai anak sekretaris desa, karena bagaimanapun juga sekretaris desa merupakan jabatan yang diidamkan setiap orang. Karena rasa bangga itulah dia selalu menerima setiap tugas yang diberikan pamong desa (kades) kepadanya, seperti mengikuti lomba P4, lomba PKK, penataran kader, menjadi kader posyandu.

Tjm. berpendidikan sampai tamat SMP. Suaminya juga tamat SMP. Dua orang anaknya masih kecil belum bersekolah, ibunya tidak sekolah, sedangkanya ayahnya (pamong desa) tamatan Sekolah Rakyat.

Secara fisik, sebenarnya keluarga Tjm bukanlah keluarga yang termasuk kategori miskin, karena rumah tempat tinggal cukup layak (dari papan jati), sangat luas, ada listrik, memiliki sepeda motor, memiliki televisi, sawah cukup luas, pendidikan cukup (untuk kategori orang desa), namun keluarga ini tetap menerima



## Lampiran 2 (lanjutan)

bantuan IDT. Kebutuhan sehari-hari cukup dapat terpenuhi, makan tiga kali sehari, pakaian cukup (tampak dari pakaian yang dipakai sehari-hari dan setiap kali mengikuti pertemuan).

Bantuan yang diterima berupa tiga ekor kambing dan satu ekor sapi, bantuan itu diterima sejak tahun 1994. Hingga penelitian ini (1996-1997) dilakukan sapi yang dimiliki masih tetap satu ekor dan kambing yang dimiliki sebanyak empat ekor. Ternak ditempatkan di dapur. Meskipun sebenarnya dimungkinkan membuat kandang di luar rumah (tanah masih tersedia dan dana sebenarnya bukanlah menjadi penyebab, untuk tenaga-kerja yang membuat kandang juga mudah diperoleh), namun tidak dilakukan. Ternak digembalakan oleh anak tetangga (sekitar usia 12 tahun) dia disebut "pangon", pekerjaan menggembalakan dilakukan sepulang dari sekolah (pukul 13.00 s.d. 16.00), pulang menggembala dengan membawa rumput. Anak tersebut cukup diberi makan (siang dan sore), kalau nanti ternaknya telah beranak, anaknya dibagi dua. Tjm. dan keluarganya tidak pernah merawat sendiri ternak bantuan tersebut, semuanya diserahkan kepada pangon.

Tentang pengembalian modal, keluarga Tjm. belum memikirkannya, meskipun seharusnya bantuan yang diterima pada tahun 1994, sudah harus mulai mengangsur. Angsuran terdiri atas modal (Rp 250.000,- ditambah bunga 5% untuk

## Lampiran 2 (lanjutan)

setiap tahunnya). Tjm. menyatakan bahwa yang lain juga banyak yang belum mengangsur, bila sudah sampai pada batas waktu angsuran itu harus lunas baru dibayar.

2. Sn. berusia sekitar 38 tahun, seorang kepala keluarga dengan seorang isteri dan tiga orang anak. Dalam keluarga ini tinggal juga ayah dan ibunya. Sn. bekerja serabutan (apa saja yang dapat menghasilkan uang). Keluarga ini sebagai petani subsisten, sawah yang dimiliki kurang dari 0,5 Ha, dikerjakan sendiri oleh anggota keluarga. Untuk mengisi waktu luang setelah mengerjakan sawah, Sn berdagang ke kota. Pada waktu musim tembakau ia menjadi makelar untuk mencari pembeli dari luar desa, pada musim tanaman lain (kedelai), ia menjadi pengepul di desa untuk kemudian dijual ke kota, atau bila tidak ada hasil sawah (desa) yang dapat dijual ke kota, Sn. bekerja sebagai tukang (bangunan) di kota. Selama mondar-mandir ke kota pekerjaan di rumah (di sawah) dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, termasuk orang tuanya.

Meskipun tanah yang dimilikinya tidak cukup luas, dan jumlah anggota keluarga cukup banyak, namun kehidupannya dapat dikatakan tidak terlalu miskin. Ini ditandai oleh disekolaskannya anak pertama di SMEA, yang berada di kecamatan Sambeng (kecamatan lain). Anak ini meskipun tinggal di rumah saudara, namun tetap memberi

## Lampiran 2 (lanjutan)

biaya hidup meskipun tidak mahal. Tiap hari Sabtu anak pertama ini pulang ke rumah. Anak nomor dua sekolah di SMP di kecamatan Bluluk, dan nomor tiga di SD setempat. Meskipun Sn dan isterinya hanya tamatan SD, tapi tampaknya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi putra-putrinya cukup tinggi. Kesadaran akan pentingnya pendidikan ini juga ditengarai oleh dipenuhi fasilitas sekolah bagi anak-anaknya.

Keluarga Sn. menempati rumah berukuran sekitar 6 kali 15 meter persegi, terdiri atas tiga bangunan yaitu ruang tamu, rumah tengah sebagai kamar, dan bagian belakang dapur. Kandang ditempatkan di samping dapur (ukuran tiga kali empat meter). Setiap pagi kandang dibersihkan dan ternak digembalakan, siang hari ternak dikandangan dan disediakan makanan secukupnya). Malam hari dibuatkan *bediang* (perapian untuk mengusir nyamuk).

Sn termasuk salah satu penerima bantuan IDT, keluarga ini mendapat bantuan tiga ekor kambing (1994) dan seekor sapi (1996). Dari tiga ekor kambing (*cempe*), ternyata pada tahun 1996 (saat penelitian dilakukan) kambing tersebut telah berkembang menjadi lima ekor (beranak dua ekor). Pemeliharaan kambing dan sapi dilakukan oleh anggota keluarga. Pada pagi hari antara jam 09.00 s.d. 10.00 kakek (ayah Sn) yang menggembalakan, dan sepulang anaknya sekolah merekalah yang mencarikan rumput untuk

## Lampiran 2 (lanjutan)

pakan ternak. Tiga hari sekali sapi bantuan dimandikan di sungai. Bila Sn berada di rumah, maka dia sendiri yang merawat ternaknya. Karena pemeliharaan yang baik tersebut, telah memberikan hasil yang menggembirakan yaitu kambing berkembang menjadi lima ekor. Di samping ternak kelihatan sehat dan gemuk.

Melihat kesibukan dari semua anggota keluarga, seakan-akan tidak ada waktu untuk pergi ke tetangga (*jagongan*), seperti yang dilakukan warga desa pada umumnya. Demikian pula dalam pertemuan yang diadakan baik untuk PKK, maupun warga, jarang didatangi oleh keluarga Sn. Dampak dari sikap ini sering keluarga ini dianggap kurang akrab. Demikian pula dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh desa, Sn akan menghadiri, bila dirasakan bermanfaat bagi dirinya. Namun bila pertemuan itu merupakan pertemuan rutin Sn jarang menghadirinya.

3. Dn. berusia sekitar 45 tahun, dia seorang petani dengan sawah sekitar 0,3 ha. Dn., memiliki seorang isteri, empat orang anak, satu diantaranya telah berkeluarga dan bertempat tinggal serumah, selain itu juga memiliki seorang cucu. Seluruh anggota keluarga menggantungkan hidupnya dari sawah yang dimilikinya. Untuk menambah penghasilan keluarga guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian anggota keluarga bekerja buruh tani

## Lampiran 2 (lanjutan)

pada tetangga (warga desa lain) yang memiliki tanah cukup luas. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tampak keluarga ini tidak terlalu ambisi (*ngoyo*). Hal ini ditandai oleh fasilitas (perabot) rumah terkesan seadanya (di ruang tamu terdapat satu dipan besar dari bambu, satu meja besar dengan dua *dingklik* panjang). Demikian juga dengan pakaian yang dipakai sehari-hari, tampak sangat sederhana dan tidak banyak jumlahnya. Makan juga tampak seadanya, menurut isteri Dn. yang penting tersedia nasi (campuran beras dengan jagung, atau bila terpaksa hanya jagung), sayur yang diperoleh dari kebun (*tegalan*). Kebutuhan makan dipenuhi dua kali dalam sehari (siang dan malam), pagi hari seadanya, kopi saja atau dengan ketela rebus.

Bagi Dn sendiri bila pekerjaan sawah sudah habis (menunggu panen), hanya diam di rumah saja. Meskipun sebenarnya bila mau bekerja dan mendapatkan uang, peluang itu ada. Rumah tempat tinggal, sangat sederhana, luas sekitar 90 meter persegi (6 kali 15 meter), rumah terbuat dari *gedeg* (bambu) tidak berventilasi, lantai dari tanah, kandang kambing terletak di dalam rumah (di dapur), kegiatan untuk membersihkan kandang tidak dilaksanakan secara rutin, tetapi semaunya sendiri (kadang pagi, kadang siang, atau sore).

## Lampiran 2 (lanjutan)

Dari empat orang anaknya hanya yang terkecil masih sekolah di SD desa setempat. Anak pertama tidak tamat SD, sedangkan kedua dan ketiga lulusan SD, dan bekerja membantu ayahnya di sawah. Dn sendiri tidak tamat SD demikian juga isterinya.

Mungkin karena kondisinya (termasuk miskin), Dn kurang aktif dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan baik oleh desa, dusun maupun RT. Bila pertemuan cukup menantunya yang disuruh datang. Demikian pula dengan isterinya, jarang mengikuti pertemuan PKK. Hubungan antara Dn dan keluarganya sebagai warga desa dengan Pemerintah (pamong desa) sebatas warga dan pamong. Menurut pamong desa Dn dikenal orang yang *sak karepe dewe*, kurang memahami aturan dan susah bila diajak bicara. Banyak waktu luang yang belum dimanfaatkan secara optimal, mereka sekeluarga pada jam-jam kosong hanya duduk-duduk di depan rumah, sambil ngobrol dengan sanak keluarga.

Dn mendapat bantuan kambing tiga ekor (1994) dan sapi 1 ekor (1996). Pada saat penelitian ini dilakukan hanya tinggal seekor kambing yang ada. Keadaanya kurang sehat (kurus), seperti kurang perawatan. Menurut Dn ternak (dua ekor kambing) yang diberikan oleh pemerintah sudah dijual karena sakit, sedangkan sapihnya dijual untuk menikahkan anaknya. Dn merasa tidak ada beban (merasa

## Lampiran 2 (lanjutan)

bersalah) pada saat menjual ternak-ternak tersebut. Karena memang tidak pernah ditegur oleh pamong.

4. Mh. berusia sekitar 50 tahun, memiliki seorang isteri dan lima orang anak. Tiga orang anaknya sudah berkeluarga, satu dari yang berkeluarga tinggal di desa lain dan dua yang lain tinggal di desa Bronjong namun lain rumah. Dua anak yang lain satu masih bersekolah di SMP Bluluk dan satu lagi sudah tidak bersekolah, dia lulusan SD. Mh. tidak tamat SR, namun ia gemar kumpul-kumpul untuk memperoleh informasi, sehingga wawasannya cukup luas.

Mh. aktif mengikuti pengajian, serta sering kali menjadi pembaca doa bila ada selamatan di desa setempat, dan dia juga menjadi pengajar mengaji di Masjid setempat. Selain itu dia selalu hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh dusun, desa, maupun kecamatan bila diundang, karena dia termasuk salah satu tokoh masyarakat. Dalam pertemuan Mh. sering mengajukan pendapat (pertanyaan) bila ada yang kurang pas. Oleh karenanya dia dianggap orang yang berani bicara, serta orang yang suka protes. Akibat sikapnya ini dia kurang disenangi oleh pamong desa. Pergaulannya dengan warga desa yang lain cukup akrab, dia termasuk orang yang senang anjang sana kepada keluarga yang mengalami musibah (sakit atau meninggal dunia).

## Lampiran 2 (lanjutan)

Seperti warga desa lainnya Mh. bekerja sebagai petani, luas tanah yang dimiliki sekitar 0,5 Ha. Hasil sawah tidak jauh berbeda dengan yang lain, sehingga secara ekonomi sebenarnya termasuk keluarga kurang mampu. Ini ditandai oleh rumah tempat tinggal keluarga Mh. terbuat dari papan (rumah bagian depan) dan bambu (rumah bagian belakang). Perabotan rumah tangganyapun tampak sangat sederhana (satu dipan kayu, satu stel kursi tamu sangat sederhana, dan satu buah lincak (dipan kecil dari bambu). Di atas lincak terdapat Alqur'an dan sajadah.

Mh. merupakan salah satu penerima bantuan yang ditentukan atau dipilih oleh desa (Kades), namun mereka menolak bantuan tersebut, meskipun sebenarnya dia juga memerlukan bantuan tersebut. Dia menyatakan bahwa masih banyak orang lain yang lebih memerlukan, sehingga bantuan tersebut lebih baik diserahkan kepada orang lain.



## Lampiran 2 (lanjutan)

Mengacu pada *life story* keempat keluarga penerima bantuan tersebut dapat dilukiskan profil keluarga penerima bantuan peningkatan pendapatan tersebut sebagai berikut:

Tabel  
Profil Penerima Bantuan Peningkatan Pendapatan

Aspek Yang Digambarkan	Tjm.	Sn.	Dn.	Mh.
1. Sikap terhadap bantuan	±	+	+/-	-
2. Keadaan ekonomi keluarga	+	-	-	-
3. Hubungan dengan pemerintah	+	-	+	-
4. Hubungan dengan warga lain	+	-	-	+
5. Pemanfaat peluang pasar	-	+	-	-
6. Pendidikan	+	+	-	±
7. Komunikasi dengan dunia luar	+	+	-	+
8. Aktivitas dlm organisasi	+	-	-	+

## Keterangan:

± = cukup baik

+ = baik

+/- = baik tapi hasilnya gagal

- = tidak baik (menolak)

**Lampiran 3: Daftar Penerima Bantuan****I. Penerima Bantuan IDT****A. Kelompok Sumber Lancar****(Dusun Penjalin Ulung)**

1. Wardo
2. Sujud
3. Gimin
4. Tasmu
5. Naryo
6. Sarwo
7. Amat (1 )
8. Tarjo (2)
9. Tamiso ( 3)
10. Roni
11. Romisan
12. Setu
13. Suwaji
14. Tasman (4)
15. Sumadi
16. Kadar
17. Seger
18. Situn
19. Asig
20. Anto

**B. Kelompok Sri Rejeki****(Dusun Geneng)**

1. Suwaji (5)
2. Saman
3. Kamat
4. Podo
5. Kardi
6. Surat
7. Taswin
8. Parno (6)
9. Wakiyan
10. Saerun
11. Kari
12. Warjan
13. Paesan
14. Narwan
15. Taji
16. Timin
17. Djono

## Lampiran 3 (lanjutan)

**C. Kelompok Langgeng Jaya (Cumpleng Kidul)**

- |                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| 1. Sutrisno (14) | 6. Paijo   | 11. Prapto |
| 2. Rachmad       | 7. Kasidi  | 12. Lasiyo |
| 3. Djamin        | 8. mBah Ni | 13. Warno  |
| 4. Mukir         | 9. Kemi    |            |
| 5. Tajem (15)    | 10. Sutopo |            |

**D. Kelompok Sumber Makmur****( Dusun Cumpleng Lor)**

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Suman (7)   | 16. Tamijan |
| 2. Kalsum      | 17. Wito    |
| 3. Tarmin (8)  | 18. Sipul   |
| 4. Adi         | 19. Sukadi  |
| 5. Supi        | 20. Leman   |
| 6. Pardi       | 21. Kasman  |
| 7. Sonaji      |             |
| 8. Simpen      |             |
| 9. Tompo       |             |
| 10. Saki       |             |
| 11. Daut       |             |
| 12. Lasmin     |             |
| 13. Karmin (9) |             |
| 14. Paimin     |             |
| 15. Tulus      |             |

## Lampiran 3 (lanjutan)

**E. Kelompok Sidodadi ( Dusun Garas)**

- |                |                |             |
|----------------|----------------|-------------|
| 1. Lamun       | 11. Kasiyono   |             |
| 2. Djoko (10)  | 12. Yatemin    |             |
| 3. Parlin      | 13. Sadimin    |             |
| 4. Paeman (11) | 14. Sonto (13) |             |
| 5. Diso (12)   | 15. Supriyanto |             |
| 6. Mulyadi     | 16. Sukahar    |             |
| 7. Sariyun     | 17. Wari       |             |
| 8. Amir        | 18. Salamunn   | 21. Tilam   |
| 9. Dono        | 19. Wage       | 22. Tajad   |
| 10. Lamijan    | 20. Mukimin    | 23. Djasman |

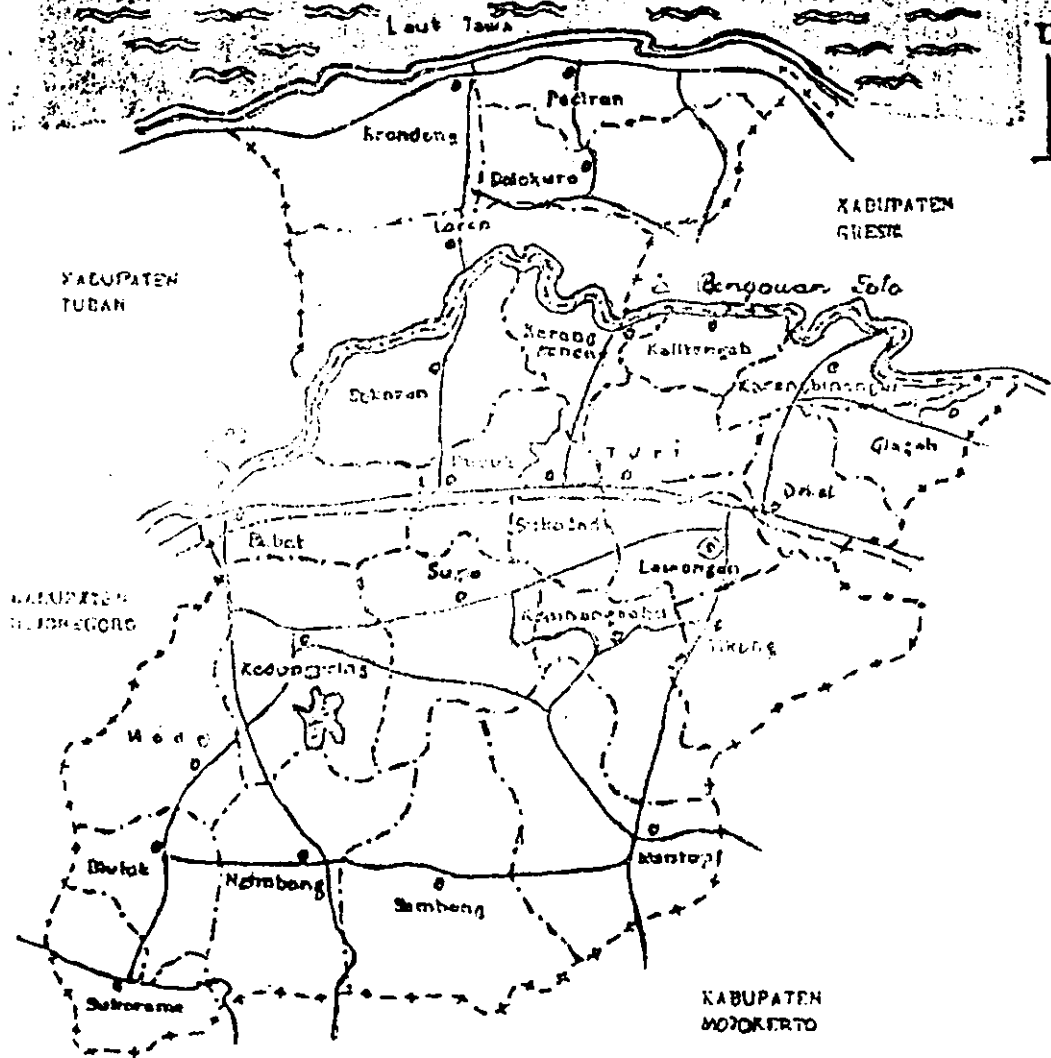
**II. Penerima Sapi dari Kecamatan rawan**

- |          |            |
|----------|------------|
| 1. Tasim | 4. Sarkoyo |
| 2. Supo  | 5. Tarjo   |
| 3. Tubi  |            |

**III. Penerima Bibit Tanaman dan Modal dari Perguruan Tinggi**

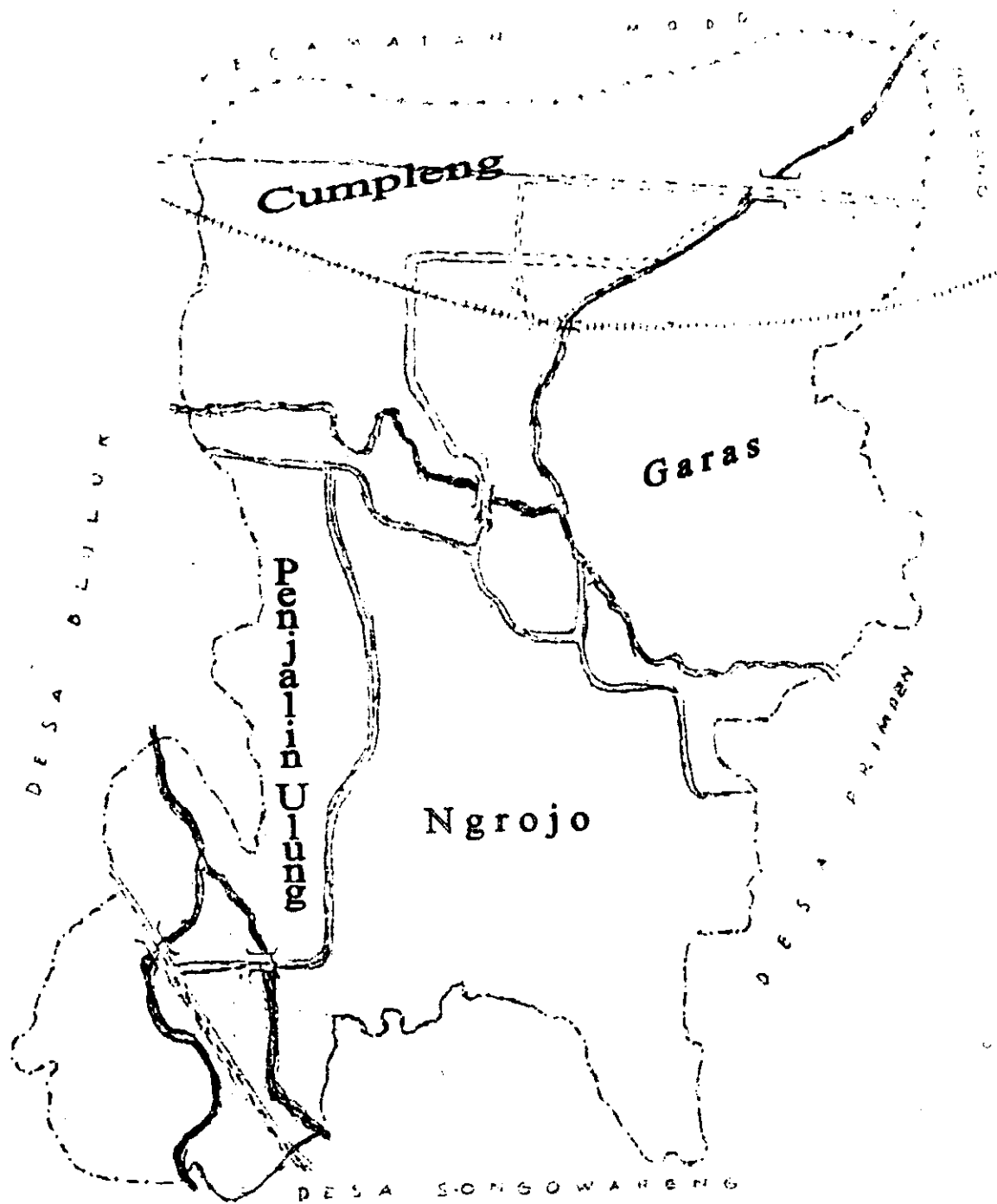
- |                 |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1. Darwati (1)  | 7. Susningsih (7) | 13. Kasri       |
| 2. Uswatul (2)  | 8. Endang S       | 14. Sutinah     |
| 3. Munartik (3) | 9. Tajem (8)      | 15. Sining (10) |
| 4. Munarsih (4) | 10. Sumining (9)  | 16. Wasilah     |
| 5. Tandur (5)   | 11. Paenah        | 17. Marni       |
| 6. Kartini (6)  | 12. Suwarti       |                 |

# PETA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN



KETERANGAN	
Skala	= 1 : 400 000
(●)	= Ibu Kota Kabupaten
(○)	= Ibu Kota Kecamatan
-----	= Batas Kabupaten
-----	= Batas Kecamatan
—————	= Jalan Propinsi / RD
—————	= Rel Kereta Api

# Desa Bronjong



Skala 1 : 15.000